



FAKULTAS  
HUKUM

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# BUKU PEDOMAN AKADEMIK

**PROGRAM SARJANA**  
**EDISI 2022-2023**



**TIM PENYUSUN**  
**BUKU PEDOMAN AKADEMIK**  
**PROGRAM SARJANA**

**Ketua :**

Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., S.Hum., M.H.

**Sekretaris :**

Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H.

Intan Dwi Prahasti, S.Tr.

**Anggota :**

Wahyu Andrianto, S.H., M.H.

Afdol, S.H., M.H.

Farida Prihatini, S.H., M.H., CN

Tiurma M. Pitta Allagan, S.H., M.H., Ph.D

Iwan Kebot, S.H.

Muhammad Rifai, SEI

Mulyadi

## KATA PENGANTAR



Segala puji dipanjatkan kepada ALLAH SWT yang atas bimbingan-Nya Buku Pedoman Akademik bagi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan Buku Pedoman Akademik berlandaskan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2020 yang berlaku bagi mahasiswa Angkatan 2020, 2021, 2022 dan seterusnya.

Buku Pedoman Akademik ini sangat penting artinya bagi mahasiswa karena selama menjalankan pendidikan di FHUI, para mahasiswa memerlukan informasi tentang berbagai hal. Informasi yang termuat dalam buku ini meliputi: kurikulum; peraturan akademik dan tata tertib; manajemen FHUI; dosen; informasi umum FHUI; beserta sejarah

lahir dan berkembangnya FHUI sampai dengan saat ini. Kesempatan beraktifitas di luar kelas pun disajikan dengan baik dalam buku ini, sehingga mahasiswa tidak hanya dapat menuntut ilmu di FHUI namun juga menimba pengalaman berorganisasi dan menempa kepekaan sosial.

Besar harapan kami dengan adanya buku ini mahasiswa dapat mempelajari informasi terkait perkuliahan dan kehidupan di kampus FHUI serta dapat diimplementasikan dengan baik dan benar.

Terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para mahasiswa, dosen, manajemen FHUI dan pihak terkait lainnya.

Depok, Agustus 2022  
Dekan,

**Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## PROFIL FAKULTAS

Sejarah Perkembangan .....	1
Visi dan Misi .....	4
Pimpinan .....	6
Organisasi Fakultas .....	6
Pelaksana Akademik Program Sarjana .....	9
Bidang Studi .....	10

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Program Sarjana .....	13
Kualitas dan Akreditasi .....	18
Registrasi .....	18
Pembimbing Akademik .....	19
Ketentuan Pengambilan SKS .....	20
Kegiatan Belajar .....	20
Masa Studi dan Evaluasi .....	24
Administrasi Hasil Belajar .....	27
Tata Alur Penyusunan Skripsi .....	27
Unit Konseling Mahasiswa .....	28

## KURIKULUM PROGRAM SARJANA

Latar Belakang .....	31
Landasan Hukum .....	31
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi .....	32
Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka .....	39
Struktur Kurikulum .....	40
Mata Kuliah .....	42
Distribusi Mata Kuliah .....	57

## DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah Wajib Universitas .....	71
Mata Kuliah Wajib Fakultas .....	72
Mata Kuliah Pendidikan Latihan & Kemahiran Hukum .....	79
Mata Kuliah Peminatan .....	82
Mata Kuliah Non-Peminatan .....	118

## DOSEN PROGRAM SARJANA

Guru Besar Tetap .....	121
------------------------	-----

Guru Besar Tidak Tetap .....	123
Dosen Tetap .....	123
Dosen Tidak Tetap .....	129
FASILITAS	
Kampus Depok .....	133
Kampus Salemba .....	136
KEMAHASISWAAN	
Organisasi Mahasiswa .....	137
Prestasi Mahasiswa .....	142
Beasiswa dan Magang .....	156
ILUNI FHUI	
Susunan Pengurus ILUNI FHUI Periode 2021-2024 .....	159
JURNAL	
Jurnal Hukum dan Pembangunan (JHP).....	161
Jurnal Hukum Internasional (IJIL) .....	162
Indonesia Law Review (ILRev).....	163
Jurnal Syariah.....	164
Dharmasiswa.....	165
Indonesian Notary Journal .....	166
Indonesia Criminal Law Review .....	167
The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies .....	168
Jurnal Konstitusi dan Demokrasi .....	169
<i>Technology and Economics Law Journal</i> .....	170
LAMPIRAN.....	171
SK Program Sarjana	
SK Tata Tertib	
SK Biaya Pendidikan	

# Profil Fakultas

## • SEJARAH PERKEMBANGAN

### 1. Pendirian Fakultas

Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1909 dengan nama *Rechtsschool*. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan P.A. Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di Pengadilan Kabupaten. Pada mulanya, sekolah ini terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum. Kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama *Rechtshogeschool* atau *Faculteit der Rechtsgeleerdheid*, yang dibuka pada 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jenderal D. Fockt di Balai Sidang *Museum van het Bataviasche Venootschap van Kunsten en Wetenschappen* di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. *Rechtshogeschool* tersebut dipimpin seorang guru besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten. Setelah adanya *Rechtshogeschool* tersebut, maka *Rechtsschool* kemudian ditutup pada 18 Mei 1928.

Nama *Rechtsschool* dan *Rechtshoge school* dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu *Hooger-Onderwijs Ordonantie*. Awalnya mata kuliah yang diberikan pada *Rechtshogeschool* adalah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal, maka terhadap 24 mata kuliah tersebut masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan merespon perkembangan masyarakat.

Lama pendidikan di *Rechtshogeschool* adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (*candidaatsexamen*), dan tahap kedua dengan ujian doktoral (*doctoralexamen*), tahun terakhir dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga. Pendidikan di *Rechtshogeschool* dibagi dalam empat jurusan (*richtingen*) yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu Hukum Keperdataan, Hukum Kepadanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi.

Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar *Meester in de Rechten*. Gelar ini memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi (a) advokat dan pengacara serta jabatan dalam bidang kehakiman lainnya; dan, (b) pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) *Rechtshogeschool* ditutup dan kemudian dibuka kembali pada 21 Januari 1946 dengan nama *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen* sebagai bagian dari *Nood-universiteit van Indonesie*. Lembaga pendidikan tinggi ini didirikan oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

Lima bulan sebelumnya yaitu pada 19 Agustus 1945 Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah mendirikan lembaga pendidikan tinggi dengan nama *Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia*. Lembaga ini pada awalnya terdiri atas empat fakultas, yaitu Kedokteran, Farmasi, Hukum dan Sastra. Meskipun sebagian dari kegiatan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini dialihkan ke luar Jakarta —ke daerah Republik Indonesia yang pada waktu itu berpusat di Yogyakarta— tetapi sebagian besar kegiatan masih berada di Jakarta.

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda, pada 27 Desember 1949, disusul kemudian pada 30 Januari 1950, dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950. Berdasarkan undang-undang tersebut Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi pembinaan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

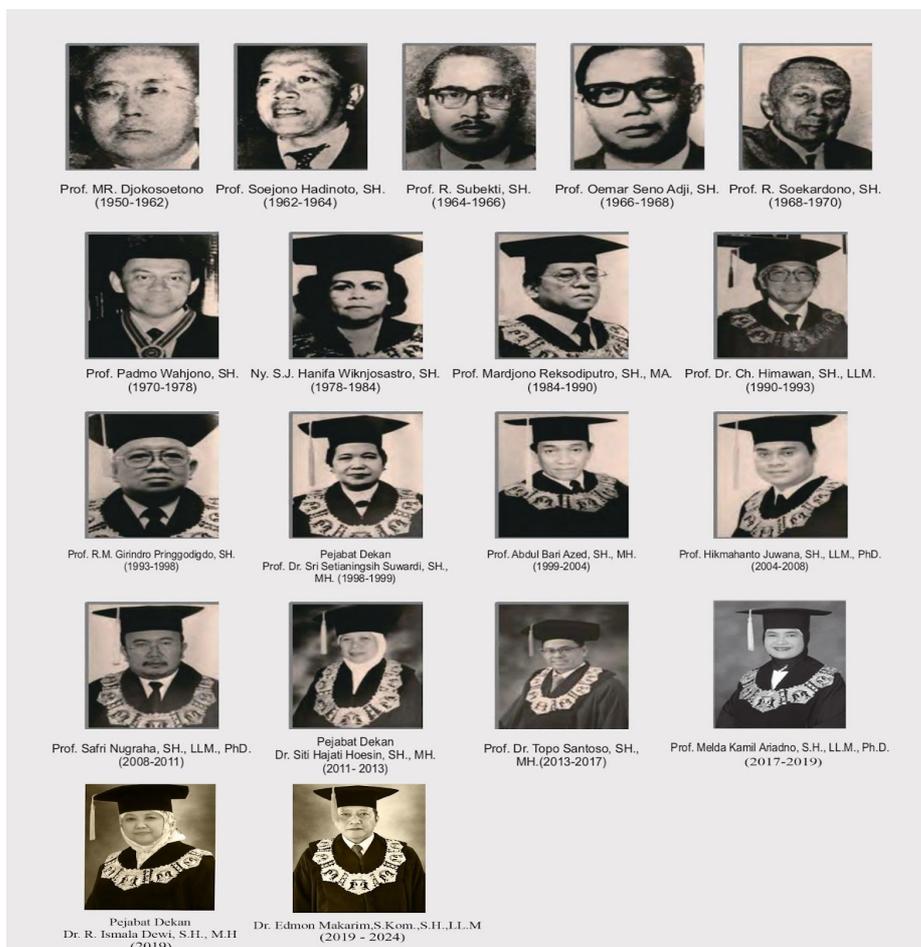
Pada 2 Februari 1950 dilakukan perundingan antara pihak Republik Indonesia, diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah, dengan pihak Belanda, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Namun pada hari itu juga lahirlah suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama *Universiteit Indonesia*—kemudian menjadi *Universitas Indonesia*.

Universitas ini merupakan penggabungan dari *Universiteit van Indonesie* dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen* dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan nama *Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat* yang dipimpin oleh Dekan Prof. Mr. Djokosoetono (1950-1962) dan Panitera Prof. Dr. Mr. Hazairin.

Pada 1959, dengan dibukanya *Jurusan Publisistik, Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan* —dikenal dengan singkatan FH & IPK— dipecah menjadi *Fakultas Hukum* dan *Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan kemudian dikenal dengan nama *Fakultas Ilmu-ilmu Sosial* dan selanjutnya dikenal sebagai *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Kurikulum dan sistem pendidikan yang selalu berlaku di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada dasarnya mengambil dari *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen*. Perubahan terjadi pada 1969 melalui penyesuaian dengan keputusan yang telah dihasilkan pada Konferensi Dinas Antar Fakultas Hukum Pembina se-Indonesia di Yogyakarta, pada 29-31 Agustus 1968, kemudian diikuti dengan penyesuaian sejalan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0198/U/1972, tertanggal 30 Desember 1972 tentang kurikulum minimal. Kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2020 dengan terbitnya Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2450/SK/R/UI/2020 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Hukum, Program Pendidikan Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, Kurikulum yang diselenggarakan pada program pendidikan sarjana telah memuat Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berorientasi pada pencapaian pembelajaran (*Outcome Based Education*).

## 2. Dekan-Dekan



## • VISI DAN MISI

### 1. Visi Universitas

Berdasarkan Statuta UI, visi UI adalah menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila.

### 2. Misi Universitas

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No.75 Tahun 2021 Misi UI adalah :

- a. menyediakan akses yang luas dan adil, serta menyelenggarakan/mengelola pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
- b. menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan nasional serta global;
- c. menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, memiliki kecerdasan emosi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global, yang memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam semangat kebangsaan;
- d. menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI.

### 3. Visi dan Misi Fakultas Hukum UI

Sejalan dengan visi-misi UI tersebut, FHUI telah menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) FHUI 2020-2024. Di dalam Renstra tersebut dinyatakan visi fakultas yaitu

**“menjadi pusat ilmu hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di Asia Tenggara serta berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan dunia”**

Adapun tonggak capaian FHUI untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut: “FHUI mantap melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai advokator dalam menyelesaikan masalah dan tantangan hukum di tingkat nasional maupun global, dan berada dalam jajaran 250 program studi ilmu hukum terbaik di dunia”.

Demi terlaksananya misi tersebut, semua pihak di lingkungan fakultas menyiapkan desain studi, mekanisme organisasi, fasilitas utama pendukung pengajaran dan penelitian.

## 4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan FHUI adalah identik dengan Tujuan UI yang terdiri atas:

- a. menciptakan komunitas pendidikan hukum yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai, dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat;
- b. menyiapkan peserta didik di bidang pendidikan tinggi hukum agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, dan memajukan hukum di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat bersaing di tingkat Nasional dan Regional/ASEAN;
- c. mengembangkan dan menyebarkan ilmu hukum untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan Nasional;
- d. mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan hukum di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berpihak kepada kepentingan nasional;
- e. memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi hukum, dan bekerjasama dengan lembaga dan asosiasi profesi terkait, sehingga lulusan FHUI dapat berperan sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya;
- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa dan negara, dan dunia melalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk pengayaan budaya hukum dan pendidikan hukum berkelanjutan; dan
- g. berinvestasi pada pengembangan sumber daya yang profesional bagi sivitas akademika dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif melalui, tridharma.

Sasaran:

1. FHUI yang inovatif, mandiri, inklusif, bermartabat, serta unggul di Asia Tenggara dan dunia
2. Pendidikan yang berkualitas tinggi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan
3. *Research-based* Tridharma
4. Tata kelola yang efektif
5. *Strategic competencies*: Pusat talenta terbaik
6. *Strategic information*: Informasi yang relevan, tepat waktu dan berkualitas
7. *Strategic infrastructure*: Pengembangan sarana dan prasarana strategis
8. *Strategic performance culture*: budaya kerja yang unggul
9. Sistem keuangan yang berimbang, efisien, dan mandiri serta yang didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik

## • PIMPINAN

**Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M**

**Dekan FHUI**

Lahir : Padang, 10 Mei 1970

Pendidikan : Sarjana Komputer (Fakultas Ilmu Komputer Gunadarma), Sarjana Hukum (FHUI), LL.M (University of Washington School of Law), Doktor Ilmu Hukum (FHUI)

Keahlian : Hukum Telematika, Hukum Hak Kekayaan Intelektual

**Prof. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D**

**Wakil Dekan Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan FHUI**

Lahir : Garut, 3 November 1972

Pendidikan : Sarjana Hukum (FHUI), LL.M (Utrecht University), Doktor (Maastricht University)

Keahlian : Hukum Lingkungan, Analisa Ekonomi atas Hukum

**Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., M.PP.**

**Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum FHUI**

Lahir : Tanjung Karang, 11 November 1976

Pendidikan : Sarjana Hukum (FHUI), Master of Law (Kyushu Graduates School of Law), Master of Public Policy (Tokyo Graduate School of Public Policy)

Keahlian : Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Hukum Kepailitan, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Jaminan.

## • ORGANISASI FAKULTAS

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor: 90/UN2.F5.D/HKP.02.04.00/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para pejabat penyelenggaraan akademik di FHUI adalah berikut ini.

### **Senat Akademik Fakultas**

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. (Ketua)

Hasril Hartanto, S.H., M.H. (Sekretaris)

### **Dewan Guru Besar Fakultas**

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Ketua)

Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Soewarno, M.A. (Sekretaris)

### **Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA)**

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.

**Kepala Sekretariat Pimpinan**

Dr. Suparjo, S.H., M.H.

**Kepala Sekretariat Dekan**

Meirani Suyawan, S.H., M.H.

**Ketua Unit Humas dan Protokoler**

Dr. M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A.

**Manajer Pendidikan**

Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., S.Hum., M.H.

**Manajer Pengabdian Masyarakat**

Kurnia Togar Pandapotan Tanjung, S.H., M.E.

**Manajer Riset dan Publikasi merangkap Ketua Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Heru Susetyo, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.

**Manajer Kemahasiswaan dan Alumni**

Hening Hapsari Setyorini, S.H., M.H.

**Kepala Pusat Dokumentasi, Referensi Hukum dan Sitasi**

Dr. Daly Erni, S.H., LL.M., M.Si.

**Manajer Sumber Daya Manusia**

Marliesa Qadariani, S.H., M.H.

**Wakil Manajer Sumber Daya Manusia**

Nadia Maulisa, S.H., M.H.

**Manajer Umum**

Wardi, S.H., M.H.

**Manajer Kerjasama Domestik & Ventura**

Endah Hartati, S.H., M.H.

**Manajer Kerja Sama Internasional & Pengelolaan Jurnal**

Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D.

**Manajer Keuangan**

Basuki Efendi, S.E.

**Koordinator Pascasarjana dan Pengembangan Akademik**

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

**Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum**

Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

Dr. Ratih Lestarini, S.H., M.H.

**Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum**

Tirta Wening, S.H., M.Si., LL.M.

**Ketua Program Magister Kenotariatan**

Dr. Yuli Indrawati, S.H., LL.M.

**Sekretaris Program Magister Kenotariatan**

Gratianus Prikasetya Putra, S.H., M.H.

**Ketua Program Sarjana**

Wahyu Andrianto, S.H., M.H.

**Ketua Subprogram Sarjana Reguler**

Afdol Anwar, S.H., M.H.

**Ketua Subprogram Sarjana Paralel dan Ekstensi**

Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.

**Ketua Subprogram Sarjana Kelas Khusus Internasional**

Tiurma Mangihut Pitta Allagan, S.H., M.H., Ph.D.

**Ketua Djokosoetono Research Center**

Patricia Rinwigati, S.H., M.I.L., Ph.D.

**Kepala Laboratorium dan Klinik Hukum**

Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.

**Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - PPS**

Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI.

**Ketua Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum**

Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.

**Koordinator Unit Sistem Teknologi Informasi**

Raden Mochammad Agung Setiawan, S.Kom., M.H.

**Ketua Unit Perencanaan, Internal Audit, dan Manajemen Risiko**

Dr. Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I., LL.M.

**Wakil Ketua Unit Perencanaan, Internal Audit, dan Manajemen Risiko**

Kristina Pranata, S.E., M.M., Ak.

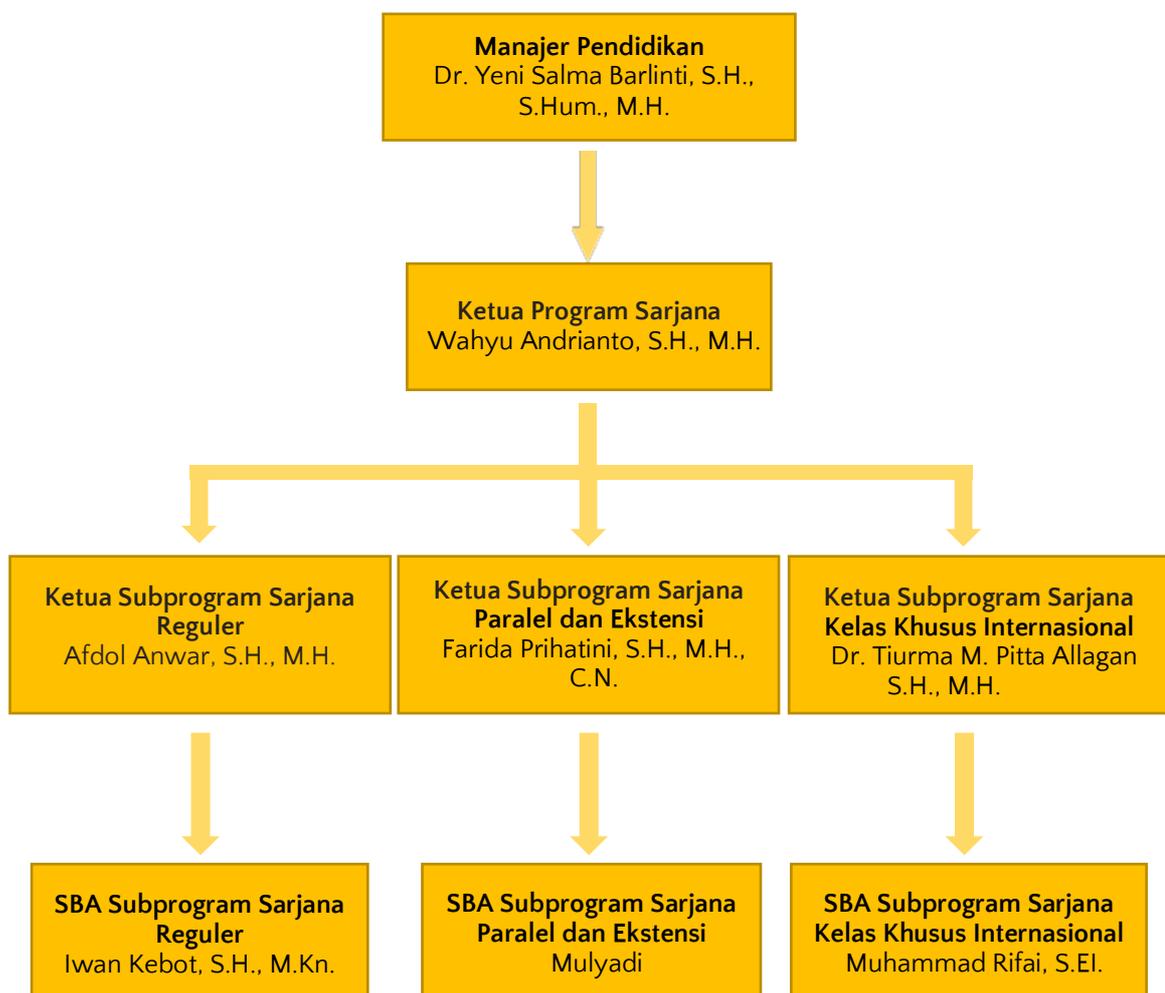
**Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa**

Aris Djatmiko Purwo, S.H.

**Ketua Unit Pengamanan**

Aris Sutopo, S.Sos.

• **PELAKSANA AKADEMIK PROGRAM SARJANA**



## • **BIDANG STUDI**

Bidang Studi merupakan organisasi di dalam fakultas di mana para staf pengajar tergabung dan berkelompok sesuai minat dan keahlian masing-masing. Bidang studi bertugas untuk membina keilmuan serta mengoordinasikan pengembangan mata kuliah dan metode pengajaran di masing-masing bidang ilmu hukum yang ditekuni. Ada 10 Bidang Studi di FHUI. Berikut adalah kesepuluh Bidang Studi beserta ketua dan sekretarisnya masing-masing.

### **Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum**

Dr. Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. (Ketua)

Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P. (Sekretaris)

### **Bidang Studi Hukum Perdata**

Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (Ketua)

Lauditta Humaira, S.H., M.Kn. (Sekretaris)

### **Bidang Studi Hukum Islam dan Hukum Adat**

Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. (Ketua)

Iffah Karimah, S.H., M.Sc. (Sekretaris)

### **Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi**

Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I (Ketua)

Wenny Setiawati, S.H., M.L.I. (Sekretaris)

### **Bidang Studi Hukum Pidana**

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Ketua)

Ahmad Ghozi, S.H., LL.M. (Sekretaris)

### **Bidang Studi Hukum Tata Negara**

Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. (Ketua)

Nurwidyastanti, S.H., M.H. (Sekretaris)

### **Bidang Studi Hukum Administrasi Negara**

Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. (Ketua)

Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (Sekretaris)

### **Bidang Studi Hukum Internasional**

Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua)

Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. (Sekretaris)

**Bidang Studi Hukum Acara**

Junaedi, S.H., M.Si., LL.M. (Ketua)

Hasril Hartanto, S.H., M.H. (Sekretaris)

**Bidang Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan**

Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Soewarno, M.A. (Ketua)

Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A., Ph.D. (Sekretaris)



# Penyelenggaraan Pendidikan

## • PROGRAM SARJANA

Pendidikan sarjana di FHUI dilaksanakan pada satu program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum. Penyelenggaraannya diselenggarakan dalam bentuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan Kelas Khusus Internasional. Dalam program studi ini mahasiswa dapat mengarahkan minat mereka dengan berkonsentrasi pada bidang-bidang hukum tertentu melalui pemilihan mata kuliah yang sesuai dengan peminatan yang ditawarkan. Mata kuliah-mata kuliah ini dikembangkan dan disampaikan oleh pengajar-pengajar yang tergabung dalam beberapa peminatan seperti hukum perdata, hukum ekonomi, hukum teknologi, hukum Islam, hukum adat, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum internasional publik, hukum perdata internasional, hukum masyarakat dan pembangunan, praktisi hukum, dan hukum keuangan publik dan perpajakan.

### 1. Kelas Reguler

Program Sarjana Kelas Reguler adalah program pendidikan jenjang sarjana yang menerima lulusan SMA/SMK/MA/ sederajat dengan batasan usia ijazah maksimal 3 tahun setelah kelulusan pada saat pendaftaran. Jalur penerimaan mahasiswa Kelas Reguler adalah melalui:

- a. Jalur undangan, disebut SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri);
- b. Jalur ujian, disebut SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri);
- c. Jalur ujian, disebut SIMAK UI (Seleksi Masuk Universitas Indonesia); dan
- d. Jalur prestasi.

Biaya Pendidikan Program Sarjana Kelas Reguler diatur di dalam Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 406/SK/R/UI/2021 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2021/2022 dan Peraturan Keputusan Rektor Nomor 178/SK/R/UI/2022 Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Tahun Akademik 2022/2023. Biaya tersebut mengacu kepada mekanisme biaya pendidikan berkeadilan yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan penanggung jawab biaya. Terdapat 2 (dua) skema biaya pendidikan yaitu:

- a. Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) besarnya terbagi dalam 6 (enam) kelas, yaitu:

Kelas-1: Rp0-500.000,  
Kelas-2: >Rp500.000,00 - Rp1.000.000,00,  
Kelas-3: >Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00,  
Kelas-4: >Rp2.000.000,00 - Rp3.000.000,00,  
Kelas-5: >Rp3.000.000,00 - Rp4.000.000,00, dan  
Kelas-6: >Rp4.000.000,00 - Rp5.000.000,00.

b. Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOP-P) besarnya terbagi dalam 5 (lima) kelas, yaitu:

Kelas-1: Rp7.500.000,00,  
Kelas-2: Rp10.000.000,00,  
Kelas-3: Rp12.500.000,00,  
Kelas-4: Rp15.000.000,00, dan  
Kelas-5: Rp17.500.000,00.

Bagi mahasiswa yang memilih skema BOP-B harus menyerahkan persyaratan administrasi diantaranya slip gaji, tagihan listrik, tagihan telepon, foto rumah, tanda bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan, keterangan tetangga dan RT/RW. Sementara bagi mahasiswa yang memilih skema BOP-P persyaratan tersebut tidak diperlukan. Selain itu, tersedia juga berbagai beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kemampuan finansial mahasiswa dan penanggung jawab biaya pendidikan maupun berdasarkan prestasi akademik dari mahasiswa.

Perkuliahan untuk Kelas Reguler diselenggarakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-15.00 WIB.

## **2. Kelas Paralel**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0090/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Paralel Universitas Indonesia tanggal 9 Februari 2010, pada tahun 2010 FHUI menyelenggarakan Program Sarjana Paralel dalam rangka perluasan akses pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia.

Pada prinsipnya Program Sarjana Kelas Paralel sama dengan Program Sarjana Kelas Reguler baik kurikulum, beban studi, masa studi maupun fasilitas, serta waktu perkuliahan. Perbedaannya terdapat pada syarat calon mahasiswa dan biaya pendidikan. Calon mahasiswa untuk Kelas Paralel adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau yang setara atau yang telah memiliki ijazah Diploma 3 dari bidang ilmu yang terkait. Biaya Pendidikan Program Sarjana Kelas Paralel diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2021/2022.

Bagi Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023. Biaya Operasional Pendidikan untuk Program Sarjana Kelas Paralel adalah sebesar Rp13.000.000,00 dan Uang Pangkal sebesar Rp16.000.000,00. Besaran biaya tersebut diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 179 Tahun 2022 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023 (SK terlampir).

Jalur penerimaan mahasiswa Program Sarjana Kelas Paralel adalah melalui:

1. Jalur undangan, disebut PPKB (Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar); dan
2. Jalur ujian, disebut SIMAK UI (Seleksi Masuk Universitas Indonesia).

Perkuliahan untuk Kelas Paralel untuk mahasiswa Angkatan 2021 dan setelahnya diselenggarakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-15.00 WIB, sedangkan untuk mahasiswa Angkatan 2020 dan sebelumnya diselenggarakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 14.00 – 21.00 WIB.

### **3. Kelas Ekstensi**

Sejak tahun 1960 Fakultas Hukum juga membuka pendidikan yang kuliahnya dilakukan pada sore hari dan dikenal dengan nama Bagian Extension Course. Bagian ini lebih diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah bekerja. Pembukaan Bagian Ekstension ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Prof. Mr. Djokosoetono No. 4/915/Ib/61/K tanggal 1 Agustus 1961. Berdasarkan SK Dekan No. 92/I/4/1994 tanggal 30 April 1994 kemudian program tersebut dinamakan Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya Penyelenggaraan Program Ekstensi diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 199/DIKTI/Kep/1996 tanggal 24 Juni 1996 dan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 141/SK/R/UI/1995 tentang Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 29 Desember 1995.

Jalur masuk Program Sarjana kelas Ekstensi hanya melalui SIMAK UI. Persyaratan calon mahasiswa Kelas Ekstensi sesuai Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia, yaitu:

1. Lulusan Diploma 3 atau Diploma 4; atau
2. memiliki ijazah dalam bidang ilmu lain; dan
3. memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.

Biaya Pendidikan Program Sarjana Kelas Ekstensi diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa 2021/2022. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), uang pangkal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Sedangkan bagi Mahasiswa Program Sarjana Kelas Ekstensi Angkatan 2022/2023 berlaku Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), uang pangkal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sesuai Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 179 Tahun 2022 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023.

Perkuliahan pada Kelas Ekstensi diselenggarakan pada hari Senin sampai Jumat, pukul 17.00-22.30 WIB di Fakultas Hukum UI Depok.

#### **4. Kelas Khusus Internasional**

FHUI membuka Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (KKI) pada tahun 2010, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0424/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Khusus Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sampai dengan semester genap tahun akademik 2021/2022, Program Sarjana KKI telah meluluskan 380 orang Sarjana Hukum.

Jalur penerimaan mahasiswa Program Sarjana KKI adalah melalui:

1. Jalur undangan, disebut *talent scouting*, atau
2. Jalur ujian, disebut SIMAK UI Internasional (Seleksi Masuk Universitas Indonesia Internasional).

Program Sarjana KKI adalah program pendidikan jenjang sarjana yang menerima lulusan SMA/SMK/MA/ sederajat dengan batasan usia ijazah maksimal 5 (lima) tahun setelah kelulusan pada saat pendaftaran. Selain ijazah, dapat pula digunakan *General Certificate of Education (A Level)*, *The Advanced International Certificate of Education at a "Pass" Level*, *Diploma Program of European Baccalaurette*, dan *Diploma Program of International Baccalaurette*. Selain itu harus pula memiliki sertifikat TOEFL yang disertifikasi oleh ETS (*Educational Testing Service*) dengan skor minimal 530 (PBT) atau 73 (IBT) atau sertifikat IELTS dengan skor minimal 5,5. Bagi mahasiswa berkewarganegaraan asing harus memiliki sertifikat BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) yang dikeluarkan oleh UI.

Saat ini terdapat 2 (dua) program atau *study track* yang dapat dipilih oleh mahasiswa KKI. Pertama, *Single Degree Track*, dengan kewajiban *international exposure* yang memberikan gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi para lulusannya. *Single Degree Track* ini

telah dibuka sejak KKI pertama kali berdiri sampai saat ini. Kedua, *Joint Degree Track*, yang bekerjasama dengan University of Canberra, Australia. Program ini memberikan gelar ganda kepada lulusan KKI, yaitu Sarjana Hukum dan *Bachelor of Law* (S.H., LL.B). *Joint Degree Track* mulai ditawarkan pada tahun 2015 dan di masa yang akan datang diupayakan akan ada beberapa universitas mitra di luar negeri yang dapat dipilih.

Mahasiswa KKI yang mengikuti *Single Degree Track* wajib melaksanakan *international exposure*, yaitu program pertukaran pelajar (*student exchange*), studi keluar negeri (*study abroad*) atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama minimal 1 (satu) semester. Beberapa fakultas hukum mitra di luar negeri yang memiliki perjanjian kerjasama pada tingkat fakultas telah menerima mahasiswa KKI dalam program *student exchange*. Fakultas mitra tersebut di antaranya Leiden University, Utrecht University, University of Groningen, Erasmus University of Rotterdam, Kobe University, dan Keio University. Selain itu, mahasiswa dapat juga mengikuti program pertukaran mahasiswa (*student exchange*) pada tingkat universitas. UI memiliki perjanjian kerjasama dengan lebih dari 100 (seratus) universitas terkemuka di luar negeri yang dapat dipilih untuk melakukan *student exchange*. Informasi mengenai hal ini dapat dilihat pada laman resmi International Office UI di <https://international.ui.ac.id> dan laman resmi Sistem Informasi Akademik Universitas Indonesia (SIK-NG UI). Sedangkan untuk program studi di luar negeri (*study abroad*) dapat dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke fakultas hukum di luar negeri yang menjadi tujuan studinya.

Pada skema *study abroad*, mahasiswa dibebaskan untuk memilih universitas tujuan belajar di luar negeri. Namun diharuskan untuk membayar *tuition fee* sesuai dengan *tuition fee* universitas tujuan studi ke luar negeri (*study abroad*), dan kemudian membayar uang administrasi di UI sebesar Rp2.000.000 (dua juta Rupiah).

Bahasa pengantar pada seluruh pelaksanaan perkuliahan, ujian, penulisan skripsi, dan sidang skripsi di KKI menggunakan Bahasa Inggris. Proses *proof reading* juga dilakukan terhadap skripsi dalam rangka penjaminan mutu. Sedangkan bahasa Indonesia akan dipergunakan pada beberapa mata kuliah saja, yaitu mata kuliah pendidikan latihan dan kemahiran hukum, seperti Praktik Hukum Pidana, Praktik Hukum Perdata, Praktik Hukum Tata Usaha Negara, dan Praktik Perancangan Peraturan Negara, Ilmu Perundang-undangan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, setiap mahasiswa KKI harus lulus minimal 144-160 sks, termasuk penulisan skripsi. Masa studi normal untuk *Single Degree Track* di KKI, sudah termasuk kegiatan *international exposure*, adalah 8 (delapan) semester. Sedangkan untuk mengikuti *Joint Degree Track*, mahasiswa KKI akan belajar selama 4 (empat) semester di FHUI dan 4 (empat) semester di *University of Canberra*, Australia. Masa studi normal untuk *Fast Track* adalah 8 (delapan) semester.

Untuk tahun ajaran 2022/2023 Biaya Operasional Pendidikan untuk KKI bagi WNI adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) dan *Admission Fee* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta). Adapun bagi WNA jumlahnya adalah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta) dan *Admission Fee* sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta). Biaya tersebut tidak termasuk biaya *tuition fee*, *travel cost*, dan *living cost* untuk mengikuti *student exchange* atau *study abroad*.

## • KUALITAS DAN AKREDITASI

FHUI adalah lembaga pendidikan tinggi di bidang hukum yang banyak berperan dalam pembangunan dan berpartisipasi dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa khususnya terkait bidang hukum. Program Sarjana sampai saat ini telah menghasilkan begitu banyak lulusan dengan kiprahnya yang terus meningkat di tengah masyarakat. Kualitas penyelenggaraan pendidikannya telah diakui secara nasional dengan diperolehnya Nilai A dalam akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sesuai Keputusan BAN PT No. 4269/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022.

## • REGISTRASI

### 1. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi bertujuan untuk memperoleh status mahasiswa aktif untuk satu semester yang akan berjalan. Registrasi administrasi dilakukan pada setiap awal semester. Pada semester gasal, registrasi dilaksanakan bulan Agustus, sedangkan pada semester genap dilaksanakan pada bulan Januari. Jadwal registrasi administrasi pada setiap semester ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik (mengisi mata kuliah dalam IRS) tetapi tidak melakukan registrasi administrasi maka mata kuliah yang telah dimasukkan dalam IRS secara otomatis akan terhapus dan memperoleh status kosong serta diperhitungkan sebagai masa studi.

Registrasi administrasi dilakukan oleh mahasiswa pemegang Kartu Identitas Mahasiswa (KIM) secara *host-to-host* di ATM bank-bank yang telah ditentukan atau melalui *teller/kasir* pada bank tertentu yang ditunjuk oleh Universitas Indonesia.

### 2. Registrasi Akademik

Registrasi akademik dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berjalan. Registrasi akademik dilakukan secara *online* melalui SIAK NG (Sistem Informasi Akademik Next Generation).

Pada masa registrasi akademik yang telah ditetapkan dalam kalender akademik, mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) dengan memilih mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester. Pemilihan mata kuliah harus memperhatikan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya, prasyarat mata kuliah, jadwal perkuliahan, dan kuota peserta yang tersedia untuk mata kuliah tersebut. Apabila salah satu hal tersebut dilanggar, maka sistem akan menyatakan bahwa IRS bermasalah dan pembimbing akademik otomatis tidak dapat menyetujui IRS yang diajukan. Meskipun hanya salah satu mata kuliah yang bermasalah, namun IRS akan ditolak secara keseluruhan oleh sistem. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan apabila IRSnya disetujui oleh pembimbing akademik (PA) atau Wakil Dekan Bidang Akademik dalam kasus-kasus tertentu.

## • **PEMBIMBING AKADEMIK**

### **1. Pembimbing**

Sejak awal studi, fakultas akan menunjuk seorang Pembimbing Akademik (PA) yang akan membimbing mahasiswa hingga akhir studi. Tugas pokok PA adalah memberikan bimbingan akademik dan konseling. PA berperan membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi untuk setiap semester maupun secara keseluruhan, memberikan motivasi, serta memantau perkembangan proses belajar, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. Selain itu mahasiswa juga dapat berkonsultasi mengenai hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan masalah akademik, misalnya apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam penyesuaian dengan lingkungan baru di kampusnya.

### **2. Persetujuan**

Pada saat registrasi akademik, agar IRS diterima oleh SIAK NG maka harus disetujui oleh PA. PA wajib memeriksa IRS yang diajukan oleh mahasiswa serta memberikan persetujuannya jika semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi, hanya melalui SIAK NG. Sangat disarankan kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingan, terutama yang menemui masalah atau membutuhkan penjelasan mengenai perkuliahan atau mata kuliah tertentu, untuk terlebih dahulu menghadap PA secara langsung guna mendapatkan bimbingan dan persetujuannya.

## • KETENTUAN PENGAMBILAN SKS

Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester berpedoman pada perolehan Indeks Prestasi semester sebelumnya (kecuali semester pendek). Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia, pengambilan sks mahasiswa Program Sarjana Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Khusus Internasional berbeda dengan mahasiswa Program Sarjana Kelas Ekstensi.

**Ketentuan pengambilan sks bagi mahasiswa Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan KKI sebagai berikut:**

IPS pada semester sebelumnya	SKS Maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 – 2,49	15
2,50 – 2,99	18
3,00 – 3,49	21
3,50 – 4,00	24

**Ketentuan pengambilan sks bagi mahasiswa Kelas Ekstensi adalah sebagai berikut:**

IPS pada semester sebelumnya	SKS Maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 – 2,49	15
2,50 – 4,00	18

## • KEGIATAN BELAJAR

Kegiatan belajar merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan kurikulum, yang meliputi kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang tercantum dalam IRS. Pada satu mata kuliah dapat diberikan oleh seorang pengajar ataupun tim pengajar. Apabila pengajar berupa tim pengajar, maka terdapat seorang penanggung jawab dan koordinator mata kuliah bersangkutan.

### 1. Ketentuan Umum Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran

Dalam satu tahun akademik, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil dilaksanakan sekitar awal bulan September sampai dengan Desember. Semester genap dilaksanakan sekitar awal bulan Februari sampai dengan Mei. Dalam satu semester, lama perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai kredit masing-masing mata

kuliah. Satu semester terdiri dari 16 (enam belas) pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Antara semester genap dan semester gasal dibuka kemungkinan untuk penyelenggaraan Semester Antara (Semester Pendek). Ketentuan penyelenggaraan mata kuliah di Semester Antara (Semester Pendek) adalah sebagai berikut:

- a. UI memberikan kesempatan kepada Fakultas untuk menyelenggarakan Semester Antara pada semester terkait;
- b. Pengajar penanggung jawab mata kuliah tersebut menyetujuinya;
- c. Jumlah peserta mata kuliah tersebut memenuhi jumlah minimum yang ditentukan oleh fakultas;
- d. Untuk Mata Kuliah Wajib Fakultas dan Mata Kuliah Wajib Peminatan mahasiswa harus sudah pernah menempuh mata kuliah tersebut;
- e. Biaya Semester Antara ditentukan oleh Fakultas.

## **2. Satuan Kredit Semester**

Berdasarkan Pasal 1 angka 39 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia, beban penyelenggaraan dan keberhasilan pendidikan tiap semesternya dinyatakan dalam sks (satuan kredit semester). Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.

## **3. Nilai Kredit Mata Kuliah**

Tiap-tiap mata kuliah diberi nilai sks yang ditentukan berdasarkan besarnya usaha untuk menyelenggarakannya sampai berhasil, yang menggambarkan juga beban yang harus dipikul mahasiswa dalam satu semester untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut. Nilai kredit berkisar antara 1 sampai 5 sks. Nilai sks tidak menentukan penting atau tidaknya suatu mata kuliah, tetapi menggambarkan luas ruang lingkup, banyaknya materi yang harus dibahas dan waktu yang dibutuhkan untuk menguasai materi tersebut.

Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit, mencakup: kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh

puluh) menit per minggu per semester. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, mencakupi kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu sks pada bentuk pembelajaran daring adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (Pasal 1 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia).

#### **4. Ujian dan Sistem Penilaian**

Ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). UTS dilaksanakan pada pertengahan semester, yaitu setelah perkuliahan berjalan kurang lebih 7 (tujuh) atau 8 (delapan) sesi perkuliahan. UAS diselenggarakan pada akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bentuk kegiatan UTS dan UAS diserahkan sepenuhnya kepada Dosen.

Penilaian merupakan bagian dari proses penyelenggaraan ujian. Jika ujian merupakan alat pengukur seberapa jauh mahasiswa dapat menyelesaikan beban studi dari mata kuliah yang diambilnya, maka penilaian merupakan ukuran kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, nilai merupakan hasil akhir dari proses evaluasi terhadap mahasiswa untuk mata kuliah tertentu.

#### **5. Nilai Akhir**

Pada setiap akhir semester setelah mengikuti proses belajar, mahasiswa akan memperoleh nilai akhir. Hanya dosen (dan koordinator pengajar, jika merupakan tim pengajar) yang berhak mengolah, menentukan, dan memublikasikan nilai akhir mata kuliah kepada mahasiswa peserta mata kuliahnya melalui SIAK-NG. Pada umumnya, komponen penilaian dapat terdiri dari:

- a. Tugas-tugas (individu dan/atau kelompok);
- b. Ujian Tengah Semester (UTS); dan,
- c. Ujian Akhir Semester (UAS).

Penentuan komponen mana yang digunakan dan bobotnya masing-masing sepenuhnya menjadi kewenangan pengajar mata kuliah. Contoh pembobotan komponen adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Individu 15%
- b. Tugas Kelompok 15%
- c. UTS 30%
- d. UAS 40%

Komponen penilaian dan bobotnya masing-masing wajib dicantumkan dalam SAP (Satuan Acara Perkuliahan) yang disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, dan juga dicantumkan dalam SIAK-NG mata kuliah bersangkutan. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf, beserta rentang nilai angkanya dari minimal 0 sampai maksimal 100 dan bobot nilai huruf dari 0,00 sampai 4,00. Adapun penghitungan antara nilai angka dan nilai huruf adalah sebagai berikut:

<b>Rentang Nilai Angka</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Bobot Nilai Huruf</b>
85 – 100	A	4,00
80 – <85	A-	3,70
75 – <80	B+	3,30
70 – <75	B	3,00
65 – <70	B-	2,70
60 – <65	C+	2,30
55 – <60	C	2,00
40 – <55	D	1,00
00 – <40	E	0

Untuk dapat dinyatakan lulus dari suatu mata kuliah, mahasiswa harus meraih nilai A, A-, B+, B, B-, C+ atau C. Nilai D dan E dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa harus mengulang pada semester-semester berikutnya, kecuali untuk mata kuliah pilihan.

Selain nilai-nilai tersebut di atas, terdapat pula nilai I, T, dan BS. Nilai I diberikan apabila dosen belum dapat memberikan nilai akhir karena komponen penilaiannya belum lengkap (*incomplete*). Nilai T diberikan apabila mahasiswa tidak memiliki satu pun komponen penilaian, yang akan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan nilai angka 0 (nol). Mahasiswa yang mendapatkan nilai T dianggap belum pernah menempuh mata kuliah tersebut. Apabila mata kuliah yang mendapat nilai T merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah lanjutan, maka mahasiswa tidak dapat menempuh mata kuliah lanjutan itu. Nilai BS (Belum Selesai) diberikan pada mata kuliah spesial, yaitu Tugas Akhir, apabila mahasiswa belum menyelesaikan penyusunan tugas akhirnya. Nilai BS tidak diperhitungkan ke dalam Indeks Prestasi.

## **6. Pemasukan dan Penerbitan Nilai Akhir**

Pemasukan (*input*) dan penerbitan (*publish*) nilai akhir oleh dosen mata kuliah ke dalam SIAK harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Keterlambatan memasukan dan menerbitkan nilai akhir menyebabkan seluruh peserta mata kuliah bersangkutan tidak memiliki nilai atau N. Perubahan nilai N dapat dilakukan melalui permohonan perubahan nilai yang diajukan dosen/tim pengajar kepada Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan.

Nilai I harus berubah menjadi nilai selain I dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberikan. Jika dalam tenggat itu tidak ada ketetapan perubahan, maka nilai I akan dengan sendirinya berubah menjadi nilai E.

## 7. Pengambilan Ulang Mata Kuliah

Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah lulus atau memiliki nilai minimal C maka kedua mata kuliah tersebut diperhitungkan dalam penghitungan IPK. Misalnya, seorang mahasiswa memiliki dua nilai dalam mata kuliah yang sama, maka bobot keduanya diperhitungkan dalam penghitungan IPK.

### • MASA STUDI DAN EVALUASI

#### 1. Masa Studi

Masa studi bagi **mahasiswa Program Sarjana Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan KKI** ditentukan 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun sampai maksimal 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun.

Masa studi bagi **mahasiswa Program Sarjana Kelas Ekstensi**, ditentukan 10 (sepuluh) semester dan dapat ditempuh minimal dalam 5 (lima) semester dan maksimal dalam 16 (enam belas) semester atau 8 tahun.

#### 2. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan rencana studi yang telah disusunnya sendiri dengan Pembimbing Akademik (PA). Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) macam evaluasi.

##### a. Evaluasi Studi Periodik

Evaluasi terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk menentukan dapat tidaknya yang bersangkutan melanjutkan studinya. **Mahasiswa Program Sarjana Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan KKI** dinyatakan putus studi apabila:

1. Pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 24 (dua puluh empat) sks dengan nilai minimal C;
2. Pada evaluasi hasil belajar 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 48 (empat puluh delapan) sks dengan nilai minimal C;
3. Pada evaluasi hasil belajar 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh minimal 72 (tujuh puluh dua) sks dengan nilai minimal C;

4. Pada evaluasi hasil belajar 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh minimal 96 (Sembilan puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
5. Pada evaluasi hasil belajar 10 (sepuluh) semester pertama tidak memperoleh minimal 120 (seratus dua puluh) sks dengan nilai minimal C;
6. Pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C;
7. Apabila seorang mahasiswa pada saat masuk memperoleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.

**Mahasiswa Program Sarjana Kelas Ekstensi** dinyatakan putus studi apabila:

1. Pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 18 sks dengan nilai minimal C;
2. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 36 (tiga puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
3. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh minimal 54 (lima puluh empat) sks dengan nilai minimal C;
4. Pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh minimal 72 (tujuh puluh dua) sks dengan nilai minimal C;
5. Pada evaluasi 10 (sepuluh) semester tidak memperoleh minimal 90 (sembilan puluh) sks dengan nilai minimal C;
6. Pada evaluasi 12 (dua belas) semester tidak memperoleh minimal 108 (seratus delapan) sks dengan nilai minimal C;
7. Pada evaluasi 14 (empat belas) semester tidak memperoleh minimal 126 (seratus dua puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
8. Pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C;
9. Apabila seorang mahasiswa pada saat masuk memperoleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.

#### **b. Evaluasi Akhir Masa Studi**

Batas masa studi **mahasiswa Program Sarjana Kelas Reguler, Kelas Paralel dan KKI** adalah 12 semester. Pada akhir masa studi, mahasiswa harus telah memperoleh minimal 144 sks (termasuk tugas akhir) dan telah lulus seluruh mata kuliah wajib, baik mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, maupun mata kuliah wajib peminatan.

Batas masa studi **mahasiswa Program Sarjana Kelas Ekstensi** adalah 16 semester. Pada akhir masa studi, mahasiswa harus telah memperoleh minimal 144 sks (termasuk tugas akhir) dan telah lulus seluruh mata kuliah wajib, baik mata kuliah wajib fakultas maupun mata kuliah wajib peminatan.

### 3. Putus Studi

Pada seluruh program studi yang diselenggarakan di UI, mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:

- a. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- b. terkena evaluasi periodik;
- c. habis masa studinya sesuai dengan ketentuan masa studi maksimal yang ditetapkan bagi program studinya;
- d. dijatuhi sanksi atas pelanggaran tata-tertib kehidupan kampus dan pelanggaran akademik;
- e. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan Universitas Indonesia.

### 4. Cuti Akademik

Cuti Akademik terdiri atas cuti akademik yang direncanakan dan cuti akademik dengan alasan khusus. Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak. Masa studi dan evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh cuti akademik disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan. Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik apapun, termasuk kegiatan semester pendek dan bimbingan skripsi.

Ketentuan Cuti Akademik yang Direncanakan:

- a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
- b. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada pimpinan fakultas sebelum pelaksanaan registrasi administrasi;
- c. Mahasiswa wajib melakukan pembayaran sebesar 25% dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan.

Ketentuan Cuti Akademik dengan Alasan Khusus:

- a. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik;
- b. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada pimpinan fakultas dalam semester berjalan (setelah masa registrasi atau pada saat masa perkuliahan);
- c. Mahasiswa tetap dikenakan kewajiban untuk membayar biaya pendidikan sebesar 100%.

## • ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Hasil belajar mahasiswa didokumentasikan dalam bentuk Daftar Nilai Semester, Riwayat Akademik, dan Transkrip Akademik. Daftar Nilai Semester berisi nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa dalam satu semester. Nilai mata kuliah yang telah diikuti oleh seorang mahasiswa selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa UI didokumentasikan dalam Riwayat Akademik. Seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu di UI akan memperoleh dokumen nilai mata kuliah berupa Transkrip Akademik. Transkrip Akademik berisi seluruh mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan di UI. Indeks Prestasi Kumulatif yang tercantum dalam Transkrip Akademik ditetapkan dari seluruh mata kuliah yang mendapatkan nilai sekurang-kurangnya C.

## • TATA ALUR PENYUSUNAN SKRIPSI



### Langkah-langkah Penyusunan Skripsi

1. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran skripsi di Biro Pendidikan (sesuai dengan Sub Program masing-masing). Mahasiswa menyusun dan menulis proposal skripsi.
2. Mahasiswa mengirim proposal skripsi yang telah disusun dan ditulis dengan mengisi formulir pendaftaran Skripsi secara *online* yang telah disediakan oleh Dewan Tugas Akhir (DTA).
3. DTA memproses permohonan dan proposal pendaftaran skripsi yang diterima dan menetapkan pembimbing skripsi.
4. Mahasiswa mengambil surat penetapan pembimbing skripsi di Biro Pendidikan (sesuai dengan Subprogram masing-masing), mengisi kolom bimbingan skripsi di SIAK-NG masing-masing, dan memulai proses bimbingan dengan pembimbing skripsi yang telah ditentukan oleh DTA. Mahasiswa wajib mengisi Log Book bimbingan di SIAK-NG.

5. Setelah penyusunan dan penulisan skripsi selesai dan mahasiswa dinyatakan siap ujian oleh pembimbing skripsi masing-masing, mahasiswa mengisi Formulir F (Persetujuan Skripsi Siap Uji).
6. Mahasiswa mendatangi Biro Pendidikan (sesuai dengan Subprogram masing-masing) untuk mendapatkan Formulir G (Berita Acara Pemeriksaan Tim Yudisium) dan Formulir H (Penetapan Ujian Skripsi).
7. Mahasiswa mengikuti proses ujian skripsi.
8. Setelah selesai mengikuti ujian skripsi, mahasiswa mengambil Lampiran Salinan Berita Acara Ujian Skripsi di Biro Pendidikan.
9. Mahasiswa melakukan perbaikan skripsi sesuai dengan masukan Tim Penguji Skripsi.
10. Setelah selesai perbaikan skripsi, mahasiswa akan mendapatkan persetujuan atas perbaikan skripsi dari pembimbing.
11. Mahasiswa meminta tanda tangan pembimbing dan penguji pada lembar pengesahan skripsi.
12. Mahasiswa mengunggah naskah skripsi lengkap beserta lembar pengesahan ke UI-ana.

## • UNIT KONSELING MAHASISWA

Unit Konseling Mahasiswa (UKM) FHUI dibentuk pada tahun akademik 2018/2019, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa FHUI dalam memelihara kesejahteraan mental mereka. UKM FHUI melakukan pelayanan kepada mahasiswa FHUI dengan memberikan bantuan psikologis untuk mereka yang menghadapi masalah baik dalam bidang akademis, pribadi, keluarga, maupun dalam hubungan sosial.

Layanan yang diberikan oleh UKM FHUI dapat berupa layanan informasi, individual maupun kelompok, terkait dengan kebutuhan pengembangan diri mahasiswa. UKM FHUI memberikan juga layanan konseling, yaitu proses pemberian bantuan pada mahasiswa FHUI yang memiliki masalah psikologis agar dapat memahami masalah yang terjadi, serta mendorong mahasiswa tersebut untuk menemukan jalan keluar sendiri dari permasalahannya.

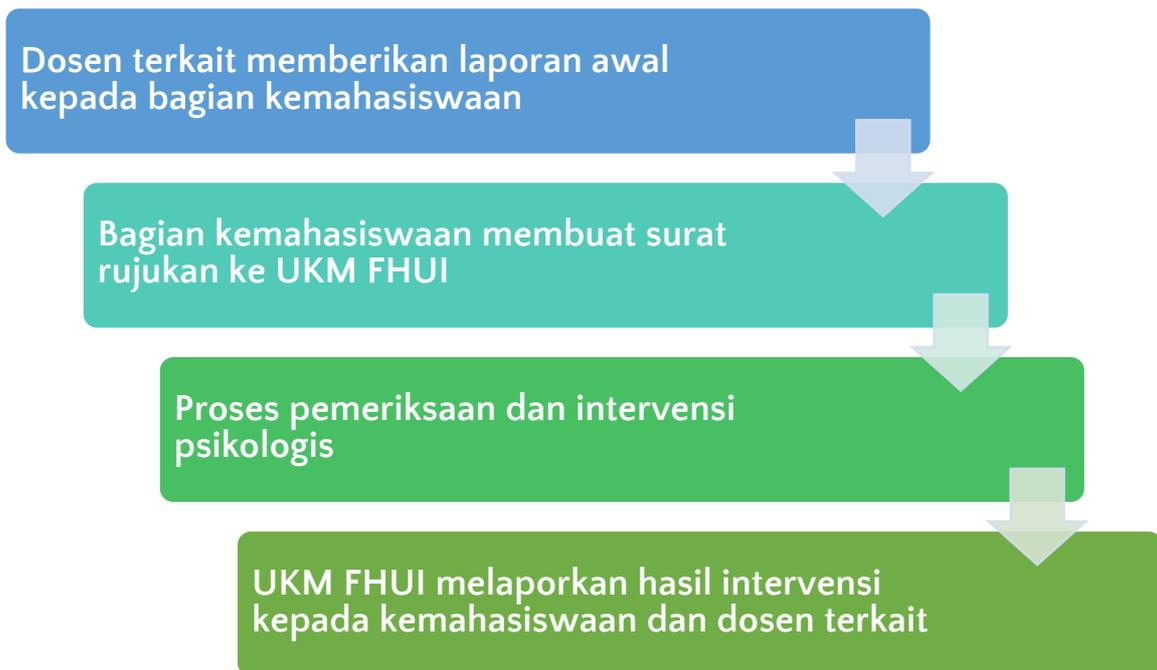
Layanan UKM FHUI terbuka bagi seluruh mahasiswa program sarjana dan pascasarjana. Layanan konsultasi psikologis dapat diberikan dengan permintaan pribadi/*voluntary* dari mahasiswa yang membutuhkan, maupun atas dasar rujukan dari dosen atau melalui Unit Kemahasiswaan FHUI.

Layanan UKM FHUI berlokasi di Ruang Kesehatan FHUI, gedung C lantai dasar, dengan waktu konsultasi pada hari Senin – Jum'at, pukul 09.00 sampai 16.00 WIB berdasarkan perjanjian.

**a. Alur Konsultasi Psikologis Mahasiswa (Voluntary) UKM FHUI**



**b. Alur Konsultasi Psikologis Mahasiswa Dengan Rujukan UKM FHUI**





# Kurikulum Program Sarjana

## • LATAR BELAKANG

Era industri 4.0 merupakan suatu masa yang memberi banyak perkembangan dan perubahan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) secara global. Perkembangan IPTEKS ini tidak dapat dihindari oleh suatu masyarakat dan negara. Hal ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi, yang harus menyiapkan lulusan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Tinggi di Indonesia mengalami perubahan kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Penerapan KPT didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020. Dalam rangka penyesuaian perkembangan hukum seiring dengan perkembangan IPTEKS, serta pelaksanaan amanah institusi untuk menerapkan KPT, Program Sarjana FHUI melakukan perubahan kurikulum berdasarkan KPT di tahun 2020. Dalam KPT, kurikulum didasarkan pada Capaian Pembelajaran yang harus diraih oleh lulusan untuk mengukur kemampuan yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Selain itu, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga diterapkan dalam Kurikulum Program Sarjana FHUI.

## • LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Kurikulum Program Sarjana FHUI adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 16 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia.

- h. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 0443/SK/R/UI/2017 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Universitas Indonesia.
- i. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 2450/SK/R/UI/2020 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Hukum Program Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

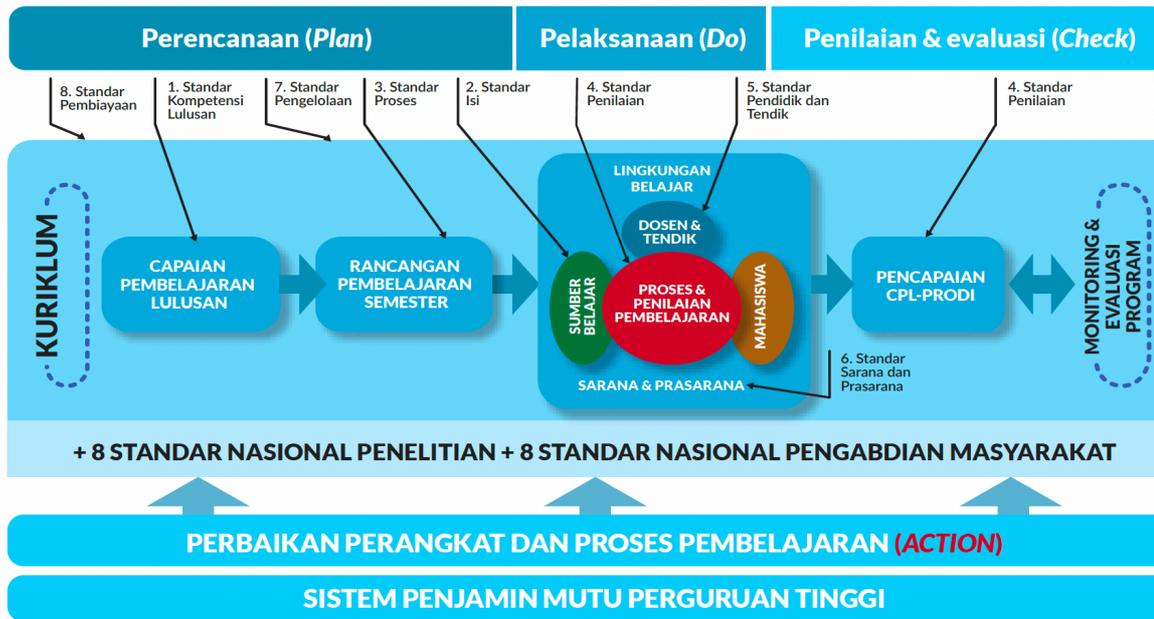
## • **PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 Pasal 1). Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Pasal 35 ayat (2)).

Penyusunan Kurikulum Program Sarjana FHUI dilakukan melalui proses review kurikulum terdahulu (KBK) dengan mengacu pada SN Dikti, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan IPTEKS secara global dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal. Dari hasil review tersebut ditetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana FHUI. Adanya CPL ini merupakan pendekatan Outcome Based Education (OBE) sebagai landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Capaian Pembelajaran Lulusan diturunkan kepada setiap Rancangan Pembelajaran Semester setiap mata kuliah yang memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), serta mencakup sumber belajar, metode pembelajaran, metode evaluasi atau penilaiannya untuk menguji mahasiswa dalam mencapai CPMK.

Pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada SNDikti yang terdiri dari delapan (8) standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



Gambar 1 SN-Dikti Kaitannya dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum  
 Sumber: *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* (Ditjen Dikti Kemendikbud: 2020)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Mahasiswa Program Sarjana harus memenuhi kriteria:

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Kurikulum sarjana (S1) FHUI dirancang untuk masa studi 8 (delapan) semester dengan batas masa studi maksimum 12 semester.

Program Sarjana bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, kompeten dan mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu:

- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dalam penyelesaian masalah dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- c. Mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

## **1. Tujuan Pendidikan Sarjana Hukum**

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu dan keterampilan dalam bidang ilmu hukum sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
- d. Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun di dalam kehidupan bersama di masyarakat;
- e. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

## **2. Profil Lulusan Sarjana Hukum**

Sarjana Hukum yang mampu menganalisis berbagai permasalahan hukum dengan menggunakan gagasan, prosedur, metode, konsep dalam bidang ilmu hukum sesuai dengan etika. Profil lulusan ini adalah hakim, jaksa, advokat, konsultan hukum, peneliti, pengabdian masyarakat, perancang peraturan, dan profesi lainnya.

### 3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana FHUI mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Perumusan ini merujuk pada profil lulusan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2020.

RUMUSAN	KODE	URAIAN
Sikap	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
	S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Pengetahuan	P1	Mampu merumuskan konsep dasar tentang manusia masyarakat Indonesia;
	P2	Mampu menguraikan peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan dan prinsip-prinsip dasar keadilan, sistem hukum, pluralisme hukum serta fungsi hukum;
	P3	Mampu menerangkan pengertian seluruh bidang ilmu hukum (perdata dan publik);
	P4	Mampu menganalisis struktur ilmu hukum melalui hukum positif (hukum materil dan hukum formil);
	P5	Mampu menganalisis bidang hukum khusus, lintas dan pengembangannya;
	P6	Mampu menentukan penyelesaian masalah hukum, melalui dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang hukum;
	P7	Mampu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan

RUMUSAN	KODE	URAIAN
		kegiatan produktif dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat;
	P8	Mampu memilih sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika profesi hukum dalam berkarya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
Keterampilan Umum	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
	KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
	KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
	KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

RUMUSAN	KODE	URAIAN
Keterampilan Khusus	KK1	Mampu menjelaskan gagasan, konsep serta hubungan antara negara, kedaulatan dan masyarakat;
	KK2	Mampu melakukan penelitian sesuai bidang ilmu hukum;
	KK3	Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik;
	KK4	Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap beragam masalah yang timbul di lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara;
	KK5	Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum perdata;
	KK6	Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum pidana;
	KK7	Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum ekonomi;
	KK8	Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum administrasi negara;
	KK9	Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum tata negara;
	KK10	Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum internasional;
	KK11	Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum Islam;
	KK12	Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum dan masyarakat (socio legal);
	KK13	Mampu menganalisis permasalahan hukum melalui berbagai bidang ilmu;
	KK14	Mampu menghubungkan ilmu hukum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan/atau budaya.

Rumusan Pengetahuan merupakan Kompetensi Utama Lulusan. Sedangkan rumusan Keterampilan Khusus merupakan Kompetensi Penunjang Lulusan. Selain itu, diharapkan lulusan memiliki kompetensi lainnya yaitu:

- a. Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok;
- b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi;
- c. Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah dirumuskan ini selaras dengan KKNI, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

KKNJ JENJANG 6	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
<p>Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/ atau Seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menganalisis struktur ilmu hukum melalui hukum positif (hukum materil dan hukum formil).</li> <li>2. Mampu menganalisis bidang hukum khusus, lintas, dan pengembangannya.</li> <li>3. Mampu menentukan penyelesaian masalah hukum, melalui dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang hukum.</li> <li>4. Mampu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan kegiatan produktif dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p>Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu merumuskan konsep dasar tentang manusia dan masyarakat Indonesia.</li> <li>2. Mampu menguraikan peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan dan prinsip-prinsip dasar keadilan, sistem hukum, pluralisme hukum, serta fungsi hukum.</li> <li>3. Mampu menerangkan pengertian seluruh bidang ilmu hukum (perdata dan publik).</li> <li>4. Mampu menganalisis struktur ilmu hukum melalui hukum positif (hukum materil dan hukum formil).</li> <li>5. Mampu menganalisis bidang hukum khusus, lintas, dan pengembangannya.</li> </ol>
<p>Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p>	<p>Mampu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya dengan kegiatan produktif dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p>	<p>Mampu memilih sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika profesi hukum dalam berkarya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.</p>

Agar dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum (S.H.), seorang mahasiswa diharuskan mengumpulkan 144-160 sks termasuk skripsi. Masa studi ditempuh dalam 8 (delapan)

sampai dengan 12 (dua belas) semester. Beban studi mahasiswa untuk satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja per hari dan kemampuan individu (perolehan indeks prestasi semester sebelumnya). Umumnya mahasiswa FHUI memikul beban sebanyak 18-24 sks dalam satu semesternya.

Lulusan FHUI adalah ahli di bidang-bidang hukum yang berpeluang untuk memasuki berbagai profesi hukum seperti advokat, konsultan hukum, *legal officer*, hakim, jaksa, diplomat, birokrat dan sebagainya.

## • PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyelenggaraan pendidikan pada Perguruan Tinggi mengalami arah kebijakan baru yaitu memberikan hak bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama tiga semester. Hak mahasiswa dalam pembelajaran Program MBKM adalah:

- a. (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
  - 1) pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - 2) pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
  - 3) pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk pembelajaran pada program MBKM adalah pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, KKN (kuliah kerja nyata) tematik, dan bela negara. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan MBKM tersebut, terdapat persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan perguruan tinggi, di antaranya sebagai berikut.

- a. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- c. Mahasiswa terdaftar di Tahun Akademik berjalan.
- d. Mahasiswa memiliki Dosen Pendamping dalam mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran MBKM.
- e. Program Studi memiliki mitra untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan MBKM.

Dalam kurikulum Program Sarjana FHUI, kegiatan MBKM ditempatkan pada semester 7 (tujuh) setelah seluruh mata kuliah wajib universitas, fakultas, dan peminatan ditempuh pada semester 1 (satu) sampai semester 6 (enam).

Mata Kuliah di Program Studi						MBKM	TA
1	2	3	4	5	6	7	8

Gambar 2. Sebaran Mata Kuliah dalam Kurikulum FHUI

Secara ideal, mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib yang dapat diselesaikan sampai semester 6 (enam). Meskipun demikian, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan MBKM sebelum semester 7 (tujuh) sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh mitra dengan tetap mempertimbangkan mata kuliah-mata kuliah yang masih harus ditempuh di program studi. Dalam situasi ini, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh mahasiswa antara lain apakah suatu mata kuliah hanya disajikan pada semester ganjil atau genap saja, dan apa prasyarat suatu mata kuliah yang harus ditempuh pada semester berikutnya. Tak kalah penting hal lain yang harus dipertimbangkan adalah syarat dan kegiatan MBKM yang ditentukan oleh mitra.

## • STRUKTUR KURIKULUM

### 1. Program Sarjana Kelas Reguler dan Kelas Paralel

Struktur Kurikulum Program Sarjana adalah sebagai berikut.

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah 9 sks.
- b. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah 84 sks (termasuk 4 sks mata kuliah PLKH)
- c. Mata Kuliah Wajib Peminatan adalah 6-7 sks.
- d. Mata Kuliah Pilihan adalah 44-45 sks yang dapat diperoleh dari mata kuliah yang tersedia di program studi dan/atau melalui kegiatan MBKM.

Pada Program Sarjana Kelas Reguler dan Kelas Paralel tersedia 16 (enam belas) peminatan yang ditawarkan untuk dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya. Peminatan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. praktisi hukum,
- b. hukum perdata,
- c. hukum Islam,

- d. hukum adat,
- e. hukum ekonomi,
- f. hukum teknologi,
- g. hukum pidana,
- h. hukum tata negara,
- i. hukum administrasi negara,
- j. hukum keuangan publik dan perpajakan,
- k. hukum agraria,
- l. hukum perburuhan,
- m. hukum lingkungan dan sumber daya alam,
- n. hukum perdata internasional,
- o. hukum internasional publik,
- p. hukum, masyarakat, dan pembangunan.

## **2. Program Sarjana Kelas Ekstensi**

Pada Kelas Ekstensi, mata kuliah wajib universitas tidak ditawarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi (PKPKPT) UI. Oleh karena itu, struktur kurikulum Program Sarjana Kelas Ekstensi adalah sebagai berikut.

- a. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah 84 sks (termasuk 4 sks mata kuliah PLKH).
- b. Mata Kuliah Wajib Peminatan adalah 6-7 sks.
- c. Mata Kuliah Pilihan adalah 53-54 sks yang dapat diperoleh dari mata kuliah yang tersedia di program studi dan/atau melalui kegiatan MBKM.

Pada Kelas Ekstensi terdapat 13 (tiga belas) peminatan yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut.

- a. praktisi hukum,
- b. hukum perdata,
- c. hukum Islam,
- d. hukum adat,
- e. hukum ekonomi,
- f. hukum teknologi,
- g. hukum tata negara,
- h. hukum administrasi negara,
- i. hukum keuangan publik dan perpajakan,
- j. hukum agraria,
- k. hukum perburuhan,
- l. hukum lingkungan dan sumber daya alam,
- m. hukum, masyarakat, dan pembangunan.

### 3. Kelas Khusus Internasional

Secara umum, struktur kurikulum Program Sarjana FHUI untuk KKI adalah sebagai berikut.

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah 9 sks.
- b. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah 84 sks (termasuk 4 sks mata kuliah PLKH).
- c. Mata Kuliah Wajib Peminatan adalah 6-7 sks.
- d. Mata Kuliah Pilihan adalah 44-45 sks yang dapat diperoleh dari mata kuliah yang tersedia di program studi dan/atau melalui kegiatan MBKM.

Peminatan yang ditawarkan pada KKI adalah sebagai berikut.

- a. hukum ekonomi,
- b. hukum perdata internasional,
- c. hukum internasional publik.

Uraian lengkap tentang kurikulum Program Sarjana KKI dapat dibaca pada *Academic Handbooks International Undergraduate Program Faculty of Law Universitas Indonesia*.

#### • MATA KULIAH

Pada bagian ini disampaikan keterangan seluruh mata kuliah dalam kurikulum Program Sarjana FHUI terkait jumlah sks, status, penyelenggaraan semester, dan prasyarat. Dalam penyelenggaraan suatu mata kuliah dapat berbeda antara Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan KKI. Perbedaan tersebut adalah tentang ditawarkan atau tidak suatu mata kuliah dan/atau diselenggarakan di semester yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk membaca pula tentang Distribusi Mata Kuliah untuk masing-masing kelas.

#### 1. Mata Kuliah Wajib Universitas

MKWU hanya diberlakukan untuk mahasiswa kelas Reguler, Paralel, dan Kelas Internasional.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	UIGE600003	MPK Bahasa Inggris	2	Wajib	1	-
2	UIGE600004	MPK Agama	2	Wajib	1	-
3	UIGE600006	MPK Terintegrasi	5	Wajib	2	-

#### 2. Mata Kuliah Wajib Fakultas (Program Studi)

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWHD600001	Ilmu Negara	3	Wajib	1	-

2	LWHD600002	Pengantar Ilmu Hukum	3	Wajib	1	-
3	LWHD600003	Pengantar Hukum Indonesia	3	Wajib	1	-
4	LWHD600004	Hukum dan Masyarakat	3	Wajib	1	-
5	LWTN600008	Asas-Asas Hukum Tata Negara	3	Wajib	2	Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia
6	LWPE600006	Asas-Asas Hukum Perdata	3	Wajib	2	Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia
7	LWIA600007	Asas-Asas Hukum Adat	3	Wajib	2	Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia
8	LWIA600005	Asas-Asas Hukum Islam	3	Wajib	2	Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia
9	LWPI600009	Asas-Asas Hukum Pidana	3	Wajib	2	Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia
10	LWAN600010	Asas-Asas Hukum Administrasi Negara	3	Wajib	3	Asas-Asas HTN
11	LWAC600023	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	Wajib	3	Asas-Asas HTN
12	LWPE600011	Hukum Perikatan	3	Wajib	3	Asas-Asas Hukum Perdata
13	LWET600012	Hak Kekayaan Intelektual	2	Wajib	3	Asas-Asas Hukum Perdata
14	LWIN600020	Hukum Internasional Publik	3	Wajib	3	Asas-Asas HTN
15	LWAC600021	Hukum Acara Pidana	3	Wajib	3	Asas-Asas Hukum Pidana
16	LWAC600022	Hukum Acara Perdata	3	Wajib	4	Hukum Perikatan

17	LWET600013	Asas-Asas Hukum Dagang	3	Wajib	4	Hukum Perikatan
18	LWAN600018	Hukum Agraria	3	Wajib	4	Asas-Asas HAN, Asas-Asas Hukum Adat, Asas-Asas Hukum Perdata
19	LWAN600019	Hukum Perburuhan	2	Wajib	4	Asas-Asas HAN, Hukum Perikatan
20	LWHD600030	Ilmu Perundang-undangan	2	Wajib	4	Asas-Asas HAN, Asas-Asas HTN
21	LWET600014	Hukum Telematika	2	Wajib	4	Asas-Asas Hukum Perdata, Asas-Asas Hukum Pidana
22	LWAN600015	Hukum Lingkungan	2	Wajib	4	Hukum Acara Pidana
23	LWPE600029	Hukum Antar Tata Hukum	3	Wajib	4	Hukum Perikatan
24	LWAC600028	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	Wajib	5	Hukum Acara Perdata, Asas-Asas HAN
25	LWHD600026	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	Wajib	5	Asas-Asas HAN, Hukum dan Masyarakat, Asas-Asas Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Adat, Asas-Asas Hukum Perdata, Asas-Asas Hukum Pidana
26	LWAC601304	Hukum Acara Peradilan Agama	2	Wajib	5	Asas-Asas Hukum Islam
27	LWGB600031	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	Wajib	6	Semua MKWF kecuali Hukum dan HAM, Filsafat Hukum
28	LWGB600032	Hukum dan HAM	2	Wajib	6	Semua MKWF kecuali Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
29	LWHD600034	Filsafat Hukum	2	Wajib	6	Semua MKWF kecuali Etika dan

						Tanggung Jawab Profesi Hukum, Hukum dan HAM
30	LWTA600044	Tugas Akhir	4	Wajib	8	Telah menempuh 114 SKS termasuk mata kuliah di FHUI yang terkait dengan Tugas Akhir

### 3. Mata Kuliah Pendidikan Latihan & Kemahiran Hukum

Mahasiswa wajib memperoleh 4 sks MK PLKH.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWLK600037	Praktik Hukum Pidana	3		4	Hukum Acara Pidana
2	LWLK600038	Praktik Diplomasi	2		4	Hukum Internasional Publik
3	LWLK600036	Praktik Hukum Perdata	3		5	Asas-asas Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata
4	LWLK600016	Praktik Peradilan Konstitusi	2		5	Hukum Acara MK
5	LWLK600039	Perancangan Peraturan Negara	2		5	Ilmu Perundang-undangan
6	LWLK600035	Praktik Hukum PTUN	2		6	Hukum Acara PTUN
7	LWLK600041	Penyusunan Kontrak Dagang	2		6	Asas-Asas Hukum Dagang
8	LWLK600040	Pilihan Penyelesaian Sengketa	2		6	Semua MKWF kecuali PLKH, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Hukum dan HAM, Filsafat Hukum
9	LWLK600043	Klinik Hukum	2		6	Semua MKWF kecuali PLKH, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum,

						Hukum dan HAM, Filsafat Hukum
10	LWLK600017	Praktik Peradilan Agama	2		6	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama

## 4. Mata Kuliah Peminatan

### A. Peminatan Praktisi Hukum

MK Peminatan Praktisi Hukum hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWLK600037	Praktik Hukum Pidana**	3	Wajib	Genap	Hukum Acara Pidana
2	LWLK600036	Praktik Hukum Perdata**	3	Wajib	Gasal	Asas-Asas Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata
3	LWAC600060	Hukum Acara Peradilan Militer	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
4	LWAC600061	Penerapan Asas-Asas Hukum Acara	2	Pilihan	Gasal	Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara Peradilan Agama
5	LWAC600062	Kapita Selektta Hukum Acara Perdata	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata,
6	LWAC600063	Kapita Selektta Hukum Acara Pidana	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana
7	LWAC600064	Hukum Pembuktian	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Perdata, Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata

## B. Peminatan Hukum Perdata

MK Peminatan Hukum Perdata hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWPE600101	Hukum Orang dan Keluarga Perdata	2	Wajib	3	Asas-Asas Hukum Perdata
2	LWPE600105	Hukum Kebendaan Perdata	2	Wajib	3	Asas-Asas Hukum Perdata
3	LWPE600104	Hukum Kewarisan Perdata	2	Wajib	4	Asas-Asas Hukum Perdata
4	LWPE600107	Perbuatan Melawan Hukum	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Perdata
5	LWPE600102	Perbandingan Hukum Perdata	2	Pilihan	Gasal	Hukum Perikatan
6	LWPE600106	Hukum Kontrak Kontemporer	2	Pilihan	Genap	Hukum Perikatan
7	LWPE600103	Hukum Jaminan Atas Benda Bergerak	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Perdata

## C. Peminatan Hukum Islam

MK Peminatan Hukum Islam hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWIA600137	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Islam	3	Wajib	3	Asas-Asas Hukum Islam
2	LWIA600136	Hukum Pidana Islam	2	Wajib	4	Asas-Asas Hukum Islam
3	LWIA600138	Hukum Ekonomi Islam	2	Wajib	4	Asas-Asas Hukum Islam
4	LWIA600139	Hukum Zakat dan Wakaf	2	Pilihan	Gasal	-
5	LWIA600140	Hukum Perikatan Islam	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Islam
6	LWIA600145	Kapita Selektif Hukum Islam	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Islam, Hukum Acara Peradilan Agama

#### **D. Peminatan Hukum Adat**

MK Peminatan Hukum Adat hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWIA600141	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat	2	Wajib	3	Asas-Asas Hukum Adat
2	LWIA600142	Aspek Hukum Publik dalam Hukum Adat	2	Wajib	3	Asas-Asas Hukum Adat
3	LWIA600143	Hukum Adat dalam Kegiatan Ekonomi	3	Wajib	4	Asas-Asas Hukum Adat
4	LWIA600144	Kapita Selektif Masalah Aktual Hukum Adat	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Adat

#### **E. Peminatan Hukum Ekonomi**

MK Peminatan Hukum Ekonomi ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan KKI.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWET600147	Hukum Organisasi Perusahaan	3	Wajib	5	Asas-Asas Hukum Dagang
2	LWET600148	Hukum Perbankan	2	Wajib	6	Asas-Asas Hukum Dagang
3	LWET600149	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	Wajib	6	Hukum Organisasi Perusahaan, Hukum Surat Berharga
4	LWET600150	Hukum Surat Berharga	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Dagang
5	LWET600151	Arbitrase	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Dagang
6	LWET600152	Hukum Asuransi	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Dagang
7	LWET600153	Analisa Ekonomi Terhadap Hukum	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Dagang
8	LWET600154	Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Dagang

9	LWET600155	Akuntansi untuk Ahli Hukum	2	Pilihan	Gasal	Hukum Organisasi Perusahaan, Hukum Surat Berharga
10	LWET600156	Hukum Persaingan Usaha	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Dagang
11	LWET600157	Hukum Kepailitan	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Dagang
12	LWET600158	Hukum Perdagangan Internasional	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Dagang, Hukum Internasional Publik
13	LWET600159	Hukum Koperasi	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Dagang
14	LWET600160	Hukum Pengangkutan	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Dagang
15	LWET600161	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Dagang
16	LWET600162	Hukum Jual Beli Perusahaan	2	Pilihan	Genap	Hukum Organisasi Perusahaan
17	LWET600163	Penulisan Hukum, Pendapat Hukum dan Keterampilan Hukum	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Dagang
18	LWET600164	Hukum Kesehatan	2	Pilihan	Genap	Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia

## **F. Peminatan Hukum Teknologi**

MK Peminatan Hukum Teknologi hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWET600166	Hak Cipta dan Hak Terkait	2	Wajib	5	Hak Kekayaan Intelektual
2	LWET600167	Paten, PVT, DI, DTLST, dan Rahasia Dagang	2	Wajib	5	Hak Kekayaan Intelektual

3	LWET600168	Keamanan dan Ketahanan Siber	2	Wajib	6	Hukum Telematika
4	LWET600169	Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik	2	Pilihan	Gasal	Hukum Telematika
5	LWET600173	Merek dan Indikasi Geografis	2	Pilihan	Gasal	Hak Kekayaan Intelektual
6	LWET600174	Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum	2	Pilihan	Gasal	Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia
7	LWET600170	Perlindungan Privasi dan Data Pribadi	2	Pilihan	Genap	Hukum Telematika
8	LWET600171	Kebendaan Digital dan Transaksi Elektronik	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Dagang, Hukum Telematika, Hukum Perikatan
9	LWET600172	Hukum Hiburan dan Olahraga	2	Pilihan	Genap	Hukum Telematika

### G. Peminatan Hukum Pidana

MK Peminatan Hukum Pidana hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler dan Kelas Paralel.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWPI600402	Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	3	Wajib	3	Asas-asas Hukum Pidana
2	LWPI600403	Penerapan Asas-asas Hukum Pidana	2	Wajib	4	Hukum Acara Pidana
3	LWPI600405	Hukum Sanksi Ditinjau dari Hukum Pidana	2	Wajib	4	Asas Hukum Pidana
4	LWPI600401	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Pidana
5	LWPI600407	Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Pidana
6	LWPI600408	Kriminologi untuk Ahli Hukum	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Pidana
7	LWPI600409	Tindak Pidana di Bidang Perekonomian	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Pidana
8	LWPI600410	Hukum Pidana dan Perlindungan Anak	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Pidana
9	LWPI600406	Kapita Selekta Hukum Pidana	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Pidana

10	LWPI600404	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas Hukum Pidana
11	LWPI600411	Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Pidana
12	LWPI600412	Viktimologi untuk Ahli Hukum Pidana	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas Hukum Pidana

## H. Peminatan Hukum Tata Negara

MK Peminatan Hukum Tata Negara hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWTN600507	Hukum Kelembagaan Negara	2	Wajib	3	Asas-Asas HTN
2	LWTN600503	Pemilihan Umum	2	Wajib	3	Asas-Asas HTN
3	LWTN600508	Hukum Tata Negara Darurat	2	Wajib	4	Asas-Asas HTN
4	LWTN600504	Lembaga Kepresidenan	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas HTN
5	LWTN600505	Lembaga Perwakilan Rakyat	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas HTN
6	LWTN600509	Hukum Tata Negara Adat	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas HTN
7	LWTN600501	Negara dalam Perspektif Hukum Islam	2	Pilihan	Gasal	-
8	LWTN600502	Sejarah Konstitusi	2	Pilihan	Genap	-
9	LWTN600506	Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas HTN
10	LWTN600510	Partai Politik dalam Perspektif HTN	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas HTN

## I. Peminatan Hukum Administrasi Negara

MK Peminatan Hukum Administrasi Negara hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWAN600601	HAN Sektoral	3	Wajib	4	Asas-Asas HAN
2	LWHD600607	Teori Perundang-undangan	2	Wajib	5	Asas-Asas HAN
3	LWAN600602	Hukum Antar Wewenang	2	Wajib	6	Asas-Asas HAN

4	LWAN600603	Diskresi dan Beleidsregel	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas HAN
5	LWAN600608	Hukum Pelayanan Publik	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas HAN
6	LWAN600606	Hukum Administrasi Daerah	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas HAN
7	LWAN600609	Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas HAN

### **J. Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan**

MK Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWAN600605	Hukum Anggaran dan Keuangan Publik	3	Wajib	4	Asas-Asas HAN
2	LWAN600610	Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah	2	Wajib	5	Asas-Asas HAN
3	LWAN600604	Hukum Pajak	2	Wajib	5	Asas-Asas HAN
4	LWAN600611	Hukum dalam Regulasi dan Lembaga Keuangan di Indonesia	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas HAN
5	LWAN600612	Hukum Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan	2	Pilihan	Gasal	Asas-Asas HAN
6	LWAN600613	Hukum Pajak Internasional	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas HAN
7	LWAN600614	Hukum Pengadilan Pajak	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas HAN
8	LWAN600615	Hukum Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan	2	Pilihan	Genap	Asas-Asas HAN

### **K. Peminatan Hukum Agraria**

MK Peminatan Hukum Agraria hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWAN600705	Pengadaan Tanah	3	Wajib	5	Hukum Agraria
2	LWAN600701	Reforma Agraria	2	Wajib	5	Hukum Agraria
3	LWAN600706	Perbandingan Hukum Tanah	2	Wajib	6	Hukum Agraria

4	LWAN600707	Hak-hak Khusus dalam Pemanfaatan Ruang	2	Pilihan	Gasal	Hukum Agraria
5	LWAN600704	Tanah sebagai Jaminan Utang	2	Pilihan	Gasal	Hukum Agraria
6	LWAN600703	Kondominium dan Permasalahannya	2	Pilihan	Genap	Hukum Agraria
7	LWAN600702	Pendaftaran Tanah	2	Pilihan	Genap	Hukum Agraria

#### L. Peminatan Hukum Perburuhan

MK Peminatan Hukum Perburuhan hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWAN600801	Hukum Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial	3	Wajib	5	Hukum Perburuhan
2	LWAN600803	Hukum tentang Upah dan Jaminan Sosial	2	Wajib	5	Hukum Perburuhan
3	LWAN600802	Hukum tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2	Wajib	6	Hukum Perburuhan
4	LWAN600804	Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja	2	Pilihan	Genap	Hukum Perburuhan
5	LWAN600805	Hukum tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2	Pilihan	Genap	Hukum Perburuhan

#### M. Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam

MK Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWAN600902	Hukum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	2	Wajib	5	Hukum Lingkungan
2	LWAN600905	Kapita Selektika Kasus-kasus Lingkungan	2	Wajib	5	Hukum Lingkungan
3	LWAN600906	Hukum Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan	3	Wajib	6	Hukum Lingkungan
4	LWAN600903	Hukum Perubahan Iklim	2	Pilihan	Gasal	Hukum Lingkungan

5	LWAN600904	Hukum dan Konflik SDA	2	Pilihan	Gasal	Hukum Lingkungan
6	LWAN600907	Hukum Pengelolaan Energi	2	Pilihan	Genap	Hukum Lingkungan
7	LWAN600908	Hukum Pengelolaan SDA Kelautan	2	Pilihan	Genap	Hukum Lingkungan
8	LWAN600909	Hukum Tata Ruang dan Perkotaan	2	Pilihan	Genap	Hukum Lingkungan, Hukum Agraria

#### **N. Peminatan Hukum Perdata Internasional**

MK Peminatan Hukum Perdata Internasional hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan KKI.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWIN601001	Hukum Perdata Internasional	3	Wajib	4	Hukum Perikatan
2	LWIN601003	Kapita Selektif Hukum Perdata Internasional	2	Wajib	5	Hukum Perdata Internasional
3	LWIN601002	Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional	2	Wajib	5	Hukum Perdata Internasional
4	LWIN601005	Status Personal dalam HPI Indonesia	2	Pilihan	5	Hukum Perdata Internasional
5	LWIN601006	Forum yang berwenang dalam HPI	2	Pilihan	5	Hukum Perdata Internasional
6	LWIN601004	Transaksi Bisnis Internasional	2	Pilihan	5	Hukum Perdata Internasional

#### **O. Peminatan Hukum Internasional Publik**

MK Peminatan Hukum Internasional Publik hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan KKI.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWIN601102	Hukum Laut	2	Wajib	4	Hukum Internasional Publik
2	LWIN601101	Hukum Perjanjian Internasional	2	Wajib	4	Hukum Internasional Publik

3	LWIN601104	Hukum Udara dan Angkasa	3	Wajib	5	Hukum Internasional Publik
4	LWIN601105	Hukum Diplomatik	2	Pilihan	5	Hukum Internasional Publik
5	LWIN601106	Hukum Lingkungan Internasional	2	Pilihan	5	Hukum Internasional Publik
6	LWIN601107	Arbitrase Investasi Internasional	2	Pilihan	5	Hukum Internasional Publik
7	LWIN601103	Hukum Organisasi Internasional dan Regional	2	Pilihan	4	Hukum Internasional Publik
8	LWIN601108	Hukum Humaniter Internasional	2	Pilihan	4	Hukum Internasional Publik

#### **P. Peminatan Hukum, Masyarakat & Pembangunan**

MK Peminatan Hukum, Masyarakat & Pembangunan hanya ditawarkan untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi.

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWMP601202	Sosiologi Hukum	2	Wajib	3	Hukum dan Masyarakat
2	LWMP601204	Hukum dan Gender	3	Wajib	3	Hukum dan Masyarakat
3	LWMP601201	Antropologi Hukum	2	Wajib	4	Hukum dan Masyarakat
4	LWMP601206	Hukum dan Kesejahteraan Sosial	2	Pilihan	Gasal	Hukum dan Masyarakat
5	LWMP601205	Ekonomi Pembangunan dan Hukum	2	Pilihan	Gasal	Hukum dan Masyarakat
6	LWMP601207	Kajian Interdisipliner terhadap Hukum yang Hidup	2	Pilihan	Genap	Hukum dan Masyarakat
7	LWMP601209	Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Hukum	2	Pilihan	Genap	Hukum dan Masyarakat, Ekonomi Pembangunan dan Hukum
8	LWMP601208	Hukum, Keadilan dan Globalisasi	2	Pilihan	Genap	Hukum dan Masyarakat

9	LWMP601203	Metode Penelitian Sosiolegal	2	Pilihan	Genap	Hukum dan Masyarakat
---	------------	------------------------------	---	---------	-------	----------------------

## 5. Mata Kuliah Pilihan Non-Peminatan

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWHD600175	Penulisan Ilmiah	2	Pilihan	1	-
2	LWNP600177	Manusia dan Masyarakat Indonesia	2	Pilihan	1	-
3	LWNP600176	Bahasa Inggris Hukum	2	Pilihan	2	-

## 6. Kegiatan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS	SEMESTER	PRASYARAT
1	LWNP600178	Magang di Luar Negeri	10	Pilihan	7	-
2	LWNP600179	Magang di Dalam Negeri	6	Pilihan	7	-
3	LWNP600180	Riset	10	Pilihan	7	-
4	LWNP600181	Kegiatan Kemanusiaan/Advokasi	10	Pilihan	7	-
5	LWNP600182	Wirausaha/Start-up	10	Pilihan	7	-
6	LWNP600183	Proyek Independen	10	Pilihan	7	-
7	LWNP600184	KKN Tematik	6	Pilihan	7	-

- DISTRIBUSI MATA KULIAH**

### 1. Program Sarjana Kelas Reguler dan Kelas Paralel

#### Mata Kuliah Wajib Fakultas dan Peminatan

SEMESTER 1			SEMESTER 2			SEMESTER 3			SEMESTER 4		
KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
<b>MKWF</b>											
UIGE600003	MPK Bahasa Inggris	2	UIGE600006	MPK Terintegrasi	5	LWAN600010	Asas-Asas Hukum Administrasi Negara	3	LWAC600022	Hukum Acara Perdata	3
UIGE600004	MPK Agama	2	LWTN600008	Asas-Asas Hukum Tata Negara	3	LWAC600023	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	LWET600013	Asas-Asas Hukum Dagang	3
LWHD600001	Ilmu Negara	3	LWPE600006	Asas-Asas Hukum Perdata	3	LWPE600011	Hukum Perikatan	3	LWAN600018	Hukum Agraria	3
LWHD600002	Pengantar Ilmu Hukum	3	LWIA600007	Asas-Asas Hukum Adat	3	LWET600012	Hak Kekayaan Intelektual	2	LWAN600019	Hukum Perburuhan	2
LWHD600003	Pengantar Hukum Indonesia	3	LWIA600005	Asas-Asas Hukum Islam	3	LWIN600020	Hukum Internasional Publik	3	LWHD600030	Ilmu Perundang-Undangan	2
LWHD600004	Hukum dan Masyarakat	3	LWPI600009	Asas-Asas Hukum Pidana	3	LWAC600021	Hukum Acara Pidana	3	LWET600014	Hukum Telematika	2
									LWAN600015	Hukum Lingkungan	2
									LWPE600029	Hukum Antar Tata Hukum	3
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>Jumlah</b>		<b>20</b>
	MK Pilihan	0-4					MK Peminatan Sesuai Pilihan	0-4		MK Peminatan Sesuai Pilihan	0-4
										PLKH* :	

SEMESTER 1			SEMESTER 2			SEMESTER 3			SEMESTER 4		
									LWLK600037	Praktik Hukum Pidana**	3
									LWLK600038	Praktik Diplomasi	2
						<b>Peminatan Hukum Pidana</b>					
						LWPI600402	Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	3	LWPI600403	Penerapan Asas-asas Hukum Pidana	2
									LWPI600405	Hukum Sanksi Ditinjau dari Hukum Pidana	2
						<b>Peminatan Hukum Perdata</b>					
						LWPE600101	Hukum Orang dan Keluarga Perdata	2	LWPE600104	Hukum Kewarisan Perdata	2
						LWPE600105	Hukum Kebendaan Perdata	2			
						<b>Peminatan Hukum Islam</b>					
						LWIA600137	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Islam	3	LWIA600136	Hukum Pidana Islam	2
									LWIA600138	Hukum Ekonomi Islam	2
						<b>Peminatan Hukum Tata Negara</b>					
						LWTN600507	Hukum Kelembagaan Negara	2	LWTN600508	Hukum Tata Negara Darurat	2
						LWTN600503	Pemilihan Umum	2			
						<b>Peminatan Hukum, Masyarakat &amp; Pembangunan</b>					
						LWMP601202	Sosiologi Hukum	2	LWMP601201	Antropologi Hukum	2
						LWMP601204	Hukum dan Gender	3			
						<b>Peminatan Hukum Adat</b>					
						LWIA600141	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat	2	LWIA600143	Hukum Adat dalam Kegiatan Ekonomi	3
						LWIA600142	Aspek Hukum Publik dalam Hukum Adat	2			

SEMESTER 1			SEMESTER 2			SEMESTER 3			SEMESTER 4		
									Peminatan Hukum Internasional Publik		
									LWIN601102	Hukum Laut	2
									LWIN601101	Hukum Perjanjian Internasional	2
									Peminatan Hukum Perdata Internasional		
									LWIN601001	Hukum Perdata Internasional	3
									Peminatan Hukum Administrasi Negara		
									LWAN600601	HAN Sektoral	3
									Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan		
									LWAN600605	Hukum Anggaran dan Keuangan Publik	3
Jumlah SKS semester 1		16-20	Jumlah SKS semester 2		16-20	Jumlah SKS semester 3		20	Jumlah SKS semester 4		20-24

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8		
KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
MKWF											
LWAC600028	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	LWGB600031	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2				LWTA600044	Tugas Akhir	4
LWHD600026	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	LWGB600032	Hukum dan HAM	2						
LWAC601304	Hukum Acara Peradilan Agama	2	LWHD600034	Filsafat Hukum	2						
Jumlah		7	Jumlah		6	Jumlah		0	Jumlah		4
	MK Peminatan Sesuai Pilihan			MK Peminatan Sesuai Pilihan			Pilihan Merdeka Belajar			Pilihan Merdeka Belajar	

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8		
	PLKH* :			PLKH* :							
LWLK600036	Praktik Hukum Perdata**	3	LWLK600035	Praktik Hukum PTUN	2						
LWLK600016	Praktik Peradilan Konstitusi	2	LWLK600041	Penyusunan Kontrak Dagang	2						
LWLK600039	Perancangan Peraturan Negara	2	LWLK600040	Pilihan Penyelesaian Sengketa	2						
			LWLK600043	Klinik Hukum	2						
			LWLK600017	Praktik Peradilan Agama	2						
<b>Peminatan Hukum Ekonomi</b>											
LWET600147	Hukum Organisasi Perusahaan	3	LWET600148	Hukum Perbankan	2						
			LWET600149	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2						
<b>Peminatan Hukum Teknologi</b>											
LWET600166	Hak Cipta dan Hak Terkait	2	LWET600168	Keamanan dan Ketahanan Siber	2						
LWET600167	Paten, PVT, DI, DTLST, dan Rahasia Dagang	2									
<b>Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam</b>											
LWAN600902	Hukum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	2	LWAN600906	Hukum Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan	3						
LWAN600905	Kapita Selektif Kasus-kasus Lingkungan	2									
<b>Peminatan Hukum Administrasi Negara</b>											
LWHD600607	Teori Perundang-undangan	2	LWAN600602	Hukum Antar Wewenang	2						
<b>Peminatan Hukum Agraria</b>											
LWAN600705	Pengadaan Tanah	3	LWAN600706	Perbandingan Hukum Tanah	2						
LWAN600701	Reforma Agraria	2									
<b>Peminatan Hukum Perburuhan</b>											

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8		
LWAN600801	Hukum Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial	3	LWAN600802	Hukum tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2						
LWAN600803	Hukum tentang Upah dan Jaminan Sosial	2									
<b>Peminatan Hukum Internasional Publik</b>											
LWIN601104	Hukum Udara dan Angkasa	3									
<b>Peminatan Hukum Perdata Internasional</b>											
LWIN601003	Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional	2									
LWIN601002	Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional	2									
<b>Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan</b>											
LWAN600610	Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah	2									
LWAN600604	Hukum Pajak	2									
<b>Jumlah SKS semester 5</b>		<b>7-24</b>	<b>Jumlah SKS semester 6</b>		<b>6-24</b>	<b>Jumlah SKS semester 7</b>		<b>20</b>	<b>Jumlah SKS semester 8</b>		<b>4-24</b>

### Mata Kuliah Pilihan Peminatan dan Non-Peminatan

SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP			SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP		
KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
<b>Peminatan Hukum Pidana</b>						<b>Peminatan Hukum Ekonomi</b>					
LWPI600401	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2	LWPI600411	Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset	2	LWET600150	Hukum Surat Berharga	2	LWET600156	Hukum Persaingan Usaha	2
LWPI600407	Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana	2	LWPI600412	Viktimologi untuk Ahli Hukum Pidana	2	LWET600151	Arbitrase	2	LWET600157	Hukum Kepailitan	2

SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP			SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP		
LWPI600408	Kriminologi untuk Ahli Hukum	2				LWET600152	Hukum Asuransi	2	LWET600158	Hukum Perdagangan Internasional	2
LWPI600409	Tindak Pidana di Bidang Perekonomian	2				LWET600153	Analisis Ekonomi Terhadap Hukum	2	LWET600159	Hukum Koperasi	2
LWPI600410	Hukum Pidana dan Perlindungan Anak	2				LWET600154	Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan	2	LWET600160	Hukum Pengangkutan	2
LWPI600406	Kapita Selektif Hukum Pidana	2				LWET600155	Akuntansi untuk Ahli Hukum	2	LWET600161	Hukum Perlindungan Konsumen	2
LWPI600404	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	2							LWET600162	Hukum Jual Beli Perusahaan	2
<b>Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan</b>									LWET600163	Penulisan Hukum, Pendapat Hukum dan Keterampilan Hukum	2
LWAN600611	Hukum dalam Regulasi dan Lembaga Keuangan di Indonesia	2	LWAN600613	Hukum Pajak Internasional	2				LWET600164	Hukum Kesehatan	2
LWAN600612	Hukum Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan	2	LWAN600614	Hukum Pengadilan Pajak	2	<b>Peminatan Hukum Teknologi</b>					
			LWAN600615	Hukum Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan	2	LWET600169	Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik	2	LWET600170	Perlindungan Privasi dan Data Pribadi	2
<b>Peminatan Hukum Agraria</b>						LWET600173	Merek dan Indikasi Geografis	2	LWET600171	Kebendaan Digital dan Transaksi Elektronik	2
LWAN600707	Hak-hak Khusus dalam Pemanfaatan Ruang	2	LWAN600703	Kondominium dan Permasalahannya	2	LWET600174	Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum	2	LWET600172	Hukum Hiburan dan Olahraga	2
LWAN600704	Tanah sebagai Jaminan Utang	2	LWAN600702	Pendaftaran Tanah	2	<b>Peminatan Hukum Perdata</b>					

SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP			SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP		
Peminatan Hukum Perburuhan						LWPE600107	Perbuatan Melawan Hukum	2	LWPE600106	Hukum Kontrak Kontemporer	2
			LWAN600804	Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja	2	LWPE600102	Perbandingan Hukum Perdata	2	LWPE600103	Hukum Jaminan Atas Benda Bergerak	2
			LWAN600805	Hukum tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2	Peminatan Hukum Islam					
Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam						LWIA600139	Hukum Zakat dan Wakaf	2	LWIA600141	Kapita Selektta Hukum Islam	2
LWAN600903	Hukum Perubahan Iklim	2	LWAN600907	Hukum Pengelolaan Energi	2	LWIA600140	Hukum Perikatan Islam	2			
LWAN600904	Hukum dan Konflik SDA	2	LWAN600908	Hukum Pengelolaan SDA Kelautan	2	Peminatan Hukum Tata Negara					
			LWAN600909	Hukum Tata Ruang dan Perkotaan	2	LWTN600504	Lembaga Kepresidenan	2	LWTN600502	Sejarah Konstitusi	2
Peminatan Hukum Administrasi Negara						LWTN600505	Lembaga Perwakilan Rakyat	2	LWTN600506	Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN	2
LWAN600603	Diskresi dan Beleidsregel	2	LWAN600609	Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara	2	LWTN600509	Hukum Tata Negara Adat	2	LWTN600510	Partai Politik dalam Perspektif HTN	2
LWAN600608	Hukum Pelayanan Publik	2				LWTN600501	Negara dalam Perspektif Hukum Islam	2			
LWAN600606	Hukum Administrasi Daerah	2				Peminatan Hukum, Masyarakat dan Pembangunan					
Peminatan Praktisi Hukum						LWMP601206	Hukum dan Kesejahteraan Sosial	2	LWMP601207	Kajian Interdisipliner terhadap Hukum yang Hidup	2
LWAC600060	Hukum Acara Peradilan Militer	2	LWAC600062	Kapita Selektta Hukum Acara Perdata	2	LWMP601205	Ekonomi Pembangunan dan Hukum	2	LWMP601209	Perencanaan Pembangunan & Kebijakan Hukum	2
LWAC600061	Penerapan Asas-Asas Hukum Acara	2	LWAC600063	Kapita Selektta Hukum Acara Pidana	2				LWMP601208	Hukum, Keadilan dan Globalisasi	2

SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP			SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP		
			LWAC600064	Hukum Pembuktian	2				LWMP601203	Metode Penelitian Sosiolegal	2
<b>MATA KULIAH PILIHAN NON PEMINATAN</b>						<b>Peminatan Hukum Adat</b>					
LWHD600175	Penulisan Ilmiah	2	LWNP600176	Bahasa Inggris Hukum	2	LWIA600144	Kapita Selekta Masalah Aktual Hukum Adat	2			
LWNP600177	Manusia dan Masyarakat Indonesia	2	LWNP600178	Magang di Luar Negeri	10	<b>Peminatan Hukum Internasional Publik</b>					
LWNP600178	Magang di Luar Negeri	10	LWNP600179	Magang di Dalam Negeri	6	LWIN601105	Hukum Diplomatik	2	LWIN601103	Hukum Organisasi Internasional dan Regional	2
LWNP600179	Magang di Dalam Negeri	6	LWNP600180	Riset	10	LWIN601106	Hukum Lingkungan Internasional	2	LWIN601108	Hukum Humaniter Internasional	2
LWNP600180	Riset	10	LWNP600181	Kegiatan Kemanusiaan/Advokasi	10	LWIN601107	Arbitrase Investasi Internasional	2			
LWNP600181	Kegiatan Kemanusiaan/Advokasi	10	LWNP600182	Wirausaha/Start-up	10	<b>Peminatan Hukum Perdata Internasional</b>					
LWNP600182	Wirausaha/Start-up	10	LWNP600183	Proyek Independen	10	LWIN601005	Status Personal dalam HPI Indonesia	2			
LWNP600183	Proyek Independen	10	LWNP600184	KKN Tematik	6	LWIN601006	Forum yang berwenang dalam HPI	2			
LWNP600184	KKN Tematik	6				LWIN601004	Transaksi Bisnis Internasional	2			

## 2. Program Sarjana Kelas Ekstensi

### Mata Kuliah Wajib Fakultas

SEMESTER 1			SEMESTER 2			SEMESTER 3			SEMESTER 4		
KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
<b>MKWF</b>											
LWHD600001	Ilmu Negara	3	LWTN600008	Asas-Asas Hukum Tata Negara	3	LWAN600010	Asas-Asas Hukum Administrasi Negara	3	LWAC600002	Hukum Acara Perdata	3
LWHD600002	Pengantar Ilmu Hukum	3	LWPE600006	Asas-Asas Hukum Perdata	3	LWAC600003	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	LWET600003	Asas-Asas Hukum Dagang	3
LWHD600003	Pengantar Hukum Indonesia	3	LWIA600007	Asas-Asas Hukum Adat	3	LWPE600001	Hukum Perikatan	3	LWAN600008	Hukum Agraria	3
LWHD600004	Hukum dan Masyarakat	3	LWIA600005	Asas-Asas Hukum Islam	3	LWET600002	Hak Kekayaan Intelektual	2	LWAN600009	Hukum Perburuhan	2
			LWPI600009	Asas-Asas Hukum Pidana	3	LWIN600020	Hukum Internasional Publik	3	LWET600004	Hukum Telematika	2
						LWAC600001	Hukum Acara Pidana	3	LWAN600005	Hukum Lingkungan	2
						LWAC601304	Hukum Acara Peradilan Agama	2	LWPE600009	Hukum Antar Tata Hukum	3
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>Jumlah</b>		<b>18</b>
<b>Jumlah SKS semester 1</b>		<b>12</b>	<b>Jumlah SKS semester 2</b>		<b>15</b>	<b>Jumlah SKS semester 3</b>		<b>18</b>	<b>Jumlah SKS semester 4</b>		<b>18</b>

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8		
KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
<b>MKWF</b>											
LWAC600028	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	LWHD600030	Ilmu Perundang-Undangan	2	LWHD600026	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	LWGB600031	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
									LWGB600032	Hukum dan HAM	2
									LWHD600034	Filsafat Hukum	2

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8			
	MK Peminatan Sesuai Pilihan			MK Peminatan Sesuai Pilihan			MK Sesuai Pilihan			MK Sesuai Pilihan		
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>Jumlah</b>			<b>6</b>
	PLKH* :			PLKH* :			PLKH* :					
LWLK600036	Praktik Hukum Perdata**	3	LWLK600035	Praktik Hukum PTUN	2	LWLK600039	Perancangan Peraturan Negara	2				
LWLK600016	Praktik Peradilan Konstitusi	2	LWLK600041	Penyusunan Kontrak Dagang	2							
			LWLK600040	Pilihan Penyelesaian Sengketa	2							
			LWLK600043	Klinik Hukum	2							
			LWLK600017	Praktik Peradilan Agama	2							
			LWLK600037	Praktik Hukum Pidana**	3							

SEMESTER 9			SEMESTER 10		
KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
<b>MKWF</b>					
			LWTA600044	Tugas Akhir	4
	MK Peminatan Sesuai Pilihan			MK Peminatan Sesuai Pilihan	
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

### Mata Kuliah Wajib Peminatan

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8		
KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
<b>MATA KULIAH WAJIB PEMINATAN</b>											
Peminatan Hukum Perdata											

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8		
LWPE600101	Hukum Orang dan Keluarga Perdata	2	LWPE600104	Hukum Kewarisan Perdata	2						
LWPE600105	Hukum Kebendaan Perdata	2									
<b>Peminatan Hukum Islam</b>											
LWIA600137	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Islam	3	LWIA600136	Hukum Pidana Islam	2						
			LWIA600138	Hukum Ekonomi Islam	2						
<b>Peminatan Hukum Tata Negara</b>											
LWTN600507	Hukum Kelembagaan Negara	2	LWTN600508	Hukum Tata Negara Darurat	2						
LWTN600503	Pemilihan Umum	2									
<b>Peminatan Hukum, Masyarakat &amp; Pembangunan</b>											
LWMP601202	Sosiologi Hukum	2	LWMP601201	Antropologi Hukum	2						
LWMP601204	Hukum dan Gender	3									
<b>Peminatan Hukum Adat</b>											
LWIA600141	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat	2	LWIA600143	Hukum Adat dalam Kegiatan Ekonomi	3						
LWIA600142	Aspek Hukum Publik dalam Hukum Adat	2									
<b>Peminatan Hukum Administrasi Negara</b>											
			LWAN600601	HAN Sektoral	3	LWHD600607	Teori Perundang-undangan	2	LWAN600602	Hukum Antar Wewenang	2
<b>Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan</b>											
			LWAN600605	Hukum Anggaran dan Keuangan Publik	3	LWAN600610	Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah	2			
						LWAN600604	Hukum Pajak	2			
<b>Peminatan Hukum Keuangan Ekonomi</b>											
LWET600147	Hukum Organisasi Perusahaan	3	LWET600148	Hukum Perbankan	2						

SEMESTER 5			SEMESTER 6			SEMESTER 7			SEMESTER 8		
			LWET600149	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2						
<b>Peminatan Hukum Teknologi</b>											
LWET600166	Hak Cipta dan Hak Terkait	2	LWET600168	Keamanan dan Ketahanan Siber	2						
LWET600167	Paten, PVT, DI, DTLST, dan Rahasia Dagang	2									
<b>Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam</b>											
LWAN60090 2	Hukum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	2	LWAN60090 6	Hukum Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan	3						
LWAN60090 5	Kapita Selektif Kasus-kasus Lingkungan	2									
<b>Peminatan Hukum Agraria</b>											
LWAN60070 5	Pengadaan Tanah	3	LWAN60070 6	Perbandingan Hukum Tanah	2						
LWAN60070 1	Reforma Agraria	2									
<b>Peminatan Hukum Perburuhan</b>											
LWAN60080 1	Hukum Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial	3	LWAN60080 2	Hukum tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2						
LWAN60080 3	Hukum tentang Upah dan Jaminan Sosial	2									
<b>Jumlah SKS semester 5</b>			<b>Jumlah SKS semester 6</b>			<b>Jumlah SKS semester 7</b>			<b>Jumlah SKS semester 8</b>		

### Mata Kuliah Pilihan Peminatan dan Non-Peminatan

SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP			SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP		
KODE	MATA KULIAH	SK S	KODE	MATA KULIAH	SK S	KODE	MATA KULIAH	SK S	KODE	MATA KULIAH	SK S
<b>Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan</b>						<b>Peminatan Hukum Ekonomi</b>					
LWAN600 611	Hukum dalam Regulasi dan	2	LWAN600 613	Hukum Pajak Internasional	2	LWET6001 50	Hukum Surat Berharga	2	LWET6001 56	Hukum Persaingan Usaha	2

SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP			SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP		
	Lembaga Keuangan di Indonesia										
LWAN600 612	Hukum Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan	2	LWAN600 614	Hukum Pengadilan Pajak	2	LWET6001 51	Arbitrase	2	LWET6001 57	Hukum Kepailitan	2
			LWAN600 615	Hukum Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan	2	LWET6001 52	Hukum Asuransi	2	LWET6001 58	Hukum Perdagangan Internasional	2
<b>Peminatan Hukum Agraria</b>						LWET6001 53	Analisis Ekonomi Terhadap Hukum	2	LWET6001 59	Hukum Koperasi	2
LWAN600 707	Hak-hak Khusus dalam Pemanfaatan Ruang	2	LWAN600 703	Kondominium dan Permasalahannya	2	LWET6001 54	Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan	2	LWET6001 60	Hukum Pengangkutan	2
LWAN600 704	Tanah sebagai Jaminan Utang	2	LWAN600 702	Pendaftaran Tanah	2	LWET6001 55	Akuntansi untuk Ahli Hukum	2	LWET6001 61	Hukum Perlindungan Konsumen	2
<b>Peminatan Hukum Perburuhan</b>									LWET6001 62	Hukum Jual Beli Perusahaan	2
			LWAN600 804	Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja	2				LWET6001 63	Penulisan Hukum, Pendapat Hukum dan Keterampilan Hukum	2
			LWAN600 805	Hukum tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2				LWET6001 64	Hukum Kesehatan	2
<b>Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam</b>						<b>Peminatan Hukum Teknologi</b>					
LWAN600 903	Hukum Perubahan Iklim	2	LWAN600 907	Hukum Pengelolaan Energi	2	LWET6001 69	Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik	2	LWET6001 70	Perlindungan Privasi dan Data Pribadi	2
LWAN600 904	Hukum dan Konflik SDA	2	LWAN600 908	Hukum Pengelolaan SDA Kelautan	2	LWET6001 73	Merek dan Indikasi Geografis	2	LWET6001 71	Kebendaan Digital dan Transaksi Elektronik	2
			LWAN600 909	Hukum Tata Ruang dan Perkotaan	2	LWET6001 74	Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum	2	LWET6001 72	Hukum Hiburan dan Olahraga	2
<b>Peminatan Hukum Administrasi Negara</b>						<b>Peminatan Hukum Perdata</b>					
LWAN600 603	Diskresi dan Beleidsregel	2	LWAN600 609	Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara	2	LWPE6001 07	Perbuatan Melawan Hukum	2	LWPE6001 06	Hukum Kontrak Kontemporer	2
LWAN600 608	Hukum Pelayanan Publik	2				LWPE6001 02	Perbandingan Hukum Perdata	2	LWPE6001 03	Hukum Jaminan Atas Benda Bergerak	2

SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP			SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP		
LWAN600 606	Hukum Administrasi Daerah	2				<b>Peminatan Hukum Islam</b>					
<b>Peminatan Praktisi Hukum</b>						LWIA6001 39	Hukum Zakat dan Wakaf	2	LWIA6001 41	Kapita Selektta Hukum Islam	2
LWAC6000 60	Hukum Acara Peradilan Militer	2	LWAC6000 62	Kapita Selektta Hukum Acara Perdata	2	LWIA6001 40	Hukum Perikatan Islam	2			
LWAC6000 61	Penerapan Asas- Asas Hukum Acara	2	LWAC6000 63	Kapita Selektta Hukum Acara Pidana	2	<b>Peminatan Hukum Tata Negara</b>					
			LWAC6000 64	Hukum Pembuktian	2	LWTN6005 04	Lembaga Kepresidenan	2	LWTN6005 02	Sejarah Konstitusi	2
<b>MATA KULIAH PILIHAN NON PEMINATAN</b>						LWTN6005 05	Lembaga Perwakilan Rakyat	2	LWTN6005 06	Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN	2
LWHD600 175	Penulisan Ilmiah	2	LWNP6001 76	Bahasa Inggris Hukum	2	LWTN6005 09	Hukum Tata Negara Adat	2	LWTN6005 10	Partai Politik dalam Perspektif HTN	2
LWNP6001 77	Manusia dan Masyarakat Indonesia	2	LWNP6001 78	Magang di Luar Negeri	10	LWNP6001 79	Negara dalam Perspektif Hukum Islam	2			
LWNP6001 78	Magang di Luar Negeri	10	LWNP6001 79	Magang di Dalam Negeri	6	<b>Peminatan Hukum, Masyarakat dan Pembangunan</b>					
LWNP6001 79	Magang di Dalam Negeri	6	LWNP6001 80	Riset	10	LWMP601 206	Hukum dan Kesejahteraan Sosial	2	LWMP601 207	Kajian Interdisipliner terhadap Hukum yang Hidup	2
LWNP6001 80	Riset	10	LWNP6001 81	Kegiatan Kemanusiaan/Advokasi	10	LWMP601 205	Ekonomi Pembangunan dan Hukum	2	LWMP601 209	Perencanaan Pembangunan & Kebijakan Hukum	2
LWNP6001 81	Kegiatan Kemanusiaan/Advo kasi	10	LWNP6001 82	Wirausaha/Start-up	10				LWMP601 208	Hukum, Keadilan dan Globalisasi	2
LWNP6001 82	Wirausaha/Start-up	10	LWNP6001 83	Proyek Independen	10				LWMP601 203	Metode Penelitian Sosiologal	2
LWNP6001 83	Proyek Independen	10	LWNP6001 84	KKN Tematik	6	<b>Peminatan Hukum Adat</b>					
LWNP6001 84	KKN Tematik	6				LWIA6001 44	Kapita Selektta Masalah Aktual Hukum Adat	2			

# Deskripsi Mata Kuliah

- **MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS**

## **Pengembangan Karakter Terintegrasi (UIGE600006)**

Kekuatan dan keutamaan karakter merupakan kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh insan akademik yang dewasa. Lulusan pendidikan tinggi diharapkan memiliki kekuatan dan keutamaan karakter yang mencakup kekuatan kognitif, afektif dan konatif (kehendak). MK Pengembangan Karakter Terintegrasi memfasilitasi mahasiswa untuk dapat memahami dasar-dasar pembentukan karakter dan menguasai dasar-dasar kekuatan kognitif yaitu logika. Lebih jauh lagi, untuk dapat menerapkan kekuatan kognitif dalam menghasilkan perilaku-perilaku yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, difasilitasi juga pembentukan perilaku-perilaku etis yang didasari oleh etika. Untuk dapat mengembangkan dasar kekuatan karakter tersebut, mahasiswa perlu mengenal dirinya sendiri sebagai manusia, baik sebagai individu maupun bagian dalam kelompok sehingga ia dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Dalam kehidupan berkelompok, mahasiswa perlu memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalin hubungan kelompok yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Khususnya sebagai warga negara Indonesia, mahasiswa perlu memahami hakikat kewarganegaraan dan dasar falsafah negara Pancasila agar dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Lulusan Perguruan Tinggi juga diharapkan memiliki kekuatan kognitif dan pemahaman tentang bagaimana kekuatan itu ditampilkan dalam perilaku etis. Oleh karena itu, mata kuliah ini juga memfasilitasi mahasiswa untuk dapat menguasai dasar-dasar kekuatan kognitif (logika kuantitatif atau matematika) dan memahami dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Alam, seperti Bumi dan Sistem Kerja Bumi, Teknologi, Lingkungan dan Kesehatan. Lebih jauh lagi, untuk dapat menerapkan kekuatan kognitif dan kekuatan karakter, atau dengan kata lain memiliki *hard skill* dan *soft skill*, dan dilandasi dengan perilaku yang baik, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, bangsa, dan negara.

## **Pengembangan Karakter Bahasa Inggris (UIGE600003)**

*The Academic English course aims to prepare you to use English in your studies. It will help you to improve your speaking, reading, listening and writing skills in English so that you will be able to use these skills in an academic environment.*

## **Pengembangan Karakter Agama (UIGE600004)**

Mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat berdasarkan ajaran agama. Mata kuliah ini disajikan dengan pendekatan *active learning* dengan materi pembelajarannya meliputi sejarah dan makna agama, pokok-pokok

ajaran agama, agama dan budaya, serta analisis kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

- **MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS**

**Ilmu Negara  
(LWHD600001)**

Mata kuliah ini mempelajari secara komprehensif mengenai hakikat negara pada umumnya, serta masalah ketatanegaraan pada khususnya, dengan cara melakukan kajian historis, sosiologis, yuridis dan filosofis, serta perbandingan teori-teori maupun ideologi-ideologi negara pada umumnya. Materi yang dikaji adalah sifat hakekat negara, pembenaran negara, unsur-unsur negara, konstitusi, alat perlengkapan negara, fungsi negara, dan negara dan hukum.

**Pengantar Ilmu Hukum  
(LWHD600002)**

Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar pengetahuan hukum untuk memahami pengertian, fungsi dasar-dasar ilmu hukum secara umum. Pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah ini antara lain dasar-dasar mengenai disiplin hukum, sistem hukum, tujuan hukum, dogmatik hukum termasuk aspek dan latar belakang kaedah hukum, kaedah hukum dan kaedah-kaedah etika lainnya, perihal kaedah hukum, pengertian-pengertian pokok dalam sistem hukum, penerapan hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, penemuan hukum dan penegakan hukum.

**Pengantar Hukum Indonesia  
(LWHD600003)**

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum yang berlaku pada saat ini (hukum positif). Materi-materi yang akan dipelajari adalah mengenai tata hukum Indonesia; sejarah pluralisme hukum di Indonesia; sistem-sistem hukum (sistem hukum Eropa Kontinental, anglo saxon, hukum adat, dan hukum Islam); ruang lingkup hukum tata negara; hukum administrasi negara; hukum pidana; hukum perdata yang melingkupi hukum kebendaan, hukum perikatan, hukum keluarga, dan hukum waris; hukum acara (pidana, perdata, tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi); hukum internasional yang mengkaji asas-asas hukum internasional, sumber hukum internasional (hukum publik dan hukum perdata), serta subyek hukum dalam hukum internasional.

**Hukum dan Masyarakat  
(LWHD600004)**

Mata kuliah Hukum dan Masyarakat menjelaskan hubungan antara hukum dengan masyarakatnya melalui pendekatan antropologi, sosiologi dan ekonomi. Ketiga pendekatan ilmu sosial tersebut dipergunakan untuk membantu ilmu hukum guna membedah gejala dan kenyataan hukum dalam kehidupan bersama di masyarakat, yang tidak dapat dijelaskan secara utuh dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum semata. Mempelajari hukum dengan memanfaatkan 3 (tiga) pendekatan tersebut sangat penting dalam rangka membantu mahasiswa dalam memahami hukum, tidak

hanya sebagai teks tetapi juga bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat; bagaimana masyarakat membangun hukum, melakukan hukum; bagaimana warga masyarakat mematuhi hukum atau justru melanggarnya. Dengan demikian, setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat secara timbal balik melalui bahan kajian yang disusun secara sistematis dengan menggunakan perspektif antropologi, sosiologi dan ekonomi.

### **Asas-asas Hukum Tata Negara (LWTN600008)**

Mata kuliah ini membahas berbagai topik dalam hukum tata negara. Bidang hukum tata negara yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai pengertian dan sumber hukum tata negara, teori konstitusi, sistem pemerintahan vertikal dan horisontal, hukum kewarganegaraan, partai politik, pemilihan umum, hukum tata negara adat, dan negara dalam perspektif hukum Islam.

### **Asas-asas Hukum Perdata (LWPE600006)**

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang mendasar dan sistematis terhadap hukum keperdataan khususnya pemahaman asas-asas fundamental dalam hukum orang, keluarga, dan waris. Ruang lingkup pembahasan materi perkuliahan terbagi menjadi empat bagian besar yaitu: i) hukum perdata secara umum, meliputi perbedaan hukum privat dan publik, asas-asas hukum perdata, sejarah hukum keperdataan, pembagian hukum perdata di Indonesia, ii) hukum perorangan, iii) hukum keluarga, dan iv) hukum waris perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di samping itu, mahasiswa juga diberikan pemahaman terhadap Balai Harta Peninggalan dan Kantor Catatan Sipil.

### **Asas-asas Hukum Adat (LWIA600007)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan asas-asas dan pengertian dasar Hukum Adat terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat terkait dengan jual-beli tanah, perutangan dan sebagainya; dan, menganalisis permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat sebagai eksekusi dari proses pembangunan dalam hal terjadinya benturan antara aturan-aturan adat sebagai hukum aslinya Bangsa Indonesia dengan aturan-aturan hukum dan kebijakan negara.

### **Asas-asas Hukum Islam (LWIA600005)**

Mata kuliah ini membahas tentang hukum dalam Islam yang meliputi ruang lingkup, tujuan, sumber hukum, dan metode ijtihad dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Islam. Dalam mata kuliah ini juga akan dibahas mengenai asas-asas hukum yang terdapat pada ruang lingkup hukum Islam, antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum perikatan, hukum ekonomi, hukum kewarisan, peradilan, serta kenegaraan.

### **Asas-asas Hukum Pidana (LWPI600009)**

Pembahasan dalam mata kuliah ini mengenai arti dan ruang lingkup hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, tentang tindak pidana, penggolongan tindak pidana, ajaran kausalitas, sifat melawan hukum, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, percobaan tindak pidana, pidana dan pemidanaan, dasar penghapus pidana, dasar peringan dan pemberat pidana, gabungan tindak pidana, penyertaan tindak pidana, serta gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana.

### **Asas-asas Hukum Administrasi Negara (LWAN600010)**

Mata kuliah Hukum Administrasi Negara adalah mata kuliah yang mengkaji berbagai kegiatan administrasi pemerintahan secara menyeluruh. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kegiatan-kegiatan administrasi negara mulai dari kekuasaan, kewenangan, tindakan, keputusan, diskresi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Selain itu, mahasiswa juga dapat menerangkan organ-organ pendukungnya seperti Aparatur Sipil Negara, organisasi administrasi negara dan daerah, instrumen pemerintahan, keuangan publik, pemerintahan daerah, dan pengawasan administrasi negara serta penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

### **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (LWAC600023)**

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan dibahas pula permasalahannya serta penyelesaiannya berdasarkan teori dan konsep serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang hukum tata negara yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait tinjauan umum tentang asas-asas dan aspek-aspek umum hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara pengujian UU terhadap UUD, hukum acara dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, hukum acara pembubaran partai politik, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dari setiap poin tersebut dipraktikkan dalam bentuk peradilan semu.

### **Hukum Perikatan (LWPE600011)**

Mata ajaran ini membahas tentang sistematika dan pola pengaturan buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian perikatan, sumber perikatan, macam-macam perikatan, prestasi dan wanprestasi, keadaan memaksa, ganti rugi, perbuatan melawan hukum dan hapusnya perikatan, persetujuan khusus yang diatur dalam KUHPerdata maupun yang diatur di luar KUHPerdata, meliputi: jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, dan penanggungan.

### **Hak Kekayaan Intelektual (LWET600012)**

Mata kuliah ini mempelajari hukum di bidang hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, merek dan perlindungan indikasi geografis dalam tataran internasional dan nasional.

### **Hukum Internasional Publik (LWIN600020)**

Mata kuliah ini membahas Hukum Internasional Publik. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum internasional dalam suatu masyarakat hukum internasional. Mata kuliah ini membahas pengertian dasar dan masalah pokok sebagai suatu pengantar dalam bidang hukum, sejarah perkembangan pemikiran dan praktik, sumber-sumber hukum internasional, serta hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Aspek-aspek lain yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain subyek hukum, perjanjian internasional, pembentukan negara dalam masyarakat hukum internasional, wilayah negara, yurisdiksi dan tanggung jawab negara.

### **Hukum Acara Pidana (LWAC600021)**

Melalui mata kuliah Hukum Acara Pidana ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis cara penyelesaian kasus pidana berdasarkan hukum acara pidana, menurut UU No. 8 Tahun 1981 dan hukum acara pidana yang diatur dalam undang-undang khusus lainnya. Ruang lingkup pembahasan terdiri dari sistem peradilan pidana, sejarah hukum acara pidana, proses penyelidikan dan penyidikan, proses penuntutan dan pembuatan surat dakwaan, praperadilan, acara pemeriksaan perkara di pengadilan, hak-hak tersangka dan terdakwa, upaya hukum, eksekusi, hakim pengawas dan pengamat.

### **Hukum Acara Perdata (LWAC600022)**

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dari hukum acara perdata dan lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Materi-materi yang akan diajarkan adalah dasar hukum, pengertian, sifat dan asas hukum acara perdata, badan-badan peradilan, Pasal 118 HIR, segi-segi beracara dan empat kemungkinan pada hari sidang pertama, mediasi, surat kuasa, surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, intervensi, *derdenverzet*, pembuktian, putusan, sita jaminan, eksekusi, upaya hukum, *class action*, dan pengadilan niaga.

### **Asas-asas Hukum Dagang (LWET600013)**

Mata kuliah ini akan membahas tentang prinsip hukum, dasar hukum, subjek hukum, dan hubungan hukum yang terjadi dalam dunia perdagangan. Topik bahasan utama mencakup berbagai perjanjian dalam lingkup perusahaan sebagai subjek hukum, berbagai bentuk perusahaan, pedagang perantara, dan surat berharga sebagai salah satu sistem pembayaran. Selain itu, akan dijelaskan pula penerapan ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

dan peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum dan dasar hukum terkait subjek hukum dan hubungan-hubungan hukum dalam hukum dagang, serta menganalisis permasalahan hukum berdasarkan praktik nyata di dunia perdagangan.

### **Hukum Agraria (LWAN600018)**

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum agraria dalam arti yang sempit yaitu seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah (hukum tanah nasional) untuk memahami sistem hukum tanah nasional Indonesia yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan pertanahan lainnya sebagai pelaksanaan UUPA yang berlaku. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum agraria dalam arti luas dan dalam arti sempit hukum tanah lama (sebelum UUPA), macam hak penguasaan atas tanah di Indonesia dan pengaturannya dalam sistem tanah sebelum UUPA, hukum tanah nasional (hukum tanah baru), pembentukan UUPA dan perkembangan hukum tanah di Indonesia, hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional, *landreform* di Indonesia, pengadaan tanah untuk pembangunan, pendaftaran tanah, tanah sebagai jaminan hutang, dan rumah susun di Indonesia.

### **Hukum Perburuhan (LWAN600019)**

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian-pengertian dasar, hakekat, sifat, sumber hukum perburuhan; paradigma hukum perburuhan ditinjau dari ilmu kaedah, ilmu pengertian dan filsafat hukum; pembahasan topik khusus mengenai pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja, hubungan kerja dan hubungan perburuhan, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.

### **Ilmu Perundang-undangan (LWHD600030)**

Mata kuliah Ilmu Perundang-undangan adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman ilmu pengetahuan perundang-undangan yang dimulai dari sejarah, latar belakang, dan teori mengenai norma hukum negara, implementasi sistem norma hukum dan perundang-undangan di Indonesia, hirarki norma hukum di Indonesia, Lembaga Negara serta Lembaga Pemerintah dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan hingga jenis, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **Hukum Telematika (LWET600014)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengkritisi kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan sistem hukum nasional terkait dengan perkembangan konvergensi teknologi informasi, media dan komunikasi (Telematika). Ruang lingkup bahan kajian adalah mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang saling beririsan satu sama lain. Perkuliahan ini dilakukan dengan diskusi interaktif dengan analisis kritis (*Critical Legal Thinking*) untuk memahami, menerapkan, menganalisis dan melakukan kritisi

terhadap bagaimana kaedah hukum yang dirumuskan diterapkan secara kontekstual dalam kasus-kasus yang telah terjadi. Mahasiswa juga ditugaskan untuk mencermati inkonsistensi kaedah hukum melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan penggunaan sistem kodifikasi, kompilasi dan informasi hukum elektronik (dapat diakses melalui halaman eclis.id). Melalui tugas mandiri dan tugas kelompok kecil untuk melakukan analisa hukum terkait dengan penerapan hukum yang sesuai dengan dinamika informasi dan komunikasi yang terjadi.

### **Hukum Lingkungan (LWAN600015)**

Mata kuliah Hukum Lingkungan adalah mata kuliah yang mengkaji kegiatan-kegiatan lingkungan dan sumber daya alam. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis prinsip hukum lingkungan, instrumen penataan, penyelesaian sengketa, serta berbagai jalur dan instrumen penegakan hukum untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup di Indonesia

### **Hukum Antar Tata Hukum (LWPE600029)**

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pluralisme sistem hukum di Indonesia dan di dunia internasional, sejarah perkembangan, dasar hukum, prinsip dan teori umum dalam Hukum Antar Tata Hukum (HATAH). Penekanan dalam mata kuliah ini adalah HATAH dalam sistem hukum di Indonesia. Lebih lanjut, dalam mata kuliah ini juga diajarkan cara mengidentifikasi hubungan hukum yang bersifat HATAH, sekaligus menentukan hukum yang berlaku dalam hubungan hukum yang bersifat HATAH tersebut.

### **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (LWAC600028)**

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah mata kuliah yang mengkaji asas dan karakteristik hukum acara umumnya serta asas dan karakteristik Hukum Acara PTUN, selain membandingkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN, juga mengulas tindak pemerintah beserta keputusannya. Kemudian membahas upaya administratif, kepentingan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terkait pengertian dasar UU PTUN yang dilanjutkan dengan proses administrasi, proses justisiil, upaya hukum dan eksekusi dan diakhiri dengan masalah kepentingan umum dan maladministrasi.

### **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (LWHD600026)**

Mata kuliah ini membahas materi mengenai kerangka dasar dalam penelitian hukum, penyusunan proposal penelitian, identifikasi ilmu hukum dalam penyusunan proposal penelitian dan pedoman penelitian, sistematika dan materi muatan proposal penelitian hukum, etika penelitian dan struktur organisasi penelitian, teknis penulisan karya tulis ilmiah, teknis penulisan catatan kaki dan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah, pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, penelusuran sumber hukum untuk penelitian hukum, karakteristik data primer, pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden, pengumpulan data primer melalui pengamatan, metode analisis data dalam penelitian, bahasa dalam penelitian hukum, penyusunan abstrak

dan timbangan buku serta teknik membaca cepat, kerangka ilmu hukum dalam penelitian hukum.

### **Hukum Acara Peradilan Agama (LWAC601304)**

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara di bidang hukum Islam yang terjadi di antara para pihak yang berperkara dalam masyarakat. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta hukum acara pada pengadilan di lingkungan peradilan agama memiliki aturan khusus yang dapat berbeda dengan pengadilan di lingkungan peradilan umum, terutama dengan bertambah kewenangannya untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah dan adanya Peradilan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini antara lain mengenai latar belakang Hukum Acara Peradilan Agama; landasan filosofis, yuridis dan sosiologis peradilan agama di Indonesia; kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan di lingkungan peradilan agama, termasuk Peradilan Syariat Islam; penerapan hukum acara/peradilan Islam; proses berperkara pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali; hukum acara ekonomi syariah; hukum acara jinayah; dan produk hukum hakim di pengadilan.

### **Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum (LWGB600031)**

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian tanggung jawab secara umum, macam-macam bentuk tanggung jawab, pengertian profesi, macam-macam profesi hukum, pengertian kode etik dan kode perilaku, pengaturan profesi hukum dan karakteristik profesi hukum, pengaturan kode etik dan kode perilaku. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tindakan-tindakan pengemban profesi hukum berdasarkan kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan.

### **Hukum dan Hak Asasi Manusia (LWGB600032)**

Mata kuliah ini membahas instrumen-instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional serta mengkaji hubungan antara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Filsafat Hukum (LWHD600034)**

Tujuan perkuliahan ini adalah untuk melatih serta merangsang mahasiswa agar dapat melaksanakan tugas Filsafat Hukum, yaitu bersikap kritis baik terhadap hukum positif, praktek hukum, dogmatik hukum, maupun teori hukum; dan membekali mereka dengan sikap konstruktif sehingga mampu melihat unsur-unsur idiel maupun riil dari Disiplin Hukum secara menyeluruh dan utuh, tidak terfragmentasi. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat memahami hakekat serta aneka eksistensi hukum, legitimasi hukum, tujuan hukum, dan nilai-nilai antinomis yang melandasi gejala-gejala maupun kenyataan-kenyataan hukum. Mahasiswa juga diperkenalkan dan didorong untuk memahami dan mampu merumuskan “*State of the Art*” (termasuk perkembangan teoritis; dan pemilihan landasan teoritis beserta metodologinya), ke dalam karya tulis ilmiah dari perspektif transendental/filsafat hukum, sehingga dihasilkannya “*Novelty*”, sebagai bagian studi ilmiah Disiplin Hukum. Untuk mewujudkan tujuan konstruktif dan

mengasah sikap kritis tersebut mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada pemikiran filsafat hukum pada beraneka komunitas di berbagai kawasan dari beraneka kurun waktu, tetapi juga diajak untuk memahami pemikiran disiplin hukum asli yang lahir dan berkembang di tanah-air; ditantang untuk mempertanyakan teori-teori tentang hukum dan penerapannya; dan dilatih menganalisis struktur konseptual dari beraneka sistem hukum. Pemahaman terhadap filsafat hukum dicapai dengan pendekatan historis dan/atau tematis. Pendekatan ini diterapkan melalui penalaran sistematis sehingga dapat menangkap refleksi kenyataan-kenyataan hukum dan memahami hubungan teoritikal terrefleksi dari gejala-gejala hukum, sebagai bekal untuk pemahaman dan perumusan argumentasi yuridis. Mahasiswa juga dilatih untuk mampu melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor non-yuridis, sebagai “*actual factors in legal materials*” yang bukan saja berperan dalam proses dan perkembangan hukum, tetapi juga bermanfaat sebagai sarana untuk pemahaman lebih mendalam terhadap Disiplin Hukum melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin dan/atau transdisiplin. Mahasiswa juga dilatih agar dapat menerapkan kajian perspektif transendental/filsafat hukum ke dalam karya tulis ilmiah; mahasiswa dilatih agar dapat merumuskan “*State of the Art*” dari karya tulis ilmiah nya (terutama perkembangan teori-teori, pemilihan landasan teoritis dan metodologinya), sehingga akhirnya dapat merumuskan preskripsi solusi permasalahan hukumnya.

#### **Tugas Akhir (LWTA600044)**

Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang harus disusun oleh setiap mahasiswa dengan topik penelitian sesuai dengan peminatan yang dipilihnya. Dalam proses penulisannya, mahasiswa akan dibimbing oleh satu atau dua dosen pembimbing tugas akhir. Isi tulisan tugas akhir ini membahas suatu permasalahan penelitian yang dijawab dengan menggunakan metode penelitian, analisis yang didasarkan pada ilmu hukum yang telah dipelajarinya, jawaban permasalahan, dan saran. Dalam menyusun Tugas Akhir, mahasiswa menggunakan Pedoman Karya Ilmiah FHUI.

### **• MATA KULIAH PENDIDIKAN LATIHAN & KEMAHIRAN HUKUM**

#### **Praktik Hukum Pidana (LWLK600037)**

Mata kuliah ini meliputi pembahasan tahapan-tahapan hukum acara pidana dengan pendekatan “bagaimana dalam prakteknya”. Oleh karena itu materi terdiri dari pembahasan topik-topik sesuai tahapan proses peradilan pidana dan pelatihan penyusunan dan atau penulisan, serta simulasi bagaimana praktek peradilan hukum pidana. Topik-topik yang dibahas dalam tahapan itu ialah mengenai pra-peradilan, proses penyelesaian perkara pidana tahap pra-ajudiksi, dakwaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dakwaan, eksepsi, tanggapan atau eksepsi (replik), dan duplik. Kemudian pelatihan untuk penyusunan dan penulisan dakwaan, eksepsi, *requisitor*, *pledooi*, dan putusan. Terakhir, praktek peradilan semu dilakukan di kelas *Moot Court* dimana masing-masing mahasiswa akan memainkan peran sesuai fungsi-fungsi dalam peradilan pidana.

### **Praktik Diplomasi (LWLK600038)**

Mata kuliah Praktek Diplomasi memberikan pemahaman praktis mengenai diplomasi dan hukum internasional secara umum. Dalam mata kuliah ini, kompetensi difokuskan pada keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh sarjana hukum dalam menerapkan hukum inter-nasional, yang dibagi menjadi empat rumpun besar; diplomasi dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), beracara di *International Court of Justice*, beracara pada forum arbitrase internasional, dan melakukan penyusunan kontrak internasional yang memiliki dimensi publik.

### **Praktik Hukum Perdata (LWLK600036)**

Dalam mata kuliah ini akan dilakukan dalam bentuk pembahasan materi, pelatihan penyusunan dan penulisan, serta simulasi praktek peradilan bidang hukum perdata. Materi yang akan diberikan adalah mengenai pembahasan terhadap penyelesaian kasus perdata, acara pemeriksaan perkara perdata, mediasi, gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan, dan eksekusi. Pelatihan diberikan untuk penyusunan dan penulisan surat kuasa, surat gugatan, jawaban dari gugatan, kesimpulan dan penyerahan kesimpulan, putusan, memori banding, dan memori kasasi, serta presentasi tentang pembuktian dari hasil observasi di lapangan. Praktek peradilan semu dilakukan di kelas *Moot Court* yang masing-masing mahasiswa akan memainkan peran seperti di pengadilan.

### **Praktik Peradilan Konstitusi (LWLK600016)**

Mata kuliah ini membahas berbagai perkembangan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peradilan konstitusi di Indonesia, serta menyelesaikan permasalahan tersebut berdasar pada teori dan konsep serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang hukum tata negara yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai peradilan konstitusi terkait tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi, bentuk dan kedudukan peradilan konstitusi, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, kewenangan dalam memutus sengketa kewenangan antarlembaga di dalam negara, pembubaran partai politik, perselisihan pemilihan umum, dan kewenangan dalam proses pemakzulan. Dari setiap poin tersebut dibahas masalah-masalah aktual yang sedang terjadi atau berkembang.

### **Perancangan Peraturan Negara (LWLK600039)**

Mata kuliah ini akan membahas pengertian, ruang lingkup, dan landasan hukum perancangan peraturan perundang-undangan; program legislasi nasional; proses pembentukan Undang-Undang; pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden; kerangka atau bentuk luar peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan dan kerangka peraturan perundang-undangan; penjelasan, pengundangan, daya ikat, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan; pencabutan dan perubahan peraturan perundang-undangan; penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan pengesahan perjanjian internasional; Bahasa Indonesia dalam

perundang-undangan; asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; naskah akademik dalam pembentukan rancangan undang-undang.

### **Praktik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (LWLK600035)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan kaidah-kaidah dasar dalam hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan tata usaha negara. Berbagai ruang lingkup itu didiskusikan dalam kelompok kecil di antaranya materi muatan suatu sengketa tata usaha negara, serta untuk kelompok besar akan juga diberikan dengan metode *project based learning*. Penerapan dalam kerangka praktik hukum peradilan tata usaha negara meliputi mekanisme hukum acara serta tata alur peradilan tata usaha negara dan membuat berbagai macam dokumen peradilan tata usaha negara.

### **Penyusunan Kontrak Dagang (LWLK600041)**

Memberikan pengertian-pengertian dasar dan substantif dari transaksi bisnis atau dagang yang terjadi di Indonesia, formatnya serta ketentuan-ketentuan di dalamnya. Mahasiswa dipacu untuk berfikir kritis dan mempunyai daya analisis yang baik untuk memecah persoalan-persoalan teoritis dan praktis yang masih aktual yang dilontarkan dalam perkuliahan.

### **Pilihan Penyelesaian Sengketa (LWLK600040)**

Mata kuliah ini membahas berbagai upaya penyelesaian sengketa secara damai yaitu dengan melakukan negosiasi dan mediasi, menjelaskan berbagai cara dan teori yang mendukung penyelesaian sengketa dengan negosiasi dan mediasi, membahas mengenai analisis konflik dan *convening* sebagai cara menggali informasi mengenai latar belakang terjadinya konflik. Selain itu dalam mata kuliah juga dibahas mengenai upaya mediasi yang dikaitkan dengan proses pengadilan sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang sekarang dilakukan di Indonesia. Dalam kuliah ini juga mahasiswa akan diajarkan mengenai berbagai pilihan penyelesaian sengketa dan strategi penggunaannya, skill yang diperlukan dalam perundingan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan perundingan (negosiasi) dengan mendasarkan pada kepentingan, serta mampu menjadi penengah (mediator) yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka.

### **Klinik Hukum (LWLK600043)**

Kemahiran dan keterampilan dalam menerapkan hukum merupakan suatu kualifikasi yang harus dimiliki seorang sarjana hukum. Untuk memberikan sarana latihan kemahiran dan keterampilan tersebut, mata kuliah Klinik Hukum memfasilitasi mahasiswa untuk mempraktikkan teori hukum melalui penanganan kasus di lapangan dengan didampingi oleh pengajar dan praktisi hukum yang ahli di bidangnya. Mahasiswa akan dipaparkan kepada kasus-kasus yang nyata terjadi untuk meningkatkan kepekaan dan pemikiran kritis dalam memberikan solusi hukum bagi masyarakat. Melalui mata kuliah Klinik Hukum, mahasiswa akan ikut serta di dalam persidangan sebagai asisten pengacara, mempersiapkan dokumen-dokumen hukum,

membuat opini hukum, memberikan konsultasi dan pendampingan hukum, serta penyuluhan hukum. Mata kuliah ini memiliki 8 sub bagian yang lebih khusus, yaitu Klinik Hukum Pidana, Klinik Hukum Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan Anak, Klinik Hukum Lingkungan, Klinik Anti Korupsi, Klinik Mediasi, Klinik *Street Law* (Penyuluhan Hukum), Klinik *Legislative Drafting* (Perancangan Peraturan), dan Klinik Perlindungan Konsumen.

### **Praktik Peradilan Agama (LWLK600017)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan kaidah-kaidah dasar dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Agama. Berbagai ruang lingkup itu didiskusikan dalam kelompok kecil melalui *small group discussion* di antaranya materi muatan suatu sengketa dalam peradilan agama, serta untuk kelompok besar akan juga diberikan dengan metode *project based learning*. Penerapan dalam kerangka praktik hukum peradilan agama meliputi mekanisme hukum acara serta tata alur peradilan Agama dan membuat berbagai macam dokumen dalam peradilan agama.

## **• MATA KULIAH PEMINATAN**

### **1. Peminatan Praktisi Hukum**

#### **Hukum Acara Peradilan Militer (LWAC600060)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami kaidah-kaidah dasar terkait kedudukan, prosedur beracara dan tahapan-tahapan proses penyelesaian perkara di peradilan militer, serta memahami hubungan peradilan umum dan peradilan militer serta kedudukan oditurat militer. Berbagai ruang lingkup itu didiskusikan dalam kelompok kecil melalui *small group discussion* di antaranya dalam menguraikan unsur pidana dalam kasus nyata, serta untuk kelompok besar akan juga diberikan dengan metode *project based learning*. Penerapan dalam kerangka praktik hukum peradilan militer meliputi mekanisme hukum acara serta tata cara pembuktian dalam peradilan militer serta berbagai dokumen dalam peradilan militer.

#### **Penerapan Asas-asas Hukum Acara (LWAC600061)**

Asas merupakan suatu konsepsi filosofis yang mendasari pembentukan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Asas akan memberikan dasar yang kuat bagi suatu pengaturan hukum untuk mencapai tujuan pembentukannya, sehingga dapat diartikan bahwa asas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Undang-Undang. Meski demikian, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menentukan kedudukan asas dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut tradisi eropa kontinental, hanya memasukkan sebagian kecil dari asas hukum ke dalam undang-undang atau ketentuan beracara, namun tetap memberlakukannya sepanjang subjek pengaturannya berkaitan dengan asas tersebut. Di sisi lain, sebagai pengaruh dari tradisi *common law system*,

yang memiliki pendekatan *case law*, memiliki yang konsekuensi untuk menempatkan norma atau asas secara *expresive verbis* dalam suatu perundang-undangan sehingga bagi sebagian orang pendekatan ini menjadi amat penting. Penerapan asas hukum acara yang baik adalah hal penting harus selalu dilakukan oleh seluruh pencari keadilan agar dapat memperoleh atau mempertahankan hak/kepentingannya. Seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia peradilan, tidak terkecuali hakim, harus memiliki pemahaman yang baik atau minimal cukup terkait asas-asas hukum acara dan penerapannya sehingga apa yang menjadi tujuan diciptakannya hukum yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Bagi Indonesia yang menganut tradisi eropa kontinental, sebenarnya banyak asas yang melingkupi ketentuan beracara namun tidak tercantum di dalam ketentuan tersebut. Ketidapahaman atas konstruksi tradisi eropa kontinental menyebabkan pandangan multi tafsir atau ambigu terhadap ketentuan beracaranya. Padahal apabila asas-asas yang berlaku pada setiap pasal ketentuan hukum tersebut dipahami dengan baik, maka penerapannya akan lebih jelas dan dan gamblang. Maka dari itu, tujuan mata kuliah Penerapan Asas-Asas Hukum Acara adalah untuk menjelaskan asas apa saja yang berlaku dalam hukum acara agar setiap orang dapat memperoleh pengertian terkait asas hukum acara secara tuntas tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam ketentuannya saja. Pemahaman yang tepat dan menyeluruh sangat diperlukan guna menghindari kesalahan dalam menerapkan ketentuan hukum acara, mengingat hukum acara bersifat *rigid/kaku*.

Hukum acara dalam konteks Indonesia, secara historis tidak dipahami hanya sekedar berasal dari satu ketentuan kitab undang-undang acara yang dibuat secara umum atau khusus saja. Sebagai perbandingan, pada masa kolonial hukum acara diatur dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR), *Reglement Buiten Geweisten* (RBg), dan *Reglement van Veroordening* (RV), namun juga harus memahami ketentuan *Algemene Bepalingen* (AB) dan *Reglement Ordonantie* (RO). Keberlakuan suatu asas kerap beririsan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum antar tata hukum (*intergentil recht*), yang bersifat lintas tata hukum dan mempengaruhi hukum acara. Beberapa contoh mekanisme hukum acara yang berkembang saat ini, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, transfer terpidana (*Transfer Sentenced Person*), transfer proses penuntutan (*Transfer Prosiding Person*) prosiding, menjadi bagian dari hukum acara pidana yang dipengaruhi oleh hukum antar tata hukum. Keterkaitan antara tata hukum ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dalam mata kuliah ini. Selain menjelaskan asas yang berlaku, mata kuliah ini juga akan membedah putusan-putusan pengadilan untuk melihat dan menilai bagaimana asas tersebut diterapkan.

### **Kapita Selekta Hukum Acara Perdata (LWAC600062)**

Mata kuliah ini menerangkan proses peradilan acara perdata di Indonesia, perkembangan hukum acara peradilan hubungan industrial, perbandingan peradilan hubungan industrial dengan negara lain, hukum acara sengketa HAKI di pengadilan, analisa pelaksanaan eksekusi putusan peradilan niaga, hukum acara sengketa konsumen, hukum acara sengketa informasi, upaya hukum dan pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa konsumen dan sengketa informasi, perkembangan pembuktian dalam proses peradilan perdata, penyelesaian sengketa malpraktek medis dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Sengketa Persaingan Usaha.

### **Kapita Selekta Hukum Acara Pidana (LWAC600063)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mengetahui perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dan negara lain. Topik yang dibahas adalah perkembangan hukum acara pidana khususnya materi hukum acara yang berkembang saat ini, Perkembangan penyelesaian perkara pidana, *mutual legal assistance* (MLA), *transfer of sentenced person* (TSP), TCP, ekstradisi, penyidikan dan penuntutan dalam perampasan aset *in rem* dan *in personam*, *dominus litis*, *deponering* dan DPA, hukum acara dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), hukum acara dalam perspektif kejahatan lintas negara dan HAM, serta hukum acara dalam sistem peradilan anak.

### **Hukum Pembuktian (LWAC600064)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mengetahui perkembangan hukum pembuktian dari segi Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, serta Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia dan negara lain. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan membandingkan perkembangan tersebut. Topik yang dibahas adalah perkembangan Hukum Pembuktian, khususnya materi praktik pembuktian yang berkembang saat ini. Dalam Hukum Acara Pidana misalnya perkembangan sistim dan beban pembuktian serta alat bukti di berbagai negara baik *civil law* maupun *common law*, perkembangan alat bukti terutama bukti digital, bukti forensik, *justice collaborator*, saksi mahkota, akte otentik elektronik, dan lain-lain.

## **2. Peminatan Hukum Perdata**

### **Hukum Orang dan Keluarga Perdata (LWPE600101)**

Mata Kuliah ini membahas dan menganalisis mengenai orang sebagai subjek hukum dan bedanya dengan badan hukum. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai lahir dan berakhirnya orang sebagai subjek hukum serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan seseorang, pembahasan mengenai catatan sipil, domisili dan keadaan tak hadir. Selain hukum orang, mata kuliah ini juga membahas dan menganalisis mengenai hukum keluarga menurut KUHPerdata dan UU No 1 Tahun 1974. Pembahasan meliputi asas-asas perkawinan, syarat dan akibat perkawinan, termasuk didalamnya permasalahan anak dan harta perkawinan serta memberikan pemahaman tentang perkawinan campuran, dan adopsi.

### **Hukum Kebendaan Perdata (LWPE600105)**

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis hukum kebendaan baik yang pengaturannya terdapat dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun perubahannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata seperti UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU No 4 Tahun 1996 Tentang Jaminan Hak Tanggungan dan UU No 42 Tahun 1999

Tentang Fidusia. Pembahasan akan diawali dengan pengertian benda dan hukum benda, perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak, arti penting perbedaan benda, ciri-ciri hak kebendaan, jenis-jenis hak kebendaan, cara memperoleh dan peralihan haknya, serta fungsi benda sebagai jaminan hutang.

### **Hukum Kewarisan Perdata (LWPE600104)**

Mata kuliah ini akan membahas dan menganalisis mengenai pengertian hukum waris, pengaturan hukum waris, subjek hukum waris, syarat pewarisan, prinsip hukum waris dan cara mewaris baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan wasiat. Pewarisan berdasarkan undang-undang didasarkan pada penggolongan ahli waris. Sedangkan pewarisan berdasarkan wasiat akan dibahas mengenai bentuk-bentuk wasiat dan pembatasan terhadap wasiat. Pembahasan mengenai hukum waris perdata diakhiri dengan pembahasan mengenai harta peninggalan tidak terurus.

### **Perbuatan Melawan Hukum (LWPE600107)**

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis definisi, unsur, perkembangan teori, dan perbandingan perbuatan melawan hukum pada sistem hukum civil law dan tort pada common law. Ruang lingkup pembahasan materi perkuliahan terbagi menjadi empat bagian besar yaitu: perkembangan teori perbuatan melawan hukum; perbandingan perbuatan melawan hukum dan tort law: perkembangan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dalam undang-undang; dan perbuatan melawan hukum dalam putusan pengadilan.

### **Perbandingan Hukum Perdata (LWPE600102)**

Mata Kuliah ini membahas dan mengkaji perbandingan hukum perdata. Pembahasan diawali pengertian dan objek perbandingan hukum, hakekat dan peranan perbandingan hukum serta proses melakukan perbandingan. Pembahasan dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum meliputi perbandingan system hukum di dunia khususnya sistim hukum civil law dan common law. Setelah melakukan perbandingan hukum umum dilanjutkan dengan perbandingan hukum khusus meliputi perbandingan hukum orang dan keluarga, perbandingan hukum benda, perbandingan hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum.

### **Hukum Kontrak Kontemporer (LWPE600106)**

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis secara sistimatis unsur-unsur dan karakteristik berbagai macam jenis perjanjian yang berkembang saat ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut merupakan jenis perjanjian yang tidak terdapat pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun perjanjian dimaksud seperti perjanjian waralaba, perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, perjanjian distributor, anjak piutang, Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, kontrak konstruksi, kontrak migas dan lain-lain. Mata kuliah ini juga akan membahas dan membandingkan antara jenis perjanjian yang satu dengan yang lain, misalnya membandingkan antara perjanjian keagenan dan distributor serta perjanjian waralaba dengan perjanjian lisensi.

### **Hukum Jaminan Atas Benda Bergerak (LWPE600103)**

Pada mata kuliah ini akan dibahas dan dianalisis mengenai fungsi benda sebagai jaminan, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep jaminan perorangan dan jaminan kebendaan serta perbedaan diantara keduanya. Terhadap jaminan perorangan akan dibahas dan dianalisis pengertian pengertian jaminan perorangan, ciri-cirinya, saat lahirnya serta akibat hukumnya terhadap harta benda debitur maupun terhadap hak-hak kreditur berhadapan dengan kreditur lainnya. Terhadap jaminan kebendaan akan dibahas mengenai ciri-ciri jaminan kebendaan, mekanisme penjaminan sampai dengan eksekusi dan hapusnya jaminan benda bergerak. Adapun Jaminan Benda Bergerak yang akan dibahas dan dianalisis meliputi gadai, fidusia, resi gudang, termasuk hak istimewa (priviledge) dan hak retentie.

## **3. Peminatan Hukum Islam**

### **Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Islam (LWIA600137)**

Keberlakuan hukum Islam di Indonesia utamanya adalah di bidang keluarga atau perkawinan dan kewarisan karena perkawinan dan kematian seseorang merupakan peristiwa penting yang terjadi pada hampir setiap individu yang memiliki aturan khusus dan memberikan akibat hukum baik kepada individu itu sendiri, pihak lain, maupun harta benda. Pada mata kuliah ini akan dibahas bagaimana aturan di dalam Islam dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, hak dan kewajiban antara suami dan isteri, putusnya perkawinan, dan ketentuan peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Pembahasan materi diperkaya dengan kasus-kasus nyata tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, serta hubungan di antara ketiga hal tersebut. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan kasus keluarga dan kewarisan dengan memberikan pendapat hukum yang didasarkan pada analisis hukum yang bersumber pada hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan pandangan ahli hukum.

### **Hukum Pidana Islam (LWIA600136)**

Capain pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisa kedudukan hukum pidana di Indonesia dalam perspektif Islam, serta perkembangan diskursus pidana Islam. Pada perkuliahan ini dibahas terkait dengan pengertian hukum pidana Islam, tujuan pidana dan pemidanaan, ruang lingkup pidana Islam, kedudukan pidana Islam di Indoensia, dan penerapan pidana Islam di Aceh.

### **Hukum Ekonomi Islam (LWIA600138)**

Mata kuliah Hukum Ekonomi Islam adalah mata kuliah yang mengkaji kegiatan-kegiatan ekonomi Islam baik yang bersifat komersil maupun sosial. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi Islam di Indonesia dengan didasarkan pada konsep dan ketentuan dalam syariah, ijtihad, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

beserta proses penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang melingkupi kegiatan keuangan bank dan non-bank, filantropi, dan penyelesaian sengketa.

### **Hukum Zakat dan Wakaf (LWIA600139)**

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan konsep tentang sistem ekonomi Islam; prinsip, filsafat, nilai dasar, dan nilai instrumental ekonomi Islam; filantropi dalam Islam; pengertian, prinsip, tujuan, dan dasar hukum dan hukum zakat; syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya; *muzakki* dan *mustahiq*; harta yang wajib dikeluarkan zakatnya; zakat, pajak dan negara; permasalahan zakat di Indonesia; zakat dan keadilan sosial; Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ); pengertian, tujuan, dasar hukum, dan hukum wakaf; rukun dan syarat wakaf; wakaf dan kesejahteraan sosial; sejarah dan permasalahan perwakafan di Indonesia; konsepsi fikih wakaf di Indonesia; Undang-Undang Tentang Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.

### **Hukum Perikatan Islam (LWIA600140)**

Kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi secara global semakin berkembang dengan penerapan ekonomi Islam, seperti adanya perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, dan sebagainya. Dalam kegiatan ini, perjanjian atau perikatan para pihak menjadi landasan utama dalam bertransaksi. Di Indonesia, ketentuan perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melingkupi dan dapat berbeda dengan ketentuan perikatan yang diatur dalam hukum Islam. Selain itu, perikatan dalam kegiatan bisnis atau ekonomi Islam telah diatur pada sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara, beserta peraturan turunannya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Oleh karena itu, mata kuliah Hukum Perikatan Islam ini akan membekali mahasiswa untuk memahami dan menguasai jenis-jenis perikatan di dalam Islam, sehingga mahasiswa dapat menentukan perikatan yang tepat untuk digunakan dalam suatu transaksi dan dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi di antara para pihak yang bertransaksi.

### **Kapita Selektika Hukum Islam (LWIA600145)**

Mata kuliah ini membahas berbagai perkembangan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum Islam secara yuridis dan praktis di Indonesia, serta menyelesaikan permasalahan tersebut berdasar pada sumber hukum Islam (al Qur'an, Hadis, dan ijtihad) dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bidang hukum Islam yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah hukum Islam dalam sistem hukum nasional, hukum kekeluargaan, hukum kewarisan, hukum pidana, hukum publik, hukum ekonomi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dari setiap bidang hukum tersebut, pembahasan dilakukan terhadap masalah-masalah aktual yang sedang terjadi atau berkembang.

## 4. Peminatan Hukum Adat

### Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat (LWIA600141)

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan asas-asas dan pengertian dasar Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat terhadap permasalahan hukum mengenai perkawinan dan kewarisan; dan, menganalisis masalah-masalah hukum yang timbul sebagai akibat perkembangan dan/atau perubahan hukum adat di bidang kekeluargaan dan kewarisan. Ruang-ruang lingkup didiskusikan dengan metode pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok (*small group discussion*) dan kuliah interaktif (*interactive lectures*) mencakupi macam-macam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat dan pengaruhnya pada hukum kekeluargaan dan kewarisan; macam-macam bentuk perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hubungan suami-istri, orang tua-anak dan harta benda perkawinan; masalah subjek dan objek hukum waris, macam-macam sistem kewarisan, garis pokok keutamaan, garis pokok penggantian dan jurai; masalah hibah dan hibah wasiat; dan, perkembangan dan/atau perubahan hukum adat di bidang kekeluargaan dan kewarisan.

### Aspek Hukum Publik dalam Hukum Adat (LWIA600142)

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengenali dan menguraikan berbagai asas, pengertian, teori dan metode terkait aspek-aspek hukum publik yang ditemukan dalam penyelidikan-penyelidikan ilmiah mengenai Hukum Adat baik klasik maupun kontemporer; dan, menganalisis berbagai masalah dan permasalahan hukum yang berkenaan dengan aspek-aspek hukum publik dalam Hukum Adat dengan menggunakan berbagai asas, pengertian, teori dan metode itu. Ruang-ruang lingkup didiskusikan dengan metode pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok (*small group discussion*) dan kuliah interaktif (*interactive lectures*) mencakupi (1) aspek-aspek hukum publik dalam kajian hukum adat klasik dan kontemporer, (2) hukum adat sebagai sistem hukum, (3) jejak-jejak kajian hukum adat dalam pembangunan hukum publik nasional, yakni: (i) hukum tata negara, khususnya UUD 1945, (ii) hukum administrasi negara, khususnya (a) hukum tanah, dan, (b) hukum pemerintahan daerah; (iii) hukum pidana; dan, (iv) penyelenggaraan kekuasaan kehakiman; serta, (4) hubungan saling pengaruh-mempengaruhi antara perkembangan kajian dan praktik hukum adat dengan hukum nasional Indonesia.

### Hukum Adat dalam Kegiatan Ekonomi (LWIA600143)

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengenali dan menguraikan berbagai asas, pengertian, teori dan metode Hukum Adat yang terkait maupun berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, yang ditemukan dalam penyelidikan-penyelidikan ilmiah mengenai Hukum Adat baik klasik maupun kontemporer; dan, menganalisis berbagai masalah dan permasalahan hukum yang timbul dari padanya dengan menggunakan berbagai asas, pengertian, teori dan metode itu. Ruang-ruang lingkup didiskusikan dengan metode pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok (*small group discussion*) dan kuliah interaktif (*interactive lectures*) mencakupi (1) asas-asas hukum adat dalam kegiatan ekonomi: (i) asas kekeluargaan, (ii) asas gotong-royong, (iii) asas keselarasan; (2) sistem perekonomian

adat; (3) konsep kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) atas (i) tanah, (ii) hutan, dan, (iii) laut; (4) hubungan hukum adat dan pasal 33 UUD 1945; (5) corak perekonomian KMHA yang berupa: (i) pertanian/perkebunan, (ii) kelautan dan perikanan, (iii) kehutanan, (iv) pertambangan, (vi) pariwisata/ kerajinan; dan, (6) penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi KMHA.

### **Kapita Selektta Masalah Aktual Hukum Adat (LWIA600144)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengenali dan menguraikan berbagai asas, pengertian, teori dan metode Hukum Adat—yang ditemukan dalam penyelidikan-penyelidikan ilmiah mengenai Hukum Adat baik klasik maupun kontemporer—yang terkait maupun berkenaan dengan perkembangan-perkembangan termutakhir (paling aktual) di seputar permasalahan “adat” dan “hukum adat”; dan, menganalisis berbagai masalah dan permasalahan hukum yang timbul dari padanya dengan menggunakan berbagai asas, pengertian, teori dan metode itu. Ruang-lingkup dalam mata kuliah ini, karenanya, akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan termutakhir itu, sehingga dapat berubah-ubah dari satu semester ke semester lainnya. Ruang-ruang lingkup didiskusikan dengan metode pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok (*small group discussion*) dan kuliah interaktif (*interactive lectures*) mencakupi, misalnya, (1) masyarakat hukum adat (MHA) sebagai pengampu pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, dalam kasus Masyarakat Adat Krayan, Kalimantan Utara dan ekspor Padi Adan; (2) masyarakat adat pesisir dan hak ulayat laut, dalam kasus penangkapan ikan pari manta oleh masyarakat adat Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur; (3) penetapan hutan adat, dalam kasus masyarakat adat Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan; (4) penambangan panas bumi, di mana kasus-kasus di Indonesia dibandingkan dengan pengalaman Selandia Baru, Filipina, Norwegia, dan sebagainya; (5) perkebunan kelapa sawit, dalam kasus masyarakat adat Moi, Sorong vs PT. Mega Mustika Plantation; (6) adat *merariq* di antara masyarakat Sasak, Nusa Tenggara Barat dan masalah perkawinan anak.

## **5. Peminatan Hukum Ekonomi**

### **Hukum Organisasi Perusahaan (LWET600147)**

Mata kuliah ini menyajikan pengantar terhadap hukum tentang organisasi perusahaan. Materi mata kuliah ini meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bentuk, cara pendirian, struktur organisasi, pengelolaan, pengawasan, dan pembubaran perusahaan. Mata kuliah ini tidak hanya mempelajari badan usaha, seperti persekutuan dan perseroan, tetapi juga implikasi dari badan usaha tersebut berkaitan dengan pertanggung jawaban dan perjanjian, kewajiban, dan perlindungan terhadap pengurus dan pemegang saham/sekutu/investor; juga dipelajari tentang persekutuan tidak berbadan hukum. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan beberapa bentuk organisasi perusahaan yang modern, pemahaman tentang ketentuan permodalan, dan ketentuan hukum berkaitan dengan para pihak yang terlibat di dalam pengelolaan organisasi tersebut. Capaian pembelajaran: mahasiswa akan memiliki pemahaman tentang ketentuan hukum yang

berkaitan dengan beberapa bentuk organisasi perusahaan yang modern, pemahaman tentang ketentuan permodalan, dan ketentuan hukum berkaitan dengan para pihak yang terlibat di dalam pengelolaan organisasi perusahaan, dan mahasiswa mampu menganalisa permasalahan tersebut melalui pendekatan hukum tentang kegiatan ekonomi.

### **Hukum Perbankan (LWET600148)**

Mata kuliah ini membahas sistem keuangan dan sistem perbankan di Indonesia; pengertian, jenis-jenis, syarat pendirian dan bentuk hukum bank; aspek hukum kelembagaan dan usaha perbankan syariah; fungsi dan peranan bank sentral, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); hubungan hukum bank dengan nasabah; likuidasi bank; aspek-aspek perkreditan dan pengikatan jaminan; jasa-jasa perbankan, transaksi perdagangan internasional dan domestik; kerahasiaan dalam kegiatan perbankan; tindak pidana di bidang perbankan. Dengan mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan, usaha perbankan dan jasa keuangan lainnya dalam konteks pelayanan jasa jasa di bidang perbankan, keuangan atau pembayaran lainnya serta dapat menganalisis kasus-kasus perbankan sehingga mampu mengimplementasikan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip perbankan dalam kasus-kasus yang selalu berkembang.

### **Hukum Investasi dan Pasar Modal (LWET600149)**

Saat ini perkembangan investasi dan pasar modal sangat pesat baik di tingkat nasional maupun global. Kebutuhan tenaga-tenaga ahli di bidang hukum investasi dan pasar sangat dibutuhkan pasar. Kehadiran mata kuliah ini ingin menjawab kebutuhan pasar yang membutuhkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang hukum investasi dan pasar modal.

### **Hukum Surat Berharga (LWET600150)**

Mata kuliah ini menjelaskan dan mengkaji surat-surat berharga sebagai alat atau instrumen pembayaran dan fasilitas atau instrument kredit. Diskusi meliputi wesel, cek, surat sanggup, dan surat berharga komersial. Secara garis besar, surat berharga terdiri dari surat janji atau kesanggupan untuk melakukan pembayaran dan surat perintah untuk melaksanakan pembayaran. Diskusi dibuka dengan pembahasan mengenai sejarah latar belakang lahirnya surat berharga. Dasar hukum dari keberadaan surat berharga, menjadi pijakan dalam diskusi. Diskusi pun mencakup perkembangan dan permasalahan hukum terkait surat berharga, termasuk diskusi mengenai para pihak yang terlibat di dalam penerbitan, peralihan, dan pembayaran surat berharga dengan pendekatan hukum perdata, hukum ekonomi, dan hukum surat berharga. Sumber hukum utama dari surat berharga di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ketentuan terkait yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia dengan otoritasnya di bidang sistem pembayaran.

### **Arbitrase (LWET600151)**

Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi pengertian, dasar hukum, kelebihan dan kekurangan arbitrase dibandingkan dengan jenis media penyelesaian sengketa lainnya --khususnya litigasi--, hal-hal atau sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, perjanjian arbitrase (fungsi, bentuk, sifat dan akibat hukum), arbiter (persyaratan-persyaratan menjadi arbiter, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian arbiter, tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban arbiter, hak dan tuntutan ingkar), prosedur arbitrase (*acara/rule of procedure*, waktu, tempat dan bahasa, turut serta dan penggabungan, putusan sela), putusan arbitrase (dasar, syarat dan sifat putusan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase), pelaksanaan putusan arbitrase (nasional dan internasional, eksekutur (sifat, tolok ukur menerima atau menolak permohonan eksekutur dan upaya hukumnya) dan prosedur eksekusi.

### **Hukum Asuransi (LWET600152)**

Mata kuliah ini mempelajari hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan kegiatan usaha di bidang perasuransian. Pokok bahasannya adalah perkembangan industri asuransi, perjanjian perasuransian, asas *insurable interest* dan *utmost good faith*, asas indemnitas dan *proximate cause*, asas subrogasi dan kontribusi, polis asuransi, jenis dan lingkup kegiatan usaha perasuransian, penutupan obyek asuransi, perizinan, dan pemasaran produk baru, pengawasan usaha perasuransian, premi dan penyelesaian klaim, serta penyelesaian sengketa asuransi.

### **Analisa Ekonomi Terhadap Hukum (LWET600153)**

Mata kuliah ini mempelajari penggunaan teori-teori di bidang ekonomi dalam menganalisis permasalahan hukum, yaitu analisis ekonomi terhadap *property law*, Hak Kekayaan Intelektual, hukum kontrak, *tort law*, hukum persaingan usaha, hukum kepailitan, hukum pidana, regulasi, hukum perlindungan konsumen, serta analisis ekonomi sebagai aliran pemikiran.

### **Aspek-aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan (LWET600154)**

Mata kuliah ini membahas berbagai permasalahan hukum dalam teori dan praktek yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan/keuangan, yang meliputi aspek hukum perdata, hukum ekonomi, hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum pasar modal, restrukturisasi/kepailitan perusahaan. Melalui mata kuliah ini, akan dibahas pula bagaimana teori hukum dasar yang dipelajari pada semester-semester awal dapat diaplikasikan dalam praktek transaksi pembiayaan/keuangan. Mata kuliah Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan dalam rangka menjawab kebutuhan mahasiswa untuk mendapat pembekalan dalam praktik transaksi keuangan dari aspek hukum yang saat ini selalu dinamis. Banyak hal-hal baru dan perubahan-perubahan yang berlangsung sangat cepat dalam dunia bisnis. Bahkan hukum dan peraturan sering berjalan di belakang. Sehingga beberapa hal yang tengah terjadi di tengah masyarakat tapi belum diatur secara baik, topik-topik tersebut didiskusikan oleh mahasiswa dan dosen pengampu, sehingga mahasiswa terbiasa dengan hal-hal yang baru dan mempersiapkannya dari sisi aturan terkini.

### **Akuntansi Untuk Ahli Hukum (LWET600155)**

Mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar pembuatan laporan keuangan dan alasan-alasan diperlukannya laporan keuangan serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu mahasiswa juga akan dilatih cara pelaporan keuangan dari suatu perusahaan sebagai skill tambahan sebagai seorang praktisi hukum.

### **Hukum Persaingan Usaha (LWET600156)**

Mata kuliah ini menguraikan dan membahas mengenai dasar-dasar hukum persaingan usaha, seperti latar belakang dan tujuan pemberlakuan hukum persaingan usaha, prinsip umum dalam hukum persaingan usaha, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, penegakkan hukum persaingan usaha, serta kegiatan-kegiatan yang dikecualikan oleh hukum persaingan usaha.

### **Hukum Kepailitan (LWET600157)**

Mata kuliah ini mempelajari hukum kepailitan yang membahas tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, pailit, *actio pauliana*, *cross border insolvency* dan hukum acara kepailitan.

### **Hukum Perdagangan Internasional (LWET600158)**

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai teori-teori hukum perdagangan internasional serta globalisasi perdagangan yang melibatkan investasi lintas negara. Dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional yang melibatkan para pihak yang melewati batas negara, maka dalam perkuliahan ini dibahas mengenai World Trade Organization (WTO) yang merupakan lembaga internasional yang melingkupi negara-negara yang melakukan perdagangan internasional baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh warga negaranya; perjanjian-perjanjian perdagangan internasional meliputi: perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral, GATT/WTO, GATs & TRIPs, TRIMs. Aplikasi dari teori dan perjanjian-perjanjian tersebut maka dibahas dalam kasus yang terjadi dalam ranah perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia serta penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Mechanism*.

### **Hukum Koperasi (LWET600159)**

Menjelaskan dan memberikan komentar kritis baik lisan maupun tertulis mengenai: sejarah koperasi dan gerakan koperasi di Indonesia dan dunia; gagasan koperasi ditinjau dari sudut pandang ideologi-ideologi ekonomi utama di dunia, yakni kapitalisme dan sosialisme; sistem perekonomian nasional sebagai implikasi dari keberlakuan Pasal 33 UUD 1945; berbagai konsep teori dan filosofi koperasi yang digagas para pakar seraya memperbandingkannya; sejarah regulasi koperasi sepanjang masa di Indonesia seraya membandingkannya baik dengan regulasi terkini maupun regulasi koperasi di luar negeri; posisi kajian koperasi dalam pembedaan ilmu hukum serta pengertian, asas dan cabang ilmu hukum apa saja yang terkait dengannya; permasalahan kebadanhukuman koperasi sebagai perkumpulan orang; membuat rancangan dokumen-dokumen hukum terkait pembentukan badan hukum koperasi,

seperti akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; memberikan penjelasan baik lisan maupun tertulis untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang terkait dengan: (a) organ dan pengelolaan koperasi, (b) keanggotaan koperasi, (c) permodalan koperasi, (d) keuangan koperasi, (e) pembinaan koperasi.

### **Hukum Pengangkutan (LWET600160)**

Mata kuliah ini mempelajari pengertian, dasar hukum, asas dan syarat-syarat sahnya atau terbentuknya perjanjian pengangkutan; hak dan kewajiban para pihak; alat pengangkut, barang muatan, dan biaya pengangkutan; konosemen atau *bill of lading* (b/l); penyelenggaraan pengangkutan; penyerahan barang muatan (objek pengangkutan); pengangkutan carter (*charter party*); pengangkutan multimoda; aspek asuransi dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengangkutan; aspek HPI dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengangkutan, klaim laut; multimoda transport.

### **Hukum Perlindungan Konsumen (LWET600161)**

Mahasiswa pada mata kuliah ini akan mempelajari secara komprehensif aspek hukum dan perkembangan terkini terkait perlindungan konsumen dimulai dari pemahaman terhadap sejarah perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen; Undang-Undang Perlindungan Konsumen; pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen; hak dan kewajiban para pihak; tanggung jawab masing-masing pihak; praktek transaksi dan niaga negatif pelaku usaha; klausula baku; penyelesaian sengketa dan litigasi; mekanisme sanksi dan regulasi lain serta profesi yang terkait perlindungan konsumen. Ruang lingkup bahan kajian adalah mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen.

### **Hukum Jual Beli Perusahaan (LWET600162)**

Mata kuliah ini mendiskusikan transaksi jual beli yang dilakukan perusahaan yang pada umumnya berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Pembahasan akan difokuskan kepada hak dan kewajiban yang muncul karena transaksi jual beli tersebut khususnya terkait kewajiban pembayaran (*payment method*) dengan menggunakan *Letter of Credit* (LC) yang mengacu kepada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 600* (UCP 600) dan kewajiban penyerahan barang (*delivery of goods*) yang mengacu kepada *International Commercial and Term* (INCOTERMS) 2000. Mengingat barang dalam transaksi jual beli harus diangkut melintasi batas negara, akan dibahas pula aspek hukum pengangkutan. Pembahasan juga mencakup aspek penyelesaian sengketa dalam jual beli (internasional) melalui arbitrase. Mata kuliah ini bermanfaat pula sebagai pengantar untuk lebih mendalami aspek-aspek hukum perdagangan internasional.

### **Penulisan Hukum, Pendapat Hukum, dan Keterampilan Hukum (LWET600163)**

Penelusuran literatur dan penulisan hukum merupakan bagian-bagian yang penting dari langkah-langkah dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, pokok bahasan dalam mata kuliah ini tidak akan dibatasi pada metode penelusuran literatur dan metode

penulisan hukum saja, akan tetapi juga metode pengumpulan bahan hukum primer dan langkah-langkah awal dalam penelitian hukum.

### **Hukum Kesehatan (LWET600164)**

Menjelaskan pengertian-pengertian dalam hukum kesehatan, prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan bidang pemeliharaan kesehatan (*health care*); termasuk ketentuan dan teori hukum mengenai tanggung jawab para tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dari segi etika profesi maupun segi hukum, serta penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat di bidang kedokteran.

## **6. Peminatan Hukum Teknologi**

### **Hak Cipta dan Hak Terkait (LWET600166)**

Secara garis besar, materi dalam perkuliahan ini terdiri dari tiga bagian besar pembahasan. Bagian pertama pembahasan adalah aspek hukum hak cipta, yang meliputi materi tentang pengertian dasar dari ciptaan dan karakteristik dari tiap-tiap ciptaan, sistem perlindungan hukum hak cipta, hak moral, hak ekonomi, hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta. Bagian kedua pembahasan, adalah aspek hukum hak terkait, yang meliputi materi tentang perbedaan mendasar hak terkait dengan hak cipta, dan hak eksklusif produser fonogram, pelaku pertunjukan, dan lembaga penyiaran. Bagian ketiga pembahasan adalah aspek hukum yang terkait dengan hak cipta dan hak terkait, yang meliputi materi pengalihan hak eksklusif, lisensi, lembaga manajemen kolektif, sengketa dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

### **Paten, PVT, DI, DTLST, dan Rahasia Dagang (LWET600167)**

Materi yang disampaikan pada kuliah ini adalah konsep perlindungan paten; sejarah konsep hukum paten dan perjanjian internasional tentang paten, pemahaman dasar mengenai invensi sebagai obyek paten, invensi yang dapat dan tidak dapat diberi paten; pemahaman dasar syarat paten: *novelty*, *inventive step*, *industrial applicability*; pemahaman dasar terkait deskripsi paten, klaim, permohonan paten dan sistem pendaftaran paten Indonesia pemahaman dasar terkait komersialisasi paten: lisensi, lisensi wajib, pengalihan hak, penggunaan paten oleh pemerintah, dan valuasi paten; pemahaman dasar terkait penegakan hukum paten: litigasi paten dan ADR; pemahaman dasar UU PVT Indonesia: obyek, subyek PVT; pemahaman dasar syarat BUSS; pemahaman dasar terkait konsep rahasia dagang; pemahaman dasar tentang obyek rahasia dagang (*confidential information*), subyek rahasia dagang dan '*obligation of confidence*'; pemahaman dasar terkait konsep perlindungan, obyek dan subyek (pendesain dan pemegang hak desain) desain industri, ruang lingkup hak desain industri dan syarat 'kebaruan'; pemahaman dasar terkait konsep perlindungan, obyek dan subyek DTLST, dan ruang lingkup hak DTLST.

### **Keamanan dan Ketahanan Siber (LWET600168)**

Mahasiswa akan mempelajari tentang ciri-ciri dan dampak dari insiden dan/atau serangan siber, upaya dalam merespon, menanggulangi, dan/atau memulihkan sistem siber, serta berbagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh para pemangku kepentingan terkait. Mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan menganalisis risiko hukum, serta menindaklanjuti dampak dari insiden dan/atau serangan siber dari sisi hukum. Mahasiswa tidak hanya akan mempelajari aspek di bidang ilmu hukum, tetapi juga akan mempelajari beberapa aspek di bidang teknis komputer, bidang kriminologi, serta bidang hubungan internasional. Untuk mempermudah mahasiswa, dalam perkuliahan ini telah dirancang suatu sesi di mana para ahli di bidang non-hukum akan mendemonstrasikan atau mensimulasikan insiden dan/atau serangan siber yang akan dilakukan di ruangan multi-guna komputer, serta akan dilakukan suatu sesi latihan peran terkait penyelesaian potensi konflik di tingkat internasional yang dikenal dengan istilah *table-top-exercise*.

### **Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (LWET600169)**

Materi dalam perkuliahan ini membahas dua bagian besar pembahasan. Bagian pertama pembahasan adalah untuk mengidentifikasi problem hukum terkait kompleksitas data dan penyelenggaraan sistem elektronik eksisting, kemudian dilanjutkan dengan membahas aspek hukum terkait kewajiban pelayanan publik dan tanggung jawab administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan sistem elektronik secara aman, andal, dan bertanggung jawab. Bagian kedua pembahasan adalah mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan pada sistem hukum nasional, regional, maupun internasional khususnya terkait dengan obyek hukum dan hubungan hukum dalam masyarakat informasi

### **Merek dan Indikasi Geografis (LWET600173)**

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan kaidah hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan pada sistem hukum nasional, regional maupun internasional khususnya terkait dengan merek dan indikasi geografis. Secara garis besar, materi dalam perkuliahan ini terdiri dari dua bagian besar pembahasan. Bagian pertama pembahasan adalah aspek hukum merek, yang meliputi materi tentang konsep dasar merek (pengertian, fungsi, kekuatan daya pembeda), permohonan merek, hingga penyelesaian sengketa merek. Bagian kedua pembahasan, adalah aspek hukum industri geografis, yang meliputi materi tentang konsep, sejarah serta pengaturan internasional maupun regional terkait indikasi geografis, prosedur pendaftaran, hingga proses penegakan hukum indikasi geografis.

### **Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum (LWET600174)**

Mata kuliah Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum adalah mata kuliah yang memperkenalkan mahasiswa kepada berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Selain mengetahui substansi hukum tersebut, mahasiswa juga akan diajarkan mengenai metode penelusuran dan perbandingan hukum yang penting dan relevan bagi

penulisan hukum mahasiswa. Penyusunan mata kuliah ini terbagi atas kawasan-kawasan hukum yang relevan dalam konteks globalisasi saat ini. Beberapa kawasan yang dipilih sebagai pembelajaran adalah hukum Amerika Serikat, Eropa (Uni Eropa), Asia Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.

### **Perlindungan Privasi dan Data Pribadi (LWET600170)**

Mahasiswa pada mata kuliah ini akan mempelajari secara komprehensif aspek hukum dan perkembangan perlindungan privasi dan data pribadi, dimulai dari pemahaman terhadap istilah yang digunakan; pemahaman terhadap hak dan kewajiban subjek data; prinsip-prinsip perlindungan data pribadi; perumusan kebijakan serta tindakan untuk melindungi data pribadi; penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi kaitan perlindungan data dengan perkembangan ekonomi digital dan sosial media. Ruang lingkup bahan kajian adalah mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan privasi dan data pribadi.

### **Kebendaan Digital dan Transaksi Elektronik (LWET600171)**

Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan kaidah hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan pada sistem hukum nasional, regional maupun internasional khususnya terkait dengan obyek hukum dan hubungan hukum dalam masyarakat informasi. Secara garis besar, materi dalam perkuliahan ini terdiri dari dua bagian besar pembahasan. Bagian pertama pembahasan adalah Aspek-aspek hukum kebendaan yang menjadi obyek transaksi elektronik. Mulai obyek kebendaan yang berbasis atom (benda konvensional), kekayaan intelektual, sampai kebendaan yang berbasis bit, yaitu benda elektronik, digital, dan virtual. Pembahasan diperkaya dengan dinamika konsep kebendaan yang terjadi pada masyarakat dari masa ke masa. Bagian kedua pembahasan, adalah aspek perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*). Fokus pembelajaran bagian ini, mempelajari aspek-aspek hukum, teknis, dan bisnis pada perdagangan elektronik. Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman, pengalaman bagaimana konsep dan penggunaan tanda tangan digital serta aspek-aspek hukumnya, pemahaman mengenai teknologi *blockchain* dan pemanfaatannya dalam dunia bisnis. Serta pemahaman keautentikan terhadap benda digital dan transaksi elektronik serta bagaimana peralihan kepemilikan kebendaan benda digital yang tercatat dalam *Electronic transferable record*.

### **Hukum Hiburan dan Olahraga (LWET600172)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengkritisi kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan sistem hukum nasional terkait dengan perkembangan hukum hiburan dan olahraga. Ruang lingkup bahan kajian ialah mencakup semua aspek hukum yang saling berkaitan dengan perkembangan serta dinamika hukum hiburan dan olahraga (*entertainment and sport law*) di Indonesia.

## **7. Peminatan Hukum Pidana**

### **Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP (LWPI600402)**

Mata kuliah ini membahas beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, khususnya yang sering terjadi di masyarakat, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana terhadap kehormatan, dan tindak pidana terhadap kemerdekaan. Pembahasan difokuskan pada unsur masing-masing tindak pidana serta perbedaannya satu dengan yang lainnya.

### **Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana (LWPI600403)**

Mata kuliah ini membahas penerapan ajaran-ajaran umum hukum pidana yang diatur di dalam peraturan umum (Buku I) KUHP, pendapat para sarjana (doktrin), dan teori-teori mengenai ajaran-ajaran umum hukum pidana pada kasus-kasus tindak pidana. Melalui mata kuliah ini juga akan ditelaah bagaimana jaksa dan hakim menerapkan asas-asas hukum pidana dalam perkara yang ditangani.

### **Hukum Sanksi Ditinjau dari Hukum Pidana (LWPI600405)**

Hukum Sanksi pada dasarnya merupakan pengetahuan tentang latar belakang pemikiran tentang penjatuhan sanksi pidana, perkembangan tentang sanksi pidana dan perkembangan sistem penjatuhannya. Mata kuliah ini pada dasarnya berakar dari pengetahuan tentang penologi atau ilmu tentang penghukuman yang menjadi salah satu bagian dari ilmu pengetahuan dalam lingkup hukum pidana. Dalam mata kuliah ini akan dipelajari tentang pengertian sanksi pidana, perbedaan sanksi pidana dengan sanksi lainnya, justifikasi penjatuhan sanksi pidana, sejarah perkembangan berbagai jenis sanksi yang diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan terutama dalam Pasal 10 KUHP dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LWPI600401)**

Mata kuliah ini membahas tentang tindak pidana korupsi, mulai dari gambaran umum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perkembangan dunia internasional sampai dengan modus operandinya. Termasuk juga bahasan dalam mata kuliah ini adalah tindak pidana yang disamakan atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

### **Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana (LWPI600407)**

Mata kuliah ini membahas mengenai lembaga Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana. Pada materi percobaan akan dibahas mengenai pengertian, dasar hukum, syarat-syarat pemidanaan, serta jenis dan teori terkait percobaan. Selanjutnya materi Penyertaan pada Tindak Pidana, akan membahas mengenai pengertian, jenis penyertaan beserta dasar hukum dan perbedaan dari masing-masing jenis tersebut. Selain itu, untuk pertanggungjawaban pidana masing-masing peserta akan dibahas syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagian akhir dari mata kuliah ini akan

mendiskusikan mengenai Gabungan Tindak Pidana yang diawali dengan sistem pemidanaan, pengertian, dasar hukum dan jenis Gabungan Tindak Pidana beserta pemidanaan dalam hal terjadi Gabungan Tindak Pidana.

### **Kriminologi untuk Ahli Hukum (LWPI600408)**

Mata kuliah ini mengetengahkan berbagai pengetahuan menyangkut kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Dalam mata kuliah ini dipelajari sejarah lahirnya kriminologi dan faktor-faktor pendorongnya. Di bagian awal juga dipelajari pengertian kriminologi, urgensinya, serta kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya, sebagai landasan sebelum mengkaji teori kriminologi, dibahas mengenai beberapa pendekatan manusia dalam menghadapi gejala kejahatan yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai mazhab dan penggolongan teori dalam kriminologi. Mata kuliah ini juga membahas secara mendetail mengenai beberapa teori kriminologi baik dari perspektif biologis-psikologis, sosiologis, maupun pendekatan lainnya.

### **Hukum Pidana dan Perlindungan Anak (LWPI600410)**

Maraknya kasus-kasus yang melibatkan anak dalam tindak pidana membawa keprihatinan tersendiri bagi para pemelajar hukum pidana, baik ketika anak menjadi pihak yang berhadapan dengan hukum maupun tatkala berkonflik dengan hukum. Anak yang karena keadaan fisik dan psikisnya yang masih mudah menjadi pribadi yang rentan. Dalam kasus faktual, anak-nak dapat menjadi korban, saksi, bahkan pelaku sehingga harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa maka mata kuliah ini menjadi penting untuk membekali para calon sarjana hukum agar memiliki kompetensi dalam memahami dan menghadapi keadaan khusus anak dalam menjalani profesinya di kemudian hari dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

### **Kapita Selektta Hukum Pidana (LWPI600406)**

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai perkembangan dalam hukum pidana, khususnya menyangkut tindak pidana di luar KUHP (selain tindak pidana korupsi) berikut kekhususannya, dibandingkan dengan hukum pidana umum di dalam KUHP (dan KUHP), yaitu ketentuan terkait perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana ekonomi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana penyelundupan dan perdagangan orang, dan penghinaan yang diatur dalam UU ITE.

### **Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (LWPI600404)**

Dalam mata kuliah ini akan dikaji prinsip dan aplikasi ilmu kedokteran forensik dan medikolegal serta mendemonstrasikan kerjasama lintas profesi, khususnya dengan profesi kedokteran. Mata kuliah ini akan mendukung sistem pembuktian pidana yang menyangkut manusia, baik sebagai korban atau pelaku delik pidana, baik hidup maupun mati. Bantuan ekspertis/keahlian kedokteran dalam mata kuliah ini merupakan kontribusi berupa bukti ilmiah yang wajib dikenali ahli hukum. Materi

bahasannya adalah pengantar ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, *visum et repertum* dan surat keterangan medik, kesaksian ahli, prosedur medikolegal, identifikasi, tanatologi, psikiatri forensik dan aplikasinya, traumatologi forensik, asfiksia, kejahatan seks, aborsi, pembunuhan anak sendiri, kematian wajar yang tak diharapkan, toksikologi forensik, laboratorium forensik praktis, dan kapita selekta.

### **Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset (LWPI600411)**

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan mereka dari hasil kejahatan, agar terlihat harta kekayaan yang dimilikinya merupakan kekayaan yang sah dan legal secara hukum. Cara itu dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pemindahan harta kekayaannya ke luar negeri, memasukkan ke lembaga keuangan atau menggunakannya dengan melakukan transaksi jual beli yang sah secara hukum. Atas hal tersebut Indonesia telah membentengi diri dengan berbagai aturan perundang-undangan yang mencegah maraknya tindak pencucian uang, terutama melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Mata kuliah ini penting untuk membekali para calon sarjana hukum agar memiliki kompetensi dalam memahami dan menentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dalam mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang, penelusuran dan pemulihan aset. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis kasus tindak pidana pencucian serta proses pemulihan aset hasil kejahatan. (C4) (A4)

Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah metode perkuliahan yang befokus pada mahasiswa (*student centered active learning*). Metode utama pembelajaran menggunakan *flipped classroom*. Mahasiswa diminta terlebih dahulu untuk belajar mandiri dengan menonton video dan/atau membaca literatur yang telah disediakan oleh dosen sebelum pleno pada pertemuan berikutnya. Pada saat sesi perkuliahan, mahasiswa diharuskan sudah memiliki informasi awal terkait materi perkuliahan dan akan didiskusikan bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya dan dosen.

Seluruh pembelajaran akan dilaksanakan secara sinkronus ataupun asinkronus dengan tetap memastikan keaktifan dan keterlibatan mahasiswa pada setiap perkuliahan. Perkuliahan diberikan dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia.

### **Viktimologi untuk Ahli Hukum Pidana (LWPI600412)**

Mata kuliah ini selain membahas tentang viktimologi sebagai pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang ahli hukum. Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, viktimisasi (perbuatan/tindak pidana yang dapat menimbulkan korban), serta perlindungan yang diberikan bagi mereka. Dalam perkuliahan ini akan dijelaskan tentang sejarah dari viktimologi sebagai reaksi atas berkembangnya kriminologi, beberapa teori tentang korban menurut doktrin, berbagai jenis korban yang ada, relevansi viktimologi dengan pemberian ganti kerugian, kompensasi dan/atau restitusi serta rehabilitasi maupun reparasi sebagai upaya untuk melindungi korban dan/atau keluarganya serta mekanisme pemberian perlindungannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. Peminatan Hukum Tata Negara**

### **Hukum Kelembagaan Negara (LWTN600507)**

Mata kuliah ini membahas mengenai kelembagaan negara di Indonesia dan dibahas pula berbagai perkembangan hukumnya serta diselesaikan permasalahannya berdasarkan teori, konsep serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang hukum tata negara terkait hukum kelembagaan negara yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai lembaga negara utama dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial, serta lembaga negara utama lainnya dan lembaga negara penunjang.

### **Pemilihan Umum (LWTN600503)**

Mata kuliah ini membahas mengenai perkembangan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum di Indonesia melalui pendekatan hukum tata negara, serta menyelesaikan permasalahan tersebut berdasar pada teori dan konsep serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan Pemilu dalam mata kuliah ini meliputi, sejarah, sistem, berbagai badan penyelenggara pemilu, dan sistem penegakan hukum pemilu. Dari setiap poin tersebut dibahas masalah-masalah aktual yang sedang terjadi atau berkembang.

### **Hukum Tata Negara Darurat (LWTN600508)**

Mata kuliah ini membahas berbagai topik dalam Hukum Tata Negara Darurat. Bidang Hukum Tata Negara Darurat yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai pengertian dasar Hukum Tata Negara Darurat, mendeklarasikan, mengakhiri, dan memperbarui keadaan darurat, batasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat, akibat hukum dari keadaan darurat, *checks and balances* dalam HTN Darurat, perbandingan HTN Darurat di berbagai negara, aparatur pelaksana kekuasaan darurat yang berlaku di Indonesia.

### **Lembaga Kepresidenan (LWTN600504)**

Mata kuliah ini membahas tentang Lembaga Kepresidenan di Indonesia dan dibahas pula berbagai perkembangan hukumnya serta diselesaikan permasalahannya berdasarkan teori, konsep serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang hukum tata negara terkait lembaga kepresidenan yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai sistem pemerintahan, pola pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, bentuk-bentuk kekuasaan, sistem pemberhentian, dan hubungan lembaga kepresidenan dengan lembaga negara lainnya.

### **Lembaga Perwakilan Rakyat (LWTN600505)**

Mata kuliah ini membahas berbagai perkembangan permasalahan hukum yang berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, serta menyelesaikan permasalahan tersebut berdasar pada teori dan konsep serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang hukum tata negara yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai lembaga perwakilan rakyat terkait kedudukan, struktur, metode

pengisian jabatan dan pemberhentian, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban. Dari setiap poin tersebut dibahas masalah-masalah aktual yang sedang terjadi atau berkembang.

### **Hukum Tata Negara Adat (LWTN600509)**

Mata kuliah ini membahas berbagai topik dalam hukum tata negara adat, yaitu proses tata kelola masyarakat adat, yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut atau hidup secara turun-temurun dan telah diterima sebagai norma-norma yang bersifat mengikat dan dianggap dapat menciptakan keteraturan hidup bersama di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dengan kata lain, materi atau substansi yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan persolan tata kelola masyarakat adat yang sudah diterima dan dilaksanakan sebagai sistem hukum yang mengikat, baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi anggota masyarakat yang bertugas menjalankan tata kelola tersebut. Tata kelola yang demikian, pada saat ini, pada tataran negara, sesungguhnya paralel dengan apa yang dikenal sebagai hukum tata negara. Adapun objek studi yang diangkat dalam mata kuliah ini adalah hukum tata negara adat yang masih berlaku saat ini dan yang berlaku pada kerajaan-kerajaan yang masih hidup pada saat Indonesia merdeka (17 Agustus 1945) yang menjadi inspirasi bagi pembentukan naskah asli konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Namun, mengingat jumlah masyarakat hukum adat yang sangat banyak di seluruh Indonesia,<sup>1</sup> tentunya tidak mungkin untuk membahas semuanya hanya dalam waktu satu semester selama mata kuliah ini disajikan. Demikian pula halnya dengan objek studi yang diangkat untuk studi perbandingan dengan negara lain. Untuk itu, dipilih hanya beberapa saja yang dinilai dapat mewakili kelompok masyarakat hukum adat dengan jumlah anggota yang sangat besar dibanding dengan yang lainnya, serta telah ada bahan-bahan kepustakaan tentang masyarakat hukum adat tersebut yang dapat dipelajari secara normatif.

Pokok-pokok pembahasan yang dipelajari dalam mata kuliah Hukum Tata Negara Adat ini adalah: (1) tujuan pembelajaran hukum tata negara adat dan pengenalan topik-topik bahasan dalam perkuliahan; (2) pokok-pokok hukum adat; (3) teori dan konsep hukum tata negara adat; (4) kontribusi tata negara adat dalam pembentukan UUD 1945, (5) tata kelola wilayah dan masyarakat hukum adat yang meliputi: kelembagaan adat (a. struktur organisasi pemerintahan adat, b. macam lembaga adat, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga adat, dan c. hubungan antar lembaga-lembaga adat), dan jabatan adat (a. macam jabatan adat, b. metode pengisian jabatan adat dan mekanisme pemberhentian pemegang jabatan adat; c. kedudukan, hak dan kewajiban dari masing-masing jabatan adat, hubungan antar jabatan adat); (6) peradilan adat yang meliputi; a. kelembagaan peradilan adat dan b. jabatan dalam peradilan adat; serta (7) perbandingan hukum tata negara adat di beberapa negara.

---

<sup>1</sup> Sebanyak 538 komunitas Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Penetapan ini dilakukan melalui 7 SK Bupati dan 6 Peraturan Daerah di tingkat kabupaten. Perda yang paling banyak menetapkan Komunitas Masyarakat Hukum Adat adalah Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015, yaitu sebanyak 519 kasepuhan yang terdiri dari kasepuhan inti, kokolot lembur dan guruhulan/rendangan (<http://epistema.or.id/kabar/siaran-pers/komunitas-masyarakat-hukum-adat/>)

Materi ajar disampaikan oleh dosen sebagai pengantar kuliah. Materi ajar selanjutnya didiskusikan dengan metode pembelajaran aktif melalui collaborative learning. Guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang materi ajar, mahasiswa diberi tugas membuat tulisan ilmiah deskriptif-normatif yang dilengkapi dengan hasil wawancara pemuka adat dan/atau ahli hukum adat. Tulisan ilmiah tersebut harus mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan hukum tata negara adat, yang bertujuan untuk membuktikan pemahaman mahasiswa tentang materi ajar.

Pada akhir semester perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa teori dan konsep tentang hukum tata negara adat serta mampu menjelaskan kegunaan dan pentingnya perhatian terhadap hukum tata negara adat dalam berbagai persoalan ketatanegaraan di Indonesia. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Bahasa Indonesia, dan disajikan untuk Program Sarjana (Kelas Sub Program Reguler dan Kelas Sub Program Paralel).

### **Negara Dalam Perspektif Hukum Islam (LWTN600501)**

Mata kuliah ini membahas konsep dasar tentang bagaimana Islam mengatur pentingnya suatu sistem kekuasaan untuk menegakkan hukum yang dapat memberikah maslahat, menjauhkan kerusakan dan memberikan keadilan bagi rakyat yang dipimpin. Ruang lingkup pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup kedudukan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem keyakinan Islam, materialisme dan gagasan penciptaan, teori kedaulatan dalam Islam, pemahaman dasar tentang syariah, nomokrasi Islam, pandangan Islam terhadap sistem demokrasi, imamah dan kekhalfahan dalam lintasan sejarah, dan perkembangan Islam di Nusantara.

### **Sejarah Konstitusi (LWTN600502)**

Mata kuliah ini membahas sejarah konstitusi Indonesia yang dimulai dari sejarah UUD 1945, UUDS, Konstitusi RIS dan UUD 1945 Perubahan. Sebagai pendalaman materi juga dibahas mengenai perbandingan cabang kekuasaan yang berlaku di setiap pelaksanaan dari konstitusi yang ada di Indonesia tersebut yaitu perbandingan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial di masing-masing praktek konstitusi.

### **Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (LWTN600506)**

Mata kuliah ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman dari perspektif hukum tata negara dan dibahas pula berbagai perkembangan hukumnya serta diselesaikan permasalahannya berdasarkan teori dan konsep serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang hukum tata negara yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah mengenai kekuasaan kehakiman terkait lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, kedudukan dan susunan, metode pengisian jabatan dan pemberhentian, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban. Dari setiap poin tersebut dibahas masalah-masalah aktual yang sedang terjadi atau berkembang.

### **Partai Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara (LWTN600510)**

Mata kuliah ini membahas mengenai partai politik dalam perspektif hukum tata negara. Ruang lingkup pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup kedudukan partai politik

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pendirian dan pembentukan partai politik, penyelesaian perselisihan partai politik, dan pembubaran partai politik.

## **9. Peminatan Hukum Administrasi Negara**

### **Hukum Administrasi Negara Sektoral (LWAN600601)**

Mata kuliah Hukum Administrasi Negara Sektoral merupakan mata kuliah yang mengkaji aspek-aspek hukum administrasi dalam sektor-sektor publik di Indonesia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan penggunaan instrumen hukum yang mengatur (*regelen*) maupun mengurus (*beschikken*) di setiap sektor dan aktivitas, baik (i) internal administrasi negara/pemerintahan dalam; (a) menjalankan kewenangan, (b) pembentukan dan pengaturan kelembagaan, (c) pengaturan dan 'pengelolaan' sumber daya manusia, (d) 'pengelolaan' aset dan keuangan, serta (e) dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, maupun; (ii) aktivitas keluar, baik (a) antar-organisasi administrasi negara di Pusat dan Daerah; maupun, (b) terhadap sektor privat dan sektor masyarakat sipil. Ruang-ruang lingkup didiskusikan dengan metode pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok (*small group discussion*), *cooperative learning*, *collaborative learning* dan kuliah interaktif (*interactive lectures*) mencakupi penggunaan instrumen hukum yang mengatur dan mengurus dalam sektor-sektor pemerintahan; aspek-aspek hukum administrasi negara dalam (1) kegiatan pengaturan/perundang-undangan; (2) pemberdayaan aparatur sipil negara; (3) pelayanan publik; (4) perancangan pembangunan nasional; (5) keuangan publik; (6) perpajakan; (7) perburuhan; (8) pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; (9) agraria; (10) pemanfaatan sumber daya alam; dan (11) penataan ruang.

### **Teori Perundang-undangan (LWHD600607)**

Perkuliahan ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu perundang-undangan, perkembangan ilmu dan teori perundang-undangan, hubungan kemerdekaan kebangsaan dan kedaulatan rakyat dengan hukum dasar negara baik tertulis maupun yang tidak tertulis, hubungan antara kedaulatan rakyat dan hukum dasar serta lembaga perwakilan rakyat, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perbandingannya dengan berbagai sistem di negara-negara lain, penyelenggaraan pemerintahan negara, kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan, materi muatan undang-undang di Indonesia, dan masalah pemahaman undang-undang di Indonesia, kekuasaan Presiden dalam membentuk peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan (*wettelijkeregels*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregels*), keberlakuan *Staatsblaad* tahun 1927 nomor 346, hubungan antara undang-undang dan peraturan pemerintah dari segi sifat dan hakikat.

### **Hukum Antar Wewenang (LWAN600602)**

Mata kuliah Hukum Antar Wewenang adalah mata kuliah yang mempelajari prinsip-prinsip kewenangan pemerintahan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari banyak institusi, lembaga, maupun satuan kerja di dalamnya. Hubungan dan koordinasi antar

sub-organ dalam organisasi pemerintahan memiliki banyak pengaturan mulai dari konstitusi sampai pada peraturan di bawahnya, termasuk keputusan bersama. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis wewenang, kewenangan, hubungan antar wewenang, kelembagaan, jabatan, dan pejabatnya, teori melebur dalam kewenangan publik dan perdata, konflik antar wewenang yang terjadi antar-kementerian di Indonesia beserta penyelesaian yang tepat dan sesuai, hingga hukum antar wewenang dalam pelaksanaan KPBU dan Tindakan Pemerintah dengan Unsur Perdata vs Tindakan Perdata oleh Pemerintah serta hubungan keuangan pusat dan daerah dalam kaitannya dengan adanya pembagian wewenang dan kewenangan.

### **Diskresi dan Beleidsregel (LWAN600603)**

Perkuliahan ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup Beleidsregel dan Diskresi. Mahasiswa diharapkan dapat memahami koridor hukum pelaksanaan kebijakan serta diskresi yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Perkuliahan ini mengupas mengenai konsep, jenis-jenis, dan tata laksana beleidsregel dan diskresi.

### **Hukum Pelayanan Publik (LWAN600608)**

Mata kuliah Hukum Pelayanan Publik merupakan mata kuliah yang mengkaji aspek-aspek hukum administrasi dalam kegiatan pelayanan publik di Indonesia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek hukum administrasi negara yang terdapat dalam kegiatan pelayanan publik di Indonesia, yang didasarkan pada konsep, paradigma dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari penyelenggara pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, perlindungan hukum dalam pelaksanaan dan pemberian pelayanan publik, perizinan yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan publik, sektor-sektor pelayanan publik, hingga pada kerja sama pemerintah dan swasta sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia.

### **Hukum Administrasi Daerah (LWAN600606)**

Mata kuliah Hukum Administrasi Daerah secara khusus membahas tentang administrasi pemerintahan di daerah. Untuk memahaminya, maka materi pembahasan dimulai dari sejarah pemerintahan daerah, pengaturan di konstitusi, letak pemerintahan daerah di berbagai bentuk sistem pemerintahan, yaitu federal, kesatuan dan konfederal. Kemudian masuk ke pengaturan sejak Indonesia merdeka, sampai dengan berlakunya pengaturan pemerintahan daerah saat ini, yaitu berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Tahap selanjutnya adalah mahasiswa membandingkan pelaksanaan pemerintahan daerah di beberapa negara.

Setelah Ujian Tengah Semester, maka mahasiswa akan membahas tentang keuangan daerah, desa dan pemerintahannya, dan perkotaan. Setelah itu, mahasiswa akan membahas “penguasa” di daerah, yaitu kepala daerah dan organisasinya, DPRD dan produk-produk hukum dan kebijakannya.

## **Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara (LWAN600609)**

Mata kuliah ini mengkaji penggunaan/penerapan hukum birokrasi dan hukum kepegawaian dalam pemerintahan, yang menyangkut organisasi kelembagaan, sumber daya manusia, prosedur tata laksana serta manajemen kepegawaian dan birokrasi pemerintah di Indonesia serta berbagai permasalahannya.

## **10. Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan**

### **Hukum Anggaran dan Keuangan Publik (LWAN600605)**

Pada mata kuliah ini akan dibahas mengenai keuangan publik: teori, konsep, dan paradigma hukum dalam konstitusi dan doktrin; legal formal keuangan publik di Indonesia; hak menguasai negara dalam sektor keuangan; karakter hukum anggaran publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah); sektor keuangan privat (korporasi dan badan lainnya) dalam kaitannya dengan kedudukan negara sebagai entitas privat; siklus anggaran publik di Indonesia; perencanaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*); desentralisasi keuangan publik; kekayaan negara yang dipisahkan: pengertian, konsep, dan paradigma hukumnya; karakteristik hukum Badan Usaha Milik Negara di Indonesia; identifikasi kerugian negara dan risiko negara dalam sektor keuangan publik; pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan anggaran publik; kedudukan lembaga pengawasan/pengendalian/pemeriksaan keuangan di Indonesia; putusan pengadilan dalam kasus keuangan publik; paradoks rasionalitas keuangan publik dan upaya mengatasinya; sifat melawan hukum dan kelalaian dalam keuangan publik serta jenis sanksi.

### **Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah (LWAN600610)**

Matakuliah ini membahas pengantar dan lingkup kekayaan/barang/aset negara, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, regulasi dan status hukumnya; kekayaan negara berupa tanah dan bangunan beserta pemanfaatannya, investasi pemerintah berupa saham dan surat berharga, serta mekanisme pemanfaatan kekayaan negara dengan pihak ketiga. Dibahas juga penyertaan modal negara ke dalam BUMN/PT, penilaian keuntungan dan kerugian dalam pengelolaan aset saham dan surat berharga, serta pencatatan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan kekayaan/aset negara berupa tanah dan/atau bangunan milik negara, yang kemudian diakhiri pembahasan kerugian negara dan risiko dalam pengelolaan kekayaan/aset negara dan Investasi Pemerintah.

### **Hukum Pajak (LWAN600604)**

Mata kuliah ini menjelaskan tentang sejarah timbulnya pajak, pengertian pajak, fungsi pajak, tujuan pajak, landasan hukum perpajakan di Indonesia, macam-macam jenis pajak, hukum formil dan materil perpajakan, cara melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan, penyelesaian sengketa pajak.

## **Hukum dalam Regulasi dan Lembaga Keuangan di Indonesia (LWAN600611)**

Matakuliah ini membahas kelembagaan keuangan di Indonesia yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan dengan titik bahasan atas tata kelola, regulasi, dan risikonya. Kemudian membahas pengaturan dan jenis transaksi sektor perbankan badan usaha milik negara (BUMN), jenis bank serta lembaga keuangan non bank (LKBB) serta pengaturan dan jenis transaksi dalam pasar uang dan surat berharga negara. Dibahas juga mitigasi risiko dalam kegiatan perdagangan pasar uang dan surat berharga negara dan kelembagaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan di Indonesia dan di Negara Lain.

## **Hukum Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan (LWAN600612)**

Matakuliah ini akan membahas asas, tujuan, dan manfaat perencanaan pembangunan, sejarah perencanaan di Indonesia yang diawali dengan adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Rencana Pembangunan Semesta Berencana, dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan. Dibahas juga pengaturan perencanaan pembangunan dan ruang lingkup perencanaan pembangunan di Indonesia serta musyawarah perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Selain itu akan dibahas mengenai kaitan perencanaan dan penganggaran dalam sistem manajemen pembangunan dan rencana kerja yang ditetapkan pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Bahasan lainnya adalah pola sistem perencanaan pembangunan yang hubungan perencanaan nasional dan daerah dan kebijakan hubungan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah; Juga dibahas pengertian dan jenis pembiayaan pembangunan serta kebijakan pembiayaannya dan diakhiri dengan patologi birokrasi dan hambatan dalam perencanaan pembangunan.

## **Hukum Pajak Internasional (LWAN600613)**

Matakuliah ini akan membahas mengenai pengertian, regulasi dan jenis pajak internasional, hukum pajak nasional yang mengatur hukum pajak luar negeri; Sumber hukum pajak internasional dan sistem perpajakan internasional; Kebijakan Penghindaran Pajak Berganda dan Prinsip-prinsip pajak internasional; Hubungan regulasi pajak nasional dan pajak internasional; Subyek dan objek pajak internasional; Beberapa perjanjian internasional yang mengatur perpajakan; Pola Kebijakan Perpajakan Internasional dan Pengaruh Kebijakan Luar Negeri. Beberapa kasus pajak internasional dan sengketa penyelesaiannya.

## **Hukum Pengadilan Pajak (LWAN600614)**

Matakuliah ini akan membahas mengenai kedudukan, kewenangan dan Kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia, sejarah dan regulasinya: Upaya administrasi dalam perpajakan dan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Hubungan Pengadilan pajak dan pengadilan lainnya khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara; Hukum Acara dan Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Pengadilan Pajak; Jenis Putusan Pengadilan Pajak; Upaya Hukum dalam perkara pajak di Indonesia. Sifat hukum dalam Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali dalam upaya hukum kasus perpajakan. Tinjauan akademis atas beberapa kasus dan putusan di pengadilan pajak.,

## **Hukum Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan (LWAN600615)**

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian pengawasan/pemeriksaan, legal formal hukum pengawasan/pemeriksaan, Sistem Pengawasan/pemeriksaan Keuangan

Negara, pengawasan/pemeriksaan dalam manajemen keuangann sektor Publik dan Privat, instistusi pengawasan/pemeriksaan, kedudukan dan peran BPK sebagai supreme audit, kedudukan dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam optimalisasi fungsi pengawasan/pemeriksaan, tata hubungan kelembagaan pengawasan/pemeriksaan, pengawasan/pemeriksaan Keuangan Negara, pengawasan/pemeriksaan Keuangan BUMN, kerugian negara dan kerugian Keuangan Negara, tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan. Untuk memperkaya wawasan mahasiswa, matakuliah ini juga menyajikan perbandingan sistem pengawasan/pemeriksaan di negara-negara lain.

## **11. Peminatan Hukum Agraria**

### **Pengadaan Tanah (LWAN600705)**

Mata kuliah ini membahas masalah aktual dalam lingkup pengadaan tanah, berbagai macam kebutuhan manusia atas tanah, asas-asas hukum dalam hak penguasaan atas tanah dan dalam rangka perolehan tanah yang terdapat di dalam hukum nasional dan internasional, hal-hal yang berkaitan dengan perolehan tanah, tata cara/prosedur perolehan hak atas tanah menurut hukum tanah nasional, pelepasan hak, pencabutan hak, penerapan prosedur perolehan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman (wisma), kawasan industri, dan kawasan pariwisata.

### **Reforma Agraria (LWAN600701)**

Mata kuliah ini membahas landreform secara umum, *landreform* di Indonesia, program-program *landreform*, program pendukung *landreform*, perbandingan *landreform* di negara lain yang berhasil di Jepang atau Taiwan, perbandingan *landreform* di negara lain yang gagal atau tidak sukses di India atau negara Amerika Latin, penatagunaan tanah-penataan ruang, penataan ruang di Indonesia, penatagunaan tanah di Indonesia, Kasiba-Lisiba, konsolidasi tanah.

### **Perbandingan Hukum Tanah (LWAN600706)**

Mata kuliah ini membahas masalah aktual yang signif kan sebagai pengetahuan pelengkap dalam mempelajari hukum agraria (hukum tanah nasional). Perbandingan dilakukan mengenai sistem hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, hukum adat, hukum tanah Belanda yang pernah berlaku di Indonesia dan perkembangannya, hukum tanah di negara komunis klasik masa USSR dan perkembangannya, hukum tanah di negara komunis di RRC dan perkembangannya, hukum tanah di negara-negara Common Law: Inggris, Amerika, Australia, negara-negara di Asia, serta negara-negara Amerika Latin dan Afrika.

### **Hak-hak Khusus dalam Pemanfaatan Ruang (LWAN600707)**

Materi kuliah ini berisikan perkembangan hak-hak baru yang timbul akibat perkembangan hukum dan kondisi tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Awal kuliah akan menjelaskan mengapa kuliah ini menjadi penting dari pengertian, batasan dan

sejarah serta perkembangan hak-hak khusus tersebut. Hak-hak khusus yang dimaksud adalah hak ruang bawah tanah, misal seperti tempat parkir bawah Gedung, jalur kereta bawah tanah dsb. Kemudian hak ruang atas tanah seperti jalan layang untuk kendaraan (dan/atau toll) atau kereta atas tanah. Serta hak khusus pada pesisir pantai terkait dua hal, yaitu reklamasi dan pemanfaatan pesisir sebagai tempat perikanan seperti tambak. Case-case yang akan dibahas, pembangunan jalan layang non toll, pembangunan jalur MRT dan LRT di Jakarta, Smart tunnel di Malaysia, pemanfaatan pulau pulau reklamasi seperti di pantai utara Jakarta, pemanfaatan perairan dalam hak garap tambak, garam dan case-case lain yang relevan. Case luar negeri yang akan dibahas adalah reklamasi Dubai, Singapore, Belanda.

### **Tanah Sebagai Jaminan Utang (LWAN600704)**

Mata kuliah ini membahas lembaga hukum jaminan di Indonesia, hak tanggungan, prosedur pembebanan hak tanggungan, prosedur/tata cara pendaftaran hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, prosedur/tata cara eksekusi hak tanggungan melalui menjual obyek hak tanggungan, implikasi yuridis hak tanggungan dalam perjanjian kredit perbankan, rumah susun dan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) sebagai jaminan hutang, implikasi hak tanggungan dalam rangka kerjasama antara bank-developer.

### **Kondominium dan Permasalahannya (LWAN600703)**

Mata kuliah ini membahas sejarah pengaturan sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 20 Tahun 2011, tujuan pembangunan dan penyelenggaraan rumah susun, definisi dan pengertian dalam sistem rumah susun, penerapan tata cara/prosedur perolehan tanah untuk pembangunan rumah susun, prosedur/tata cara penerbitan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS), penjualan dan pemilikan Satuan Rumah Susun (SRS), hak dan kewajiban pemilik SRS, rumah susun dan HMSRS sebagai jaminan utang, penghunian dan pengelolaan rumah susun, pemilikan SRS oleh warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing (BHA), dinamika permasalahan rumah susun di Indonesia, dinamika permasalahan rumah susun di berbagai negara.

### **Pendaftaran Tanah (LWAN600702)**

Mata kuliah ini membahas aspek teoritis pendaftaran tanah; kegiatan pendaftaran tanah; kegiatan pengumpulan data fisik letak, batas, luas, dan permasalahannya; kegiatan pengumpulan data yuridis: status subyek, status tanah dan permasalahannya; kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah; sistem publikasi; aspek praktek pendaftaran tanah; penerapan peraturan yang digunakan dalam praktek pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali (*initial registration*); praktek pelaksanaan pemeliharaan data pendaftaran tanah, melalui pembahasan; jual-beli tanah dan praktek pendaftaran tanah menyangkut penerapan hukum dan permasalahan hukum yang timbul; dan profesi-profesi yang terkait dengan pendaftaran tanah dan permasalahan hukumnya.

## **12. Peminatan Hukum Perburuhan**

### **Hukum Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial (LWAN600801)**

Mata kuliah ini membahas pengertian dan ciri perjanjian kerja diperbandingkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan lainnya. Penerapan teori akumulasi maupun teori absorpsi untuk membedakan ketentuan yang berlaku dalam suatu hubungan untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya dibahas mengenai peran pemerintah dan sarana dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis. Pengaruh keanggotaan dalam organisasi perburuhan internasional, maupun dampak globalisasi dan perdagangan internasional terhadap pembentukan standar perburuhan dan penerapan standar perburuhan pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

### **Hukum tentang Upah dan Jaminan Sosial (LWAN600803)**

Mata kuliah ini membahas sejarah perkembangan jaminan sosial, pengertian, bentuk dan sistem pemberian jaminan sosial, kegunaan jaminan sosial di masyarakat, model-model pemberian jaminan sosial di suatu negara, dan pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia. Selanjutnya juga dibahas mengenai teori pengupahan, bentuk dan cara pembayaran upah, upah minimum serta kaitan pengupahan dengan produktivitas, jaminan sosial dan kelangsungan usaha.

### **Hukum Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LWAN600802)**

Mata kuliah ini membahas tentang kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja meliputi sejarah perlindungan bagi pekerja terhadap eksploitasi pengusaha, pengertian dan hakekat perlindungan sosial, sifat hukum publik, perlindungan bagi anak, pekerja perempuan, waktu kerja dan waktu istirahat, tempat kerja, dan terkait tanggung jawab pengusaha serta pemerintah dalam hal pengawasan. Selanjutnya keselamatan kerja meliputi sejarah perlindungan terkait kecelakaan kerja, pengertian dan hakikat perlindungan teknis, sifat hukum publik, asas keamanan kerja, tanggung jawab pengusaha serta pemerintah dalam hal pengawasan.

### **Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja (LWAN600804)**

Mata kuliah Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja (P2TK) membahas mengenai profil ketenagakerjaan Indonesia berikut asumsi dan variabel berpengaruh, permasalahan ketenagakerjaan berikut upaya mengatasi serta pengaturannya meliputi intervensi kependudukan, penanaman modal, penempatan TK ke luar negeri, TKA, bursa kerja, pelatihan kerja dan manajemen SDM tingkat mikro mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, jenjang karir, pelatihan, kompensasi dan benefit sampai dengan pengakhiran pemekerjaan. Dibahas pula isu-isu aktual terkait ketenagakerjaan (antar kerja) lintas daerah dan negara.

### **Hukum tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LWAN600805)**

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, permasalahan yang diperselisihkan antara pekerja/buruh dan pengusaha maupun antar

serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, upaya para pihak serta proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

### **13. Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam**

#### **Hukum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (LWAN600902)**

Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis prinsip-prinsip hukum lingkungan dan tata cara pemulihan dan penanggulangan lingkungan ke dalam permasalahan hukum terkait pencemaran dan perusakan lingkungan di berbagai sektor sumber daya alam di Indonesia serta penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Mata kuliah ini akan membahas materi-materi sebagai berikut: Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Teori dan Konsep), Instrumen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Pencemaran Air, Studi Kasus: Pencemaran Air dalam Putusan, Pencemaran dan Perusakan Ekosistem Laut, Studi Kasus: Pencemaran dan Perusakan Ekosistem Laut, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Perusakan dan Pencemaran Tanah, Pengelolaan Sampah (Darat dan Laut), *Food Safety*, Pencemaran Udara, Kebakaran Lahan dan Gambut, Penanggulangan dan Pemulihan, dan Studi Kasus: Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

#### **Hukum Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan (LWAN600906)**

Mata kuliah Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan adalah mata kuliah yang mengkaji kegiatan-kegiatan di ketiga sektor, dalam perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya:

1. Potensi dan permasalahan SDA khususnya Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan di Indonesia;
2. Keterkaitan paradigma pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan kebijakan pengelolaan Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan;
3. Kerangka hukum dan kebijakan yang memberikan dasar hukum atas pengelolaan Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan di Indonesia;
4. Praktek pelaksanaan dan penegakan hukum kebijakan pengelolaan Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan;
5. Sumber/akar permasalahan terkait dengan permasalahan penegakan hukum pengelolaan Kehutanan, Pertambangan, dan Perkebunan.

#### **Hukum Perubahan Iklim (LWAN600903)**

Mata kuliah ini membahas dan mendiskusikan berbagai aspek hukum dari perubahan iklim, baik pada tingkat internasional maupun tingkat nasional. Mata kuliah dimulai dari pembahasan mengenai latar belakang ilmiah terkait sebab-sebab dan akibat dari pemanasan global. Setelah itu mata kuliah membahas persoalan perubahan iklim dari perspektif keadilan iklim. Di samping itu, mengingat banyaknya ketidakpastian ilmiah dalam berbagai konteks pemanasan global, maka kuliah ini pun akan mendiskusikan perubahan iklim dalam perspektif kehati-hatian. Berbagai isu utama yang termuat

dalam UNFCCC dan Protokol Kyoto serta hasil yang dicapai dari berbagai pertemuan para pihak akan didiskusikan pula. Termasuk ke dalam pembahasan ini adalah posisi Indonesia dalam berbagai pertemuan tersebut. Fokus dari pembahasan mengenai pertemuan-pertemuan ini terutama akan diarahkan pertemuan setelah COP 13 di Bali tahun 2007. Selanjutnya, aspek hukum dari berbagai instrumen penurunan emisi gas rumah kaca akan mendapat pembahasan dalam 3 kali perkuliahan, yaitu: pembahasan mengenai mekanisme fleksibel secara umum, pembahasan mengenai implementasi CDM di Indonesia, dan pembahasan mengenai pasar karbon di berbagai negara/*region*. Isu kehutanan dan REDD+ akan didiskusikan dalam 4 kali perkuliahan, yaitu: pembahasan mengenai isu kehutanan secara umum, pembahasan mengenai beberapa aspek penting dalam REDD+, pembahasan dan evaluasi mengenai pengaturan dan pelaksanaan REDD+ di Indonesia, serta pembahasan mengenai keterkaitan antara REDD+ dengan perlindungan hak masyarakat adat atas sumber daya kehutanan. Perkuliahan akan ditutup oleh dua isu yang tidak kalah penting, yaitu persoalan pendanaan dan adaptasi perubahan iklim, serta persoalan litigasi perubahan iklim dengan merujuk pada beberapa kasus terkait perubahan iklim yang berkembang, terutama, di Amerika Serikat. Kuliah menggunakan sumber belajar dari berbagai artikel, baik yang ada di dalam buku maupun jurnal hukum. Di samping itu, perkuliahan juga menggunakan berbagai dokumen hukum sebagai rujukan, yang terdiri dari UNFCCC, Protokol Kyoto, berbagai hasil (draft) kesepakatan dari berbagai pertemuan para pihak, peraturan perundang-undangan nasional/daerah, serta putusan pengadilan.

### **Hukum dan Konflik Sumber Daya Alam (LWAN600904)**

Mata kuliah Hukum dan Konflik Sumberdaya Alam adalah mata kuliah yang mengkaji sengketa atau konflik yang terkait dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan dan Sumberdaya Alam. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi sumber-sumber atau penyebab konflik sumberdaya alam dan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi maupun menyelesaikan sengketa/ konflik tersebut

### **Hukum Pengelolaan Energi (LWAN600907)**

Mata kuliah Hukum Pengelolaan Energi merupakan mata kuliah yang mengkaji aspek-aspek hukum dalam sektor pengelolaan energi di Indonesia, yang meliputi perkembangan penggunaan energi di Indonesia, aspek Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan energi, aspek lingkungan, perubahan iklim, konservasi energi, pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, termasuk di dalamnya perihal perusahaan energi yang meliputi hak monopoli energi, produksi, distribusi dan konsumsi energi.

### **Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan (LWAN600908)**

Mata kuliah Hukum Pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan merupakan mata kuliah yang mengkaji:

1. Potensi dan permasalahan SDA Kelautan dan Perikanan di Indonesia (dengan ilustrasi perbandingan di negara lain);

2. Keterkaitan paradigma pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan kebijakan pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan
3. Kerangka hukum dan kebijakan yang memberikan dasar hukum atas pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan di Indonesia;
4. Praktek pelaksanaan dan penegakan hukum kebijakan pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan;
5. Sumber/akar permasalahan terkait dengan permasalahan penegakan hukum pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan.

### **Hukum Tata Ruang dan Perkotaan (LWAN600909)**

Mata kuliah ini membahas tentang penataan ruang dalam dimensi perkotaan. Secara normatif, ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang, namun dalam pelaksanaannya banyak hal yang dapat dibahas, baik faktor-faktor yang mendukung dengan pendekatan terkini berdasarkan GISTARU maupun berbagai persoalan yang menjadi problemnya, seperti “keterlanjuran” pembangunan gedung, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan masalah lainnya dengan pendekatan perkotaan. Kota seperti apa yang diinginkan akan didasarkan pada pengaturan, perekonomian yang berkembang, kehidupan masyarakatnya yang menuju kota cerdas.

## **14. Peminatan Hukum Perdata Internasional**

### **Hukum Perdata Internasional (LWIN601001)**

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai sejarah perkembangan, dasar hukum, prinsip, teori umum dan teori khusus dalam HPI, termasuk di antaranya: *renvoi*, kualifikasi, pilihan hukum dan ketertiban umum. Berdasarkan pemahaman yang komprehensif atas hal-hal tersebut di atas, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan-hubungan hukum yang merupakan pertemuan dua sistem hukum nasional atau lebih, sekaligus menentukan hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan hukum tersebut.

### **Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional (LWIN601003)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai *Communis Opinio Doctorum* (Pendapat Umum Sarjana) dalam RUU HPI Indonesia dan UU Hukum Perdata Internasional negara-negara tetangga di Asia. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus HPI dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul dalam hubungan-hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik dalam hukum keluarga maupun hukum kontrak.

### **Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional (LWIN601002)**

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengaturan dan keberlakuan konvensi-konvensi internasional yang secara khusus berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum perdata internasional. Di dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai teori-teori umum dan teori-teori khusus HPI yang tercermin di dalam konvensi-konvensi

internasional tersebut. Konvensi-konvensi internasional yang dibahas dalam mata kuliah ini, antara lain adalah: konvensi-konvensi yang dihasilkan dalam *The Hague Conference on Private International Law*, *New York Convention 1958*, *ICSID Convention 1965*, *CISG 1980*, dan *Cape Town Convention 2001*.

### **Status Personal dalam HPI Indonesia (LWIN601005)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan kembali teori-teori Hukum Perdata Internasional dalam suatu kasus yang relevan. Dalam perkuliahan dibahas mengenai teori-teori Hukum Perdata Internasional serta pembahasan penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Dalam hal ini, kasus-kasus nyata yang menjadi bagian dari Status Personal dalam HPI Indonesia, yaitu perkawinan campuran internasional, pembatalan perkawinan campuran internasional, hubungan orang tua anak dalam perkawinan campuran internasional, pengesahan karena perkawinan menyusul, harta benda perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran internasional, perceraian dengan unsur asing, adopsi internasional (*intercountry adoption*) serta hukum waris dengan unsur asing.

### **Forum yang Berwenang dalam HPI (LWIN601006)**

Mata kuliah Forum yang Berwenang dalam Hukum Perdata Internasional merupakan mata kuliah spesialisasi dari hukum perdata internasional yang membahas aspek-aspek dan isu-isu spesifik tentang kompetensi hakim Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdata dengan unsur asing serta proses beracara perdata yang melibatkan unsur-unsur asing. Mata ajar ini menerapkan metode pembelajaran metode *problem-based-learning*, di mana mahasiswa diberikan kasus-kasus hipotesis namun berdasarkan kasus-kasus riil dan bersifat aplikasi dari teori yang didapat dari literatur. Mahasiswa kemudian membahasnya secara bersama dengan dosen sebagai fasilitator. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat memahami aspek khusus tentang forum yang berwenang dan proses beracara perdata dalam Hukum Perdata Internasional.

### **Transaksi Bisnis Internasional (LWIN601004)**

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengertian, ruang lingkup, pelaku dan jenis-jenis peristiwa atau hubungan hukum yang termasuk dalam ranah komersial yang melintasi batas-batas negara. Dalam kuliah ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab para pelaku Transaksi Bisnis Internasional, yang antara lain adalah: individu, perusahaan-perusahaan multinasional dan negara dalam suatu transaksi komersial yang melintasi batas-batas negara. Lebih lanjut mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus aktual dalam ranah Transaksi Bisnis Internasional yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.

## **15. Peminatan Hukum Internasional Publik**

### **Hukum Laut (LWIN601102)**

Mata kuliah Hukum Laut adalah mata kuliah yang mengkaji pengaturan hukum terkait aktifitas di laut. Hukum Laut adalah suatu aspek penting dalam hukum internasional yang mengatur kegiatan negara-negara dalam pemanfaatan laut baik untuk kepentingan pelayaran maupun pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hukum laut mengatur tidak hanya bagaimana penggunaan permukaan laut, tetapi juga kolom air, dasar laut dan tanah di bawahnya. Berbagai perkembangan hukum laut sejak masa sebelum adanya kodifikasi sampai dengan adanya Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Kuliah akan membahas mengenai pengetahuan dasar mengenai zona maritim, hak dan kewajiban negara pantai dan kapal asing, berbagai yurisdiksi negara di laut dan alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi terkait dengan laut. Berbagai praktek negara dalam hukum laut akan dibahas termasuk praktek Indonesia terkait hukum laut.

### **Hukum Perjanjian Internasional (LWIN601101)**

Mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional merupakan pengetahuan dasar dari hukum internasional publik terkait dengan keberlakuan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dan berbagai aspek pembentukannya serta pemberlakuannya dalam sistem hukum nasional. Mata kuliah ini akan memfokuskan pada peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional, hubungan antara perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, proses pembentukan perjanjian internasional, keberlakuan perjanjian internasional dan prinsip perubahan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian internasional.

### **Hukum Udara dan Angkasa (LWIN601104)**

Mata kuliah Hukum Udara dan Angkasa membahas mengenai aspek wilayah dalam Hukum Internasional. Aspek wilayah yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah wilayah udara dan angkasa dari sudut pandang Hukum Internasional. Mata Kuliah ini dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, Hukum Udara yang membahas mengenai sejarah hukum udara internasional, definisi hukum udara, kedaulatan negara di ruang udara, aspek-aspek penting dalam penerbangan sipil yang diatur dalam *Chicago Convention 1944*, kebebasan di ruang udara, hukum udara atas tindak pidana di ruang udara atau di pesawat. Kedua, Hukum Angkasa yang membahas mengenai definisi ruang angkasa, yurisdiksi negara di ruang angkasa, aspek-aspek penting aspek-aspek penting dalam *Space Treaty 1967*, konvensi-konvensi tentang kegiatan ruang angkasa, aspek-aspek hukum pada perkembangan kegiatan manusia di ruang angkasa.

### **Hukum Diplomatik (LWIN601105)**

Mata kuliah Hukum Diplomatik membahas mengenai aspek hukum dalam hubungan diplomatik antar negara. Secara garis besar perkuliahan hukum diplomatik akan membahas pasal-pasal dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation (VCDR)*. Mulai dari ketentuan hukum terkait pembukaan hubungan diplomatik, imunitas diplomat dan

tempat kantor perwakilan diplomatik, persona non grata terhadap perwakilan diplomatik, kekebalan perwakilan diplomatik hingga pemutusan hubungan diplomatik.

### **Hukum Lingkungan Internasional (LWIN601106)**

Mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional membahas mengenai Hukum Lingkungan dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional. Hukum Lingkungan Internasional membahas pengaturan lingkungan hidup yang diatur dalam perjanjian internasional dan memperkenalkan secara komprehensif konsep, ketentuan serta perkembangan Hukum Lingkungan Internasional sebagai bagian dari hukum internasional beserta implementasinya di Indonesia.

### **Arbitrase Investasi Internasional (LWIN601107)**

Arbitrase Investasi Internasional membahas tentang latar belakang, sejarah, sumber hukum yang berlaku, asas-asas perlindungan investasi, mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional melalui arbitrase.

### **Hukum Organisasi Internasional dan Regional (LWIN601103)**

Mata kuliah Hukum Organisasi Internasional dan Regional membahas mengenai kedudukan Organisasi Internasional dan Regional dalam Hukum Internasional, dengan memahami perbedaan dari berbagai macam organisasi internasional dan regional melalui struktur organisasi, fungsi organisasi dan mekanisme kerja organisasi. Selain itu juga membahas mengenai masalah-masalah hukum dalam suatu organisasi internasional dan regional.

### **Hukum Humaniter Internasional (LWIN601108)**

Mata kuliah hukum humaniter internasional adalah mata kuliah yang memperkenalkan mahasiswa kepada tatanan dan instrumen hukum humaniter internasional, baik yang berlaku sebelum sengketa bersenjata terjadi (*jus ad bellum*) maupun selama sengketa bersenjata atau peperangan (*jus in bello*). Dalam pembahasan instrumen hukum humaniter internasional, mata kuliah ini akan menekankan pada analisis kritis atas praktik hukum humaniter kontemporer yang melibatkan atau memberi dampak bagi masyarakat internasional dan Indonesia, seperti kemajuan teknologi dan pergeseran nilai. Dalam menyajikan perkembangan diskursus tersebut, mata kuliah ini akan menganalisis resolusi yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, putusan dalam Mahkamah Internasional maupun nasional, dan praktik negara-negara pada umumnya.

## **16. Peminatan Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan**

### **Sosiologi Hukum (LWMP601202)**

Sosiologi Hukum adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa agar mampu menganalisis fenomena sosio-legal dengan menggunakan teori dan metode sosiologi hukum. Melalui mata kuliah ini mahasiswa mempelajari kegunaan sosiologi dalam

studi hukum, teori struktural fungsional, fungsi hukum, teori konflik, hukum dan perubahan sosial, sosiologi interpretif dan teori rasionalisasi hukum, metode penelitian sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum, bagi hasil perikanan dalam perspektif teori konflik, hukum formal vs hukum informal, hukum, ruang publik dan kehidupan keagamaan, hukum sebagai sarana penyelesaian konflik agraria, dan tentang hukum, perubahan sosial, dan teknologi informasi, serta tentang telaah sosiologi hukum atas pengembangan sains dan teknologi.

### **Hukum dan Gender (LWMP601204)**

Dalam mata kuliah ini, perkuliahan dibagi menjadi tiga bagian, pertama memuat pengantar dan pengenalan mengenai sejumlah konsep utama. Pendekatan hukum berperspektif perempuan (*feminist legal theory*) dijelaskan dalam konteks sebagai alat analisis untuk mengkaji beragam permasalahan perempuan, terutama yang berasal dari kelompok marginal. Sejumlah kasus akan diangkat untuk didiskusikan guna merekonstruksi miskonsepsi hukum netral dan objektif dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya. Konsep *gender budgeting* (anggaran responsif gender) akan digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk hambatan bagi perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari setiap program pembangunan. Bagian kedua memuat sejumlah isu-isu penting yang dipilih untuk dibahas seperti masalah akses perempuan dalam legislasi, perdagangan perempuan, prostitusi dan pornografi, kekerasan berbasis gender (*gender based violence*), pemiskinan perempuan, serta status dan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga dan berbagai problematika implikasinya, dan persoalan ketidakadilan ekonomi berbasis gender (*economic inequality by gender*). Bagian ketiga perkuliahan memberikan ruang pada mahasiswa untuk berperan lebih aktif, yaitu dengan fokus melakukan riset sederhana mengenai permasalahan hukum dan kebijakan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Hasil riset kemudian akan diseminarkan sebagai tugas akhir perkuliahan. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menganalisis, dan menjelaskan berbagai persoalan kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Selain itu, mahasiswa mampu menganalisis problem tersebut dengan mengaitkannya dengan konteks hukum dan kebijakan (substansi, struktur, dan kultur).

### **Antropologi Hukum (LWMP601201)**

Fokus utama kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum dari perspektif kebudayaan. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat terkait dengan konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi di mana hukum itu berada. Masyarakat bisa menciptakan aturan hukumnya sendiri, karena mereka memang memiliki kapasitas untuk itu. Mereka juga bisa menciptakan forum penyelesaian sengketanya sendiri yang dirasa lebih dekat (familiar) dengan budaya dan keseharian mereka. Dengan demikian apabila hukum negara dirasa tidak cukup memberi rasa keadilan, maka selalu ada “jalan keluar”.

Hukum sebagai teks tidak bisa dipahami secara netral dan obyektif, dan diisolasi dari konteksnya. Mempelajari hukum hanya secara “*black letter perspective*” memang diperlukan dalam konteks tertentu, tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang mendasar tentang bagaimana hukum direspon, dikonstruksi dan diimplementasikan oleh para aktor.

Dalam kuliah ini akan disampaikan beberapa konsep teoritis dan pendekatan metodologis, khususnya etnografi hukum. Beberapa tematik isu akan diberikan, di antaranya kajian kritis terhadap hukum, pluralisme hukum, penyelesaian sengketa, pembangunan hukum, pengelolaan sumber daya alam (air dan tanah) dan akses keadilan kepada kelompok rentan.

### **Hukum dan Kesejahteraan Sosial (LWMP601206)**

Mata kuliah ini membahas mengenai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), latar belakang pemikirannya serta usaha-usaha dalam mencapai negara kesejahteraan; rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial; kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial Indonesia; luas lingkup pembangunan sosial di Indonesia dengan parameternya MDGs, HDI/IPM dan Hak Asasi Manusia; serta jaminan sosial dalam perspektif asuransi sosial dan asistensi sosial, SJSN dan peran dari BPJS.

### **Ekonomi Pembangunan dan Hukum (LWMP601205)**

Mata kuliah ini membahas pentingnya hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi, teori-teori pembangunan ekonomi, perspektif liberalisme terhadap peran hukum dalam pembangunan ekonomi, peran hukum dalam pembangunan ekonomi yang sosialis, peran hukum dalam pembangunan ekonomi, dampak dari pembangunan ekonomi liberal pada sistem hukum, dampak pembangunan ekonomi pada sistem hukum, dampak globalisasi pada sistem hukum Indonesia, dampak globalisasi hukum pada pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi di Indonesia, masalah-masalah hukum yang muncul, studi preskriptif atas pembangunan hukum dan ekonomi di Indonesia.

### **Kajian Interdisipliner terhadap Hukum yang Hidup (LWMP601207)**

Kajian Interdisipliner terhadap Hukum yang Hidup adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa agar mampu memahami dan menganalisis eksistensi/keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama di dalam masyarakat, baik secara deskriptif maupun preskriptif. Melalui mata kuliah ini mahasiswa mempelajari keragaman hukum di Indonesia, menganalisis dengan menerapkan kajian dengan perspektif sosiologis/antropologis/ekonomi terhadap disiplin hukum, dan memahami lebih mendalam tentang eksistensi/keberadaan hukum adat yang konkrit melalui perspektif sosiologis, sebagai bagian dari keragaman hukum; dan substansi hukum melalui pendekatan *socio-legal studies*.

### **Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Hukum (LWMP601209)**

Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mendasar aspek-aspek kebijakan hukum yang diperlukan dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonomi dan memiliki kaitan dengan kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan seorang ahli hukum. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan memberikan pengenalan beberapa aspek praktis yang dibutuhkan dalam praktik seorang ahli hukum.

## **Hukum, Keadilan, dan Globalisasi (LWMP601208)**

Globalisasi masa kini memiliki karakter yang berbeda, karena dunia terhubung oleh komunikasi digital dan *big data*. Dunia seolah tidak lagi berbatas, ditandai oleh lalu lalang komunikasi dan informasi digital, perdagangan atau pertukaran barang dan jasa yang masif, perjanjian internasional dalam berbagai bidang, migrasi, dan juga kejahatan global terhadap kemanusiaan. Hukum juga mengalami globalisasi karena bersatunya delegasi dari seluruh dunia, menghasilkan instrumen hukum yang dirumuskan bersama, kemudian diterapkan lagi ke berbagai negara. Dunia menyepakati nilai-nilai baru yang dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan global utamanya menyangkut bidang-bidang kemanusiaan termasuk hak asasi perempuan dan anak, pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih atau anti korupsi. Melalui mata kuliah ini mahasiswa akan menganalisis hubungan antara hukum dengan berbagai pranata atau institusi politik, sosial budaya dan ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Mahasiswa juga didorong untuk berdiskusi dan berdebat secara aktif mengenai berbagai isu teoretik maupun praktik yang disampaikan dalam perkuliahan. Beberapa topik penting yang dibahas adalah pluralisme hukum, *Rule of Law*, migrasi, pembangunan hukum dan akses keadilan bagi kelompok miskin, kejahatan terhadap perempuan dan anak, pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai dampak kebijakan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

## **Metode Penelitian Sosiolegal (LWMP601203)**

Kuliah ini berfokus pada pembahasan mengenai metodologi penelitian hukum dari perspektif sosio-legal yang merupakan perluasan dari penelitian hukum yang *mainstream*. Hukum selama ini dilihat sebagai ilmu yang *sui-generis* sehingga selalu dipandang bersifat otonom, padahal perumusan dan bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak terisolasi dari konteks-konteks politik, ekonomi, sosial dan kultural. Konsekuensi metodologisnya adalah seorang peneliti hukum tidak dapat mengandalkan pendekatan hukum doktrinal saja, karena ada banyak penjelasan tentang kaitan antara hukum dan keadilan masyarakat yang tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu penelitian ilmu hukum diperkaya pendekatan yang bersifat interdisipliner sebagai alat bantu untuk memahami hukum yang bekerja dalam masyarakat.

## **• MATA KULIAH PILIHAN NON-PEMINATAN**

### **Penulisan Ilmiah (LWHD600175)**

Matakuliah ini didesain untuk meningkatkan kemampuan menulis akademik mahasiswa. Tipe artikel yang menjadi fokus peningkatan kemampuan menulis mahasiswa adalah berupa naskah akademis berupa skripsi dan jurnal hukum ilmiah.

## **Manusia dan Masyarakat Indonesia (LWNP600177)**

Matakuliah Manusia dan Masyarakat Indonesia memiliki capaian pembelajaran adanya kepekaan terhadap jatidiri (identitas) keindonesiaan, baik sebagai pribadi, masyarakat maupun budaya, kepekaan terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar berbangsa dan bernegara Indonesia, dan kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bernegara. Capaian pembelajaran ini merupakan suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk mempelajari hukum dan ilmu hukum di Indonesia dengan mempelajari 12 pokok bahasan, yaitu: asal-usul manusia Indonesia, pandangan hidup manusia Indonesia, kemajemukan masyarakat Indonesia, masyarakat hukum Indonesia, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, wawasan nusantara, ketahanan nasional, Indonesia dalam pergaulan antar bangsa, Indonesia dan pembangunan ekonomi, Indonesia dan kesejahteraan sosial, dan perempuan dan anak Indonesia.

## **Bahasa Inggris Hukum (LWNP600176)**

Bahasa Inggris Hukum merupakan Mata Kuliah yang mendiskusikan mengenai istilah-istilah atau terminologi hukum. Diskusi dimulai dengan pembahasan mengenai pentingnya mempelajari istilah-istilah dalam bahasa Inggris Hukum. Diskusi juga akan diawali dengan bagaimana melakukan penelusuran referensi hukum; yang pada umumnya akan dilakukan dengan mengetahui istilah atau terminologi hukum yang kerap digunakan. Peserta Mata Kuliah ini diharapkan untuk mengenal dan mengerti terminologi hukum yang sering dijumpai baik dalam teori maupun praktik hukum. Pembahasan makna atau penggunaan dari terminologi-terminologi hukum tersebut akan dilakukan secara umum; sebagai pengenalan istilah hukum yang sering digunakan. Dalam setiap pertemuan di kelas, pembahasan akan berdasar pada setiap ranah atau bidang keilmuan yang ada di FHUI; misalnya dalam bidang Hukum Perdata, Pidana, Ekonomi dan Teknologi, Islam dan Adat, Hukum Internasional Publik, Hukum Perdata Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum dan Masyarakat, Hukum Administrasi Negara serta Hukum Acara.



# Dosen Program Sarjana

- **GURU BESAR TETAP**



**Agus Sardjono, S.H., M.H., Dr., Prof.**  
(SH., FHUI 1987; MH., FHUI 1997; Dr. FHUI 2004)  
Guru Besar untuk Bidang Hak Kekayaan Intelektual



**Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., Dr., Prof.**  
(SH., FHUI 1982; MH., FHUI 1989; Dr., FHUI 2001)  
Guru Besar Hukum Perburuhan



**Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr., Prof.**  
(SH., FHUI 1984; MH., FHUI 1999; Dr., FHUI 2004)  
Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara



**Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Prof.**  
(SH., FHUI 1979; MA., Sam Houston State University 1988; Dr., Sam Houston State University 1999)  
Guru Besar dalam Hukum Pidana dan ahli di bidang Hak Asasi



**Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof.**

(SH., FHUI 1987; LL.M., Keio University 1992; Ph.D., University of Nottingham 1997)

Guru Besar Hukum Internasional



**M.R. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof.**

(SH., FHUI 1998; LL.M., Utrecht University 2002; Ph.D., Maastricht University 2008)

Guru Besar dalam Bidang Hukum Lingkungan



**Rosa Agustina, S.H., M.H., Dr., Prof.**

(SH., FHUI 1985; MH., FHUI 1995; Dr., FHUI 2003)

Guru Besar dalam Bidang Hukum Keperdataan



**Satya Arinanto, S.H., M.H., Dr., Prof.**

(SH., FHUI 1990; MH., FHUI 1995; Dr., FHUI 2003)

Guru Besar dalam Bidang Hukum Tata Negara



**Sulistyowati Irianto, Dra., M.A., Dr., Prof.**

(Dra., Antropologi FISIPOL UGM 1985; MA., Universiteit Leiden 1989; Dr., Antropologi FISIP UI 2001)

Guru Besar dalam Bidang Antropologi Hukum



**Topo Santoso, S.H., M.H., Dr., Prof.**  
(SH., FHUI 1992; M.H., FHUI 2000; PhD., Universiti Malaya 2009)  
Guru Besar dalam Bidang Hukum Pidana

## • GURU BESAR TIDAK TETAP

1. **Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., Prof.**  
(SH., FHUI 1975; MH., FH UNPAD 1993; Dr. Universiti Utara Malaysia)
2. **Achmad Z. Umar Purba, S.H., LL.M., Prof.**  
(S.H. FHUI 1974; LL.M. Harvard Law School 2003)
3. **Djaenal Sidik Suraputra, S.H., Prof.**  
(S.H. FHUI 1960; Dr. UNPAD 1988)
4. **Fachri Bey, S.H., MM., Dr., Prof.**  
(S.H. FHUI 1980; MM. STIM Labora; Dr. Universiti Kebangsaan Malaysia)
5. **Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., L.L.M., Dr., Prof.**  
(S.H., FHUI 1976; LL.M., California School of Law 1980; Dr., FH UGM 2004)
6. **Insan Budi Maulana, S.H., LL.M., Dr., Prof.**  
(S.H. FHUI 1986; LL.M. Kobe University 1992; Dr. Kobe University 1998)
7. **Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Dr., Prof.**  
(SH. FHUI 1982; MH., FHUI; Dr., FHUI 1993)
8. **Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Dr., Prof.**  
(SH FH UI 1975; M.H., FHUI 1997; Dr FHUI 2002)
9. **Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H., Dr., Prof.**  
(S.H. FHUI 1967; M.H. UNPAD 1993; Dr. FHUI 2003)

## • DOSEN TETAP

- Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., Dr.**  
(S.H. FHUI 1988; M.Kn. FHUI 2003; Dr. FHUI 2018)
- Abdul Salam, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 2002; M.H. FHUI 2007; Dr. FHUI 2018)
- Afdol, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1987; M.H. FHUI 2003)
- Ahmad Khozi, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2015; LL.M. University of Groningen 2018)
- Akhiar Salmi, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 1983; M.H. FHUI 2004)  
**Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1998; M.H. FHUI 2002; Dr. FHUI 2015)  
**Ali Abdillah, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2014; LL.M. Leiden University 2016)  
**Angga Prianca, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2017; LL.M. The University of Edinburgh 2020)  
**Antarin Prasanthi Sigit, S.H., M.Si., Dr.**  
(S.H. UNDIP 1988; M.Si. IPB 1999; Dr. Universitas Pelita Harapan 2019)  
**Antonius Cahyadi, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 1999; LL.M. Utrecht University 2003)  
**Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D.**  
(S.H. FHUI 2003; M.I.L. University of Sydney 2007; Ph.D. University of Otago 2013)  
**Aristyo Rizka Darmawan, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2017; LL.M. TUFTS University 2019)  
**Aristo M.A. Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D.**  
(S.H. FHUI 2008; LL.M. Utrecht University 2012; Ph.D. University of Washington 2022)  
**Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1998; M.H. FHUI 2005)  
**Arman Nefi, S.H., M.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 2000; M.M. FEUI 2006; Dr. FHUI 2015)  
**Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.**  
(S.H. FHUI 2008; M.Sc. Maastricht University 2009)  
**Brian Amy Prastyo, S.H., M.LI., Dr.**  
(S.H. FHUI 2002; M.LI. University of Wisconsin, Madison 2004; Dr. FHUI 2017)  
**Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2011; LL.M. University of Washington 2016)  
**Daly Erni, S.H., LL.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1990; LL.M. Seoul TLBU School of Law 2004; Dr. FHUI 2019)  
**Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1999; M.H. FHUI 2004; Dr. FHUI 2012)  
**Dina Diana, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 1997; LL.M. University of Groningen 1998)  
**Dinda Rizkiyatul Himmah, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2019; LL.M. University of Groningen 2020)  
**Disriani Latifah, S.H., M.H., M.Kn.**  
(S.H. FHUI 2002; M.H. FHUI 2005; M.Kn. FHUI 2011)  
**Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.**  
(S.H. FHUI 2002; M.E. FEUI 2009)  
**Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., Dr.**  
(S.Kom. Universitas Gunadarma 1993; S.H. FHUI 1994; C.M. University of Washington 2004; Dr. FHUI 2009)  
**Endah Hartati, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 1999; M.H. FHUI 2004)  
**Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1995; M.H. FHUI 2002; Dr. FHUI 2009)  
**Farida Prihatini, S.H., CN., M.H.**  
(S.H. FHUI 1985; CN. FHUI 1996; M.H. FHUI 1996)  
**Fatmawati, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1996; M.H. FHUI 2002; Dr. FHUI 2009)  
**Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 2001; M.H. FHUI 2006; Dr. FHUI 2019)  
**Fernando Manullang, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 2000; M.H. FHUI 2008; Dr. FIB UI 2014)  
**Fitra Arsil, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 2000; M.H. FHUI 2004; Dr. FHUI 2015)  
**Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1998; M.H. FHUI 2005; Dr. FHUI 2015)  
**Flora Dianti, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 2001; M.H. FHUI 2004; Dr. Universitas Pelita Harapan 2018)  
**Freddy Harris, S.H., LL.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1992; LL.M. University of Groningen 1998; Dr. FHUI 2007)  
**Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. Dr.**  
(S.H. FHUI 2002; M.Kn. FHUI 2005; Dr. FHUI 2021)  
**Gandjar L. Bonaprapta, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1995; M.H. FHUI 2003)  
**Gemala Dewi, S.H., LL.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1989; LL.M. American University 1999; Dr. FHUI 2011)  
**Ghunarsa Sujatnika, S.H., M.H.**  
(S.H., FHUI; M.H. FHUI 2016)  
**Gratianus Prikasetya Putra, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H., FHUI 2014; M.H. FHUI 2016; Dr. FHUI 2022)  
**Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2002; LL.M. American University 2004)  
**Hamid Chalid, S.H., LL.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1992; LL.M. Melbourne University 1998; Dr. FHUI 2009)  
**Hari Prasetyo, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 2012; M.H. FHUI 2015)  
**Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., Dr.**  
(S.H. FHUI 1994; M.Si. FEUI 2003; Dr. FHUI 2009)  
**Hasril Hertanto, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 2002; M.H. FHUI 2008)  
**Hendriani Parwitasari, S.H., M.Kn.**  
(S.H. FHUI 1998; M.Kn. FHUI 2010)  
**Hening Hapsari, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 2001; M.H. FHUI 2006)

**Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI., Dr.**  
(S.H. FHUI 2001; M.H. FHUI 2003; M.LI. University of Wisconsin 2004; Dr. FHUI 2019)

**Henry Darmawan Hutagaol, S.H., LL.M.**  
(S.H., FHUI 2007 ; LL.M. Universiteit Van Amsterdam 2010)

**Heru Susetyo, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.**  
(S.H. FHUI 1996; M.Si. FISIP UI 2003; LL.M. Northwestern University 2003; Ph.D. Mahidol University 2014)

**Iffah Karimah, S.H., M.Sc.**  
(S.H., FHUI 2007 ; M.Sc. University of Durham 2019)

**Iva Kasuma, S.H., M.Si.**  
(S.H. FHUI 2000; M.Si UI 2009)

**Junaedi, S.H., M.Si., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2002; M.Si. UI 2005; LL.M. Canberra University 2008)

**Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1985; M.H. FHUI 2003, Dr. FHUI 2016)

**Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., Dr.**  
(S.H. FHUI 2009; M.P.P. National University of Singapore 2013)

**Kurnia Togar Pandopotan Tanjung, S.H., M.E.**  
(S.H., FHUI 2011 ; M.E. FEUI 2016)

**Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.**  
(S.H. FHUI 1987; LL.M. University of Washington 1998; Ph.D. University of Washington 2012)

**Lauditta Humaira, S.H., M.Kn.**  
(S.H., FHUI 2014 ; M.Kn. FHUI 2017)

**Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si., Dr.**  
(S.H. FHUI 1996; M.Si. FISIP UI 2002; Dr. FISIP UI 2014)

**Lita Arijati, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 1986; LL.M. University of Florida 1997)

**M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A., Dr.**  
(S.H. FHUI 2002; M.A. Onati International Institute for The Sociology of Law 2007; Dr. FHUI 2021)

**Marliesa Qadariani, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 2001; M.H. FHUI 2006)

**Meirani Suyawan, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1996; M.H. FHUI 2004)

**Meliyana Yustikarini, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1999; M.H. FHUI 2005)

**Miftahul Huda, S.H., LL.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1986; LL.M. University of University of Melbourne 1997; Dr. FHUI 2010)

**Mohammad Novrizal, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 1992; LL.M. University of Groningen 1998)

**Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LL.M., Dr.**

(S.H. FHUI 2000; M.H. FHUI 2004; LL.M. Northwestern University 2006; Dr. FHUI 2019)

**Mutiara Hikmah S.H, M.H., Dr.**

(S.H. FHUI 1995; M.H. FHUI 2002; Dr. Universitas Pelita Harapan 2011)

**Nadia Maulisa, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 2002; M.H. FHUI 2008)

**Nathalina, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 1999; M.H. FHUI 2004)

**Nurwidyastanti, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 2000; M.H. FHUI 2005)

**Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M**

(S.H. FHUI 2002; LL.M. Kyushu University 2007)

**Patricia Rinwigati, S.H., M.I.L., Ph.D.**

(S.H. FHUI 1996; M.I.L Lund University ; Ph.D University of Uppsala)

**Priskila Pratita Penasthika, S.H., M.H., Ph.D**

(S.H. FHUI 2009; M.H. FHUI 2012; Ph.D Erasmus University, Rotterdam 2022)

**Qurrata Ayyuni, S.H., MCDR., Dr.**

(S.H. FHUI 2007; MCDR James Cook University 2012; Dr. FHUI 2022)

**R. Ismala Dewi, S.H., M.H., Dr.**

(S.H. FHUI 1987; M.H. FHUI 2001; Dr. FHUI 2010)

**Rafiqa Qurrata A'yun, S.H., M.H.**

(S.H. Brawijaya 2006; M.H. FHUI 2010)

**Ranggalawe Suryasaladin, S.H., M.H., LL.M.**

(S.H. FHUI 2000; M.H. FHUI 2003; LL.M. American University 2004)

**Ratih Lestarini, S.H., M.H., Dr.**

(S.H. FHUI 1985; M.H. FHUI 2000; Dr. FHUI 2014)

**Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI.**

(SH. FHUI 2001; M.LI. University of Wisconsin 2004)

**Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M., Dr.**

(S.H. FHUI 2001; LL.M University of Melbourne 2003; Dr. Universitas Pelita Harapan 2019)

**Ryan Muthiara Wasti, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 2013; M.H. FHUI 2016)

**Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 2013; M.H. FHUI 2016)

**Setyawati Fitrianggraeni, S.H., LL.M.**

(S.H. FHUI 2006; LL.M. University College London)

**Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H., Dr., CN.**

(S.H. FHUI 1986; CN. 1995; M.H. UI 1996; Dr. FHUI 2006)

**Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H. Dr.**

(S.H. FHUI 1998; M.H. FHUI 2005; Dr. FH UNPAD 2016)

**Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 1995; M.H. FHUI 2004)

**Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1998; M.H. FHUI 2003)

**Suparjo, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1994; M.H. FHUI 2002; Dr. FHUI 2014)

**Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1988; M.H. UI 1997; Dr. FHUI 2006)

**Teddy Anggoro, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 2007; M.H. FHUI 2010; Dr. FHUI 2015)

**Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 2002; M.H. FHUI 2007)

**Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A., Ph.D**  
(S.H. FHUI 2004; M.A. International Institute for the Sociology of Law. 2009; Ph.D. Humboldt-Universitat Zu Berlin 2018)

**Tirtawening, S.H., M.Si.**  
(S.H. FHUI 2005; M.Si FISIP UI 2011)

**Tiurma MP. Allagan, S.H., M.H., Ph.D**  
(S.H. FHUI 1995; M.H. FHUI 2006; Dr. University of Groningen 2019)

**Togi Marolop P Pangaribuan, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2006; LL.M. Harvard University 2011)

**Tri Hayati, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1984; M.H. FHUI 1994; Dr. FHUI 2012)

**Wahyu Andrianto, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 2002; M.H. FHUI 2005)

**Wenny Setiawati, S.H., M.L.I.**  
(S.H. FHUI 2002; M.L.I. University of Wisconsin 2004)

**Wirnyaningsih, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1992; M.H. FHUI 2002, Dr. FHUI 2018)

**Wiwiek Awiati, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1990; M.H. FHUI 2018)

**Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1998; M.H. FHUI 2001; Dr. FHUI 2010)

**Yetty Komalasari Dewi, S.H., ML.I., Dr.**  
(S.H. FHUI 1993; ML.I. University of Wisconsin 2003; Dr. FHUI 2011)

**Yoni Agus Setyono, S.H., M.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1987; M.H. FHUI 2001; Dr. FHUI 2008)

**Yu Un Oppusunggu, S.H., L.L.M., Ph.D.**  
(S.H. FHUI 2000; LL.M. Universiteit Leiden 2001; Ph.D. University of Washington 2015)

**Yuli Indrawati, S.H., L.L.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1992; LL.M. Ruprecht-Karls Universitaet Heidelberg 1998; Dr. FHUI 2018)

**Yunani Abiyoso, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 2007; M.H. FHUI 2012)

## • DOSEN TIDAK TETAP

**Abdul Karim Munthe, S.Sy., S.H., M.H.**

(S.Sy. UIN Syarif Hidayatullah; S.H. UIN Syarif Hidayatullah; M.H. FHUI 2016)

**Adolf Warouw, S.H. L.L.M.**

(S.H. FHUI; LL.M. Harvard University 1996)

**Agus Brotosusilo, S.H., M.A., Dr.**

(S.H. FHUI 1982; M.A. Brown University 1991; Dr. FHUI 2006)

**Agt. Supriyanto, S.H., S.S., M.H.**

(M.H. FHUI 2003)

**Ahmad Madison, M.H.**

(M.H. FHUI 2020)

**Alif Nurfakhri Muhammad, LL.M.**

(LL.M. Universiteit Leiden 2020)

**Arief T. Surowidjoyo, S.H., LL.M.**

(S.H. FHUI 1977; LL.M. University of Washington 1984)

**Ayu Galuh Anggraini, S.H. M.Kn.**

(M.Kn. FHUI 2018)

**Azizah Muhammad, S.H., M.M.**

(S.H. FHUI 1973; M.M. Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta 2009)

**Budi Darmono, S.H., MSA., MCL., Ph.D.**

(S.H. FHUI 1979; MSA University of Michigan 1984; MCLGeorge Washington 1986; PhD University of Melbourne 2005)

**Chudry Sitompul, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 1986; M.H. FHUI 2006)

**Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A., Ph.D.**

(S.H. Universitas Padjajaran 1987; M.A. The University of Hull 2002; Ph.D Johann Wolfgang Goethe Universitat 2014)

**David Maruhum Lumban Tobing, Dr.**

(Dr. FHUI 2015)

**Dessy Eko Prayitno, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 2003; M.H. FHUI 2019)

**Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 2019; M.H. FHUI 2021)

**Enny Koeswarni, S.H., M.Kn.**

(S.H. FHUI 1980; M.Kn. FHUI 2002)

**Fitriana, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI 2015; M.H. FHUI 2020)

**Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Dr.**

(S.H. FHUI 2013; M.Kn. FHUI 2015; Dr. FHUI 2020)

**Helena Purwanto Roring, S.H., M.H.**

(S.H. FHUI; M.H. FHUI 2002)  
**Heri Tjandrasari, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1975; M.H. FH UNTAR 2005)  
**Irham Virdi, S.H., M.Kn.**  
(M.Kn FHUI 2018)  
**Josi Khatarina, S.H., LL.M., Ph.D.**  
(S.H. FHUI 1999; LL.M. The University of Melbourne 2009; Ph.D. The University of Melbourne 2020)  
**Jufrina Rizal, S.H., M.A., Dr.**  
(M.A. Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales 2005)  
**Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D.**  
(S.H. FH Universitas Diponegoro 1991; LL.M. University of Nottingham 1995; Ph.D. University of Wollongong 2010)  
**Kristina Pranata, S.E., M.M.Ak.**  
(S.E. UNTAR 1996; M.M. FEUI 2002)  
**Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, Dr.**  
(Dr. FHUI 2009)  
**Lily Mulyati, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1976; M.H. FHUI 1992)  
**Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1981; LL.M. Nottingham 1991; Dr. FHUI 2009)  
**Makmur Amir, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1990; M.H. FHUI 2003)  
**Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., Dr.**  
(Dr. FHUI 2014)  
**Metha Ramadita, M.H.**  
(M.H. FHUI 2018)  
**Miftah Farid Hanggawan, S.H., M.Si.**  
(M.Si FISIP UI 2015)  
**Mohamed Idwan Ganie, S.H., Dr.**  
(S.H. FHUI 1977; Dr. University of Hamburg 1983)  
**Muhammad Dzadit Taqwa, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 2018; LL.M. The University of Melbourne 2020)  
**Myra Rosana Bachtiar, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1981; M.H. FHUI 2001)  
**Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D.**  
(S.H. FHUI 1987; M.H. FHUI 2000; Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia 2013)  
**Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Dr.**  
(S.H. FHUI 1985; M.H. 1993; Dr. 2003)  
**R. Narendra Jatna, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 1994; LL.M. University AIX Marseille 2003)  
**Retno Murniati, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1979; M.H. UI 1985)

**Rizky Banyualam Permana, LL.M.**  
(LL.M. Universiteit Maastricht 2019)

**Sophian M. Martabaya, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1982; M.H. FH UNPAD 2014)

**Sri Mamudji, S.H., MLL.**  
(S.H. FHUI 1974; MLL. University of Washington 1981)

**Sulaikin Lubis, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1975; M.H. UI 1995)

**Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI ; M.H. FHUI 2000)

**Thorkis Pane, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 1986; M.H. FHUI 2013)

**Tien Handayani, S.H., M.Si.**  
(S.H. FHUI 1977; M.Si. UI 1995)

**Timur Sukirno, S.H., LL.M.**  
(S.H. FHUI 1989; LL.M. Boston University 1991)

**Titi Anggraini, S.H., M.H.**  
(S.H. FHUI 2001; M.H. FHUI 2005)

**Vivi Novita Rido, S.H., M.Kn**  
(S.H. FHUI ; M.Kn FHUI 2003)

**Wasis Susetio, S.H., M.H., Dr.**  
(M.H. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 2009; Dr. Universitas Brawijaya 2015)

**Winarno Yudho, S.H., M.A.**  
(S.H. UNAIR 1979; M.A. Ohio University 1982)

**Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H.**  
(M.H. FHUI 2006)

**Yozua Makes, S.H., LL.M., M.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1980; LL.M. University of California Berkeley 1991; M.M. Asian Institute of Management; Dr FHUI 2015)

**Yunus Husein, S.H., LL.M., Dr.**  
(S.H. FHUI 1980; LL.M. American University 1986; Dr. FHUI 2003)

**Yvonne Kezia Dhianingtyas Nafi, S.H., LL.M.**  
(LL.M. Universiteit Van Amsterdam 2012)

**Zahrashafa Putri Mahardika, S.H., M.H.**  
(S.H. Universitas Padjajaran 2017; M.H. FHUI 2019)

**Zainal Arifin, Drs., S.H., M.H.**  
(Drs. IAIN Syarief 1976; S.H. FHUI 1982; M.H. FHUI 1998)



# Fasilitas

Fakultas Hukum Universitas Indonesia memiliki fasilitas yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa dari semua program yang ditawarkan. Fasilitas tersebut terdapat di dua lokasi yaitu kampus Depok dan Salemba.

## • KAMPUS DEPOK

**Ruang Kelas Multimedia** yang berjumlah 28 ruangan berpendingin udara dengan fasilitas penunjang berupa perangkat komputer, sistem tata suara, *overhead projector* maupun LCD dan internet.

**Ruang Kelas Hybrid** yang berjumlah 16 ruangan.

**Akses Internet Nirkabel (wi-fi)** dapat diakses di setiap ruang dan halaman gedung.

**Sarana Telekonferensi (*teleconference*)** memungkinkan dilakukannya kuliah/seminar jarak jauh dengan koneksi internet khusus.

**Ruang Soemadipradja & Taher** dapat digunakan untuk *teleconference*, *video conference*, seminar, pelatihan dan perkuliahan yang dapat menampung 100 orang.

**Auditorium Djokosoetono** dapat menampung hingga 610 orang dan dapat dipergunakan untuk kegiatan seminar, promosi doktor, konferensi, acara-acara budaya dan perkuliahan.

**Balai Sidang Djokosoetono** dapat menampung hingga 250 orang dan dapat dipergunakan untuk kegiatan seminar, promosi doktor, konferensi, acara-acara budaya dan perkuliahan.

**Laboratorium dan Klinik Hukum** memiliki ruang diskusi, rapat dan dilengkapi akses internet yang dapat digunakan antara lain untuk berlatih pembuatan kontrak, sidang peradilan semu atau diskusi-diskusi ilmiah.

**Ruang Peradilan Semu (*Moot Court*)**. Fakultas memiliki dua ruang *moot court*: pertama, bertempat di Gedung D lantai dasar dapat menampung 59 orang yang memiliki fasilitas *video conference*; kedua, ruang *moot court* Hafni Sjahrudin yang terletak di gedung E lantai dasar berkapasitas 38 orang.

**Koleksi Perpustakaan** diantaranya buku referensi, jurnal ilmiah, majalah dan buletin, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, mikrofis, pidato pengukuhan Guru Besar, koleksi langka dan lain-lain. Semua koleksi ini dapat dibaca di Perpustakaan Pusat UI.

**Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum** memiliki koleksi berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan, *Staatsblad van Nederlandse Indie*, *Nederlandse Jurisprudentie*, majalah-majalah hukum serta buku-buku referensi dalam dan luar negeri. Pelayanan informasi dan data salinan cetak maupun digital disediakan untuk kepentingan umum dan terutama sivitas akademika.

**Basis Data Elektronik** *Westlaw*, *HeinOnline*, *JSTOR*, *Springerlink*, *Proquest* dan lain sebagainya disediakan sebagai sumber rujukan penelitian ilmiah sivitas akademika yang dapat diakses di lingkungan UI melalui website UI dan Fakultas Hukum melanggan *Cambrige Law Report*.

**Resource Room dan Student Hall Soerjono Soekanto** merupakan ruang baca berkapasitas 40 orang dan juga memiliki 2 (dua) Ruang Diskusi Kecil (*Small Discussion Room*) dengan kapasitas 4-6 orang yang dilengkapi dengan Infocus. Ruangan ini menyatu dengan Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum.

**Ruang Rapat DGBF dan SAF** merupakan ruang multifungsi dengan kapasitas masing-masing 43 orang.

**Ruang Rapat Prof. Soekardono** merupakan ruang multifungsi dengan kapasitas masing-masing 40 orang.

**Koperasi Mahasiswa (KOPMA)** dan **Koperasi Karyawan Yustisia** menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa dan umum seperti buku teks, buku tulis, alat tulis, cendera mata, jasa foto kopi dan jasa pengiriman dokumen dan barang. Kedua koperasi ini terletak di Lantai 2 Kantin Mahasiswa FHUI.

**Kantin** terletak di Gedung G menyediakan berbagai macam makanan dan minuman bercita rasa Indonesia maupun dengan harga terjangkau. Kantin ini juga merupakan wadah informal untuk berdiskusi dan bersantai sejenak bagi sivitas akademika untuk melepas penat di antara jam-jam kuliah.

**Taman Pelataran FHUI** yang terletak di samping Gedung D, dapat digunakan oleh sivitas akademika FHUI untuk mengadakan berbagai acara seni budaya dan akademik.

**Lapangan Olahraga** dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti bulutangkis, bola basket, bola voli, senam dan juga futsal. Selain itu lapangan olahraga kerap juga digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan.

**Asrama Universitas Indonesia** berpenghuni 1.745 orang. Fasilitas kamar untuk Putri 1 orang/kamar, sedangkan untuk putra 2-3 orang/kamar. Fasilitas kamar terdiri dari tempat tidur, meja belajar, kursi dan rak buku.

**Balairung Universitas Indonesia** merupakan aula besar dengan kapasitas  $\pm$  5.000 orang, biasa dipergunakan untuk Wisuda, pameran dan lain-lain yang terletak di samping danau Kenanga dan Gedung Rektorat UI.

**Stasiun Kereta** di Universitas Indonesia ada 2 (dua) yaitu Stasiun UI dan Stasiun Pondok Cina. Masing-masing stasiun ini hanya berjarak  $\pm$ 200 m dari Fakultas Hukum UI dan dilintasi kereta *commuter line* Jabodetabek.

**Mushalla** Prof. H. M. Daud Ali terletak di samping Gedung E FHUI.

**Ruang Kesehatan & Nursery Room** terletak di gedung C FHUI.

**Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia** terletak di samping Fakultas Hukum UI.

**Elevator** tersedia di Gedung C, D, dan F.

**Jaringan ATM BNI** terletak di Gedung D FHUI. Selain itu tersedia juga Bank dan Jaringan ATM lain di berbagai tempat di area kampus UI.

**Sarana transportasi** bis kampus Universitas Indonesia yang biasa disebut “bis kuning” dan sepeda yang dapat digunakan secara gratis di dalam area kampus setiap hari kuliah. Pengguna bis umum dan angkutan kota dapat dengan mudah mengakses kampus lewat halte utama UI di Jl. Raya Lenteng Agung.

**Lingkungan asri, hijau, dan bebas asap rokok** di lingkungan fakultas dilengkapi dengan taman, bangku-bangku, saklar, serta akses internet untuk belajar dan diskusi.

**Keamanan Kampus** selalu berkordinasi dengan satuan pengamanan Universitas dan Kepolisian setempat dalam mengamankan area kampus. Fakultas Hukum dilengkapi dengan 112 buah kamera CCTV, 71 buah APAR. Selain itu dilengkapi juga dengan jalur evakuasi untuk keadaan darurat.

**Student Center** yaitu ruang-ruang kegiatan kemahasiswaan serta sekretariat beberapa lembaga mahasiswa yang terletak di gedung F.

**Sarana Penyandang Disabilitas** telah disediakan di beberapa tempat antara lain parkir khusus, kamar mandi, akses menuju semua gedung di mana perkuliahan diselenggarakan.

**Museum FHUI** memuat sejarah Fakultas Hukum sejak masa Belanda sampai sekarang. Museum ini dilengkapi dengan memorabilia seperti toga Prof. Djokosoetono (Dekan Pertama FHUI), Patung Dewi Keadilan, beberapa Manuscript, Buku Langka, Studio Room dan Foto.

- **KAMPUS SALEMBA**

**Ruang Kelas Multimedia** berjumlah 16 ruangan berpendingin udara yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sistem tata suara, proyektor overhead maupun digital, kabel akses internet (LAN) dan berpendingin udara. Ruang kelas ini diperuntukkan bagi mahasiswa Magister dan Doktoral.

**Ruang Kelas Hybrid** yang berjumlah 10 ruangan.

**Ruang Video Conference** merupakan ruang multifungsi dengan fasilitas multimedia dan digunakan baik untuk ujian ataupun kuliah *Teleconference*.

**Akses Internet Nirkabel (Wi-Fi)** melingkupi sebagian besar area kampus.

**Selasar Mahasiswa “Koesnadi Hardjasoemantri”** merupakan tempat yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk melakukan diskusi informal.

**Ruang Koleksi (*Reference Room*)** merupakan ruang baca dengan koleksi lebih dari 5.000 buku terbitan asing terbaru. Sebagian besar Koleksi Buku merupakan sumbangan dari beberapa Guru Besar.

**Masjid At-Tauhid Arief Rahman Hakim** merupakan masjid simbol perjuangan mahasiswa angkatan 1966 dan kerap digunakan sebagai pusat dakwah mahasiswa. Masjid ini terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan perpustakaan dan ruang serbaguna.

**Galeri ATM dan Bank BNI** memberikan kemudahan bagi civitas akademika untuk melakukan transaksi perbankan.

# Kemahasiswaan

## • ORGANISASI MAHASISWA

Di dalam lingkungan FHUI terdapat beberapa organisasi mahasiswa, yang dapat dibedakan menjadi Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Otonom (BO) dan Badan Semi Otonom (BSO).

### 1. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)

BPM merupakan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan koordinatif di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa FHUI (IKM FHUI)

Kepengurusan BPM FHUI Periode 2022:

<b>Ketua Umum</b>	: Andi Fauzan Bachtiar
<b>Wakil Ketua Umum I</b>	: Pranklin Nata Rosmarikas Pardede
<b>Wakil Ketua Umum II</b>	: M. Adivian Hazakwan
<b>Sekretaris Jenderal</b>	: Hezekia Putri Talenta
<b>Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi</b>	: Tiffany Natawidjaja
<b>Bendahara Umum</b>	: Shafa Andien

### 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

BEM FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif di dalam IKM FHUI.

Kepengurusan BEM FHUI Periode 2022:

<b>Ketua</b>	: Adam Putra Firdaus
<b>Wakil Ketua</b>	: Fadel Muhammad Suaib
<b>Sekretaris Umum</b>	: Habil Billah Maulana
<b>Bendahara Umum</b>	: Zahwa Namora Siregar
<b>Kepala Kantor Komunikasi &amp; Informasi</b>	: Gracella Tabhitha Vivian
<b>Koordinator Bidang Sosial Politik</b>	: Timothy Andrue Sambuaga
<b>Koordinator Bidang Akademik &amp; Profesi Hukum</b>	: Gaby Febriani
<b>Koordinator Bidang Kemahasiswaan</b>	: Taufiq Athallah

**Biro Penelitian dan Pengembangan**

Kepala : Ali Mutthahari  
Wakil Kepala : Nadila Mahilaveda

#### **Biro Kesekretariatan**

Kepala : Tri Velna E.  
Wakil Kepala : Retha Soraya A.

#### **Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kepala : Madeline S E.  
Wakil Kepala : Reshita A. D.

#### **Biro Keuangan**

Kepala : Mayang Imani  
Wakil Kepala : Kirana Dewata

#### **Biro Media dan Relasi Alumni**

Kepala : Glorya Eryana  
Wakil Kepala : Hanifah Alamsyah

#### **Biro Hubungan Masyarakat**

Kepala : Alleghia Savanah  
Wakil Kepala : Gabriel Maranatha

#### **Departemen Kajian dan Aksi Strategis**

Kepala : Prisakanti M.Q.  
Wakil Kepala I : Mikaela R.E.  
Wakil Kepala II : Daniel Winarta

#### **Departemen Pengabdian Masyarakat**

Kepala : Raynal Musfiel  
Wakil Kepala I : Dina F. Herllina  
Wakil Kepala II : M. Oza Krisnawan

#### **Departemen Advokasi**

Kepala : Olivia Magdalena A.  
Wakil Kepala I : Miranda Farahdina  
Wakil Kepala II : Adinda Hafni H.

#### **Departemen Pendidikan dan Keilmuan**

Kepala : Rasti Apriliani  
Wakil Kepala I : Peter Alexander  
Wakil Kepala II : Yoshio Haryo

### **Departemen Pengembangan Karier**

Kepala : Fayadiva H. Birowo  
Wakil Kepala I : M. Gifari Ashari  
Wakil Kepala II : Fathrine Putri R.

### **Departemen Olahraga**

Kepala : Rico Reynardo  
Wakil Kepala : M. Rafisya Akbar

### **Departemen Seni dan Budaya**

Kepala : Eric Gregory  
Wakil Kepala I : Klose Mikhael R.  
Wakil Kepala II : Josheline C. Myrtle

### **Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dan Badan Semi Otonom**

Kepala : Darren Davin N.  
Wakil Kepala : A. Reza Maulana

## **3. Badan Otonom (BO)**

BO merupakan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang mandiri secara administratif, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan organisasi. Saat ini, terdapat 4 (empat) BO di FHUI sebagai berikut:

**a. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Indonesia (ALSA LC UI)**

ALSA LC UI merupakan bagian dari ALSA National Chapter Indonesia yang bertujuan untuk membantu anggotanya mengembangkan nilai-nilai ALSA yang berwawasan internasional, bertanggung jawab secara sosial, berkomitmen secara akademis, dan terampil secara hukum.

**Director: Aliya Ilysia Irfana Ampri**

**b. Koperasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (KOPMA FHUI)**

KOPMA FHUI merupakan lembaga kemahasiswaan yang menampung potensi kewirausahaan mahasiswa dengan fasilitas sebuah gerai/kios yang menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa dari makanan hingga buku-buku kuliah

**Ketua Umum: Abni Nur Aini**

**c. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI)**

LK2 FHUI merupakan lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang riset dan kajian permasalahan hukum. Tujuan didirikannya LK2 FHUI adalah sebagai pembentuk insan akademis yang mampu memberikan kontribusi bagi

perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum, sehingga mahasiswa dapat menentukan tempatnya di dunia ilmu pengetahuan.

**Direktur Eksekutif: Muhammad Firman**

**d. Pers, Fotografi, Film, dan Musik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PERFILMA FHUI)**

PERFILMA FHUI merupakan organisasi di FHUI yang mengasah kemampuan pers, fotografi, film dan musik di lingkup kampus khususnya lingkup FHUI. Tujuan dari PERFILMA adalah menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas dan juga menambah pengetahuan di bidangnya.

**Ketua: Halida Mutiara Dhia**

#### **4. Badan Semi Otonom (BSO)**

BSO FHUI merupakan Lembaga Kemahasiswaan yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi IKM FHUI dalam suatu bidang peminatan bakat dan/atau pelayanan keagamaan di FHUI yang berada di bawah BEM FHUI. Saat ini, terdapat 19 BSO FHUI sebagai berikut:

**a. Senantiasa Ramah Bernuansa Islam (SERAMBI FHUI)**

SERAMBI merupakan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi lembaga dakwah pada kegiatan keagamaan Islam di FH UI. SERAMBI menjadi wadah bagi setiap mahasiswa dan/atau mahasiswi muslim di FHUI untuk memperluas syiar Islam dan menebarkan kebermanfaatannya kepada sesama, khususnya di lingkungan FH UI

**Ketua: Arsyiella Azzahra**

**b. Persekutuan Oikumene (PO FHUI)**

PO FHUI merupakan BSO yang hadir sebagai wadah untuk mahasiswa/mahasiswi Kristen di FH UI dalam memperlengkapi diri dan bersekutu.

**Koordinator: Vina Natalia**

**c. Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK FHUI)**

KMK FHUI merupakan BSO yang menjadi wadah bagi mahasiswa/i Katolik FHUI untuk membangun semangat persaudaraan dan cinta kasih Tuhan serta membentuk setiap pribadi menjadi penerang bagi sekitarnya.

**Koordinator: Dipa Oryza Ananta**

**d. Business Law Society FHUI (BLS FHUI)**

BLS FHUI merupakan BSO yang bergerak dalam lingkup seputar hukum bisnis. Tujuan dari dibentuknya BLS FH UI adalah menjadi wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran bagi IKM FHUI mengenai permasalahan dan isu-isu dalam bidang hukum bisnis.

**Direktur Eksekutif: Irfan Yunus**

- e. **The International Law Moot Court Society (ILMS)**  
ILMS FHUI merupakan BSO yang fokus terhadap isu-isu hukum internasional, khususnya kompetisi peradilan semu internasional.  
**President: Ihsan Oepangat**
  
- f. **Law Students Association for Legal Practice FHUI (LaSALe FHUI)**  
LaSALe FHUI merupakan BSO yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa/i FHUI di bidang praktik hukum, baik praktik pidana maupun perdata.  
**Direktur Eksekutif: Amirah Hisna**
  
- g. **Indonesian Law Debating Society FHUI (ILDS FHUI)**  
ILDS FHUI merupakan BSO yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa/i FH UI dalam berpikir kritis serta mengikuti kompetisi-kompetisi debat hukum nasional maupun regional.  
**Direktur Eksekutif: Frans Anugerah Lase**
  
- h. **Recht Football Club FHUI (RFC FHUI)**  
RFC FHUI merupakan BSO Olahraga yang fokus terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa/i FHUI di bidang sepak bola dan futsal.  
**Ketua: Dhava Bintang**
  
- i. **Recht Basketball Club FHUI (RBC FHUI)**  
RBC FHUI merupakan BSO Olahraga yang fokus terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa/i FHUI di bidang basket.  
**Ketua: Albert Ganda**
  
- j. **Darecho Badminton Club FHUI (DBC FHUI)**  
DBC FHUI merupakan BSO Olahraga yang fokus terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa/i FHUI di bidang bulu tangkis.  
**Ketua: Ja'far Alhamid**
  
- k. **Taekwondo FHUI**  
Taekwondo FHUI merupakan BSO Olahraga yang fokus terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa/i FHUI di bidang taekwondo.  
**Ketua: Muhammad Nurfaizi Penanggungungan**
  
- l. **Law Table Tennis Club FHUI (LTTC FHUI)**  
LTTC FHUI merupakan BSO Olahraga yang fokus terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa/i FHUI di bidang tenis meja.  
**Ketua: Andi Rassya Akbar**
  
- m. **Law's Art Performers FHUI**

Law's Art Performers (LAWPER) adalah satu-satunya Badan Semi Otonom di bidang Kesenian yang juga menjadi wadah bagi IKM FH UI untuk mengembangkan bakat serta minat mereka sebagai pelaku dan penikmat seni.

**Direktur Eksekutif: Lutfiah Ariani**

## • PRESTASI MAHASISWA

Berikut adalah prestasi internasional dan nasional yang diraih oleh mahasiswa/i FHUI pada tahun 2021:

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
1.	LKTI Nasional BEM FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang	Juara 1	Online, 4 Januari 2021	Muhamad Aria Dika Brajamusti Satryo Martasuanda (2019)
2.	Darma Cendika Law Competition 2020 Universitas Darma Cendika	Juara 1	Online, 10 Januari 2021	Lisella Martan (2018) Michelle Angely (2018)
3.	National Moot Court Competition Piala Tjokorda Raka Derana VI Universitas Udayana	Juara 3	Online, 23 - 24 Januari 2021	Irene Beathrine (2017) Yanesya Lastika (2017) I Made Diyosena (2018) Intan Permata Mipon (2018) Lidwina Goldenia (2018) Aditya Weriansyah (2019) Amira Hisana (2019) Aqila Maretasya (2019) Benedict Lumbangaol (2019) Danielle Tracie (2019) Marleen Josephine (2019) Melva Retha (2019) Stephen Antonius (2019) Tasya Ramadhani (2019) Wahyumi Illahidayah (2019) Yabunaya Salsabila (2019)
4.	Lomba Esai Nasional HMJ Asuransi Syariah 2021 UIN Antasari Banjarmasin	Juara 1	Online, 18 - 19 Januari 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
5.	Lecture 2.0 Esai Nasional BSLC BINUS University	Juara 1	Online, 25 - 28 Januari 2021	Shofiyah Adila Farhana (2018)
6.	The 11th Annual Indonesia Willem C. Vis Pre Moot	Runner Up Team & Dennis Lubis as Second Best Oralist	Online, 8 - 9 Februari 2021	Salma Prihandani (2017) Sebastian Sormin (2018) Aisyah Salsabilla (2019) Muhammad Dennis Lubis (2019) Daniel Regis (2020) Gracella Maureen (2020)
7.	LKTI Universitas Internasional Batam	Juara 3	Online, 25 Februari 2021	Alexander Stanislaus J. W. Toar Harryandi (2018) Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan (2018) Yonathan Wirajaya Wilion (2018)
8.	Model World Trade Organization 2021	Best Delegate & Presenter of Final Resolution	Online, 10 - 15 Maret 2021	Deavina Christy (2018) Justin Alexander Halim (2018) Nadiah Salsabilla (2018)

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
9.	Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition	Top 48 Teams at the Global Rounds (out of 570 teams) Ranked 11th, Best Overall Respondent Side Ranked 38th, Hardy C. Dillard Awards (Best Combined Memorials)	Online, 13 Maret - 18 April 2021	Daniel Nicholas Pakpahan (2017) Michelle Natashia Christyanto (2017) Alda Leony Winarto (2018) Almer Theda Alana (2019)
10.	Sebelas Maret Essay Competition & Investment Seminar 2021	Juara 1	Online, 20 Maret 2021	Maula Yusuf Ibrahim (2020)
11.	The 28th Annual Willem C. Vis Moot	Honorable Mention Martin Domke Award for The Best Individual Oralists	Online, 27 Maret - 1 April 2021	Gracella Maureen (2020)
12.	Kongres Nasional Paham Hukum	Best Delegate	Online, 27 - 28 Maret 2021	Nicholas Martua Siagian (2020)
13.	Indichment Competition ALSA Legal Competition	Juara 1	Online, 7 - 12 April 2021	Naja Nurizkya (2019) Richard Goenawan (2019) Budiman Prawiroatmojo (2020)
14.	Youth International Science Fair	Gold Medal dan Grand Award	Online, 9 - 11 April 2021	Raissa Zhafira (2019)
15.	Negotiation Competition ALSA Legal Competition 2021	Juara Harapan 1	Online, 12 April 2021	Eifellyne Jovanca Bandi (2019) Sadam Permana (2019)
16.	Essay Nasional Economic Education Fair 2021 Universitas Lampung	Juara Harapan 1	Online, 21 - 23 April 2021	Christina Faith Daniella Panggabean (2018)
17.	Essay Competition UNNES	Juara 1	Online, 30 April - 8 Mei 2021	Tazkia Nafs Azzahra (2020)
18.	European Model United Nations	Best Delegate of Human Rights Council	Online, 13 - 16 Mei 2021	Aliya Ilysia Irfana Ampri (2019)
19.	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional STIKES Bina Usada	Juara 3	Online, 22 Mei 2021	Permata Zahra Rosandra (2020) Vilia Evani Silalahi (2020) Yobel Manuel Oktapianus Rajagukguk (2020)
20.	Scientific Paper Competition PPI Tiongkok	Juara 3	Online, 22 Mei 2021	Reviana Ditya (2018) Tiara Ariqah Yunizar (2018) Yohanna Amelia Simanjuntak (2018)
21.	Essay Competition Universitas Katolik Widya Karya Malang	Juara 2	Online, 5 - 21 Mei 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
21.	National Business IT Plan Competition Institut Teknologi Telkom	Juara 2	Online, 22 Mei 2021	Tazkia Nafs Azzahra (2020)
22.	Lomba Esai Nasional HIMA PGSD Kampus 1 UNY	10 Esai Terbaik	Online, 22 Mei 2021	Richard Goenawan (2019)
23.	PSA Law Competition 2021	Juara 3	Online, 4 - 22 Mei 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
24.	Papua Open Virtual Taekwondo Championship 2021	Juara 2	Online, 29 - 31 Mei 2021	Muhammad Nurfaizi Penanggungan (2019)

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
25.	Noble Peace Prize Laureate Essay Writing Competition 2021	Champion	Online, Mei 2021	Ricky Hendrika (2019)
26.	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia 2021	Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Rumpun Sosial dan Humaniora	Online, 5 Juni 2021	Nurul Zamzami (2018)
27.	ALSA Legal Opinion Competition Local Chapter Universitas Sriwijaya	Juara 1	Online, 5 - 14 Juni 2021	Cut Divina Ardelia Daud (2019) Nabila Azzahra Alwini (2019) Ranesya Nararya (2019)
28.	ALSA Legal Opinion Competition Local Chapter Universitas Sriwijaya	Juara 2	Online, 5 - 14 Juni 2021	Agatha Moy (2018) Nabilah Anika (2018) Priscilla Angela Violetta (2018)
29.	International Criminal Court Moot Court Competition 2021	39th Overall Rank in the Global Rounds Nomination for Best Speaker Award (Raushan Aljufri)	6-27 Juni 2021	Raushan Aljufri Christou Imanuel Yasmine Dwihanjani Amanda Fathia Nur Izzati Iona Lathifa
30.	Singapore Model United Nations	Best Small Delegation Awards & Outstanding Delegate at African Union	Online, 7 - 10 Juni 2021	Ardia Khairunnisa Setiawan (2020) Faiza Afelia Maheswari (2020) Raihan Maulana Fajri (2020)
31.	Lomba Karya Essay FH Mengajar FH UPN Veteran Jawa Timur	Juara 1	Online, 14 Juni - 16 Juli 2021	Farras Zidane Diego Ali Farhan (2020)
32.	National Business Model Competition STIE Dewantara	Juara 1	Online, 15 Juni 2021	Difa Zahra (2019) Mohamad Yuflih (2019) Melody Akita (2020)
33.	2nd UNNES Law Festival 2021	Juara 3 Karya Tulis Ilmiah	Online, 17 Juni 2021	Ammar Bramundito (2020)
33.	Kompetisi Esai Youth For The Future by Teens Go Green Indonesia & Plan Indonesia	Juara 1	Online, 21 Juni 2021	Farras Zidane Diego Ali Farhan (2020)
34.	KMPH UIN Saifuddin Zuhri National Essay Competition 2021	Juara 1	Online, 22 Juni 2021	Mollynda Ara Safia (2019)
35.	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Kopertis III	Juara 1	Online, 28 Juni 2021	Deavina Christy (2018) Ricky Hendrika (2019)
36.	Argument Open British Parliamentary Debate Competition	Champion, Grand Final Best Speaker, 3rd and 9th Best Speaker	Online, 3 - 4 Juli 2021	Deavina Christy (2018) Ricky Hendrika (2019)
37.	Lomba Esai Constellation CLC FH UNS	Juara 2	Online, 1 - 7 Juli 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
38.	Lomba Esai Constellation CLC FH UNS	Juara Harapan 2	Online, 1 - 7 Juli 2021	Richard Goenawan (2019)
39.	Essay Competition DEMA Legislative Drafting FH UNS	Juara 2	Online, 10 Juli 2021	Farras Zidane Diego Ali Farhan (2020)
40.	European International Model United Nations	Best Delegate	Online, 12 - 15 Juli 2021	Faiza Afelia Maheswari (2020)
41.	European International Model United Nations	Honorable Mention	Online, 12 - 15 Juli 2021	Aliya Ilysia Irfana Ampri (2019)
42.	Legal Opinion Competition LBH LAPAN 2021	Juara 1	Online, 12 - 23 Juli 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
43.	Gadjah Mada Business Law Legal Essay Competition	Juara 1	Online, 13 - 30 Juli 2021	Aliya Ilysia Irfana Ampri (2019) Muhammad Deckri A. (2019)
44.	Gadjah Mada Business Law Legal Essay Competition	Juara 2	Online, 13 - 30 Juli 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
				Yonathan Wirajaya Willion (2019)
45.	Kompetisi Esai Konsititusi FH UTM	Juara 2	Online, 15 Juli 2021	Tazkia Nafs Azzahra (2020)
46.	GO FIA 3.0 Universitas Indonesia	Juara 3 PUBG Mobile	Online, 17 Juli 2021	Laurensius Susilo Yunior (2019) Mohammad Reza Mahendra (2019) Muhammad Andrian Putra (2019) Tyrone Raul Rinaldi (2019) Muhammad Rafisy Akbar (2020)
47.	ALSA International Mediation Competition	2nd Place for Best Mediation Plan	Online, 23 - 25 Juli 2021	Nurul Zamzami (2018) M. Daviro Rafa Tampi (2019) Syifa Nashita Noegroho (2019) Haura Fatima (2020)
48.	ALSA International Mediation Competition	9th Best Overall Negotiator Team	Online, 23 - 25 Juli 2021	Muhammad Fariza Hanif Iskandar (2019) Priskilla Saur Novelia Br. Napitupulu (2020) Regita Eka Maritza (2020)
49.	Lomba Esai Dies Natalis ke-18 FH Universitas Mulawarman	Juara 1	Online, 23 - 25 Juli 2021	Farhan Khairi Adhan (2018)
50.	Debat Hukum Nasional Parahyangan Legal Competition 2021	Juara 2	Online, 23 - 25 Juli 2021	Alfauzi Rauf (2018) Eifellyne Jovanca Bani (2019) Sadam Permana (2019)
51.	Karya Tulis Ilmiah Parahyangan Legal Competition 2021	Juara 3	Online, 24 Juli 2021	Decmont Nuel Pasaribu (2018) Nabilah Anika (2018)
52.	NLDC Legal Competition 2021	Juara 1	Online, 25 Juli 2021	Frans Anugrah Lase (2019) Regina Margarettha (2019) Talitha Agatha (2019)
53.	FPCI Chapter UGM Call For Essay 2021	Top 3 Best Essay	Online, 25 Juli 2021	Anggita Andrea Larasati (2019)
54.	Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan Tingkat Nasional Universitas Islam Malang	Third Runner Up	Online, 31 Juli 2021	Dimas Fir Rizqi (2019)
55.	Kompetisi Paper Nasional Pekan Hukum Pidana Universitas Brawijaya 2021	Juara 3 & Presentasi Terbaik	Online, 5 Agustus 2021	Aditya Wayu Saputro (2018) Rayhan Andyara Milono (2018) Shafira Anna Medina (2018)
56.	Legal Opinion Competition Atmajaya Business Law Competition 2021	Juara 1	Online, 13 - 15 Agustus 2021	Muhammad Alif Umari (2019)
57.	Legal Opinion Competition Atmajaya Business Law Competition 2021	Juara 2	Online, 13 - 15 Agustus 2021	Sahda Edgina Nahdah (2018)
58.	Contract Drafting Competition Atmajaya Business Law Competition 2021	Juara 2	Online, 13 - 15 Agustus 2021	Anastasia Evelyn Soetanto (2018) Ayska Karissa (2018) Hilwa Az Zahra Adwani (2018) I Made Diyosena Bratadana (2018) Michelle Angely (2018) Pahlawan Jati Kusomo (2018)

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
59.	Photography Competition Indonesia Cultural Events (IMCE) 2021	Juara 2	Online, 18 - 20 Agustus 2021	Annisa Izzati (2019)
60.	ASEAN Youth Students Dialogue Competition	Best Delegate of Marine Regulation Chamber	Online, 21 - 22 Agustus 2021	Christou Imanuel (2019)
61.	Taxtival Tax Essay Competition	Third Runner Up	Online, 8-18 Agustus 2021	Adinda Putri Surjawan (2020); Ananda Rasya Nadhine (2020); dan Reynhart Henry Halomoan (2020).
62.	Legal Opinion Competition PMII FHUII	Juara 1	Online, 15 - 18 Agustus 2021	Nafila Andriana Putri (2020)
63.	Photography Competition Indonesia Malaysia Cultural Events (IMCE) 2021	2nd winner and favorite winner	Online, 18-20 Agustus 2021	Annisa 'Izzati (2019)
64.	CLSA NATIONAL CONFERENCE	TOP 5 SPEAKER OF CRIMINAL LAW STUDENT ASSOCIATION NATIONAL CONFERENCE 2021	Online, 29 Agustus 2021	Ristania Salsabila Putri (2018) Yonathan Wiryajaya Wilion (2018) Naja Nurizkya (2019)
65.	Lomba Essay Anti Discrimination Week 2021 Komisi Anti Diskriminasi dan Kesetaraan Gender BEM Unair	Juara 2	Online, 18 Juli - 30 Juli 2021	Farras Zidane Diego Ali Farhan (2020)
66.	Legal Opinion Competition Brawijaya Law Fair XII 2021	Juara 3 Legal Opinion Competition	Online, 8 Agustus 2021	Rafi Rahmat Ghozali (2019)
67.	THE 8th SOCIAL SCIENCE IN NATIONAL LAW COMPETITION	Juara 3 Critical Essay Competition		Muhammad Akbar Magistra Putra
68.	Constitutional Law Festival Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021	3rd Place and Best Presentation	Online, 5 September 2021	1. Almas Rioga Pasca Pratama (2018) 2. Mayang Devi Azhara (2018) 3. Ndaru Hidayatullah (2018) 4. Nadhifa Marsaa (2019) 5. Anjar Firstandy (2020)
69.	Pekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Juara 3 Contract Drafting	Online, 8 September 2021	Annisa Dwi Hapsari (2018) Miranda Asima (2018) Nathania Alifiani (2018) Raynold Ronaldo (2018) Sekar Rana Izdihar (2018)
70.	International Day of Democracy, National Essay BEM KM Unnes	2nd Place	Online, 15 September 2021	Ristania Salsabila Putri (2018), Nadya Jessica Junita (2018)
71.	Tend For Youth National Quiz Competiton (Lomba Cepat Tepat)	Juara 5 National Quiz Competiton Tend For Youth (Lomba Cepat Tepat)	Online, 12 Agustus 2021	Dimas Fir Rizqi (2019)
72.	National Quiz Competition 2 Tend For Youth (Lomba Cepat Tepat)	Juara 1 National Quiz Competition 2 Tend For Youth (Lomba Cepat Tepat)	Online, 10 September 2021	Hanna Arinawati (2018)
73.	Lambung Mangkurat Critical Essay Competition	Juara 1	Online, 30 Agustus 2021	Adennisa Cahya Pramesti

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
74.	Udayana Investment Week 2021	Juara 1 Kompetisi Artikel	Online, 12 Juli - 31 Agustus 2021	Muhammad Faqih
75.	Bharaduta Open 2	Medali Emas	Online, 11-12 September 2021	Muhammad Nurfaizi Penanggungan
76.	Lambung Mangkurat Critical Essay Competition 2021	Juara 2	Online, 19 September 2021	Sutan Pasha Umbara (2018)
77.	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia oleh Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek	Peraih Medali Emas	Online, 30 Oktober - 5 September 2021	1. Deavina Christy (2018) 2. Ricky Hendrika (2019)
78.	ALSA UB English Debate Competition	1. 2nd Runner Up 2. 2nd Best Speaker (Deavina Christy)	Online, 20 - 21 Oktober 2021	1. Deavina Christy (2018) 2. Ricky Hendrika (2019)
79.	ALSA International Moot Court Competition	Quarter Finalist and 4th Overall Ranking Team	Online, 3- 5 September 2021	Anggardha Anindito (2018) Adara Zalokha (2019) Agaputra Ihsan Oenpang (2019) Divka Talulla (2020) Gusti Ayu Made Irene Sarasvati (2020)
80.	National Agrarian Law Competition Piala Prof. Boedi Harsono 2021	1st Place and Best Paper Karya Tulis Ilmiah	Online, 25 September 2021	Ndaru Hidayatulloh (2018) Nadhifa Marsaa (2019) Anjar Firstandy (2020)
81.	Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa Nasional 7	- Juara 3 Legal Opinion Competition - Best Video	Online, 24 - 26 September 2021	Stephanie Ruriko Sondakh (2019)
82.	KERTAS LP2KI Universitas Hasanuddin	Best Paper KERTAS LP2KI Universitas Hasanuddin	Online, 25 September 2021	Fira Janice Natasha Sinuraya (2020), Giava Zahranisa (2020), dan Salsa Juanita (2020).
83.	The 21st ALSA English Challenge Competition	2nd Place of the 21st ALSA English Challenge Speech Competition	Online, 26 September 2021	Anggita Andrea Larasati (2019)
84.	Business Case Competition UNY Accounting Fair 2021	Juara 3	Online, 26 September 2021	Andri Halomoan Manullang (2019) Kenneth Emmanuel Senewe (2019) Ryan Kananggar (2019)
85.	Lomba Esai Nasional DPM FIP UTM	Juara 1	Online, 26 September 2021	Adam Putra Firdaus (2019)
86.	Call for Papers G20	Juara 3	Online, 28 Agustus 2021	Yonathan Wirajaya Wilion (2018)
87.	Kompetisi Esai Brawijaya Law Fair	Juara 3	Online, 12 September 2021	Yonathan Wirajaya Wilion (2018)
88.	Accounting Skill Competition UKDW	Juara 1	Online, 25 September 2021	Yonathan Wirajaya Wilion (2018)
89.	The 21st ALSA E-Challenge Model United Nations (MUN)	Honorable Mention of WHO	Online, 24-26 September 2021	Eileen Monica (2021)

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
90.	Law Students Entrepreneurship Competition (LASEC) 2021	Juara III Lomba Esai Nasional	Online, 4 September - 2 Oktober 2021	Iyolla (2020)
91.	The 21st ALSA English Challenge	Verbal Commendation of ECOSOC Council	Online, 24-26 September 2021	Fadlan Maulana Pramudya (2020)
92.	Asia Pacific MUN Competition	Diplomacy Award	Online, 1-3 Oktober 2021	Agatha Nadeen Angnandyta (2020)
93.	11th Warsaw FDI Pre-moot	Second Runner Up Team 5th best oralist - Alvin Natanael 6th best oralist - Syafailliyin Nurarini 7th best oralist - Qafaldi Putra Ismayudha 11th best oralist - Emilia Bunga Margaret 15th best oralist - Nayla Iqlima Asmoro	Online, 1-2 Oktober 2021	Alvin Natanael - 2018 Emilia Bunga Margaret - 2019 Qafaldi Putra Ismayudha - 2019 Syafailliyin Nurarini - 2019 Nayla Iqlima Asmoro - 2020
94.	Konferensi Nasional Administrasi Negara dan Call for Paper UPN "Veteran" Jawa Timur 2021	Best Paper	Online, 12 Oktober 2021	Anggie Fauziah Dwiliandari (2019) Satrio Alif Febriyanto (2019)
95.	Sriwijaya Law Fair	Juara 1	Online, 17 Oktober 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
96.	LSPR Model United Nations 2021	Most Outstanding and Verbal Commendation Award	Online, 15 Oktober 2021	Faiza Afelia Maheswari (FH UI 2020) - Most Outstanding Award Roka Hanan Firmansyah (FH UI 2020) - Verbal Commendation Award
97.	International Youth Leadership	Delegation for International Youth Leader Program Batch 34 Chapter United Stated of America	Online, 4 - 14 Oktober 2021	Nasya Ayudianti Ramadhani
98.	Pekan Hukum Nasional UNS 2021	Juara 1 Lomba Opini	Online, 20 Oktober 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
99.	The 6th International Dispute Negotiation Competition	Second-Highest Ranked Team & Best Negotiator	Online, 8 - 10 Oktober & 16 - 17 Oktober 2021	Aliya Ilysia Irfana Ampri (2019) Muhammad Deckri Algamar (2019)
100.	Lomba Debat APBN 2021, Kementerian Keuangan	Juara 2 dan Best Speaker	Online, 21 Oktober 2021	Alfauzi Rauf (2018) Ahmad Alfarizy (2020) Sadam Permana (2019)
101.	Musabaqah Tilawatil Qur'an Universitas Indonesia (MTQ UI)	Juara 2 Musabaqah Fahmil Qur'an (MFQ)	Online, 23 Oktober 2021	Muhammad Farhan Nugraha (2021) Rizka Ananda Harini (2021) Salsabila Usman Patamani (2021)

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
102	Musabaqah Tilawatil Qur'an Universitas Indonesia (MTQ UI)	Juara 2 Lomba Musabaqah Hifzil Qur'an Kategori 10 Juz Akhwat MTQ UI	Online, 16 Oktober 2021	Anisa Nawa Husnal Baroya (2021)
103	Musabaqah Tilawatil Qur'an Universitas Indonesia (MTQ UI)	Juara 3 Lomba Musabaqah Hifzil Qur'an Kategori 10 Juz Ikhwan MTQ UI	Online, 16 Oktober 2021	Muhammad Faris Rasyid
104	Musabaqah Tilawatil Qur'an Universitas Indonesia (MTQ UI)	Juara 3 Lomba Musabaqah Hifzil Qur'an Kategori 5 Juz Ikhwan MTQ UI	Online, 16 Oktober 2021	Raden Achmad Zaky Adi Nugraha
105	Musabaqah Tilawatil Qur'an Universitas Indonesia (MTQ UI)	Juara 1 Lomba Debat Kandungan Al-Qur'an Bahasa Arab MTQ UI	Online, 23 Oktober 2021	Diva Rizky 2021 Muhammad Faris Rasyid 2021
106	Internation Moot Court Competition	Octo Finalists 4th Best Oralist - Cut Meutia Rizkina Zagloel 7th Best Oralist - Raisha Heidi Rizqiana 7th Best Overall Memorials	Online, 19 - 20 Juni 2021	Cut Meutia Rizkina Zagloel - 2020 Raisha Heidi Rizqiana - 2020
107	Jogja International Model United Nations 2021	Best Delegate of United Nations Security Council (Aliya) Most Outstanding Delegate of United Nations Human Rights Council (Raihan)	Online, 22 - 24 Oktober 2021	Aliya Ilysia Irfana Ampri (2019) Raihan Maulana Fajri (2020)
108	Pekan Olahraga Nasional XX Papua	1 Medali Emas kategori Team 1 Medali Perunggu kategori Duet	Online, 5 - 7 Oktober 2021	Visky Sekar Floreta Pribadi
109	German News Reading (Nachrichten Lesen) Deutsche Woche XXV Unesa	Juara 1	Online, 16 Oktober 2021	Dimas Akmal Nurulhady (2019)
110	Diponegoro Law Fair 2021	Juara 1 Contract Drafting Competition Diponegoro Law Fair 2021	Online, 30 Oktober 2021	Cut Divina Ardelia Daud (2019) George Andreas Hasiholan (2019) Kalisha Nabila Permana Adi (2019) Mollynda Ara Safia (2019) Nabila Azzahra Abdul Kadir Said Alwini (2019) Pasha Umar Hubeis (2019)
111	Diponegoro Law Fair 2021	Juara 2 Contract Drafting Competition Diponegoro Law Fair 2021	Online, 30 Oktober 2021	Alvansa Vickya (2018) Andrew Nibrass Hariyoto (2018) Fathan Silmi (2018) Jocelyn Tjahjono (2018) Qadli Iyaldi (2018) Septarinda Bella Pramesti (2018)
112	ALSA Crushbone Competition Ver. 2 ALSA LC UGM	1st Place Winner of Paper Presentation Competition	Online, 29 - 31 Oktober 2021	Nasya Ayudianti Ramadhani

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
113	Call for Paper Competition IMAMAH UII 2021	Juara 2	Online, 26 Oktober 2021	Chairul Yaqin Marthin James Rafi Aulia Ibrahim
114	ALSA Legal Review Competition 2021 Universitas Hasanuddin	Juara 1 Legal Review Competition	Online, 5 November 2021	Nafila Andriana Putri (2020)
115	Pekan Hukum Nasional	Juara 1 Legal Opinion Competition	Online, 7 November 2021	1. Navesya Clara Choirunnisa (2018) 2. Sahda Edgina Nahdah (2018)
116	Foreign Direct Investment Moot Competition 2021	Global Rounds Top 32 Teams	Online, 28 Oktober - 3 November 2021	Alvin Natanael (2018) Emilia Bunga Margaret (2019) Qafaldi Putra Ismayudha (2019) Syafailliyin Nurarini (2019) Nayla Iqlima Asmoro (2020)
117	Lomba Esai Nasional Petikum FOSMI FH UNS (Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)	Juara 1	Online, 16 - 23 Oktober 2021	Athallah Zahran Ellandra
118	Pekan Hukum Nasional UNS 2021	Top 4 Best Scientific Writing Competition	Online, 7 November 2021	1. Muhammad Akbar Magistra (2020) 2. Tazkia Nafs Azzahra (2020) 3. Yobel Manuel Oktapianus (2020)
119	Pekan Hukum Nasional 2021	Juara 1 Contract Drafting Competition		1. Dzaki Prakoso W. (2019) 2. Paquita Aleysandra (2019) 3. Rifdah Rudi (2019) 4. Aulia Yasyfa Anwar (2020) 5. Faiz Idris Wiyasa (2020) 5. Timotius Benjamin Ebenezer (2020)
120	Lomba Esai Nasional KPK UINSUKA 2021	Juara 1	Online, 31 Oktober 2021	Ristania Salsabila Putri
121	Alsa Legal Review Competition Universitas Hasanuddin	Juara 2	Online, 5 November 2021	Ristania Salsabila Putri
122	Law Discussion Room (LDR) Competition PHN 2021 Piala Prof. K.G.P.H. Haryo Mataram, S.H.	Best Speaker LDR Competition	Online, 7 November 2021	Ristania Salsabila Putri
123	Essay Competition Justicia Business Week 2021 FH UGM	Juara III Essay Competition	Online, 15 - 26 Oktober 2021	Claudia Georgette Melik (2021), Fathiya Irfani Prameswari (2021), Rofy Candra Rusdiana (2021)
124	International Mediation Singapore 2021	Gold Medalist for Mediation Advocacy and Gold Medalist for Mediation	Online, 22 - 24 Oktober & 30 - 31 Oktober 2021	Nurul Zamzami (2018), Syifa Nashita Noegroho (2019), Priskila Saur Novelia Br. Napitupulu (2020), Regita Eka Maritza (2020)
125	Karya Tulis Ilmiah UIN LAW FAIR	Juara 3 Karya Tulis Ilmiah UIN LAW FAIR V	Online, 16 - 17 Oktober 2021	Afida Ilfa (2018) Farisa Azhara (2018) Shofiyah Adila Farhana (2018)
126	Essay Writing Competition FEC Expo UNJ	Juara 1	Online, 14 November 2021	Azizah Nadhira (2019)

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
127	Malikussaleh Scientific Competition 2021	Karya 7 Essay Terbaik	Online, 14 November 2021	Adennisa Cahya Pramesti
128	Pekan Progresif BEM FH Undip	Best Delegates	Online, 11 - 13 November 2021	Adam Putra Firdaus (2019) Aisyah Hasna Inaya (2020) Nur Kharisma Rais (2020)
129	Marvelaw UNNES Competition 2021	1st Place and Best Presentation Legal Opinion Competition	Online, 13 November 2021	Iyolla (2020) Nafila Andriana Putri (2020)
130	Marvelaw UNNES Competition 2021	Juara 1 Lomba Debat Hukum Nasional  Best Speaker: Kayla Aliyah (2021)	Online, 11 - 14 November 2021	Kayla Aliyah Putri (2021) Melinda Yunita Lasmaida Sirait (2021) Sandy Yudha Pratama Hulu (2021)
131	UNEJ Law Fair 2021 (Kompetisi Artikel Ilmiah Mahasiswa Hukum Tingkat Nasional)	Juara 1 (Hukum Perdata)	Online, 15 November 2021	Aditya Prathama Nanda Putra - 2019 Hanna Infrastuti Ardingrum Edrus - 2019 Hugo Satryo Mulyono - 2020
132	Universitas Negeri Jember (UNEJ) Law Fair 2021 Tema Kegiatan Pidana: Tinjauan Kritis Terhadap Formulasi RKUHP 2021	Juara 1 (Hukum Pidana)	Online, 15 November 2021	Alya Zafira (2019) Nadya Zahra Aulia (2019) Raquela Raya Tarigan (2019)
133	Palapa Legal Discussion II Tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Peserta Terbaik III	Online, 13 November 2021	Stephanie Ruriko Sondakh (2019)
134	ALSA Legal Writing Competition - Universitas Gadjah Mada	Second Runners Up of Legal Review Competition	Online, 22 October 2021	Aisha Kirana Revalina (2020) Muhammad Afredo Lazuardi (2020) Ramadya Bima Saputra (2020)
135	ALSA Legal Writing Competition - Universitas Gadjah Mada	First Runners Up of Legal Review Competition	Online, 22 October 2021	Aliya Ilysia Irfana Ampri (2019), Elaine Chairmandy Afla (2019), Sasha Brilliani Trison (2019)
136	ALSA Legal Writing Competition - Universitas Gadjah Mada	First Winner of Legal Opinion Competition	Online, 22 October 2021	Verina Marcilia (2019); Alda Eunique Napitupulu (2020); and Yohannes Maria Vianney Widoputranto (2020).
137	Konferensi Mahasiswa Hukum Nasional	Best Paper	Online, 19-21 November 2021	Muhammad Oza Krisnawan (2020) dan Adhityo Adyahardiyanto (2020)
138	Kompetisi Esai Nasional Formasi Law Fair 2021	Juara 1 Kompetisi Esai	Online, 14 November 2021	Andreas Darryl Silitonga (2020) Giava Zahrannisa (2020)
139	Padjajaran Law Fair XIII	Juara 1	Online, 28 November 2021	Sadam Permana (2019) Frans Anugerah Lase (2019) Tazkia Nafs Azzahra (2020)
140	Padjajaran Law Fair XIII	Juara 2 Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair XIII Piala Prof. Sri Soemantri 2021		Andreas Darryl Silitonga (2020) Anjar Firstandy (2020) Giava Zahrannisa (2020) Nur Fauzi Ramadhan (2020) Salsa Juanita (2020)
141	Kompetisi Nasional Pemuda dan Presidensi G20 Indonesia	Juara 3 Kompetisi Artikel Ilmiah Sarjana-1 (S-1)	Online, 19 November 2021	Anindytha Arsa Prameswari (2019) Bryan Eduardus Christiano

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
	Kementerian Koordinator Perekonomian RI			(2019) Prasasta Putra Tangkas (2019)
142 .	Lomba Penulisan Essay "Teladan Pancasila Aparatur Negara" BPIP RI	Juara Harapan 2 Kategori Pejabat Negara	Online, 31 Agustus 2021	Farras Zidane Diego Ali Farhan (2020)
143 .	Parahyangan National Model United Nations 2021	-Honorable Mention of United Nations Security Council (Aliya Ilysia Irfana Ampri) -Most Outstanding Delegate of United Nations Security Council (Raihan Maulana Fajri)	Online, 26-28 November 2021	Aliya Ilysia Irfana Ampri (2019) Raihan Maulana Fajri (2020)
144 .	International Negotiation Competition Indonesian National Round 2021	Champion	Online, 27-28 November 2021	Daniel Wiyarta Tenggara [2020] Aurizza Amanda Puteri [2020]
145 .	Global Impact SDG Case Competition	Champion	Online, 4 Desember 2021	Aliya Ilysia Irfana Ampri, Muhammad Deckri Algamar, Putri Artanti Batrisyia
146 .	National Essay Competition Biofair 2021	Juara 2	Online, 6 Desember 2021	Mollynda Ara Safia
147 .	English Speech WOW Competition Universitas Brawijaya	2nd Place	Online, 7 Desember 2021	Aurelia Cellin Bahtera (2019)
148 .				
149 .	Mahkamah Lead V	Juara 1 Lomba Esai Nasional	Online, 6-26 November 2021	- Adinda Putri Surjawan - Cut Meutia Rizkina Zagloel - Reynhart Henry Halomoan
150 .	Penghargaan Nasional Hakordia TAPAKSIAPI KPK RI 2021	Penerima Penghargaan Fasilitator Terbaik Nasional Hakordia TAPAKSIAPI KPK RI 2021	Online, 8 Desember 2021	Nicholas Martua Siagian
151 .	Trunojoyo Law Festival 2021	Juara 3 Legal Opinion Competition	Online, 13 Desember 2021	Alya (2020) Ananda Rasya Nadhine (2020)
152 .	KOMPETISI MEDIASI - NATIONAL TRUNOJOYO LAW FESTIVAL 2021	Juara 3	Online, 4 Desember 2021	Ines Krisantia (2019), Muhammad Ramziy Elsaadiy (2019), Puti Najlahana Wahyudi (2019), Sulthan Hanif Wicaksono (2019), Willy Wardana (2019), Valerie Pricillia (2019), Verina Marcillia (2019)
153 .	Formasi Law Fair 2021	Juara 3	Online, 22 November 2021	Nadya Jessica Junita (2018) Ristania Salsabila Putri (2018)
154 .	Andalas Law Competition 2021	Second Place	Online, 14 November 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
155 .	Lomba Esai Nasional 2021 "Magnesium: Make The Young Generation To Be Shining"	Juara 2 Esai Mahasiswa	Online, 15 Desember 2021	Dhia Amirah Deaz Putri

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
156	Lomba Debat Hukum Nasional Fordehkonsumero Law Fair	Juara 1	Online, 13-15 Desember 2021	Ahmad Alfarizy (2020) Giava Zahrannisa (2020) Tazkia Nafs Azzahra (2020)
157	Legal Opinion Competition Dialektika Eksternal LPM NOVUM FH UNS 2021	Juara 2	Online, 12 Desember 2021	Aurelia Cellin Bahtera (2019)
158	NACE COMPETITION LK2 FH UI 2021	6TH BEST NATIONAL LAW CRITICAL ESSAY COMPETITION FOR LAW STUDENT CATEGORY	Online, 15 November-1 Desember 2021	AMARADUHITA LAKSMI PRABHASWARI
159	Paper Presentation Competition NBLC Summit 2021	1st Winner	Online, 18 Desember 2021	Anggita Azzahra Pulungan (2020) Budiman Prawiroatmojo Danardana (2020) Puti Samara Zarifa Sastosatomo (2020)
160	Esai Energi dan Pertambangan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Second Place	Online, 12 Desember 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
161	Marketing Competition Entrepreneur Festival FEB Universitas Syiah Kuala 2021	Juara 2	Online, 11 November 2021	Arista Salsabila Hakimah
162	National Business Law Community: Internal Legal Opinion Competition	3rd Winner	Online, 4 Desember 2021	Irfan Yunus Muhammad Alif Umari
163	National English Essay Competition Universitas Sanata Dharma 2021	Juara 3	Online, 17 Desember 2021	Valerie Louisa Joanne Sondakh
164	The III ITLOS Moot Court Competition	Best Overall Memorial & Best Memorial for Applicant	Online, 8-10 November 2021	Agnes Claudia (2018) Hikmatu Shalihah (2018) Nadiyah Salsabila (2018) Talitha Marie Imomirara (2018) Edmund Khovey (2019)

Berikut adalah data prestasi mahasiswa FHUI periode Januari – Juni 2022:

No.	Nama Perlombaan	Prestasi	Tempat dan Waktu Perlombaan	Nama Delegasi / Kontingen
1	International Political Economy ICOP Week	Juara 2 Lomba Essay	Online, 29 Januari 2022	Hany Areta A (2019) Hardiana Clarisa (2019)
2	Kompetisi Esai Energi dan Pertambangan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Juara 2	Online, 20 Desember 2021	Ristania Salsabila Putri (2018)
3	Lomba Adu Gagasan Energi dan Pertambangan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)	Juara 1	Online, 29 Januari 2022	Ristania Salsabila Putri (2018)
4	Model UNHRC The 4th Edition of World Youth Forum	Honorable Mention	Online, 10-13 Januari 2022	Raihan Maulana Fajri (2020)
5	Kompetisi Esai Mahasiswa Tingkat Nasional Dies Natalis FH USU ke 68	Juara Harapan 1	Online, 30 Januari 2022	Amanda Aurelia (2021)

6	National Essay Competition Diploma Perbanas Competition (DPC) Tingkat Nasional UHW Perbanas Surabaya	- Juara 1 National Essay Competition Diploma Perbanas Competition (DPC) Tingkat Nasional UHW Perbanas Surabaya - Best Presenter National Essay Competition Diploma Perbanas Competition (DPC) Tingkat Nasional UHW Perbanas Surabaya	Online, 13 Februari 2022	1. Azaria Rahma Hasnah - 2021 2. Chelsea Raphael Rajagukguk - 2021 3. Vito Natanael - 2021
7	Indonesia MUN 2022	Best Delegate and Honourable Mention of United Nations Environmental Programme Council	Online, 4-6 Februari 2022	Priskila Saur Novelia Br. Napitupulu (2020) Roka Hanan Firmansyah (2020)
8	UKI National Law Competition 2022	Juara 2 Lomba Debat UNLC 2022	Online, 18 Februari 2022	Fira Janice Natasha Sinuraya (2020) Olivia Brigita (2020) Salsa Juanita (2020)
9	Indonesia MUN 2022 (IMUN)	Verbal Commendation of SPECPOL	Online, 4-6 Februari 2022	
10	Prague Model United Nations 2022	Honorable Mention of Economic and Social Council	Online, 11- 13 Februari 2022	Raihan Maulana Fajri (2020)
11	Tanjungpura Law Festival 2022	Juara 2 Esai Hukum Nasional	Online, 5 Maret 2022	Reynhart Henry Halomoan (2020) dan Amanda Aurelia (2021)
12	Indonesia MUN 2022	Verbal Commendation of SPECPOL	Online, 4-6 Februari 2022	Muhammad Akbar Rafsanjani (2021)
13	Esai Kritis Nasional	Juara 2	Online, 16 Februari 2022	Helen Solagratia (2020)
14	Lomba Menulis Artikel Opini Anti Korupsi Tingkat Nasional	Juara 1	Online, 10- 27 November 2021	Farras Zidane Diego Ali Farhan (2020)
15	Harvard World Model United Nations 2022	Verbal Commendation at SOCHUM Council (Raihan & Aliya) Verbal Commendation at ECOFIN Council (Faiza Afelia)	Online, 14 - 17 Maret 2022	Aliya Ilysia Irfana Ampri (2019) Faiza Afelia Maheswari (2020) Raihan Maulana Fajri (2020)
16	LPM Nawaksara x SMHI FH Unair Essay Competition "Populisme dalam Dunia Pers Nasional"	Juara 1	Online, 13 Februari - 9 Maret 2022	Diandra Paramita Anggraini (2021)
17	Makassar Model United Nations (Maks MUN)	Most Outstanding Delegate of UNODA	Online, 18- 20 Maret 2022	Muhammad Akbar Rafsanjani (2021)
18	Groningen MUN 2022	Honourable Mention of CSTD	Online, 10 Maret 2022	Priskila Saur Novelia Br. Napitupulu
19	Kompetisi Debat APUPPT antar Perguruan Tinggi	Juara 1	Online, 24 Maret 2022	Nadya Zahra Aulia (2019) Deden Ardiansyah (2020) Vilia Evani Silalahi (2020)
20	Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu	Juara 2	Online, 23 Februari 2022	Eifellyne Jovanca Bandi (2019) Frans Anugerah Lase (2019) Sadam Permana (2019) Ahmad Alfarizy (2020)
21	Grab University Business Case Competition 2022	Juara 3	Online, 9 Desember 2021 - 27 Maret 2022	Aliya Ilysia Irfana Ampri Derek Gunawan Elaine Chairmandy Afla Putri Artanti Batrisyia

22	Speech Competition Universitas Katolik Widya Mandala	First Place	Online, 19 Febuari - 5 Maret 2022	Aurelia Cellin Bahtera (2019)
23	UII Law Fair Piala Mohammad Natsir 2022	Juara 1 Karya Tulis Ilmiah dan Best Paper	Online, 23 Maret - 29 Maret 2022	Alexander S. J. W. Toar Harryandi (2018), Muhammad Akbar Magistra Putra (2020), dan Fira Janice Natasha Sinuraya (2020)
24	Raden Rahmat Law Fair 2022	Juara 3 Kompetisi Esai Hukum Mahasiswa Nasional	Online, 7 Maret 2022	Francesca Rachel - 2019 Shafa Andien Hanifa - 2019 Wafa Raniah Putri Akbar - 2019
25	ALSA Legal Opinion Competition Local Chapter ALSA LC Universitas Sriwijaya	Juara 2	ONLINE, 9 April 2022	Indira Nurul Anjani (2019) Rara Vasya Putri (2019)
26	Makassar MUN 2022	Most Outstanding Delegate of UNHRC	Online, 18-20 Maret 2022	Priskila Saur Novelia Br. Napitupulu (2020)
27	ICC Vis Pre-Moot	Top 6 Teams	Paris, France, 31 Maret - 1 April 2022	Yasmine Dwihanjani (2019), Iona Lathifa Melayu (2020), Amanda Izzati (2020), Sarah Suci (2021), Trisha Cornellia David (2021), Freya Rinaldi (2021)
28	29th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot	Top 32 in the 29th Willem C Vis Moot (out of 365 teams) Eric Bergsten Honorable Mention Award for Best Team Orals  Indo Pre-Moot Runner-up Team 2nd Best Oralist Amanda Izzati 3rd Best Oralist Trisha David ICC Paris Pre-Moot Top 6 Shanghai Pre-Moot Top 9 Shanghai Pre-Moot Honourable Mention Oralist Trisha Cornellia David	Vienna, Austria, 9-14 April 2022	Yasmine Dwihanjani (2019), Iona Lathifa Melayu (2020), Amanda Izzati (2020), Sarah Suci (2021), Trisha Cornellia David (2021), Freya Rinaldi (2021)
29	LEXELLENCE 2022	Juara 1 Legal Opinion	Universitas Prasetiya Mulia, 11 Maret 2022	Felicia Fubert (2021) Florenca Felim (2021) James Austin Gunawan (2021)
30	LEXELLENCE Prasmul 2022 Essay Competition	Juara 1	ONLINE, 1 Maret 2022	Helen Solagrata (2020) Tazkia Nafs Azzahra (2020) Alifia Indah Nur Lestari (2021)
31	The Economix MUN	Honorable Mention of World Health Organization The Economix MUN 2022	FEB UI, 13-14 Februari 2022	Regina Mutiara (2020)
32	Lexellence Prasetiya Mulya	Lomba Legal Opinion Juara 2	ONLINE, 11 Maret 2022 - 30 April 2022	Timotius Benjamin Ebenezer - 2020 Aina Mufida Irawan - 2021 Achmad Sultan R S - 2021
33	Nanyang Technological University (NTU) Model United Nations 2022	Best Position Paper and Verbal Commendation of UN-Human Settlement Programme	ONLINE, 18-20 Maret 2022	Keisha Inaraputri Mahendra - 2020 Regina Mutiara - 2020

		Nanyang Technological University (NTU) Model United Nations 2022		
34	Kompetisi Legal Opinion pada Dies Natalis 10th Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga	Juara 2	ONLINE, 14 Mei 2022	Anjar Firstandy (2020)
35	Lexexcellence Prasetya Mulya	Juara 2	ONLINE, 30 April 2022	Timotius Benjamin Ebenezer - 2020 Achmad Sultan R S - 2021 Aina Mufida Irawan - 2021
36	The 10th Padjajaran Public Relation Fair	Juara 2 Lomba Legal Opinion	ONLINE, 25 April - 20 Mei 2022	Daniella Pia Darmanto (2020) Maudy Andhara Putri (2020)
37	LEXCELLENCE National Essay Competition 2022	2nd Winner of Public Relations Student Forum	ONLINE, 30 April 2022	Helen Solagratia (2020) Tazkia Nafs Azzahra (2020) Alifia Indah Nur Lestari (2021)
38	Lomba Esai Nasional ARGION Tarumanagara Judicial Law Competition	1st winner	ONLINE, 18-21 Mei 2022	Helen Solagratia (2020)
39	International Bar Association (IBA) International Criminal Court (ICC) Moot Court Competition 2022	Quarter Finalist Ranked 14 out of 76 teams (Global Rounds)	ONLINE, 8 Mei-29 Mei 2022	Andri Malkyano Silitonga 2019 Frederick Roland Aristito 2020 Raisha Heidi Rizqiana 2020 Eileen Monica 2021 Virzana Mutiara Hanifa 2021
40	ARGION Judicial Law Competition 2022	1st Winner National Essay Competition	ONLINE, 16 Mei - 30 Juli 2022	Gracia Tiurmauli Syalomita (2019) Gisela Tracy Gracia King (2019)
41	Legal Opinion Competition Tingkat Nasional - Dies Natalis Business Law Universitas Binus ke-11	Juara 3 Legal Opinion	Online, 3 Juni 2022	Della Puspita Loga (2019)
42	ADR ODR International Mediation Competition 2022	The Third Best Negotiating Team	ONLINE, 14-15 Mei 2022	Ghina Raihanah [2019] Jessica Virginita [2019] Daniel Wiyarta Tenggara [2020]

## • BEASISWA DAN MAGANG

### 1. Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi mahasiswa ataupun berupa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan finansial. Universitas Indonesia menerima tawaran beasiswa setiap tahunnya dari berbagai institusi baik swasta maupun pemerintah baik di dalam maupun luar negeri. Beasiswa di Universitas Indonesia ditawarkan dalam bentuk paket-paket dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh UI dan pihak pendonor.

Skema beasiswa yang ditawarkan di lingkungan UI mencakup: (1) peningkatan prestasi akademik; dan (2) bantuan biaya finansial. Untuk skema pertama, syarat utama calon penerima beasiswa adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dan tidak boleh turun. Sedangkan untuk skema kedua, diprioritaskan adalah mahasiswa yang

tidak mampu secara finansial, baik untuk kebutuhan hidup maupun pembayaran biaya pendidikan.

Beasiswa di UI dikelola dengan sistem yang berbasis teknologi informasi (TI) yang dapat digunakan oleh semua pihak terkait melalui laman <http://www.beasiswa.ui.ac.id>. Di Fakultas Hukum saja, pada tahun 2021 tercatat ada 131 mahasiswa yang mendapatkan berbagai paket beasiswa.

#### **Kesempatan untuk meraih beasiswa di antaranya melalui :**

Beasiswa Bidikmisi-KIP Kuliah, Beasiswa Afirmasi, Difabel, KNB, Pemkot Bogor, BPJS Ketenagakerjaan, Beasiswa BPPDN Dikti, LPDP,ESDM, POSCO, SEA, BI, Nama Foundation, Setjen DPR, Kementan, Pertamina, Karya Salemba Empat, YAGI, JNE, AEON, Bank Shinhan, Kemenag, Kemenkumham, Pemprov Riau, Mahkamah Konstitusi.

## **2. Magang**

Magang adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan langsung rutinitas dunia kerja. FHUI banyak sekali menerima permintaan tenaga magang dari firma-firma hukum dalam dan luar negeri, perusahaan, dan instansi-instansi pemerintahan. Sebagai salah satu Kegiatan MBKM, mahasiswa juga dapat mengikuti magang dengan mendapatkan kredit (SKS) baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun berdasarkan kerjasama FHUI dengan mitra. Di tahun 2021, tercatat kurang lebih 56 mahasiswa FHUI yang diterima magang di berbagai instansi.

#### **Kesempatan untuk magang di antaranya di mitra berikut:**

Kejaksaan RI, POLRI. Mahkamah Konstitusi, berbagai Kementerian dan Lembaga negara, Komisi I DPR RI, Pertamina Geothermal Energy, Ditjen PP, KPPU, OJK, Bank Indonesia, PT Telkom Indonesia, PT Adaro Energy, Bank Indonesia, AQP, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Amalan International Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Biro Hukum Pemda DKI, PT Go-Jek Indonesia, EMP Malacca Staatsa, PT Petrochina, PT Trokindo Utama, KBRI Bangkok, Mahkamah Agung RI, dan berbagai Kantor Firma Hukum terkemuka di Indonesia seperti Assegaf Hamzah & Partners (AHP); Lubis, Ganie, Surowidjojo (LGS), Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP), Ginting & Reksodiputro, Soemadipradja & Taher (S&T), dan lain-lain.



# ILUNI FHUI

FHUI memiliki organisasi untuk para alumni FHUI yaitu Ikatan Alumni FHUI atau ILUNI FHUI. Susunan pengurus ILUNI FHUI periode 2021-2024 adalah sebagai berikut.

**Ketua Umum** : Ropin Mudiardjo S.H., ACCS., S.Kom., CRA., CIP.  
**Wakil Ketua Umum** : Wicaksono Wahyu Santoso S.H., M.H.  
**Bendahara Umum** : Dini Lastari S.H., SpN.  
**Sekretaris Umum** : Rian Hidayat S.H.

## **Divisi Sosial & Advokasi**

**Kepala Divisi** : Arya Wibisana S.H.  
**Wakil Kepala Divisi** : Wanda Hamidah S.H., M.Kn.  
**Wakil Kepala Divisi** : Gita Paulina S.H.

## **Divisi Kemitraan & Pengembangan Usaha**

**Kepala Divisi** : Akhmad Riski Rasyid S.H., M.M.  
**Wakil Kepala Divisi** : Mohamad Adam Ali Bhutto S.H., M.B.A.  
**Wakil Kepala Divisi** : Andhika Putera S.H.

## **Divisi Seni Budaya & Olahraga**

**Kepala Divisi** : Achmad Sandi Wargana S.H.  
**Wakil Kepala Divisi** : Sintorini Purwasisti S.H.  
**Wakil Kepala Divisi** : Mohammad Agus Riza Hufaida S.H.  
**Wakil Kepala Divisi** : Muhammad Tanziel Aziezi S.H.

## **Divisi Hubungan Alumni & Jejaring**

**Kepala Divisi** : Gladi Febri Argo S.H., LL.M  
**Wakil Kepala Divisi** : Johannes Albert Paul Huka S.H., M.H.  
**Wakil Kepala Divisi** : Fikri Hamadhani S.H.

## **Divisi Hubungan Kajian, Penelitian & Pelatihan**

**Kepala Divisi** : Fahrurozi S.H., M.H.  
**Wakil Kepala Divisi** : Carolina Sophia Martha S.H., LL.M  
**Wakil Kepala Divisi** : Eka Septiana S.H., M.Kn. M.H.  
**Wakil Kepala Divisi** : Windi Berlianti S.H., M.Kn.

## **Divisi Organisasi & Hukum**

**Kepala Divisi** : Riska Setiady S.H., M.Kn.  
**Wakil Kepala Divisi** : Daeng Randy Indra S.H.  
**Wakil Kepala Divisi** : Rizky Pramustiko S.H., M.H.

**Divisi Hubungan Masyarakat & Publikasi**

Kepala Divisi : Ratna Sari Wardani S.H.

Wakil Kepala Divisi : Indira Rezkisari S.H.

Wakil Kepala Divisi : Adifyan Rahmat Asga S.H., LL.M

**Divisi Pengabdian Masyarakat & Kerohanian**

Kepala Divisi : Abdi Kurnia Djohan S.H., M.H.

Wakil Kepala Divisi : Holy Kalangit S.H., M.H.

Wakil Kepala Divisi : Ucu Saepuridwan S.H.

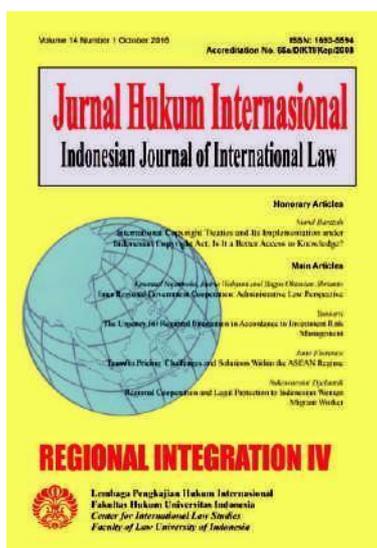
**Divisi Teknologi Informasi**

Kepala Divisi : Dwi Popo Cahyadi S.H.

Wakil Kepala Divisi : Mukhlis Ifransah S.H.



## 2. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of Internati



*Indonesian Journal of International Law (IJIL)* adalah jurnal yang secara khusus berfokus pada isu-isu mengenai Hukum Internasional. Diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) empat kali dalam satu tahun secara tematik setiap edisinya. Tiap terbitan IJIL terdiri atas segmen *Honorary Article* yang memuat hasil pemikiran para pakar hukum Internasional, *Main Articles* yang memuat artikel-artikel sesuai dengan tema per edisinya, *General Articles* berupa artikel umum tentang Hukum Internasional maupun pembahasan terkait dengan Hukum Internasional, serta *Book Review*, *International Law Making* dan *International Law News*.

Saat ini IJIL telah menerapkan kebijakan akses terbuka (*Open Access*) dan telah menjadi rujukan penting dalam topik perkembangan Hukum Internasional bagi Indonesia.

**Editor in Chief** : Arie Afriansyah, S.H.,LL.M.,Ph.D.  
**Website** : <http://ijil.ui.ac.id>  
**ISSN** : 1693-5594 (Cetak) /2356-5527 (Daring)  
**Terbit** : Oktober, Januari, April, Juli

### 3. Indonesia Law Review (ILRev)



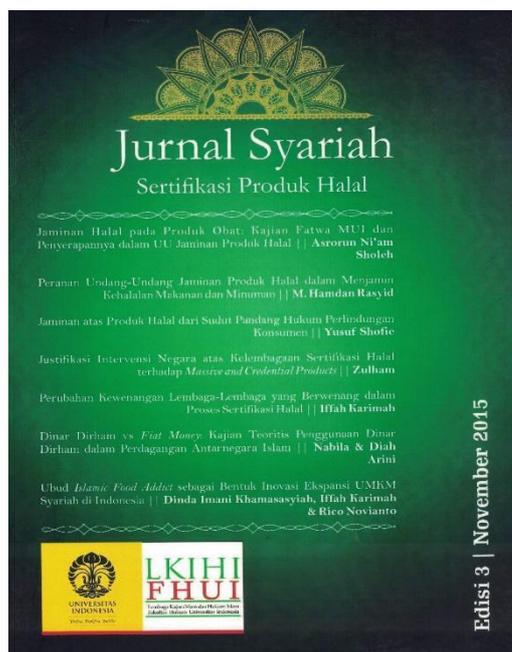
*Indonesia Law Review* (ILRev) adalah Jurnal Hukum berbahasa Inggris yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2011 oleh Djokosoetono Research Center sebagai media diseminasi pemikiran dan penelitian para pakar hukum Indonesia dikancah internasional. ILRev menerbitkan enam artikel dan satu Book Review dalam setiap terbitannya.

ILRev terbit tiga kali setiap tahun di bulan April, Agustus dan Desember. Sejak tahun 2014, ILRev telah menerapkan kebijakan akses terbuka (*open access*), sehingga setiap artikel yang diterbitkan dapat diakses secara bebas secara daring.

Saat ini ILRev sedang dalam tahap persiapan indeksasi oleh scopus dan telah menjadi rujukan penting dalam penelitian tentang atau terkait dengan hukum Indonesia bagi para ilmuwan hukum mancanegara.

**Editor in Chief** : Patricia Rinwigati, S.H., M.I.L., Ph.D.  
**Website** : <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/>  
**ISSN** : 2088-8430 (Cetak) / 2356-2129 (daring)  
**Terbit** : April, Agustus, Desember

#### 4. Jurnal Syariah



Jurnal Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) dan telah dirintis sejak tahun 2008. Jurnal ini merupakan jurnal yang memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian maupun opini seputar Hukum Islam dalam segala aspeknya. Terbit tiga kali dalam setahun, setiap bulan Maret, Juli dan November.

LKIHI FHUI bersama ini mengundang seluruh peneliti, pemerhati, pengkaji dan pengamat hukum Islam, baik dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk menulis dan mengirimkan artikelnya terkait isu-isu Hukum Islam untuk diterbitkan dalam Jurnal Syariah LKIHI FHUI.

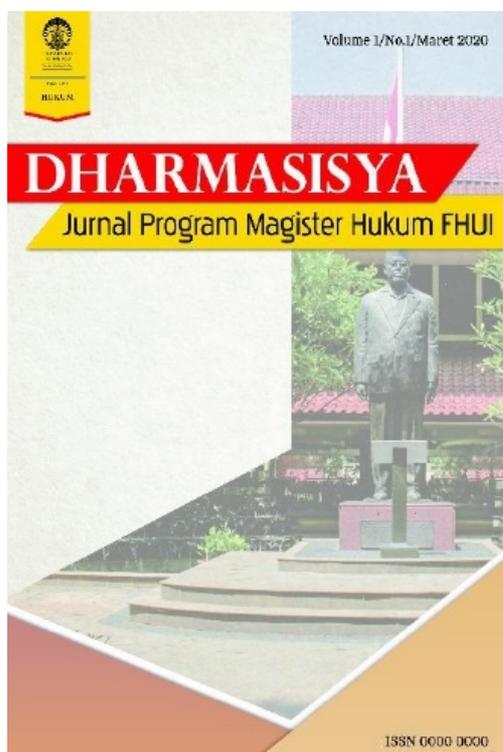
**Editor in Chief** : Heru Susetyo, S.H., MSi., LL.M., Ph.D.

**Website** : <http://js.law.ui.ac.id>

**ISSN** : 2599 – 204X

**Terbit** : Maret, Juli, November

## 5. Dharmasisya



Dharmasisya adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai jurnal ilmiah, artikel yang diterbitkan adalah artikel ilmiah hasil riset maupun kajian yang telah melalui proses review. Tujuan Dharmasisya adalah untuk menjawab dinamika perkembangan masalah hukum di Indonesia.

**Editor in Chief** : Ratih Lestarini  
**Website** : <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/>  
**e-ISSN** : 2808-9456  
**Terbit** : Maret, Juni, September, Desember

## 6. Indonesian Notary Journal

*Indonesian Notary Journal* adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. *Notary* sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan *Notary*, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap *review* sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun *reviewer* dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, *Notary* menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.

**Editor in Chief** : Yuli Indrawati

**Website** : <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/index>

**e-ISSN** : 2684-7310

**Terbit** : Maret, Juni, September, dan Desember.

## 7. Indonesia Criminal Law Review



*Indonesia Criminal Law Review* (ICLR) adalah jurnal ilmiah yang diprakarsai oleh Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai jurnal ilmiah, artikel yang diterbitkan adalah artikel ilmiah hasil penelitian dan kajian yang telah melalui proses review. Terutama untuk memfasilitasi diskusi ilmiah dan profesional tentang perkembangan terkini dan tantangan dinamis tentang masalah hukum pidana di Indonesia.

**Editor in Chief** : Prof. Topo Santoso, S.H.,M.H.  
**Website** : <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/>  
**Terbit** : Maret, Juni, September, Desember.  
**e-ISSN** : 2808 – 2648

## 8 . The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies

### THE INDONESIAN JOURNAL OF SOCIO-LEGAL STUDIES



*Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* (IJSLS) adalah jurnal di bidang Hukum dan Masyarakat dan Studi Sosio-Legal di Indonesia, yang dapat membangun sejarah panjang dan karya Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam menyelenggarakan studi hukum internasional dan nasional.

Tujuan IJSLS adalah menjadi jurnal internasional terkemuka untuk studi sosio-legal di Indonesia. IJSLS menerbitkan kontribusi teoritis yang masuk dalam bidang sosio-hukum, serta kontribusi yang merupakan hasil penelitian empiris dan interdisipliner tentang masalah hukum di Indonesia. Makalah yang dikirimkan akan melalui proses peer-review tersamar ganda oleh para ahli nasional dan/atau internasional.

**Editor in Chief** : Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A.  
**Website** : <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/>  
**e-ISSN** : 2808-2591  
**Terbit** : Maret, Agustus

## 9. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi



Jurnal Konstitusi dan Demokrasi adalah Jurnal Ilmiah di bidang Hukum Tata Negara yang terbit sebanyak dua kali setiap tahunnya (Juni dan Desember). Jurnal Konstitusi dan Demokrasi diterbitkan oleh Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jurnal ini berisi tulisan hasil penelitian dan pemikiran di bidang hukum tata negara serta isu yang mencakup pemilihan umum, hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, lembaga perwakilan rakyat, dan isu hukum tata negara lainnya.

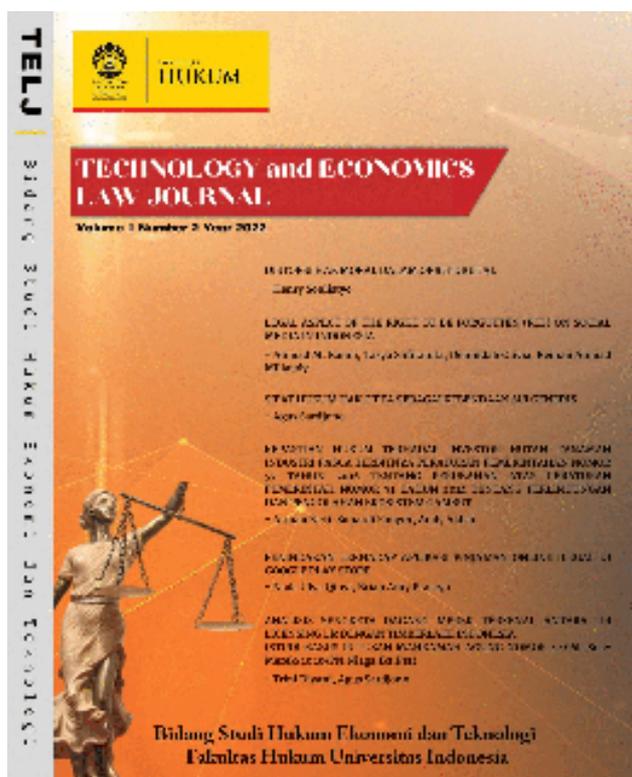
**Editor in Chief** : Dr. Fitra Arsil, S.H.,M.H.

**Website** : <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/>

**e-ISSN** : -

**Terbit** : Agustus, Desember

## 10. *Technology and Economics Law Journal*



Jurnal Hukum Teknologi dan Ekonomi adalah jurnal yang merupakan inisiatif dari Klaster Hukum Ekonomi dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan para sarjana hukum dan profesional mengenai perkembangan masalah hukum ekonomi dan teknologi di Indonesia. Jurnal Hukum Teknologi dan Ekonomi Terbit dua kali dalam setahun.

**Editor in Chief** : Prof. Dr. Agus Sardjono S.H.,M.H.

**Website** : <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/>

**Terbit** : dua kali dalam setahun

**e-ISSN** : 2828 - 6294



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2450 /SK/R/UI/2020  
TENTANG  
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana, mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang ilmu hukum siap kerja dan mampu bersaing secara global;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Indonesia diperlukan kurikulum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Hukum Program Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
  8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0443/SK/R/UI/2017 tentang Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1636/SK/R/UI/2020 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2020-2024;
12. Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor 1748/SK/RUI/2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode 2020-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 698/UN2.R1/HKP.02/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Pembuatan SK Kurikulum tentang Kurikulum Tahun Ajaran 2020/2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.**

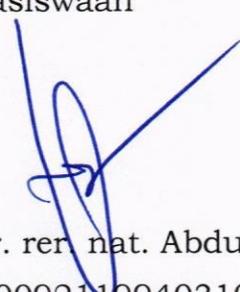
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Hukum Program Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 ini berlaku bagi mahasiswa Tahun Akademik 2020 dan selanjutnya.
- KETIGA : Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 3-5 tahun oleh Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.
- KEEMPAT : Semua Mata Kuliah yang tertera dalam Kurikulum ini wajib memiliki Buku Rancangan Pengajaran (BRP).
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku mulai Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2020

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan

  
Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris  
NIP197009211994031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 2450/SK/R/UI/2020  
TENTANG  
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM  
PENDIDIKAN SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

**KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**A. Tujuan Program Studi**

Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum FHUI didasarkan pada Visi Misi UI dan FHUI. Lulusan yang dihasilkan diharapkan memiliki profil lulusan “Sarjana Hukum yang mampu menganalisis berbagai permasalahan hukum dengan menggunakan gagasan, prosedur, metode, konsep dalam bidang ilmu hukum sesuai dengan etika”. Untuk menghasilkan profil lulusan ini, tujuan Program Studi Ilmu Hukum pada Pendidikan Sarjana di FHUI adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu dan ketrampilan dalam bidang ilmu hukum sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;

4. Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun di dalam kehidupan bersama di masyarakat;
5. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

### **B. Capaian Pembelajaran Lulusan**

Dalam rangka mencapai tujuan Program Studi Ilmu Hukum pada Pendidikan Sarjana FHUI dengan profil lulusannya, Program Studi menentukan capaian pembelajaran lulusan yang didasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Capaian pembelajaran lulusan meliputi kompetensi utama, kompetensi penunjang yang mendukung kompetensi utama, dan kompetensi lainnya yang merupakan kompetensi institusi yang wajib dimiliki oleh semua lulusan.

#### **Kompetensi Utama:**

1. Mampu merumuskan konsep dasar tentang manusia dan masyarakat Indonesia;
2. Mampu menguraikan peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan dan prinsip-prinsip dasar keadilan, sistem hukum, pluralisme hukum serta fungsi hukum;
3. Mampu menerangkan pengertian seluruh bidang ilmu hukum (perdata dan publik);
4. Mampu menganalisis struktur ilmu hukum melalui hukum positif (hukum materil dan hukum formil);
5. Mampu menganalisis bidang hukum khusus, lintas, dan pengembangannya;
6. Mampu menentukan penyelesaian masalah hukum, melalui dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang hukum;

7. Mampu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan kegiatan produktif dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat;
8. Mampu memilih sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika profesi hukum dalam berkarya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.

**Kompetensi Penunjang:**

1. Mampu menjelaskan gagasan, konsep serta hubungan antara negara, kedaulatan, dan masyarakat;
2. Mampu melakukan penelitian sesuai bidang ilmu hukum;
3. Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik;
4. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap beragam masalah yang timbul di lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara;
5. Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum perdata; hukum pidana; hukum ekonomi; hukum administrasi negara; hukum tata negara; hukum internasional; hukum Islam; serta hukum dan masyarakat (*socio-legal*).
6. Mampu menganalisis permasalahan hukum melalui berbagai bidang ilmu;
7. Mampu menghubungkan ilmu hukum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan/atau budaya.

**Kompetensi Lainnya (Institusi)**

1. Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok;
2. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi;

3. Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika.

### C. Matrik Padanan dengan KKNI

Penyusunan kurikulum Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum didasarkan kepada kompetensi yang ditentukan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 6. Keselarasan capaian pembelajaran lulusan dengan KKNI ditunjukkan pada matrik berikut.

<b>KKNI JENJANG 6</b>	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN</b>
Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu menganalisis struktur ilmu hukum melalui hukum positif (hukum materil dan hukum formil).</li><li>2. Mampu menganalisis bidang hukum khusus, lintas, dan pengembangannya.</li><li>3. Mampu menentukan penyelesaian masalah hukum, melalui dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang hukum.</li><li>4. Mampu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan kegiatan produktif dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.</li></ol>
Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu merumuskan konsep dasar tentang manusia dan masyarakat Indonesia.</li></ol>

<b>KKNI JENJANG 6</b>	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN</b>
dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Mampu menguraikan peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan dan prinsip-prinsip dasar keadilan, sistem hukum, pluralisme hukum, serta fungsi hukum.</li><li>3. Mampu menerangkan pengertian seluruh bidang ilmu hukum (perdata dan publik).</li><li>4. Mampu menganalisis struktur ilmu hukum melalui hukum positif (hukum materil dan hukum formil).</li><li>5. Mampu menganalisis bidang hukum khusus, lintas, dan pengembangannya.</li></ol>
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.	Mampu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan kegiatan produktif dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	Mampu memilih sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika profesi hukum dalam berkarya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.

#### D. Matrik Padanan dengan SN Dikti

Lulusan dari Program Studi Ilmu Hukum Pendidikan Sarjana FHUI harus memenuhi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sebagaimana yang ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Keselarasan capaian pembelajaran lulusan dengan SN Dikti ditunjukkan pada matrik berikut.

<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN</b>
<p><b>Sikap:</b> Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p>	<p><b>Kompetensi Utama:</b> Mampu memilih sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika profesi hukum dalam berkarya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.</p> <p><b>Kompetensi Lainnya (Institusi):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok.</li><li>2. Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika.</li></ol>
<p><b>Pengetahuan:</b> Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman</p>	<p><b>Kompetensi Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu merumuskan konsep dasar tentang manusia dan masyarakat Indonesia.</li><li>2. Mampu menguraikan peristilahan, definisi, fakta-fakta,</li></ol>

<p>kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p>	<p>gagasan dan prinsip-prinsip dasar keadilan, sistem hukum, pluralisme hukum, serta fungsi hukum.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Mampu menerangkan pengertian seluruh bidang ilmu hukum (perdata dan publik).</li><li>4. Mampu menganalisis struktur ilmu hukum melalui hukum positif (hukum materil dan hukum formil).</li><li>5. Mampu menganalisis bidang hukum khusus, lintas, dan pengembangannya.</li></ol> <p><b>Kompetensi Penunjang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu menjelaskan gagasan, konsep serta hubungan antara negara, kedaulatan dan masyarakat.</li><li>2. Mampu melakukan penelitian sesuai bidang ilmu hukum.</li><li>3. Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum perdata; hukum pidana; hukum ekonomi; hukum administrasi negara; hukum tata negara; hukum internasional; hukum Islam; hukum dan masyarakat (<i>socio-legal</i>).</li></ol>
---	--

	<p>4. Mampu menganalisis permasalahan hukum melalui berbagai bidang ilmu.</p> <p>5. Mampu menghubungkan ilmu hukum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan/atau budaya.</p> <p><b>Kompetensi Lainnya (Institusi)</b></p> <p>Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok.</p>
<p><b>Keterampilan:</b></p> <p>Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p>	<p><b>Kompetensi Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu merumuskan konsep dasar tentang manusia dan masyarakat Indonesia;</li><li>2. Mampu menguraikan peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan dan prinsip-prinsip dasar keadilan, sistem hukum, pluralisme hukum serta fungsi hukum;</li><li>3. Mampu menganalisis struktur ilmu hukum melalui hukum positif (hukum materil dan hukum formil);</li><li>4. Mampu menganalisis bidang hukum khusus, lintas dan pengembangannya;</li></ol>

	<p>5. Mampu menentukan penyelesaian masalah hukum, melalui dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang hukum;</p> <p>6. Mampu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan kegiatan produktif dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Kompetensi Penunjang:</b></p> <p>1. Mampu melakukan penelitian sesuai bidang ilmu hukum;</p> <p>2. Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik;</p> <p>3. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap beragam masalah yang timbul di lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara;</p> <p>4. Mampu menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan hukum perdata; hukum pidana; hukum ekonomi; hukum administrasi negara; hukum tata negara; hukum</p>
--	---

	<p>internasional; hukum Islam; serta hukum dan masyarakat (<i>socio-legal</i>).</p> <p>5. Mampu menganalisis permasalahan hukum melalui berbagai bidang ilmu;</p> <p>6. Mampu menghubungkan ilmu hukum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan/atau budaya.</p> <p><b>Kompetensi Lainnya (Institusi)</b></p> <p>Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok.</p> <p>Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi.</p>
--	---

### **E. Struktur Kurikulum**

Struktur kurikulum Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum FHUI terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan dengan beban belajar 144 SKS. Mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah wajib universitas, fakultas, dan peminatan. Mata kuliah pilihan terdiri dari mata kuliah peminatan dan kegiatan pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. Struktur kurikulum dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Mata Kuliah Wajib dengan beban belajar 99 – 100 SKS sebesar 69.4%.
  - a. Mata Kuliah Wajib Universitas : 9 SKS
  - b. Mata Kuliah Wajib Fakultas : 84 SKS
  - c. Mata Kuliah Wajib Peminatan : 6-7 SKS

2. Mata Kuliah Pilihan dengan beban belajar 44 – 45 SKS sebesar 30.6%.

Mata Kuliah Pilihan : 44-45 SKS



Peminatan Hukum, Masyarakat & Pembangunan			
KODE	MATA KULIAH	SKS	Jumlah SKS semester 1
LWMP601202	Sosiologi Hukum	2	16-20
LWMP601204	Hukum dan Gender	3	
<b>Peminatan Hukum Adat</b>			
LWIA600141	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat	2	20
LWIA600142	Aspek Hukum Publik dalam Hukum Adat	2	
<b>Peminatan Hukum Internasional Publik</b>			16-24
LWIN601102	Hukum Laut	2	
LWIN601101	Hukum Perjanjian Internasional	2	
<b>Peminatan Hukum Perdata Internasional</b>			20-24
LWIN601001	Hukum Perdata Internasional	3	
<b>Peminatan Hukum Administrasi Negara</b>			16-24
LWAN600601	HAN Sektoral	3	
<b>Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan</b>			16-24
LWAN600605	Hukum Anggaran dan Keuangan Publik	3	
<b>Jumlah SKS semester 3</b>			<b>20</b>
<b>Jumlah SKS semester 2</b>			<b>20</b>
<b>Jumlah SKS semester 1</b>			<b>16-20</b>

SEMESTER 5				SEMESTER 7				SEMESTER 8			
KODE	MATA KULIAH	SKS	Jumlah	KODE	MATA KULIAH	SKS	Jumlah	KODE	MATA KULIAH	SKS	Jumlah
LWAC600028	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	7	LWGB600031	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	6	LWTA600044	Tugas Akhir	4	4
LWHD600026	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3									
LWAC601304	Hukum Acara Peradilan Agama	2									
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>	<b>Jumlah</b>			<b>6</b>	<b>Jumlah</b>			<b>0</b>
<b>PLKH* :</b>			<b>0-17</b>	<b>PLKH* :</b>			<b>0-18</b>	<b>PLKH* :</b>			<b>20</b>
LWLK600036	Praktik Hukum Perdata**	3	7	LWLK600035	Praktik Hukum PTUN	2	6	LWLK600041	Penyusunan Kontrak Dagang	2	0
LWLK600016	Praktik Peradilan Konsultasi	2									
LWLK600039	Perancangan Peraturan Negara	2									
LWLK600043	Klinik Hukum	2									
<b>Peminatan Hukum Ekonomi</b>			<b>0-17</b>	<b>PLKH* :</b>			<b>0-18</b>	<b>PLKH* :</b>			<b>20</b>
LWET600147	Hukum Organisasi Perusahaan	3	3	LWET600148	Hukum Perbankan	2	2	LWET600149	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	2
<b>Jumlah SKS semester 5</b>				<b>17</b>	<b>Jumlah SKS semester 7</b>			<b>18</b>	<b>Jumlah SKS semester 8</b>		

Peminatan Hukum Teknologi											
LWET600166	Hak Cipta dan Hak Terkait	2	LWET600168	Kecamatan dan Ketahanan Siber	2						
LWET600167	Paten, PVT, DI, DTLIST, dan Rahasia Dagang	2									
<b>Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam</b>											
LWAN600902	Hukum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	2	LWAN600906	Hukum Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan	3						
LWAN600905	Kapita Selekta Kasus-kasus Lingkungan	2									
<b>Peminatan Hukum Administrasi Negara</b>											
LWHD600607	Teori Perundang-undangan	2	LWAN600602	Hukum Antar Wewenang	2						
<b>Peminatan Hukum Agraria</b>											
LWAN600705	Pengadaan Tanah	3	LWAN600706	Perbandingan Hukum Tanah	2						
LWAN600701	Reforma Agraria	2									
<b>Peminatan Hukum Perburuhan</b>											
LWAN600801	Hukum Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial	3	LWAN600802	Hukum tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2						
LWAN600803	Hukum tentang Upah dan Jaminan Sosial	2									
<b>Peminatan Hukum Internasional Publik</b>											
LWIN601104	Hukum Udara dan Angkasa	3									
<b>Peminatan Hukum Perdata Internasional</b>											
LWIN601003	Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional	2									
LWIN601002	Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional	2									
<b>Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan</b>											
LWAN600610	Hukum Kekayaan/Barang Milik Negara dan Investasi Pemerintah	2									
LWAN600604	Hukum Pajak	2									
<b>Jumlah SKS semester 5</b>		<b>7-24</b>		<b>Jumlah SKS semester 6</b>		<b>6-24</b>		<b>Jumlah SKS semester 7</b>		<b>20</b>	
<b>Jumlah SKS semester 8</b>		<b>24</b>									

\*PLKH = wajib mengambil minimal 4 SKS dari 22 SKS yang tersedia  
 \*\*MK Peminatan adalah 6 -7 SKS yang bisa diambil dari semester 3 -6

Resume	Mata Kuliah Universitas	9
	Mata Kuliah Prodi/Fakultas	84
	Mata Kuliah Wajib Peminatan	6 - 7
		99 - 100
	Mata Kuliah Pilihan	44 - 45
	Total	144

MATA KULIAH PILIHAN

SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP			SEMESTER GASAL			SEMESTER GENAP		
KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS	KODE	MATA KULIAH	SKS
<b>Peminatan Hukum Pidana</b>											
LWPI600401	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2	LWPI600411	Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihian Aset	2	LWET600150	Hukum Surat Berharga	2	LWET600156	Hukum Persaingan Usaha	2
LWPI600407	Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana	2	LWPI600412	Viktimologi untuk Ahli Hukum Pidana	2	LWET600151	Arbitrase	2	LWET600157	Hukum Kepalifitan	2
LWPI600408	Kriminologi untuk Ahli Hukum	2				LWET600152	Hukum Asuransi	2	LWET600158	Hukum Perdagangan Internasional	2
LWPI600409	Tindak Pidana di Bidang Perkonomian	2				LWET600153	Analisis Ekonomi Terhadap Hukum	2	LWET600159	Hukum Koperasi	2
LWPI600410	Hukum Pidana dan Perlindungan Anak	2				LWET600154	Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Keuangan	2	LWET600160	Hukum Pengangkutan	2
LWPI600406	Kapita Selekta Hukum Pidana	2				LWET600155	Akuntansi untuk Ahli Hukum	2	LWET600161	Hukum Perlindungan Konsumen	2
LWPI600404	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	2							LWET600162	Hukum Jual Beli Perusahaan	2
<b>Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan</b>											
LWAN600611	Hukum dalam Regulasi dan Lembaga Keuangan di Indonesia	2	LWAN600613	Hukum Pajak Internasional	2				LWET600163	Penulisan Hukum, Pendapat Hukum dan Keterampilan Hukum	2
LWAN600612	Hukum Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan	2	LWAN600614	Hukum Pengadilan Pajak	2				LWET600164	Hukum Kesehatan	2
			LWAN600615	Hukum Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan	2	<b>Peminatan Hukum Teknologi</b>					
LWAN600707	Hak-hak Khusus dalam Pemanfaatan Ruang	2	LWAN600703	Kondominium dan Permasalahannya	2	LWET600169	Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik	2	LWET600170	Perlindungan Privasi dan Data Pribadi	2
LWAN600704	Tanah sebagai Jaminan Utang	2	LWAN600702	Pendaftaran Tanah	2	LWET600173	Merek dan Indikasi Geografis	2	LWET600171	Kebudayaan Digital dan Transaksi Elektronik	2
<b>Peminatan Hukum Agraria</b>											
						LWET600174	Hukum Kawasan dan Perbandingan Hukum	2	LWET600172	Hukum Hiburan dan Olahraga	2
<b>Peminatan Hukum Perburuhan</b>											
			LWAN600804	Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja	2	LWPE600107	Perbuatan Melawan Hukum	2	LWPE600106	Hukum Kontrak Kontemporer	2
			LWAN600805	Hukum tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2	LWPE600102	Perbandingan Hukum Perdata	2	LWPE600103	Hukum Jaminan Atas Benda Bergerak	2
<b>Peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam</b>											
LWAN600903	Hukum Perubahan Iklim	2	LWAN600907	Hukum Pengelolaan Energi	2	LWIA600139	Hukum Zakat dan Wakaf	2	LWIA600141	Kapita Selekta Hukum Islam	2
LWAN600904	Hukum dan Konflik SDA	2	LWAN600908	Hukum Pengelolaan SDA Kelautan	2	LWIA600140	Hukum Perikatan Islam	2			
			LWAN600909	Hukum Tata Ruang dan Perkotaan	2	<b>Peminatan Hukum Tata Negara</b>					
<b>Peminatan Hukum Administrasi Negara</b>											
LWAN600603	Diskresi dan Beleidsregel	2	LWAN600609	Hukum Birokrasi dan Manajemen Negara	2	LWTN600504	Lembaga Kepresidenan	2	LWTN600502	Sejarah Konstitusi	2
LWAN600608	Hukum Pelayanan Publik	2				LWTN600505	Lembaga Perwakilan Rakyat	2	LWTN600506	Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif HTN	2
						LWTN600509	Hukum Tata Negara Adat	2	LWTN600510	Partai Politik dalam Perspektif HTN	2
						LWTN600501	Negara dalam Perspektif Hukum Islam	2			

LWAN600606		Hukum Administrasi Daerah	2	Peminatan Praktisi Hukum		LWMP601206	Hukum dan Kesejahteraan Sosial	2	LWMP601207	Kajian Interdisipliner terhadap Hukum yang Hidup	2
LWAC600060		Hukum Acara Peradilan Militer	2	Peminatan Hukum Acara Perdata		LWMP601205	Ekonomi Pembangunan dan Hukum	2	LWMP601209	Perencanaan Pembangunan & Kebijakan Hukum	2
LWAC600061		Penerapan Asas-Asas Hukum Acara	2	Peminatan Hukum Acara Pidana		LWMP601208	Hukum, Keadilan dan Globalisasi	2	LWMP601208	Hukum, Keadilan dan Globalisasi	2
LWAC600064		Hukum Pembuktian	2	Peminatan Hukum Pembuktian		LWMP601203	Metode Penelitian Sosiolegal	2	LWMP601203	Metode Penelitian Sosiolegal	2
MATA KULIAH BAHUAN NON PEMINATAN											
LWHD600175		Penulisan Ilmiah	2	Bahasa Inggris Hukum		LWIA600144	Kapita Selekta Masalah Aktual Hukum Adat	2			
LWNP600177		Manusia dan Masyarakat Indonesia	2	Magang di Luar Negeri		LWIN601105	Hukum Diplomatik	2	LWIN601103	Hukum Organisasi Internasional dan Regional	2
LWNP600178		Magang di Luar Negeri	10	Magang di Dalam Negeri		LWIN601106	Hukum Lingkungan Internasional	2	LWIN601108	Hukum Humaniter Internasional	2
LWNP600179		Magang di Dalam Negeri	10	Riset		LWIN601107	Arbitrase Investasi Internasional	2			
LWNP600180		Magang di Dalam Negeri	10	Kegiatan Kemanusiaan/Advokasi							
LWNP600181		Riset	10	Wirasusaha/Start-up							
LWNP600182		Kegiatan Kemanusiaan/Advokasi	10	Wirasusaha/Start-up							
LWNP600183		Riset	10	Kegiatan Kemanusiaan/Advokasi							
LWNP600184		Riset	10	Wirasusaha/Start-up							
LWNP600185		Riset	10	Wirasusaha/Start-up							
LWNP600186		Riset	10	Wirasusaha/Start-up							
LWNP600187		Riset	10	Wirasusaha/Start-up							
LWNP600188		Riset	10	Wirasusaha/Start-up							



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
NO: 158/UN2.F5.D/HKP.02.04.05/2018**

Tentang :

**Tata Tertib Bidang Akademik Dan Non Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

*Desember 2018*

Pada tanggal 29 Desember 2018, a.n. Rektor, Wakil Rektor dan Kepala Bina Sarana

Prof. Dr. Retno Listyandani, S.H., M.H.,  
NIP. 1970092199001000

Menimbang a. Bahwa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai Institusi pendidikan, di dalam menjalankan proses pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang mendukung terciptanya komunikasi atau dialog, kejujuran intelektual, keterbukaan untuk perubahan yang konstruktif dan menghormati hak individu;

b. Bahwa setiap warga Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan masyarakat wajib menjunjung tinggi etika, berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik demi menjaga harkat dan martabat Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

c. Visi dan misi Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mengingat a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>f. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;</li> <li>g. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang tentang Perubahan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;</li> <li>h. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia;</li> <li>i. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0491/SK/R/UI/2010 tentang Pembentukan Komite Profesor untuk Etika Universitas Indonesia;</li> <li>j. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0883/SK/R/UI/2011 tentang Kode Etik Universitas Indonesia;</li> <li>k. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 208/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Plagiarisme yang Dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia;</li> <li>l. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1413/SK/R/UI/2012 tentang Kode Perilaku Universitas Indonesia;</li> <li>m. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2143/SK/R/UI/2017 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia ;</li> <li>n. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 207/SK/R/UI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;</li> <li>o. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2648/SK/R/UI/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Periode 2017-2021.</li> </ul>
--	--

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	Tata Tertib Bidang Akademik Dan Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia
------------	---	---

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2) Warga Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah Sivitas Akademika, Organ-Organ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Tenaga Kependidikan;
- (3) Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah tenaga pendidik dan peserta didik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (4) Tenaga Pendidik adalah dosen yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Tenaga Kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
- (6) Peserta didik adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang menjalani pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Asing;
- (7) Masyarakat adalah mereka yang tidak termasuk dalam warga Fakultas Hukum Universitas Indonesia tetapi melakukan aktivitas di dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (8) Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah ruangan dan/atau area di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok;
- (9) Tata tertib adalah aturan Perilaku yang harus ditaati oleh semua warga Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (10) Plagiarisme adalah tindakan seseorang yang mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisan orang lain dan yang digunakannya dalam tulisannya seolah-olah ide atau tulisan orang lain yang bersangkutan adalah ide, pikiran dan/atau tulisan sendiri sehingga merugikan orang lain baik material maupun non material, dapat berupa pencurian sebuah kata, frasa, kalimat, paragraph,

atau bahkan pencurian bab dari tulisan atau buku seseorang, tanpa menyebut sumbernya;

- (11) Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus (P3T2) adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor Universitas Indonesia untuk memberikan pertimbangan kepada Rektor atas dugaan terjadinya Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus universitas Indonesia termasuk di dalamnya adalah tindakan Plagiarisme;
- (12) Panitia Pengawas Tata Tertib (P2T2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah panitia yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk memberikan pertimbangan kepada Dekan atas dugaan terjadinya Pelanggaran Tata Tertib di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (13) Dewan Guru Besar Fakultas adalah Dewan yang beranggotakan seluruh Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (14) Dekan dan Wakil Dekan adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Warga Fakultas harus mendasari setiap aktivitasnya dengan Nilai-Nilai Dasar Universitas Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor: 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia, meliputi: (1) kejujuran (*honesty*); (2) keadilan (*just and fair*); (3) kepercayaan (*trust*); (4) kemartabatan (*dignity*) dan/atau penghormatan (*respect*); (5) tanggungjawab (*accountability*); (6) kebersamaan (*togetherness*); (7) keterbukaan (*transparency*); (8) kebebasan akademik dan otonomi keilmuan (*academic freedom and scientific autonomy*); dan (9) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance to laws*);
- (2) Keputusan Dekan ini bertujuan mengatur perilaku setiap warga Fakultas dan Masyarakat dalam setiap aktivitasnya agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Fakultas.

## **BAB III**

### **TATA TERTIB**

#### **Pasal 3**

#### **Tata Tertib Warga di Lingkungan Fakultas**

Warga Fakultas dilarang:

- 1) Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan akademik Fakultas;
- 2) Mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh terlarang menurut norma kesopanan dan kesusilaan;
- 3) Menghisap atau menikmati rokok; membawa, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan, dan tindakan lain yang menjadikan rokok sebagai objek;
- 4) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus Universitas Indonesia dan/atau menempatkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan;
- 5) Bermain kartu dalam bentuk apapun;
- 6) Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Fakultas;
- 7) Menggunakan sarana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Fakultas secara tidak bertanggung jawab;
- 8) Membuat atau mensirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai kebakaran, ledakan, kejahatan atau jenis emergensi lainnya;
- 9) Memakai tanpa izin materi, sistem, *website* dan/atau perangkat lunak sarana pendidikan;
- 10) Mengotori atau merusak ruangan, bangunan, dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Fakultas;
- 11) Mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau properti orang lain tanpa izin;
- 12) Mengakses, membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, file atau materi akademik dari Perpustakaan dan unit pelaksana teknis lainnya;
- 13) Melakukan tindakan yang dapat merugikan dan/atau mencemari nama baik Fakultas;
- 14) Membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia;
- 15) Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Fakultas;
- 16) Melakukan Plagiarisasi dalam karya akademik;
- 17) Melakukan perjudian dalam bentuk apapun;
- 18) Melakukan transaksi, mengedarkan, menggunakan atau melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan terlarang atau narkotika dan minuman keras;
- 19) Melakukan perbuatan melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan;

- 20) Melakukan pelecehan seksual;
- 21) Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut Fakultas dan Universitas;
- 22) Memasuki, mencoba memasuki, menggunakan, memindahtangankan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Fakultas;
- 23) Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Fakultas yang digunakan secara tidak sah;
- 24) Melakukan agitasi, provokasi, intimidasi, pemukulan, penganiayaan, perundungan (*bullying*), dan pencemaran nama baik, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- 25) Melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, orientasi politik, dan cacat fisik;
- 26) Membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam Fakultas;
- 27) Menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku;
- 28) Melakukan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain cedera;
- 29) Memperkenalkan, mengajarkan, menanamkan dan/atau menyebarluaskan paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

##### **Tata Tertib dalam Kegiatan Perkuliahan**

Peserta didik dilarang:

- 1) Tidak hadir dalam perkuliahan tanpa alasan yang sah/dapat dibenarkan;
- 2) Meminta orang lain untuk hadir dan menandatangani presensi/daftar kehadiran atas namanya;
- 3) Mengenakan pakaian yang tidak sopan dan sandal di dalam kelas saat mengikuti perkuliahan;
- 4) Mengaktifkan segala jenis alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung kecuali dibutuhkan dalam proses belajar mengajar;
- 5) Berdiskusi di luar konteks mata kuliah saat kuliah sedang berlangsung;
- 6) Melakukan aktivitas di luar konteks perkuliahan seperti: tidur, membuka sosial media, bermain *video game*, mendengarkan musik dan kegiatan lainnya yang mengganggu perkuliahan .

#### **Pasal 5**

##### **Tata Tertib dalam Pelaksanaan Ujian**

Peserta didik dilarang:

- 1) Mengikuti Ujian Akhir Semester apabila kehadirannya dalam perkuliahan kurang dari 75%, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan;
- 2) Terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit pada saat Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester;
- 3) Membawa buku-buku, catatan-catatan kuliah, dan atau catatan-catatan lainnya dalam bentuk apapun, gadget (HP, laptop, dsb) ke dan di meja ujian pada saat diselenggarakan Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester, kecuali dalam hal ujian dengan sistem “terbuka” (*open book*), atau dalam hal diperbolehkan oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah yang diujikan untuk menggunakan bahan ujian tertentu;
- 4) Bertindak curang dalam ujian termasuk diantaranya: mencontoh dan/atau menyalin jawaban peserta ujian lain; bekerjasama dalam bentuk apapun dan atau membahas soal yang diujikan dengan peserta ujian lain pada saat ujian sedang berlangsung; mempersiapkan, membawa dan menggunakan contekan selama ujian berlangsung dengan cara apapun; mengerjakan ujian bagi peserta ujian lain atau digantikan oleh orang lain saat mengerjakan ujian; mengganti nama di lembar jawaban ujian peserta lain dengan namanya sendiri/mengganti nama di lembar jawaban ujiannya dengan nama peserta ujian lain, tidak mengumpulkan lembar jawaban ujian pada saat ujian mata kuliah yang diuji telah dinyatakan selesai;
- 5) Mengikuti ujian tanpa membawa kartu ujian atau kartu ujian sementara;
- 6) Melakukan kegiatan yang mengganggu peserta ujian lain.

## **Pasal 6**

### **Tata Tertib Warga Fakultas Terkait Norma Perilaku**

Warga Fakultas wajib:

- 1) Bersikap dan bertindak jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- 2) Berlaku sopan, santun, *responsif*, disiplin, dan tidak diskriminatif dalam segala kegiatan;
- 3) Bersikap amanah atau dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dengan menjaga dan menjalankan setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
- 4) Menjaga nama baik Fakultas;
- 5) Berpartisipasi secara aktif untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas;
- 6) Menjunjung tinggi standar perilaku bertanggung jawab dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 8) Konsisten dan bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan akademik;
- 9) Menegakkan obyektifitas keilmuan dalam melakukan penelitian, pendidikan, pengajaran dan penerapan pengetahuan pada bidang keahliannya;
- 10) Berlaku adil dan berupaya mewujudkan terciptanya keadilan dengan menerapkan standar organisasi yang baik dalam praktik dan prosedur kelembagaan;
- 11) Berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan dan harta kekayaan milik Fakultas yang diamanatkan kepadanya;
- 12) Memiliki rasa tanggung jawab untuk menjamin terciptanya lingkungan yang aman, bersih dan sehat bagi semua warga Fakultas dan masyarakat yang memasuki kawasan Fakultas.

### **BAB III**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 7**

##### **Pelanggaran Tata Tertib Warga di Lingkungan Fakultas**

Bagi setiap warga Fakultas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 akan dikenakan satu atau lebih sanksi antara lain berupa:

- a. Sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik;
- b. Teguran dan/atau peringatan lisan/tertulis;
- c. Penundaan kenaikan pangkat;
- d. Mengganti semua kerugian dan/atau denda yang disebabkan oleh perbuatannya;
- e. Larangan dan/atau pembatasan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di lingkungan Fakultas atau kegiatan apapun yang membawa nama Fakultas (skorsing);
- f. Pemberhentian dari jabatan di Fakultas;
- g. Diberhentikan dari tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pencabutan kedudukan sebagai anggota Sivitas Akademika.

##### **Pasal 8**

##### **Pelanggaran Tata Tertib dalam Kegiatan Perkuliahan**

Bagi peserta didik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 akan dikenakan satu atau lebih sanksi antara lain berupa:

- a. Dilarang masuk ke dalam ruang perkuliahan oleh dosen pengampu mata kuliah;
- b. Diminta meninggalkan ruang perkuliahan oleh dosen pengampu mata kuliah;
- c. Digugurkan keikutsertaannya pada mata kuliah yang bersangkutan.

## **Pasal 9**

### **Pelanggaran Tata Tertib dalam Pelaksanaan Ujian**

Bagi peserta didik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 akan dikenakan satu atau lebih sanksi antara lain berupa:

- a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan
- b. Tidak diperkenankan mengikuti ujian yang berikutnya selama masa ujian berlangsung pada semester yang bersangkutan;
- c. Nilai semua mata ujian yang telah diikuti pada semester yang bersangkutan dinyatakan gugur.

## **Pasal 10**

### **Pengawasan dan Pelaksanaan Tata Tertib**

1. Pelaksanaan ketentuan ini diawasi oleh Panitia Pengawas Tata Tertib Fakultas Hukum Universitas Indonesia (P2T2-FHUI) yang dibentuk berdasarkan SK Dekan;
2. P2T2-FHUI bertugas untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik
3. P2T2-FHUI bertugas memeriksa dan merekomendasikan sanksi bagi para pelanggar kepada Dekan;
4. Dewan Guru Besar Fakultas bertugas menangani pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik;
5. Dekan dan para Wakil Dekan bertugas menangani pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan;
6. Rekomendasi P2T2-FHUI dapat ditindaklanjuti ke tingkat Universitas melalui P3T2 UI.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

## **Pasal 11**

1. Keputusan ini mengikat setiap warga Fakultas dan masyarakat di lingkungan Fakultas dalam menjalankan setiap aktifitas dan/atau kegiatan lainnya di dalam kampus Universitas Indonesia.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan, akan diperbaiki dan ditambah sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 12

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Nomor 017/SK/D/FH/VIII/2002 tentang Tata Tertib Warga Fakultas Hukum Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Para Wakil Dekan FHUI</li><li>Para Ketua Bidang Studi FHUI</li><li>Para Ketua Unit Khusus FHUI</li><li>Para Manajer FHUI</li><li>Para Ketua Subprogram FHUI</li><li>Para Ketua Lembaga di Lingkungan FHUI</li><li>Para Ketua Organisasi Mahasiswa di Lingkungan FHUI</li></ol>	<p>Ditetapkan di: Depok Pada tanggal : September 2018 Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,</p> <p>Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., L.L.M., Ph.D. NIP196805291993032001</p>
---	---

PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN S1 REGULER



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 178 /SK/R/UI/2022

TENTANG  
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM  
SARJANA (S1) KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, sumber pendanaan Universitas Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Indonesia selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, pendapatan dari badan/satuan usaha Universitas Indonesia, kerjasama Tridharma

- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penetapan kelompok besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1519/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor ND-411/UN2.R2/KEU.00/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor tentang Tarif Biaya Pendidikan S1 Reguler Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023.
- KEDUA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan:
- a. BOP-Berkeadilan (BOP-B); dan
  - b. BOP-Pilihan (BOP-P).
- KETIGA : Besaran Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mekanisme BOP-B dan BOP-P sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *Overseas* wajib membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per semester/*term*.

- KELIMA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *Student Exchange* tetap diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.
- KEENAM : Pembayaran Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib dilaksanakan pada masa registrasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- KETUJUH : Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, melalui mekanisme '*Host to Host*', yaitu pembayaran secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi '*electronic delivery-payment switching*' yang tersedia pada *Automatic Teller Machine (ATM)*, *teller* di bank atau kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh bank yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia.
- KEDELAPAN : Mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa yang terlambat membayar Biaya Pendidikan setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan/atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan/atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditanggung.
- KESEMBILAN : Mahasiswa yang mempunyai tunggakan Biaya Pendidikan semester sebelumnya, dikenakan denda atas tunggakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tunggakan Biaya Pendidikan.

- KESEPULUH : Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah dibayarkan untuk dan atas nama Mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan/atau dialihkan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk Mahasiswa lain.
- KESEBELAS : Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Sanksi" wajib membayar Biaya Pendidikan untuk semester/*term* berjalan sesuai dengan tarif UKT yang telah ditetapkan.
- KEDUABELAS : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGABELAS : Keputusan Rektor ini berlaku untuk Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.  
NIP196201281988111001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
 NOMOR **178** /SK/R/UI/2021 TENTANG TARIF UANG KULIAH  
 TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1)  
 KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK  
 2022/2023

**Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia  
 Tahun Akademik 2022/2023**

**I. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) (Dalam Rupiah)**

<b>Rumpun</b>	<b>Kelas-1</b>	<b>Kelas-2</b>	<b>Kelas-3</b>	<b>Kelas-4</b>	<b>Kelas-5</b>	<b>Kelas-6</b>
Sains Teknologi dan Kesehatan	0 s.d. 500.000	>500.000 s.d. 1.000.000	> 1.000.000 s.d. 2.000.000	> 2.000.000 s.d. 4.000.000	> 4.000.000 s.d. 6.000.000	> 6.000.000 s.d. 7.500.000
Sosial Humaniora	0 s.d. 500.000	>500.000 s.d. 1.000.000	> 1.000.000 s.d. 2.000.000	> 2.000.000 s.d. 3.000.000	> 3.000.000 s.d. 4.000.000	> 4.000.000 s.d. 5.000.000

**II. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOP-P) (Dalam Rupiah)**

<b>Rumpun</b>	<b>Kelas-1</b>	<b>Kelas-2</b>	<b>Kelas-3</b>	<b>Kelas-4</b>	<b>Kelas 5</b>
Sains Teknologi dan Kesehatan	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000
Sosial Humaniora	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal *14* *februari* 2022  
Rektor,



*PK*  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

*PK*  
NIP196201281988111001

# PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN S1 NON REGULER



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018, anggaran pendapatan Universitas dapat bersumber dari biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Rektor menetapkan Biaya Pendidikan dan jumlah mahasiswa program studi yang akan diterima dengan pertimbangan dari Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 151 ;
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018 tentang Revisi Peraturan MWA Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1519/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah komponen biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut BP adalah keseluruhan biaya yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh penanggung biaya Mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (3) Biaya Registrasi *Overseas* adalah biaya registrasi bagi Mahasiswa dengan status akademik *Overseas*.
- (4) Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa yang selanjutnya disebut DKFM adalah komponen dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran Mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan Mahasiswa yang alokasi sepenuhnya dikelola di tingkat Universitas.
- (5) Dana Penunjang Pendidikan yang selanjutnya disebut DPP adalah komponen dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi Mahasiswa baru, antara lain pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater, atribut Universitas, dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan Mahasiswa baru serta sosialisasi peraturan dan sistem akademik serta program pendidikan di Universitas yang alokasi sepenuhnya dikelola di tingkat Universitas.
- (6) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
- (7) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (8) Kuliah di Luar Universitas adalah melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri karena mengikuti program pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*) atau program lain yang diakui Universitas.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan pada suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (10) *Overseas* adalah melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree, joint degree* atau *linkage*.

- (11) Penanggung Biaya Pendidikan adalah individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung sebagian atau seluruh BP untuk dan atas nama Mahasiswa Universitas.
- (12) Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (13) Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (14) Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
- (15) Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (16) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
- (17) Program Spesialis adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidang tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kokoh.
- (18) Registrasi Administrasi adalah pembayaran BP sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
- (19) Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
- (20) Sanksi adalah tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (21) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari Registrasi Administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
- (22) *Student Exchange* adalah status akademik Mahasiswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar yang akan atau sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas, di dalam maupun di luar negeri.
- (23) Uang Pangkal yang selanjutnya disebut UP adalah komponen pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta penunjang pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan program Non S1 Reguler.
- (24) Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.

## BAB II

### KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN (BP)

#### Pasal 2

- (1) BP Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas terdiri dari BOP dan UP.
- (2) BOP merupakan komponen BP yang harus dibayar oleh Mahasiswa atau Penanggung Biaya Pendidikan atas nama Mahasiswa tersebut, pada setiap Semester, sejak Semester pertama hingga Mahasiswa dinyatakan lulus atau putus studi.
- (3) UP merupakan komponen BP yang harus dibayar oleh Mahasiswa atau Penanggung Biaya Pendidikan, pada Semester pertama dan hanya satu kali selama mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (4) UP sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran BOP Semester pertama pada masa Registrasi Administrasi sesuai dengan jadwal pada kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas.

BAB III  
TARIF BIAYA PENDIDIKAN (BP)

Pasal 3

- (1) Tarif BP yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku untuk Mahasiswa Non S1 Reguler yang diterima pada tahun akademik 2022/2023.
- (2) Besaran Tarif BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Program Pendidikan Vokasi pada Lampiran I;
  - b. Program Sarjana Reguler (S1- Reguler WNA) pada Lampiran II;
  - c. Program Sarjana Paralel (S1-Paralel) pada Lampiran III;
  - d. Program Sarjana Ekstensi (S1-Ekstensi) pada Lampiran IV;
  - e. Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI) pada Lampiran V;
  - f. Program Profesi pada Lampiran VI;
  - g. Program Magister (S2) pada Lampiran VII;
  - h. Program Doktor (S3) pada Lampiran VIII;
  - i. Program Spesialis pada Lampiran IX; dan
  - j. Biaya Registrasi *Overseas* pada Lampiran X.
- (3) Penetapan Tarif BP Mahasiswa Profesi kelas reguler pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Farmasi yang merupakan lanjutan dari Program S1 Reguler Fakultas tersebut, dapat mengikuti mekanisme penetapan BP pada Program S1 Reguler, sepanjang terdapat rekomendasi dan keputusan dari Dekan.
- (4) Tarif BP merupakan besaran yang pasti (*fixed price*), tidak dapat dikurangi dan/atau diringankan.

Pasal 4

- (1) Besaran BOP setiap Mahasiswa terkandung di dalamnya komponen DKFM sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- (2) Besaran UP setiap Mahasiswa terkandung di dalamnya komponen DPP sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang terdaftar dengan status “Aktif” wajib membayar BP sesuai dengan tarif pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (2) Mahasiswa yang terdaftar dengan status “Tidak Aktif (kosong)” tidak diwajibkan membayar BP.
- (3) Mahasiswa yang terdaftar dengan status “Cuti Akademik”, jika pengajuan cuti dilakukan sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi maka dapat membayar BP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif BP Semester berjalan, apabila pengajuan permohonan cuti diajukan pada masa Registrasi Administrasi atau diajukan dalam Semester berjalan maka Mahasiswa tetap membayar BP sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Mahasiswa yang terdaftar dengan status “Kuliah di Luar Universitas” karena mengikuti program *Student Exchange* wajib membayar BP untuk periode Semester berjalan dengan tarif BOP per Semester pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (5) Mahasiswa yang terdaftar dengan status “*Overseas*” wajib membayar Biaya Registrasi *Overseas* setiap Semester selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan tarif yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri.
- (6) Mahasiswa yang terdaftar dengan status “Sanksi” wajib membayar BP untuk periode Semester berjalan dengan tarif BOP per Semester pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (7) Calon Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai Mahasiswa Universitas tetapi karena satu dan lain hal menunda registrasi pada Semester berikutnya atau tahun akademik berikutnya (paling lama 1 tahun) maka tarif BP yang berlaku adalah

tarif BP pada saat status akademik yang bersangkutan dinyatakan Aktif.

BAB IV  
JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN  
Pasal 6

- (1) Pembayaran BP wajib dilaksanakan pada masa Registrasi Administrasi sebagaimana ditetapkan di dalam kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran BP wajib dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran secara *on-line*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *teller* di bank atau kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh bank yang bekerjasama dengan Universitas;
- (4) Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Mahasiswa/ Penanggung Biaya Pendidikan.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 7

- (1) Mahasiswa/Penanggung Biaya Pendidikan Mahasiswa yang terlambat membayar BP setelah berakhirnya masa Registrasi Administrasi dan/atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan/atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah BP yang ditanggung.
- (2) Keterlambatan pembayaran BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayaran BP periode Semester berjalan.

- (3) Mahasiswa yang mempunyai tunggakan Biaya Pendidikan semester sebelumnya, dikenakan denda atas tunggakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tunggakan Biaya Pendidikan.
- (4) Pengecualian ayat (1) dapat diberikan bagi Mahasiswa yang beban BP ditanggung oleh instansi pemerintah atau instansi lain yang sudah ada perikatan/perjanjian dengan Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dilarang menerima pembayaran BP dengan alasan apapun.
- (2) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima, dan wajib menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening Universitas yang ditetapkan.

### BAB VI

#### BEASISWA

#### Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan atau persyaratan dapat memperoleh beasiswa atau bantuan BP dari Universitas, Pemerintah, atau sumber lainnya.
- (2) Beasiswa atau bantuan BP yang bersumber dari Universitas diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (3) Beasiswa atau bantuan BP yang bersumber dari luar Universitas dapat diatur dalam perikatan/perjanjian dengan pemberi beasiswa atau bantuan BP.

BAB VII  
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang telah terdaftar dan atau telah membayar BP Semester/term berjalan dan kemudian mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermaterai cukup dan diajukan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan.
- (2) BP yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang mengundurkan diri, dengan alasan apapun tidak dapat dikembalikan dan/atau dialihkan untuk pembayaran BP pada program studi lain maupun untuk Mahasiswa lain.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat menetapkan besaran biaya pendidikan Mahasiswa di luar besaran BP sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor lainnya.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2022

Rektor,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

 NIP196201281988111001

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan Program Pendidikan Vokasi**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
1	Semua Program Studi / Peminatan	D3	10.000.000	11.500.000
2	Fisioterapi	D4	13.000.000	15.000.000
3	Terapi Okupasi	D4	13.000.000	15.000.000
4	Manajemen Rekod dan Arsip	D4	11.000.000	15.000.000
5	Bisnis Kreatif	D4	11.000.000	15.000.000
6	Produksi Media	D4	11.000.000	15.000.000
7	Manajemen Bisnis Pariwisata	D4	11.000.000	15.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan  
Program Sarjana Reguler (S1- Reguler WNA)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kesehatan Masyarakat	WNA	16.000.000	10.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan Program Sarjana Paralel (S1-Paralel)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Matematika dan IPA	Reguler	12.000.000	25.000.000
		WNA	21.000.000	20.000.000
2	Fakultas Teknik	Reguler	10.000.000	50.000.000
		WNA	30.000.000	50.000.000
3	Fakultas Hukum	Reguler	13.000.000	16.000.000
		WNA	40.000.000	30.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	15.000.000	34.000.000
		WNA	15.000.000	34.000.000
5	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	Reguler	10.000.000	15.000.000
6	Fakultas Psikologi	Reguler	14.000.000	16.000.000
		WNA	20.000.000	27.000.000
7	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Reguler	12.000.000	14.000.000
		WNA	34.000.000	27.000.000
8	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	12.500.000	40.000.000
		WNA	15.000.000	40.000.000
9	Fakultas Farmasi	Reguler	14.000.000	20.000.000
		WNA	27.000.000	20.000.000
10	Fakultas Ilmu Administrasi	Reguler	14.000.000	25.000.000
		WNA	27.000.000	22.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN IV

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan  
Program Sarjana Ekstensi (S1-Ekstensi)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	13.000.000	15.000.000
		WNA	34.000.000	34.000.000
2	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Reguler	11.000.000	9.000.000
		WNA	16.000.000	10.000.000
3	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	10.000.000	14.000.000
4	Fakultas Hukum	Reguler	17.000.000	15.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN V

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGGARAN TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan  
Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	51.700.000	111.100.000
		WNA	59.400.000	148.500.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	75.000.000	225.000.000
		WNA	86.000.000	300.000.000
3	Fakultas Teknik	Reguler	25.000.000	50.000.000
		WNA	30.000.000	50.000.000
4	Fakultas Hukum	Reguler	35.000.000	25.000.000
		WNA	42.000.000	32.000.000
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	36.000.000	38.000.000
		WNA	41.000.000	50.000.000
6	Fakultas Psikologi	Reguler	34.000.000	20.000.000
		WNA	34.000.000	27.000.000
7	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Reguler	31.000.000	17.000.000
		WNA	37.000.000	20.000.000
8	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	35.000.000	25.000.000
		WNA	40.000.000	40.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN VI  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan Program Profesi**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	11.000.000	-
		Khusus	22.000.000	-
		WNA	44.000.000	-
	a. Semua Peminatan	Reguler	51.700.000	-
		WNA	59.400.000	-
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	12.500.000	10.000.000
		Khusus	40.000.000	84.000.000
		WNA	40.000.000	84.000.000
3	Fakultas Teknik			
	a. Pendidikan Arsitektur	Reguler	10.000.000	20.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	13.000.000	5.000.000
		Khusus	13.000.000	5.000.000
		WNA	27.000.000	14.000.000
5	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	10.000.000	-
		Ekstensi	10.000.000	4.000.000
6	Fakultas Farmasi	Reguler	15.000.000	7.000.000
		Lulusan Non UI	23.000.000	11.000.000
		WNA	40.000.000	20.000.000

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Februari 2022  
Rektor,

  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.  
NIP196201281988111001

LAMPIRAN VII

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
 NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
 PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
 UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
 AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan Program Magister (S2)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kedokteran			
	a. Semua Prodi/Peminatan	Reguler	13.750.000	17.600.000
		Khusus	19.500.000	22.000.000
		WNA	51.700.000	45.100.000
	b. Kedokteran Kerja	Reguler	13.750.000	17.600.000
Khusus		16.500.000	22.000.000	
2	Fakultas Kedokteran Gigi			
	a. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Reguler	12.500.000	35.000.000
		WNA	47.000.000	68.000.000
	b. Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	Reguler	12.500.000	35.000.000
		Khusus	15.000.000	35.000.000
WNA		35.000.000	50.000.000	
3	Fakultas Matematika dan IPA	Reguler	12.000.000	17.000.000
		Khusus	15.000.000	17.000.000
		Riset	12.000.000	17.000.000
		WNA	40.000.000	35.000.000
4	Fakultas Teknik	Reguler	12.500.000	20.000.000
		Khusus	15.000.000	25.000.000
		WNA	35.000.000	30.000.000
5	Fakultas Hukum			
	a. Ilmu Hukum	Reguler	11.000.000	12.000.000
		Khusus	13.000.000	16.000.000
		WNA	38.000.000	27.000.000
b. Kenotariatan	Reguler	15.000.000	16.000.000	

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis			
	a. Ilmu Ekonomi	Reguler	17.000.000	9.000.000
		B. Inggris / DD	17.000.000	26.000.000
		WNA	41.000.000	14.000.000
	b. Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)	Reguler	16.000.000	12.000.000
		Khusus	16.000.000	12.000.000
		B. Inggris	19.000.000	18.000.000
		WNA	41.000.000	14.000.000
	c. Pascasarjana Ilmu Manajemen	Reguler	20.000.000	9.000.000
		Khusus	25.000.000	9.000.000
		WNA	41.000.000	14.000.000
	d. Manajemen			
	- Manajemen	Reguler	31.000.000	9.000.000
		Khusus	26.500.000	9.000.000
		WNA	41.000.000	15.000.000
	- MM-MBA	Khusus	43.500.000	34.000.000
		WNA	45.000.000	35.000.000
	- MM-Aviation	Khusus	45.500.000	25.000.000
		WNA	45.500.000	35.000.000
	e. Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA)	Reguler	16.000.000	10.000.000
WNA		41.000.000	14.000.000	
f. Magister Akuntansi (MAKSI)	Reguler	23.000.000	9.000.000	
	Khusus	20.000.000	9.000.000	
	WNA	41.000.000	14.000.000	
g. MAKSI-PPAk Dual Program	Reguler	14.000.000	7.000.000	
	Khusus	10.500.000	7.000.000	
h. Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Reguler	15.000.000	9.000.000	

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
7	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya			
	a. Semua Peminatan	Reguler	12.000.000	11.000.000
		WNA	41.000.000	27.000.000
	b. Asia Tenggara	Reguler	12.000.000	12.000.000
		WNA	41.000.000	27.000.000
	8	Fakultas Psikologi		
a. Ilmu Psikologi (Psikologi Science)		Reguler	17.000.000	14.000.000
		Khusus	20.000.000	28.000.000
		WNA	40.000.000	47.000.000
b. Psikologi Profesi		Reguler	20.000.000	17.000.000
		Khusus	22.500.000	28.000.000
		WNA	42.500.000	47.000.000
c. Psikologi Terapan		Reguler	17.500.000	17.000.000
		Khusus	20.000.000	28.000.000
	WNA	40.000.000	47.000.000	
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik			
	a. Sosiologi	Reguler	14.000.000	10.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	b. Ilmu Kesejahteraan Sosial	Reguler	14.000.000	10.000.000
		Khusus	13.000.000	7.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	c. Ilmu Hubungan Internasional	Reguler	17.000.000	7.500.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	d. Ilmu Politik	Reguler	14.000.000	10.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	e. Kriminologi	Reguler	14.000.000	10.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	f. Antropologi	Reguler	14.000.000	6.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	g. Ilmu Komunikasi	Reguler	14.000.000	10.000.000
Khusus		18.000.000	14.000.000	
WNA		40.000.000	27.000.000	

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
Fakultas Kesehatan Masyarakat				
10	a. - Semua Program Studi / Peminatan	Reguler	14.000.000	12.000.000
		WNA	35.000.000	15.000.000
	- Administrasi Rumah Sakit	Reguler	15.000.000	12.000.000
	- Epidemiologi Terapan / FETP	Reguler	24.000.000	12.000.000
	b. <i>International Health</i>	<i>Joint Degreee</i>	60.000.000	15.000.000
Fakultas Ilmu Komputer				
11	a. Ilmu Komputer	Reguler	16.000.000	17.000.000
		Khusus	19.000.000	17.000.000
	b. Teknologi Informasi	Reguler	20.000.000	17.000.000
		Khusus	23.000.000	17.000.000
12	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	11.000.000	14.000.000
Fakultas Farmasi				
13	a. Semua Program Studi / Peminatan	Reguler	15.000.000	17.000.000
		WNA	38.000.000	35.000.000
	b. Farmakologi dan Toksikologi	Reguler	15.000.000	17.000.000
		WNA	46.000.000	40.000.000
Sekolah Ilmu Lingkungan				
14	a. Semua Program Studi / Peminatan	Reguler	15.000.000	15.000.000
		Khusus	20.000.000	15.000.000
		WNA	35.000.000	25.000.000
		Riset	25.000.000	25.000.000
Sekolah Stratejik dan Global				
15	a. Semua Program Studi / Peminatan	Reguler	13.000.000	15.000.000
		Khusus	19.000.000	15.000.000
		WNA	35.000.000	25.000.000
		Riset	20.000.000	20.000.000
	b. Ekonomi dan Keuangan Syariah	Reguler	14.000.000	15.000.000
		Khusus	20.000.000	20.000.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
16	Fakultas Ilmu Administrasi			
	a. Administrasi dan Kebijakan Publik	Reguler	17.500.000	18.000.000
		Khusus / Kerjasama / <i>Double Degree</i>	30.000.000	30.000.000
		WNA	34.000.000	30.000.000
	b. Kebijakan dan Administrasi Niaga	Reguler	17.500.000	18.000.000
		Khusus	20.000.000	20.000.000
		WNA	34.000.000	30.000.000
	c. Administrasi dan Kebijakan Perpajakan	Reguler	17.500.000	18.000.000
		Khusus	20.000.000	20.000.000
		WNA	34.000.000	30.000.000
	d. Administrasi dan Kebijakan PSDM Sektor Publik	Khusus	20.000.000	20.000.000
	e. Studi Pemerintah Daerah	Khusus	20.000.000	20.000.000
	f. <i>E-Government</i>	Reguler	17.500.000	18.000.000
		Khusus / Kerjasama	30.000.000	30.000.000
g. Analisis Kebijakan Publik	Khusus	20.000.000	20.000.000	
h. Inovasi dan Intapreneurship	Khusus	20.000.000	20.000.000	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan Program Doktor (S3)**

<b>No</b>	<b>Program Studi/Peminatan</b>	<b>Jenjang</b>	<b>BOP/TF</b>	<b>UP/AF</b>
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	19.250.000	27.500.000
		Khusus	19.250.000	27.500.000
		WNA	51.700.000	45.100.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	20.000.000	40.000.000
		WNA	54.000.000	68.000.000
3	Fakultas Matematika dan IPA	Reguler	13.000.000	17.000.000
		Jalur Riset	13.000.000	17.000.000
		WNA	50.000.000	40.000.000
4	Fakultas Teknik	Reguler	15.000.000	30.000.000
		WNA	40.000.000	40.000.000
5	Fakultas Hukum	Reguler	24.000.000	22.000.000
		Khusus	26.000.000	22.000.000
		WNA	45.000.000	30.000.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis			
	a. Ilmu Ekonomi	Reguler	21.500.000	11.500.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
	b. Ilmu Manajemen			
	- Keuangan	Reguler	30.000.000	11.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
	-Strategi Korporasi	Reguler	45.000.000	11.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
	-Pemasaran	Reguler	30.000.000	11.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
	-Perbankan	Reguler	30.000.000	11.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
c. Ilmu Akuntansi	Reguler	26.500.000	12.000.000	
	WNA	47.000.000	27.000.000	
7	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	Reguler	13.000.000	14.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
8	Fakultas Psikologi	Reguler	21.000.000	15.000.000
		Khusus	24.000.000	28.000.000
		WNA	47.000.000	34.000.000
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik			
	a. Sosiologi	Reguler	18.000.000	12.000.000
	b. Ilmu Kesejahteraan Sosial	Reguler	18.000.000	14.000.000
	c. Ilmu Politik	Reguler	18.000.000	14.000.000
	d. Kriminologi	Reguler	18.000.000	14.000.000
	e. Antropologi	Reguler	18.000.000	8.000.000
	f. Ilmu Komunikasi	Reguler	18.000.000	14.000.000
	g. Semua Program Studi / Peminatan	WNA	47.000.000	27.000.000
10	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Reguler	16.500.000	15.000.000
		WNA	40.000.000	20.000.000
11	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	25.000.000	20.000.000
		Khusus	25.000.000	25.000.000
12	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	14.000.000	16.000.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
13	Fakultas Farmasi	Reguler	20.000.000	15.000.000
		WNA	54.000.000	41.000.000
14	Sekolah Ilmu Lingkungan	Reguler	20.000.000	20.000.000
		Riset	30.000.000	25.000.000
		WNA	40.000.000	25.000.000
15	Sekolah Kajian Strategik dan Global	Reguler	23.000.000	20.000.000
		By Riset	25.000.000	25.000.000
		WNA	40.000.000	25.000.000
16	Fakultas Ilmu Administrasi	Reguler	30.000.000	29.000.000
		WNA	40.000.000	23.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 febrnari 2022

Rektor,



*pk*  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

*b*  
NIP196201281988111001

LAMPIRAN IX

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
 NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
 PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
 UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
 AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan Program Spesialis**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
I	Fakultas Kedokteran			
I.1.	Program Spesialis 1 (Sp-1)			
1	Anestesiologi	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
2	Ilmu Bedah	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
3	Ilmu Penyakit Dalam	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	29.700.000	60.500.000
4	Ilmu Kesehatan Anak	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
5	Obstetri dan Ginekologi	Reguler	22.000.000	75.900.000
		Khusus	37.400.000	113.300.000
6	Ilmu Penyakit Syaraf	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	105.600.000
7	Ilmu Kedokteran Jiwa	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
8	Ilmu Penyakit Mata	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	27.500.000	46.200.000
9	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	105.600.000
10	Ilmu Penyakit THT	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
11	Ilmu Penyakit Jantung	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
12	Ilmu Penyakit Paru-Paru	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
13	Radiologi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
I	Fakultas Kedokteran			
I.1.	Program Spesialis 1 (Sp-1)			
13	Radiologi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
14	Ilmu Kedokteran Forensik	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
15	Patologi Anatomik	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
16	Patologi Klinik	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
17	Ilmu Bedah Orthopedi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
18	Ilmu Bedah Urologi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
19	Ilmu Bedah Saraf	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
20	Ilmu Rehabilitasi Medik	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
21	Ilmu Bedah Plastik	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
22	Ilmu Kedokteran Olahraga	Reguler	16.500.000	24.200.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
23	Mikrobiologi Klinik	Reguler	13.750.000	22.000.000
		Khusus	22.000.000	27.500.000
24	Farmakologi Klinik	Reguler	12.100.000	22.000.000
		Khusus	16.500.000	27.500.000
25	Kedokteran Okupasi	Reguler	15.000.000	24.200.000
		Khusus	17.500.000	32.500.000
26	Ilmu Bedah Kardiovaskular	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
27	Onkologi Radiasi	Reguler	13.750.000	24.200.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
28	Kedokteran Penerbangan	Reguler	15.400.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
29	Ilmu Gizi Klinik	Reguler	15.400.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
30	Parasitologi Klinik	Reguler	13.750.000	16.500.000
		Khusus	16.500.000	27.500.000
31	Akunpunter Medik	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
I	Fakultas Kedokteran			
I.1.	Program Spesialis 1 (Sp-1)			
32	Semua Program Studi/Peminatan	WNA	51.700.000	51.700.000
I.2	Program Spesialis 2 (Sp-2 / Konsultan)			
1	Ilmu Penyakit Dalam	Reguler	19.250.000	33.000.000
2	Ilmu Kesehatan Anak	Reguler	19.250.000	33.000.000
3	Ilmu Bedah	Reguler	19.250.000	33.000.000
4	Obstetri dan Ginekologi	Reguler	27.500.000	38.500.000
5	Kedokteran Jiwa	Reguler	19.250.000	37.400.000
6	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Reguler	24.200.000	33.000.000
II	Fakultas Kedokteran Gigi			
1	a. Ilmu Bedah Mulut	Reguler	23.000.000	69.000.000
	b. Ilmu Kesehatan Gigi Anak	Reguler	23.000.000	69.000.000
	c. Ilmu Konservasi Gigi	Reguler	21.000.000	69.000.000
	d. Ilmu Penyakit Mulut	Reguler	14.000.000	30.000.000
	e. Radiologi Kedokteran Gigi	Reguler	12.500.000	30.000.000
	Semua Program Studi/Peminatan	WNA	47.000.000	68.000.000
2	Ortodonsia	Reguler	31.000.000	76.000.000
		WNA	47.000.000	82.000.000
3	Periodonsia	Reguler	21.000.000	69.000.000
		WNA	47.000.000	82.000.000
4	Prostodonsia	Reguler	21.000.000	69.000.000
		WNA	47.000.000	69.000.000
III	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler (Lanjutan)	14.000.000	4.000.000
		Non Reguler	14.000.000	13.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN IX  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 179 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023

**Besaran Tarif Biaya Registrasi Overseas**

No	Program Pendidikan /Jenjang	BOP
1	Program Vokasi	750.000
2	Program Sarjana (S1)	750.000
3	Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI)	2.000.000
4	Program Profesi	750.000
5	Program Magister (S2)	1.000.000
6	Program Spesialis	1.000.000
7	Program Doktor (S3)	1.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2022

Rektor,



  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

 NIP196201281988111001